

# SEJARAH PERJUANGAN RAKYAT



Bupati yang pernah menjabat di  
Kabupaten Musi Banyuasin



## LAMBANG DAERAH



## A. Letak Geografis, Iklim, Penduduk dan Mata-pencarian :

Berdasarkan lingkungan geografis daerah Tingkat II Musi Banyuasin yang pada jaman Hindia Belanda termasuk Onderafdeeling Moesi Iilir en Koeboestrecken & Onderafdeeling Banyoeasin<sup>1)</sup> merupakan Kabupaten terluas didalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan yang terletak pada garis 1<sup>o</sup>30' - 3<sup>o</sup>0' Lintang Selatan, dan 103<sup>o</sup> - 106<sup>o</sup> Bujur Timur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah Utara dengan Propinsi Jambi, sebelah Barat dengan Kabupaten Musi Rawas, sebelah Selatan dengan daerah Kabupaten Lematang Ogan Tengah dan sebelah Timur dengan daerah Kabupaten Ogan Komering Iilir dan Selat Bangka. Realita daerah ini terletak menyisir pantai Timur Sumatera yang sebagian besar terdiri dari rawa-rawa dan sebagian kecil tanah datar. Luas daerahnya ± 25.664 km<sup>2</sup> dan secara topografis terdiri dari daerah rendah beserta rawa-rawa ± 53%, tanah yang agak datar ± 35% dan tanah yang agak tinggi bergelombang ± 12%.<sup>2)</sup>

Daerah ini sebagian besar terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa yang cukup luas dan terbentang dari arah Barat Laut ke arah Tenggara. Ketinggiannya dari permukaan laut tidak lebih dari sembilan meter. Daerah yang tidak begitu jauh dari pantai ditumbuhi kayu bakau (mangrove) kemudian : kayu seru, kayu gelam dan pohon nipah dan lain-lain. Kondisi pantai yang landai tertutup oleh pohon kayu dengan semak belukar, kemudian bersambung dengan hutan lebat ke arah pedalaman (hinterland) sampai 100 km jarak yang sulit dilalui, bahkan ada hutan-hutan tertentu yang belum pernah dijamah oleh tangan manusia, kecuali lahan-lahan di dekat sungai terdapat sawah-sawah tadah hujan yang diusahakan oleh penduduk secara tradisional dan beberapa kebun karet rakyat yang letaknya terpisah-pisah, merupakan kondisi ideal yang sangat menguntungkan "Perang Gerilya" yang pernah dilakukan oleh pejuang pada waktu revolusi fisik melawan

---

<sup>1)</sup> Memorie van Overgave dari Residen Palembang (D.A.F Brautigam), Arsip Nasional, Jakarta ; Proyek IDKN, Sumatera Selatan ditinjau dari sudut Geografi-Sejarah dan Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan RI, Jakarta, 1972, halaman 134.

<sup>2)</sup> Pem.Kab.Muba/ Kantor Statistik, Musi Banyuasin dalam Angka, Sekayu, 1984, halaman 1.

Belanda. Meskipun demikian daerah ini sebagian besar terdiri dari dataran rendah yang terletak di daerah tropis, dan sepanjang tahun mendapatkan curah hujan yang cukup tinggi.<sup>3)</sup> Pada umumnya masyarakat pedusunan yang hidup bercocok tanam masih dapat membedakan antara musim hujan dan musim kemarau pada bulan-bulan tertentu sebagai kegiatan untuk menentukan musim tanam padi di sawah atau di ladang-ladang (Ume).

Wilayah Propinsi Sumatera Selatan pada umumnya dan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada khususnya sangat ditentukan oleh angin musim, yang pada bulan-bulan : November, Desember, Januari, Februari dan Maret angin berembus dari arah Barat dengan membawa hujan, sedangkan dalam bulan-bulan : Mei, Juni, Juli, Agustus dan September angin berembus dari jurusan Tenggara yang membawa udara kering dari benua Australia. Dari tahun ke tahun musim menanam padi di sawah hanyalah satu kali setahun. Bagi mereka yang tidak punya sawah ada yang menanam padi di ladang (Ume), yang dikerjakan secara tradisional dan kadang-kadang mendapatkan serangan hama atau dilanda air hujan, maka hasilnya tidak mencukupi untuk hidup keluarga selama satu tahun. Pada akhir-akhir ini ada masyarakat pedusunan yang mengalami kegagalan dalam mengolah sawah tadah hujan, telah mencoba menanam padi pada lahan pasang surut yang tidak jauh dari pantai atau lebak-lebak yang dpat digenangi oleh air hujan. Karena hasil sawah tadah hujan atau ladang tidak mencukupi, maka sulit untuk diberantas kebiasaan membuka hutan yang berpindah-pindah tanpa memperhitungkan kelestarian alam. Penebangan kayu secara liar telah menimbulkan erosi dan hampir setiap tahun daerah ini dilanda banjir. Pada jaman revolusi fisik, keadaan seperti ini belum begitu terasa oleh para petani, karena jumlah penduduk masih relatif kecil. Tetapi setelah kita melampaui masa revolusi, dari tahun ke tahun mulailah dirasakan oleh penduduk di daerah pedalaman, sehingga urbanisasi dianggap sebagai jalan keluar dari kesulitan hidup.

---

<sup>3 )</sup> Ibid, halaman 3-7; Lihat R.W. van Bemmelen, The Geology of Indonesia, Vol. Ia, The Hague, 1946, halaman 6.

Anak-anak sungai yang ada di daerah ini antara lain : Sungai Batanghari Leko (160 km), Sungai Lalan (195 km), Sungai Tunggal, Sungai Banyuasin dan Sungai Rawas. Semuanya berinduk ke Sungai Musi yang panjangnya  $\pm$  450 km yang dapat dilayari oleh kapal-kapal roda lambung (sekarang sudah tidak ada lagi), perahu motor gandengan, dan kapal-kapal samudra hanyalah dapat berlayar dari Muara Sungsang sampai ke Pelabuhan Boom Baru. Pada umumnya anak-anak sungai itu tersebut mempunyai perbedaan yang tinggi permukaan air di sepanjang aliran, memiliki tebing yang curam, banyak rintangan batang kayu yang tidak hanyut terbenam di pinggir sungai dan banjir setiap tahun. Proses pendangkalan dan pembentukan rawa-rawa di sebelah menyebelah anak sungai berlangsung terus ke muaranya, sehingga sungai-sungai di daerah ini tidak dapat dilayari oleh kapal motor yang berukuran relatif besar, kecuali perahu-perahu motor yang kecil masih tetap dominan sebagai alat transportasi dari daerah pedalaman ke kota. Pada tiap kali pasang naik dan musim hujan, permukaan tanah di sekitar sungai Musi dan anak-anaknya selalu digenangi air karena sungai-sungai itu sudah tidak dapat lagi menampung, sebagai akibat pendangkalan yang terus menerus.

Di lihat dari keadaan topografis, daerah Musi Banyuasin yang terletak di sebelah Selatan Khatulistiwa, memiliki hutan yang cukup luas dengan aneka ragam kayu. Hutan-hutan itu menurut coraknya terdiri dari : hutan rimba, hutan belukar dan padang alang-alang. Jenis kayu lainnya seperti : Meranti, Merawan, Medang, Bungur, Petanang, Tembesu, Pulai dan sebagainya dapat dijadikan bahan bangunan rumah atau kapal/ perahu kayu dan alat-alat rumah tangga.

Lebak-lebung dan anak-anak sungai menghasilkan ikan sungai yang beraneka ragam yang semuanya itu menjadi sumber penghasilan dan sekaligus menjadi alat penukar dengan barang-barang kebutuhan yang berasal dari luar daerah. Sebagai akibat keadaan lingkungan alam, lebatnya hutan rimba dan sukarnya hubungan dari dusun satu dengan dusun yang lain terutama di musim hujan, sungai-sungai kecil itu pulalah yang menjadi jalan penting bagi lalu lintas perdagangan, pemerintahan dan juga kontak kebudayaan dengan golongan pendatang yang berasal dari daerah sekitarnya.

Tidak terlalu berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia, iklim daerah ini di musim penghujan tidak terlalu dingin dan rata-rata menunjukkan angka antara 27<sup>0</sup> - 29<sup>0</sup> Celcius di sepanjang siang dan malam hari. Tetapi di musim kemarau ada perbedaan yang cukup tajam, siang hari panasnya dapat mencapai 31<sup>0</sup> Celcius sedangkan malam hari, lebih-lebih mendekati fajar, udaranya cukup dingin bagi orang-orang yang biasa hidup di daerah tropis. Ketika kayu-kayu yang menutupi daerah ini belum banyak di tebang, dan hutan-hutan lebat yang tidak dapat ditembus oleh sinar Matahari, temperatur udara cukup sejuk dan perbedaan musim hujan dan musim kemarau tidak begitu terasa. Tetapi ketika daerah ini di landa musim kemarau yang cukup panjang, sementara rakyat hidup berladang yang berpindah-pindah, kebakaran hutan terjadi di mana-mana, akhir-akhir ini perbedaan temperatur cukup tinggi.

Apabila kita menjelajahi daerah ini dengan menggunakan jalur lalu lintas sungai, nampak di kiri-kanan sungai ditumbuhi hutan belukar yang dihuni oleh binatang-binatang liar seperti : ular, harimau, gajah, kerbau, beruang, rusa, menjangan, babi hutan, jelutung, biawak dan aneka ragam marga satwa lain-lain. Dusun-dusun besar dan kecil yang terletak di pinggir-pinggir sungai, ada juga dusun yang jauh dari sungai, merupakan pusat kehidupan masyarakat petani tradisional yang dipimpin oleh Kerio beserta seperangkat perabot desa yang terdiri dari : Penggawa, Khotib dan orang-orang Kmet yang dapat dinamakan "P e m i p i n F o r m a l T r a d i s i o n a l".<sup>4)</sup> Pada umumnya rumah-rumah penduduk didirikan di atas tiang kayu berbentuk limas, beratap genteng atau serdang dengan posisi letak menghadap ke jalan raya atau membelakangi sungai. Perbedaan ibukota Marga dengan Dusun, dapat dilihat dari jumlah cacah jiwa dan arsitektur rumah-rumah yang ada. Petunjuk ini dapat disamakan dengan keadaan di Jawa Timur pada abad ke-19.<sup>5)</sup> Bedanya terletak pada bahan-bahan rumah yang

---

<sup>4)</sup> Istilah ini kami pinjam dari Dr.Alfian yang pernah melakukan penelitian di Aceh : Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh, LP3ES, Jakarta, 1977, halaman 78.

<sup>5)</sup> Alfian, Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan, PT.Gramedia, Jakarta, 1985, halaman 9-10.

digunakan oleh penduduk, yaitu di Jawa Timur terbuat dari batu bata sedangkan di daerah ini dari kayu. Di pinggir-pinggir sungai Musi dan Batang Hari Leko pada setiap dusun terdapat rakit-rakit kayu yang terapung di atas air sebagai tempat mandi, kakus/WC dan tempat mencuci pakaian.

Sebagai tempat mandi dan buang air besar/ kecil, ia merupakan tempat bermain bagi anak-anak nakal telanjang bulat bercelempungan di air menikmati olahraga air sehari-hari (daily watersport), yang sampai saat ini masih nampak dan masih segar sekali di daerah pedalaman. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila nak-anak yang berasal dari dusun, tidak akan berbahaya jika mereka tinggal di air. Pada awal revolusi fisik, kondisi dusun belum banyak yang berubah dan sifat gotong royong masih melekat pada tradisi rakyat pedusunan.

Untuk memperoleh data statistik penduduk di daerah Onderafdeeling Moesi Iilir en Koeboestrecken & Onderafdeeling Banyoeasin, pada masa mendekati keruntuhan Hindia Belanda dan jaman pendudukan Jepang, belum dapat diketemukan. Oleh karena itu terpaksa mengambil data sensus tahun 1961 sebagai kerangka acuan sementara, dimana jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin  $\pm 293.073$  jiwa dan pada tahun 1971  $\pm 375.011$  jiwa.<sup>6)</sup> Ini berarti dalam jangka waktu 10 tahun penduduk bertambah  $\pm 81.938$  jiwa. Apabila ditarik kebelakang (tahun 1951) penduduk Musi Banyuasin diperkirakan 211.135 jiwa, sehingga tiap-tiap kilometer bujursangkar didiami oleh penduduk  $\pm 8$  jiwa. Banyak faktor yang mendorong laju perkembangan penduduk di daerah ini antara lain : kesediaan menerima transmigran, adanya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas-Puskesmas dan perbaikan gizi yang dari tahun ke tahun meningkat. Dapat dibayangkan daerah yang cukup luas ini didiami  $\pm 8$  jiwa per km<sup>2</sup> pada kurun waktu revolusi fisik, kiranya dapat diterima apabila Usman Bakar Komandan Batalyon 30 meminta bantuan personil dalam mempertahankan daerah ini. Mayoritas penduduk daerah ini terdiri dari suku Melayu yang menggunakan bahasa Melayu dengan aneka ragam dialek. Khusus yang di wilayah

---

<sup>6)</sup> Kabupaten Muba (Kantor Sensus), Kantor Sensus & Statistik Muba, Sekayu, 1978, halaman 1.

Bayung Lincir (artinya bujang tinggi semampai) yang terletak di perbatasan Propinsi Jambi terdapat suku Anak Dalam (suku Kubu). Suku ini mempunyai bahasa tersendiri dan cara hidupnya masih berkelana, walaupun pada akhir-akhir ini sudah ada usaha dari Pemerintah (Departemen Sosial) setempat untuk menjadikannya masyarakat yang menetap.

Masyarakat pedusunan atau perkotaan pada dasarnya mengenai lapisan-lapisan sosial (strata sosial) seperti yang terdapat di daerah-daerah lain, sehingga dimana ia akan selalu ada dan terus ada sepanjang masyarakat itu sendiri mengenal adanya sesuatu yang dihargai. Sesuatu yang dihargai dapat berbentuk materi atau non materi. Yang berupa materi seperti pemilikan atas tanah dan kebun atau kekayaan dalam bentuk lain, sedangkan yang bersifat non materi seperti ilmu pengetahuan, kekuasaan, kesalehan, nama baik keluarga dan sebagainya. Oleh sebab itu di daerah pedusunan pada umumnya dalam masyarakat petani tradisional mengenal dua macam golongan petani : golongan pemilik tanah/ kebun dan golongan penggarap tanah (buruh tani). Betapa besarnya pengaruh lingkungan terhadap perilaku kehidupan seseorang atau kelompok, walaupun adanya faktor demografis, penduduk yang tipis di daerah yang luas, perjuangan yang berat melawan tantangan alam yang hebat, tanah merupakan unsur penting dalam kehidupan petani tradisional. Itulah sebabnya dasar kehidupan masyarakat pedusunan hampir seluruhnya bercocok tanam terutama bersawah dan berladang.

Disamping adanya dua golongan tersebut di atas, terdapat pula kelompok kerja sebagai buruh perkebunan dan pegawai negeri, yang lazimnya memperoleh pendidikan. Pegawai pemerintah, administratur dan orang-orang yang berpendidikan termasuk golongan elit atau "priyayi".<sup>7)</sup> Stratifikasi sosial yang berdasarkan kelahiran, terutama yang ada di dalam masyarakat Palembang asli,<sup>8)</sup> tidak kita jumpai di daerah Uluu walaupun adanya kelas penguasa yang turun temurun

---

<sup>7)</sup> Robert Van Niel, Munculnya Elit Modern Indonesia (terjemahan oleh Ny. Zahara Deliar Noer), Pustaka Jaya, Jakarta, 1984, halaman 30.

<sup>8)</sup> D.G. Stibbe, Encyclopedie van Nederlandshe-Indie (Tweede druk), ,s Gravenhage-Martinius Nijhoff, Leiden, 1917, halaman 271.

diciptakan oleh pemerintah Belanda sebagai penguasa formal-tradisional. Tetapi setelah terjadi revolusi kemerdekaan, kelas penguasa yang selama ini sebagai golongan elit di mata masyarakat petani, mulai pudar di kaki langit keruntuhannya, dan stratifikasi sosial yang baru nampaknya cenderung untuk berkembang atas dasar tinggi rendahnya pangkat dalam sistem birokrasi kepegawaian yang ditopang oleh pendidikan, belum lagi mendapat wujud yang mantap. Sejak jaman Hindia Belanda menjalankan Politik Etika, tidak hanya faktor kekakayaan atas tanah, golongan yang mendapatkan pendidikan dianggap oleh penduduk lebih tinggi. Memiliki tanah di berbagai tempat di Indonesia berlainan cara dan bentuknya. Di daerah Musi Banyuasin, tanah umumnya milik perseorangan yang diakui oleh Marga. Orang-orang dusun pemilik tanah/ kebun yang cukup luas, pada umumnya orang terkaya di desa itu. Kepala Desa dengan segala pembantunya (Khotib dan para Penggawa) dan guru-guru/ pemimpin agama termasuk golongan yang berdiri di atas rakyat jelata, karena mereka lebih dari yang lain. Kelebihan itu dapat dilihat dalam beberapa hal memimpin, berpengaruh, mengatur dan menuntun masyarakat.

Penduduk desa yang termasuk golongan rendah adalah orang-orang yang tidak memiliki tanah dan tidak mempunyai rumah atau kebun. Sedangkan orang yang paling bertanggung jawab di mata orang dusun adalah Kepala Desa dengan segala perangkatnya. Dia (Khotib dan para Penggawa) merupakan penghubung antara dusun dengan penguasa yang paling tinggi. Dengan kata lain, dia adalah orang yang paling berkuasa dalam wilayah kekuasaannya. Hal ini dapat dilihat dari kekuasaannya yang terbesar berasal dari perantarnya dalam menjalankan tradisi dan kebiasaan-kebiasaan dusun, dan yang lebih penting dalam segala kemungkinan membendung segala pengaruh atau tekanan yang dapat mengganggu kerukunan dusun. Fenomena sosio-kultural ini banyak persamaan dengan daerah-daerah lain di dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan. Disinggung adanya dua golongan yang tersebut diatas, terdapat pula golongan masyarakat atas dasar kekayaan seperti: golongan orang berada, golongan cukup/ menengah dan golongan miskin yang harus diterima sebagai takdir. Pengakuan terhadap golongan-golongan ini, menunjukkan cukup kuat unsur



religius yang ada dalam kehidupan masyarakat petani tradisional pada umumnya.

Sumber daya alam yang erat hubungannya dengan keadaan letak wilayah, iklim dan tanah yang menjadi unsur penting dalam menentukan mata pencaharian penduduk yang sebagian besar hidup bercocok tanam, hutan dengan segala isinya dan sungai beserta lebak lebung termasuk faktor penunjang yang dianggap sebagai hasil “nilai tambah”. Hasil hutan yang dimaksud adalah: kayu yang berbagai kualitas, rotan yang bermacam-macam jenis, barang anyaman untuk tikar, getah gambir, madu lebah dan gula aren (pohon enau), getah damar, binatang-binatang liar (rusa, menjangan, kancil dan margasatwa), umbut-umbut dan pucuk-pucukan dan sebagainya.

Sungai Musi beserta anak-anaknya dan lebak lebung sebagai milik marga yang dapat diusahakan oleh penduduk (atas dasar sewa), telah menghasilkan ikan basah dan ikan salai (dijemur dibawah terik matahari atau diasapi diatas api) yang dapat dijual belikan. Di daerah yang lebih datar dan berbukit-bukit dapat ditanam pohon karet. Karet merupakan komoditi ekspor nonmigas yang paling utama didaerah ini sebelum perang Dunia II. Perkebunan karet yang ada didaerah ini tidak hanya di usahakan oleh pengusaha-pengusaha asing seperti; Perkebunan Musi Landas, Perkebunan Melani dan Perkebunan Tabenan (Betung) pada masa itu.

Perkebunan karet yang diusahakan oleh rakyat dikenal dengan nama “Perkebunan Karet Rakyat”, di jaman Hindia Belanda pernah mengalami jalan kemakmuran yang lazim disebut “Jaman Kupon”, suatu jaman dimana penduduk oleh pemerintah untuk membuat kebun karet dengan diberi insentif. Sebagian besar hasil karet berasal dari daerah Musi Banyuasin, terutama sekali karet yang dihasilkan oleh rakyat. Pada tahun 1938 pelabuhan Palembang (Boom Baru) mengeksport karet ±320.214 ton; dalam tahun 1948 sebanyak 279.788 ton; dalam tahun 1949 sebanyak 408.265 ton; dalam tahun 1959 sebanyak 631.889 ton dan pada tahun 1951 ± 756.935 ton.<sup>9)</sup>

---

<sup>9)</sup> Kementrian Pen; Republik Indonesia Prop. Sumsel, Palembang, 1954, halaman 453.

Pada jaman revolusi kemerdekaan produksi karet di daerah ini tidak hanya merupakan mata pencaharian penduduk, tetapi juga sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang pernah memegang peranan penting untuk membiayai perjuangan pada waktu itu. Masalah tanaman karet ini telah menjadi ciri khas bagi daerah Musi Banyuasin, sehingga dalam segi pengolahan dan cara penyadapannya tidak banyak mengalami kesulitan. Disamping Perkebunan Karet Rakyat dan Asing, terdapat juga Perkebunan Kelapa Sawit di Betung dan sekitarnya yang diusahakan oleh orang-orang asing. Bahkan pada akhir-akhir ini Perkebunan Tanaman Produksi X (PTP) telah menanam Kelapa Sawit secara ekstensif, disamping perluasan penanaman pohon karet.

## **B. Struktur Kemasyarakatan.**

Apa yang telah diceritakan di atas, terutama mengenai penduduk Musi Banyuasin, adalah hasil dari pengamatan secara umum. Pada bagian ini akan di coba menguraikan beberapa konsep yang bersifat teoritis. Berbicara mengenai struktur kemasyarakatan, seorang ahli filsuf Yunani (Aristoteles) pernah mengatakan bahwa di dalam tiap-tiap negara terdapat tiga golongan masyarakat : golongan kaya, golongan miskin dan golongan yang berada diantara kedua golongan itu. Pernyataan yang pernah dilontarkan itu, sedikit banyaknya ada mengandung kebenaran, dan di duga pada jaman-jaman sebelumnya orang telah mengakui adanya pelapisan di dalam masyarakat yang mempunyai kedudukan bertingkat-tingkat dari bawah ke atas. Lapisan-lapisan yang di maksud itu terkenal dengan istilah "sosial stratification".<sup>10)</sup> Sistem pelapisan itu merupakan ciri yang tetap dan bersifat universal di dalam masyarakat yang teratur. Barang siapa yang memiliki suatu yang berharga dalam jumlah yang relatif besar, dianggap oleh masyarakat berkedudukan di lapisan atas, sedangkan mereka yang hanya sedikit atau sama sekali tidak memiliki sesuatu yang berharga itu, di dalam pandangan masyarakat mempunyai kedudukan yang rendah atau berada di lapisan bawah. Biasanya golongan yang berada di lapisan atas tidak hanya memiliki suatu

---

<sup>10)</sup> P.A.Sorokin, Social and Cultural Mobility, The free Press C.Mac.Millan Ltd, London, 1959, halaman 11.

macam saja dari apa yang dihargai oleh masyarakat, tetapi justru kedudukannya yang tinggi itu bersifat kumulatif, yaitu disamping memiliki sesuatu wujud benda materi juga memiliki sesuatu yang bersifat non materi (ilmu pengetahuan, kesalehan, kekuasaan, dan lain lain).

Lapisan-lapisan masyarakat yang di maksud, secara historis mulai ada semenjak manusia mengenal adanya kehidupan bersama di dalam organisasi kemasyarakatan. Mengenai bentuk-bentuk lapisan dalam masyarakat berbeda-beda dan banyak sekali. Bahkan di mana-mana kita temukan lapisan tersebut, apakah lapisan itu terdapat dalam masyarakat kapitalis, masyarakat komunis, masyarakat sosialis dan demokratis. Semakin kompleks dan majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi suatu masyarakat di muka bumi ini, semakin kompleks pula sistim pelapisan dalam masyarakat.<sup>11)</sup> Oleh karena itu, di dalam masyarakat yang sudah kompleks, berbagai ukuran yang digunakan untuk membedakan golongan yang satu dengan yang lain atau orang perorang. Seperti yang lazim pada masyarakat tradisional negeri kita, masyarakat di daerah ini terdiri dari kelompok menurut pekerjaan dan kelompok menurut kelahiran. Semua kelompok itu merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Untuk memberikan uraian mengenai struktur masyarakat Musi Banyuasin, penulis akan mencoba mengaitkan hal tersebut pada sistim Marga yang berlaku jauh sebelum adanya sistem Kesultanan Palembang. Dengan adanya sistim kesultanan, maka dalam masyarakat Palembang sendiri terdapat susunan yang menyerupai piramida: Raja beserta keluarga meliputi Pangeran, Raden dan Mas Agus. Golongan bangsawan rendah yang dapat dikategorikan golongan menengah, adalah orang-orang yang memiliki gelar Kimas dan Kiagus.<sup>12)</sup> Sedangkan mereka yang termasuk rakyat jelata terdiri dari orang-orang miji, orang-orang Senan dapat disamakan dengan orang-orang

---

<sup>11)</sup> Surjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Yayasan UI Jakarta, 1978, halaman 134.

<sup>12)</sup> Undang-undang Simbur Tjahaja, Jakarta (tanpa tahun), halaman disempurnakan pada tahun 1922; Kumpulan makalah yang membicarakan sistem "Marga" dalam seminar di UNSRI, 1979.

pedusunan (mata gawe). Kelas sosial yang secara tradisional dikenal di Surakarta yaitu: Santana Dalem, Abdi Dalem dan Kawula Dalem yang termasuk rakyat jelata.<sup>13)</sup> Susunan masyarakat seperti ini tidak dikenal atau tidak terdapat di daerah Uluan, walaupun kepala-kepala Marga itu sendiri ada atau tidak adanya hubungan dengan keluarga penguasa di dalam sistem kesultanan. Mereka merupakan golongan penguasa yang jumlahnya relatif kecil diantara rakyat jelata yang jumlahnya lebih besar. Dengan kata lain masyarakat pedusunan yang sebagian besar hidup bercocok tanam/ bertani, susunanya sangat sederhana dan hanya terdiri dari golongan penguasa “formal-tradisional”<sup>14)</sup> dan rakyat jelata yang lazim disebut “mata-gawe”.

Penguasa-penguasa formal-tradisional, mula-mula berasal dari kepala-kepala kelompok yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan kemufakatan anggota-anggotanya. Para penguasa yang dianggap sebagai penduduk inti dan menurut tradisi dianggap sebagai keturunan dari pendiri (cikal bakal) dan ketua didesa itu, biasanya dikenal dengan nama “Poyang-poyang” (kata ini berasal dari kata empu dan hyang). Hampir setiap daerah diwilayah Propinsi Sumatera Selatan, mengenal “poyang-poyang”, yang menduduki tempat penting dalam dunia kepercayaan. Berdasarkan permufakatan yang telah berakar di dalam masyarakat pedusunan, di antara poyang-poyang itu ditunjuk sebagai Kepala Marga yang dikenal dengan nama “Pasirah” (Depati). Pada jaman Hindia Belanda tradisi itu disesuaikan dengan demokrasi Barat, yaitu mereka itu dipilih secara langsung (Voting) menurut keinginan penguasa Belanda tersebut. Walaupun ada kebebasan memilih tapi biasanya yang akan menjadi Pasirah juga ditentukan dari atas, yaitu orang-orang yang setia kepada pemerintah kolonial Belanda. Apa yang dikemukakan diatas, susunan masyarakat Uluan pada umumnya tidak banyak seluk beluknya apabila dibandingkan dengan struktur masyarakat di Palembang kota yang berdasarkan

---

<sup>13)</sup> Gaetano Mosca, The Rulling Class, New York, Mc. Grawill, 1939, halaman 50.

<sup>14)</sup> Penguasa formal- tradisional dapat dibedakan dengan penguasa formal yang biasanya digaji oleh Pemerintah berdasarkan tinggi-rendahnya dalam birokrasi kepegawaian, sedangkan penguasa formal-tradisional mendapatkan gaji dari pajak yang ditarik dari rakyat yang dikuasainya.

kelahiran. Tetapi kemudian setelah tercapai kemerdekaan, sejalan dengan proses perkembangan masyarakat pedusunan sebagai akibat kesempatan belajar bagi setiap anak, maka lapisan-lapisan sosial ikut mengalami perubahan.

Setatus sosial yang berdasarkan kelahiran mulai merosot dalam pandangan masyarakat umum dan tidak lagi menjadi kriteria utama, tapi mulai bergeser pada kemampuan seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, kekayaan dan kepangkatan didalam sistem birokrasi pemerintahan. Dengan kata lain, faktor pendidikan yang dimiliki oleh seseorang sangat menentukan diantara kriteria-kriteria tersebut. Dengan adanya kesempatan belajar, maka klasifikasi sosial yang bersifat tradisional semakin lama semakin kabur dalam proses perkembangan masyarakat di daerah Uluu. Meskipun ada usaha dari pihak mereka yang memiliki status selama ini untuk menarik orang-orang yang biasa yang memiliki kemampuan ke dalam lingkungan keluarganya, tapi dasar "kelahiran" tidak lagi menjadi ukuran utama untuk menilai seseorang.

Nampaknya faktor "pendidikan" sangat menonjol dalam proses pembentukan struktur masyarakat tradisional di daerah Uluu akhir-akhir ini. Demokratisasi dalam dunia pendidikan telah menimbulkan dampak positif bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Apakah ia berasal dari anak petani, pedagang kaki lima, pegawai negeri, bangsawan dan sebagainya, secara keseluruhan memburu dan menjurus pada suatu kelompok cendekiawan baru yang pernah melalui proses pendidikan formal yang relatif sama. Kelompok ini muncul berangsur-angsur dengan gaya tersendiri, menggantikan kedudukan yang selama ini yang di pegang oleh keluarga penguasa formal-tradisional sebagai pemimpin. Hal ini merupakan konsekuensi yang logis dari proses modernisasi dan pembangunan di segala bidang, yang dalam kaitan ini adalah hasil konkrit dari perkembangan pendidikan pada khususnya. Bertolak dari sudut pandangan ini, golongan bangsawan atau golongan yang memiliki status yang menjadi sumber "kepemimpinan" selama ini, semakin lama semakin berkurang identitasnya, dan demikian pula kaum Elit Agama yang selama ini menjadi panutan masyarakat pedusunan semakin terdesak oleh pengaruh birokrasi dan pendidikan modern. Dengan kata lain

bahwa pendidikan sebagai faktor dinamisasi sosial,<sup>15)</sup> nampaknya telah menimbulkan pergeseran nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat pedusunan.

Diferensiasi sosial yang ditimbulkan proses pendidikan formal sampai ke tingkat Perguruan Tinggi di daerah ini, telah membawa pergeseran didalam pola kepemimpinan yang berdasarkan pada pengangkatan dari pemegang kekuasaan temporal atau oleh masyarakat adat setempat, masalah yang menyangkut kepentingan bersama atau perorangan (musim tanam, epidemi, ibadah, warisan, kematian, perkawinan dan sebagainya) terkonsentrasi ditangan kaum ulama/ kiyai, ini berangsur-angsur terbagi kedalam berbagai pola kepemimpinan disegala bidang kehidupan umat seperti dibidang : politik, ekonomi, pendidikan, sosial-kultural, agama dan lain-lain. Dengan timbulnya berbagai pola kepemimpinan tersebut, maka kesempatan itu memberikan peluang pada golongan cendekiawan keagamaan untuk ikut berkiprah dalam proses pembangunan umat dan mengembangkan ajaran agama mereka. Tak dapat kita elakkan realita ini, dimana kaum agamawan dan cendekiawan keagamaan memiliki fungsinya masing-masing yang semakin hari semakin jelas. Berdasarkan pengamatan awal dari hasil penelitian di daerah ini, rupa-rupanya kaum bangsawan memiliki peran dalam urusan keagamaan yang relatif luas, sedangkan para cendekiawan keagamaan berperan lebih dari pada itu yang menyangkut beberapa aspek dalam pengembangan konseptual dan manajerial. Pada umumnya para agamawan masih dirasakan pengaruhnya, dan dapat bertahan didalam masyarakat tradisional di dusun-dusun terpencil (geinsoleerd), sedangkan para cendekiawan keagamaan lebih banyak berkiprah dalam masyarakat terdidik yang tinggal diperkotaan.

### **C. Kegiatan di Bidang Sosial-Budaya dan Agama :**

Pada jaman Hindia Belanda jenis-jenis sekolah yang ada diwilayah Keresidenan Palembang hanya terdapat Sekolah Dasar sampai ke tingkat Sekolah Lanjutan Pertama (MULO : Meer

---

<sup>15)</sup> Seminar Sejarah Lokal, Pendidikan sebagai Faktor Dinamisasi Sosial, (Dir. Sej. Nilai tradisional), Jakarta, 1983.

Uitgebreid Lager Onderwijs). Jenis Sekolah Dasar ada yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda dan ada pula yang berbahasa pengantar bahasa Melayu. Khususnya di daerah Musi Banyuasin (Onderafdeeling Moesi Ilir en Koeboestraken dan Banyoeasin), sejak permulaan abad ke-28 hanyalah terdapat jenis Sekolah Dasar saja yang termasuk kategori sekolah Kelas Dua (De Scholen der tweede klasse) yang dibiayai oleh pemerintah Marga setempat. di beberapa dusun tertentu terdapat sekolahan agama yang setingkat dengan Sekolah Dasar (ibtidiah yang dikelola oleh pemuka-pemuka agama).

Berdirinya Sekolah Dasar (sekolah Gouvernement) di daerah ini yang lazim disebut “Sekolah Desa” (Openbare Volksschool), ada hubungannya dengan pasal 1 Surat Keputusan Raja Belanda (Koninklijk Besluit) tertanggal 28 September 1892 Nomor 44 (Lembaran Negara 1893 Nomor 125), yang membagi Sekolah Negeri Bumiputera dalam dua kategori : Sekolah Kelas Satu (De Scholen eerste Klasse) dan Sekolah Kelas Dua (De Scholen der tweede Klasse).<sup>16)</sup> Sekolah Desa yang lama belajarnya tiga tahun diperuntukkan bagi penduduk Bumiputera pada umumnya, tetapi tidak setiap dusun didirikan sekolah semacam itu. Mungkin hal itu disebabkan masalah biaya, jumlah penduduk dan politik kolonial dalam melaksanakan Politik Etika. Sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Kolonial Belanda setempat untuk merealisasikan Politik Etika, maka pada dasarnya mereka memperoleh pendidikan di tingkat Sekolah Dasar saja di dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terdidik bagi keperluan administrasi Pemerintah di tingkat Marga, dan tidak kurang pentingnya adalah masih langkanya tenaga pengajar, kemudian sekolah semacam itu diperluas dengan mendirikan Sekolah Sambilan (Vervolgschool) pada setiap ibukota Marga yang terpilih,<sup>17)</sup> yang lama belajarnya 2 tahun. Tetapi kemudian setelah

---

<sup>16)</sup> Dep.Pendidikan & Kebudayaan, Pendidikan di Indonesia 1900 - 1940, Jakarta, 1977, halaman 5 - 6.

<sup>17)</sup> IDKD Sumsel, Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Selatan, Dep. P&K, Jakarta, 1980/1981, halaman 47 ; Syaibani (mantan Bupati Muba), Wawancara, Palembang, 1988.

jaman pendudukan Jepang hampir semua ibukota Marga (Son) dan dusun-dusun yang padat penduduknya didirikan sekolah sambungan (Koto-Syogakko), sehingga bagi mereka yang mau melanjutkan pelajarannya tidak perlu lagi ke ibukota Marga.

Perluasan sekolah kelas dua ini dalam rangka pengembangan pendidikan bagi penduduk Bumiputra, didasarkan pada suatu asumsi bahwa tidaklah cukup hanya mengandalkan sekolah-sekolah Desa yang lama belajarnya tiga tahun saja, karena pengetahuan yang didapatkan sangatlah minim. Dapat kita katakan bahwa bentuk sekolah semacam itu hanyalah dapat diterima dalam rangka usaha memberantas buta aksara. Asumsi ini tidaklah berarti memperkecil nilai paedagogis yang diberikan di Sekolah Dasar, apabila dinilai dari segi kegunaan membaca dan menulis huruf latin, dalam kondisi sosial dimana sama sekali tidak ada sekolah-sekolah formal. Dengan adanya perluasan sekolah kelas dua di daerah, maka terpaksa pemerintah Belanda setempat membuka Lembaga pendidikan Guru untuk Sekolah Dasar yang terkenal dengan nama sekolah Leergang. Sekolah Leergang yang baru dibuka di Sekayu itu, lama belajarnya dua tahun dan siswa-siswanya diharuskan tinggal di asrama. Lembaga Pendidikan Guru tersebut merupakan satu-satunya sekolah tertinggi di daerah ini sebelum Perang Dunia II. Sebelum sekolah ini dibuka, unuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar disekolah-sekolah desa, kepala-kepala Marga terpaksa mendatangkan tenaga guru dari luar daerah, atau mengangkat murid-murid yang telah menyelesaikan pelajarannya di Sekolah Sambungan (Vervolgschool) menjadi "magang" di sekolah-sekolah Desa.<sup>18)</sup>

Dua tahun setelah meletus Perang Dunia II, sekolah Leergang yang menjadi tempat mendidik kader-kader guru Sekolah Desa, didirikan sebuah lagi di ibukota Babat,<sup>19)</sup> sehingga didaerah ini terdapat dua lembaga pendidikan guru dalam pelaksanaan Politik

---

<sup>18)</sup> Haji Amiruffin B.A. (eks Pengawas Sekolah Rakyat), Wawancara, Sekayu, 1986; Moh. Hasyin (eks Kepala Sekolah Rakyat), Wawancara, Palembang, 1987.

<sup>19)</sup> . Moh. Hasyim, Wawancara, Palembang, 1987; Syargawi Hulip, Wawancara, Lumpatan, 1986



Etika. Kemudian nama sekolah itu dirubah dengan nama Curcus Voor Volks Onderwijzer (CVD), yang pada jaman pendudukan Jepang di beri nama Kyoing-yo-bei-jo. Kedua lembaga pendidikan guru ini tidak setiap tahun menerima siswa, karena tiap-tiap angkatan harus ditamatkan lebih dahulu. Oleh karena itu dua tahun sekali menerima siswa. Setelah mereka menyelesaikan pelajarannya, biasaya langsung diangkat menjadi guru bantu di Sekolah-sekolah Desa. Walaupun sudah ada Lembaga Pendidikan Guru untuk memenuhi tenaga guru yang diperlukan di Sekolah-sekolah Desa, nyatanya masih belum lagi mencukupi, sehingga penerimaan murid setiap tahun sangat dibatasi sesuai dengan daya tampung yang tersedia hanyalah tiga lokal saja, atau tidak ada kelas yang paralel.

Lembaga pendidikan yang diutarakan diatas adalah lembaga pendidikan umum yang dikelola oleh pemerintah Marga, yang pada dasarnya bersifat “netral” dalam arti tidak m encam puri urusan-urusan agama.<sup>20)</sup> Mengingat sekolah-sekolah Couvernement kurang sekali memberikan pelajaran agama atau budi pekerti, maka timbulah reaksi dikalangan masyarakat yang sebagian besar memeluk agama Islam, untuk mendirikan sekolah-sekolah yang bernafaskan keagamaan, sesuai dengan citra masyarakat agraris tradisional yang menginginkan agar anak-anaknya berbudi luhur. Dengan kata lain, sekolah-sekolah pemerintah itu berpijak pada “tidak campur tangan” (politik van onthouding) yang diarahkan pada pembentukan kecerdasan akal semata-mata. Sedangkan pembentukan akhlak atau budi pekerti di kesampingkan sama sekali atau sama sekali tidak tercantum di dalam kurikulum sekolah. Pada dasarnya sistim persekolahan yang ada pada waktu itu berdasarkan pada golongan penduduk menurut kelahiran/keturunan atau stratifikasi sosial lainnya yang ada dan golongan kebangsaan yang berlaku pada waktu itu. Bagaimanapun juga harus diakui bahwa lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda, cenderung sebagai pendidikan bagi golongan-golongan tertentu saja. Faktor lain yang tidak kurang pentingnya, mengenai jumlah sekolah yang ada tidak banyak apabila dibandingkan

---

<sup>20)</sup> Soegarda Purbakawatja, Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka, Gunung Agung, Jakarta, 1970, halaman 206.

jumlah penduduk. Terbatasnya daya tampung, sehingga sebagian kecil saja kesempatan belajar yang di berikan kepada rakyat secara keseluruhan.

Apabila dilihat dari sisi lain/ Islam, ternyata lembaga pendidikan Islam tradisional yang telah berkembang sebelumnya, apakah sistim pengajian ataukah berbentuk Pesantren yang berada di daerah Uluan, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang telah berkembang di dalam masyarakat, sehingga tiap periode sejarah kebudayaan sesuatu bangsa akan memaksa pemuka-pemuka agama (Islam) untuk meninjau kembali isi dari kekayaan aqidah dan agamanya. Kemunduran dan kefanatikan yang menyelubungi masyarakat Islam yang didominasi oleh kaum Tuo <sup>21)</sup> dan kemajuan pesat yang di peroleh Missie dan Zending dalam dunia pendidikan didalam dan diluar jawa, <sup>22)</sup> rehabilitasi Islam didaerah ini mendapatkan manifestasinya dalam bentuk inovasi yang dipelopori oleh Haji Basri bin H. Yusuf, Haji A.Cholik dan Anang Kirom. <sup>23)</sup> Sebagai akibat keadaan setempat dan motif politik yang menguasainya dalam kerangka pembaharuan lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional, maka pada tahun 1926 berdirilah Madrasah Islamiyah di Sekayu dibawah pimpinan Haji Basri Bin H. Yusuf. Lembaga pendidikan formal ini memberikan agama dan pengetahuan umum dari tingkat ibtidayah sampai ke tingkat Aliyah dengan bahasa pengantar bahasa Arab.

Beberapa bulan kemudian di Dusun Tanah Abang didirikan pula sekolah semacam itu yang dipimpin oleh Haji. A. Cholik. Dalam waktu yang hampir bersamaan atas usaha Anang Kirom, berdiri lagi Madrasah Islamiyah di Dusun Teluk Marga Epil. <sup>24)</sup> Tiga serangkai ini

---

<sup>21)</sup> Istilah "Kaum Tuo" dikutip dari hasil penelitian D r. Deliar Noer di daerah Minangkabau, yang mengandung arti dimana Islam bercampur dengan tradisi masa lampau sebagai ciri-ciri khas ke-Islaman di Indonesia; Lihat Robert Van Niel. Op cit, halaman 36 - 38

<sup>22)</sup> J.S. Furnival, Netherlands Indie, a studi of plural economy, the Mc. Millan - New York, 1944, Halaman 380 - 381

<sup>23)</sup> Haji Syaibani, Wawancara, Palembang, 1988; haji Romli Rozak, Wawancara, Palembang, 1988

<sup>24)</sup> Haji Syaibani, Wawancara, Palembang, 1988; haji Thahir, Wawancara, Bailangu, 1988

adalah produk sekolah Al Irsyad di Betawi, yang merupakan peletak dasar utama bagi pembaharuan pendidikan Islam di daerah ini, dan telah mendorong kearah terbentuknya suatu kelompok masyarakat yang disebut „Kaum Mudo”. Tanpa dirasa oleh kedua belah pihak, perbedaan pandangan itu telah melicinkan jalan bagi Belanda untuk menciptakan prakondisi yang bersifat pluralistik. Setelah Madrasah Islamiyah di Sekayu menghasilkan murid-muridnya yang terpilih seperti : H. Thohib, romli, Abdul kadir Djamain, Hasan bin H. Yusuf, Cholik bin Goffar, H. Abdulhamid, Amir hamyah, dan lain-lain, maka dengan perantaraan mereka itu Islam mulai menyentuh daerah-daerah yang terpencil di dalam wilayah orderafdeeling Moesi Iilir dan Banyoeasin. Di antara mereka itu ada pula yang meneruskan pelajarannya kesemanajung Melayu (Singapura dan Johor). Setelah mereka menamatkan pelajarannya di sana, mereka kembali ketempat asalnya, dan berperan aktif dalam menyebarkan agama Islam di kalangan umat.

Lembaga Pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang di daerah ini, secara analitis adalah hasil dari pertentangan kedua golongan yang telah disebutkan di atas, karena masing-masing pihak akan berlomba-lomba mencari dukungan massa untuk memperkuat pengaruhnya di dalam masyarakat. Pada tahun 1933 organisasi Muhammadiyah berhasil mendirikan Dinyak School di Ulakpaceh, dan pada tahun 1937 Madrasah Islam telah didirikan di Air Itam oleh H.Abdul Hamid Cs.<sup>25)</sup> di ibukota Onderafdeeling Moesi Iilir sendiri terdapat banyak lembaga pendidikan Islam seperti : pada tahun 1933/1934 berdiri Madrasah Attawuniah oleh KH.Mustopa pada tahun 1937/1938 di sekolah agama yang setingkat Schakel School oleh Syamsul Hamid dan Rozali Rozak; pada tahun 1939 berdiri Schakel School Muhammadiyah oleh Tuan Semsun dan pada tahun 1940 berdiri Dharul Ulum oleh KH.Moh.Noer di dusun Lumpatan berdiri pula Madrasah Al Mahaddudin pada tahun 1939 oleh KH.Amir

---

<sup>25)</sup> Dinas Sosial Tk.I Sumsel, Perintis Kemerdekaan Indonesia, Palembang, 1978, halaman 20-22.

Hamzah Cs.<sup>26)</sup> Hampir setiap dusun kita dapati sekolah-sekolah agama, yang dikelola oleh orang-orang yang berorientasi pada kedua faham tersebut.

Lembaga pendidikan Islam yang lahir macam cendawan di musim hujan dan dikelola oleh keduas golongan (Kaum Tuo dan Kaum Mudo), rupa-rupanya ada juga sekolah-sekolah itu yang didukung oleh Serikat Islam, dan dijadikan wahana untuk menyebarkan faham politik seperti Madrasah Islamiyah di Air Itam yang berperan ganda yaitu disamping menyebarluaskan ajaran agama juga menanamkan rasa antipati terhadap kolonialisme Belanda. Tidak mengherankan apabila lembaga pendidikan Islam di Air Itam itu, selalu diawasi oleh Pemerintah Belanda setempat, bahkan itu pernah diinspeksi oleh Asisten Residen de Boer.<sup>27)</sup> Mengingat aktifitas sekolah tersebut berkembang dengan pesat dan cenderung untuk melawan Pemerintah Belanda maka dicarikan jalan keluar untuk menyaingi lembaga Islam di tempat itu dengan mendirikan Schakel School sebagai lanjutan yang telah ada disana oleh Pemerintah Belanda. Schakel School yang diusahakan oleh Pemerintah waktu, pada dasarnya akan memeberikan kesempatan pada lulusan sekolah itu untuk menempuh ujian Klein Ambtenaer Examen (KAE). Tetapi apa yang terjadi pada jaman pendudukan Jepang 1942-1945, semua lembaga pendidikan Islam di daerah ini tanpa kecuali dibubarkan oleh penguasa Jepang. Walaupun sekolah-sekolah agama itu telah sirna, tetapi cita-cita yang telah dikembangkan oleh sekolah-sekolah tersebut menjadi panutan masyarakat secara keseluruhan, untuk berjuang menentang segala macam bentuk penindasan, yang pada jaman revolusi kemerdekaan mereka itu telah menjadi “Pelopor” dalam proses pembentukan lasykar-lasykar yang berbau agama.

Agama Islam yang telah dikembangkan oleh para mubaligh di jaman Kesultanan Palembang adalah Islam tradisional<sup>28)</sup> yang telah

---

<sup>26)</sup> Muh.Hasyim, Wawancara, Palembang, 1988; Abas Kurib, Wawancara, Palembang, H.Rozali Rozak, Wawancara, Sekayu, 1988.

<sup>27)</sup> Dinas Sosial Tk.I Sumsel, op cit, halaman 21.

<sup>28)</sup> Islam tradisional adalah Islam yang masih terikat pada pikiran-pikiran para Ulama (ahli Fiqih-Hadith-Tafsir-Tauhid dan Tasawuf) yang hidup antara abad ke-7-13. Oleh karena itu Islam yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada

20

berakar sedemikain rupa sehingga sebagian besar masyarakat di pedusunan menganut faham-faham yang telah dirintis oleh pemikir-pemikir (Ulama) di abad pertengahan. Kaum Ulama yang dimaksud itu termasuk golongan tradisional yang lebih banyak menghiraukan soal-soal agama / din atau masalah ibadah belaka. Bagi mereka, Islam seakan-akan sama dengan fiqih sehingga dalam hal ini mereka mengakui “taqlid” dan menolak segala macam “ijtihad”. Meskipun mereka dapat diklasifikasikan pada golongan Islam yang taat dan mengaku setia menjadi pengikut mazhab yang pada umumnya mazhab Syafe'i, tetapi secara keseluruhan mereka itu tidak mengikuti ajaran pendiri mazhab itu secara langsung. Mereka mengikuti ajaran Islam yang datang kemudian, yang sering pula menyimpang dari ajaran pendiri mazhab itu sendiri. Golongan ini lebih banyak mengikuti fatwa yang telah ada, dan bukannya berusaha untuk memahami cara-cara untuk memberikan atau merumuskan fatwa itu sendiri. Beberapa contoh yang telah berlaku di dalam masyarakat di daerah Musi Banyuasin yang masih kuat pengaruh adat mengenai masalah Faraidh (termasuk fiqh) sering memberikan tempat pada kebiasaan pemberian warisan, dimana anak perempuan mendapat hak yang relatif kecil jika dibandingkan dengan apa yang diterima anak laki-laki. Dalam rangka tasawuf banyak dari golongan ini yang tergelincir pada praktek-praktek yang termasuk “syirik” (mempersekutukan Tuhan dengan benda-benda). Mereka masih percaya pada sisa-sisa kepercayaan lama seperti menghormati tempat-tempat yang dianggap keramat, memakai azimat, percaya kepada dukun-dukun dan sebagainya.

Contoh-contoh tersebut diatas ini masih jelas terdapat pada masyarakat pedusunan dan kesemuanya ini cenderung mengaburkan pengertian tauhid dan akan menjauhkan diri dari hubungan langsung dengan Yang Maha Kuasa. Gambaran masyarakat di daerah ini identik dengan apa yang telah ditulis Deliar Noer dan Robert van Niel mengenai Islam di Indonesia.<sup>29)</sup> Dengan kata lain, Islam yang menjadi

---

umumnya banyak mengandung konsep-konsep mistik yang selaras dengan kepercayaan keagamaan rakyat Indonesia kuno.

<sup>29)</sup> Deliar Noer, Gerakan modern Islam di Indonesia 1900-1942, LP3ES, Jakarta, 1980, halaman 320; Bandingkan Robert van Niel, op cit, halaman 36.

panutan masyarakat pedusunan adalah Islam yang bercampur dengan ajaran dan kebiasaan (Animisme dan Hindu-Budha) di negeri ini dalam proses pertumbuhan dan perkembangan di masa lampau. Bukanlah menjadi suatu masalah Pokok bagi mereka pada waktu itu, apakah campuran pemikiran dan praktek-praktek itu sesuai atau tidak dengan Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad S.A.W, nyatakan tidak mereka persoalkan. Kepatuhan masyarakat pada agama Islam di daerah ini, dapat dilihat pada beberapa elemen-elemen itu adalah peranan kaum ulama/ kiayi beserta tempat-tempat peribadatan atau masjid. Peranan ulama/ kiayi di daerah ini tidak dapat dipisahkan dengan tempat peribadatan, karena dimanapun kaum muslimin berada mereka selalu menggunakan mesjid atau langgar sebagai tempat pertemuan, pusat pendidikan, aktifitas administrasi dan kultural.<sup>30)</sup> Bahkan dalam jaman awal kemerdekaan di daerah ini dimana umat Islam belum begitu di pengaruhi oleh budaya Barat, kita temukan para Ulama/ kiayi yang penuh pengabdian mengajar masyarakat di tempat-tempat peribadatan, serta memberi wejangan dan anjuran untuk meneruskan tradisi yang terbentuk sejak jaman permulaan Islam. Walaupun semangat pengabdian mereka cukup tinggi dalam menyebarkan ajaran agama dikalangan umat, sikap tradisional tanpa tanya cara yang lazim digunakan dalam proses penyampaian wejangan yang bersifat taqlid. Dalam hal ini mereka dianggap maksum atau sunyi dari kesalahan. Apa saja yang menyangkut agama Islam merupakan monopoli ulama atau kiayi, sehingga fatwa ulama atau kiayi bersifat final dan tidak boleh diperdebatkan apalagi disangkal. Semuanya dianggap benar tanpa cacat.

Apabila kita melihat bangunan masjid pada setiap dusun di daerah ini, baik dalam ukuran kecil maupun besar, nyatanya bangunan tempat peribadatan itu sangat terpelihara oleh masyarakat pedusunan. Ia dibangun secara artistik bersegi empat persegi, beratap genteng yang bertingkat menyerupai "meru" sebagai paduan seni bangunan masa lampau dengan Islam masa sekarang. Dilihat dari segi atap masjid, bangunan itu merupakan sinkritisme antara Islam dan Hindu

---

<sup>30)</sup> Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, LP3ES, Jakarta, 1982, halaman 49

seperti yang dapat kita lihat pada bangunan masjid Kudus di Jawa Tengah. Hampir sebagian besar bangunan mesjid di pedusunan sebelum ada pembangunan masjid yang baru, mengambil bentuk yang sama yaitu puncak atapnya menyerupai “meru” seperti bangunan pura di Pulau Bali. Betapa penting fungsi dan peranannya di dusun-dusun yang memiliki nilai strategis, karena tidak hanya sebagai tempat melakukan hubungan langsung dengan Yang Maha Kuasa saja, tapi juga sebagai tempat dakwah dalam tradisi pengajian yang berkembang dari tahun ketahun dalam masyarakat agraris tradisional. Kedudukan masjid sebagai pusat kegiatan pendidikan dan basis penyebaran agama Islam, pada dasarnya merupakan kesinambungan sistim pendidikan Islam yang berpusat di masjid sejak Masjid Al Quba di Madina pada masa Nabi Muhammad s.a.w. Tradisi masjid atau langgar yang kita kemukakan di atas, merupakan bagian integral dari salah satu aspek kehidupan masyarakat di daerah ini, sehingga pada masa pembangunan sekarang ini sarana itu dapat pula digunakan sebagai tempat penyampaian pesan-pesan/ media komunikasi untuk pembangunan.

#### **D. Sistim Pemerintah Sebelum dan Sesudah Pendudukan Jepang**

Setelah pemerintah kolonial Belanda memperoleh kedaulatan atas daerah ini pada awal abad ke-19 yaitu terhapusnya sistem Kesultanan Palembang di bawah penguasa Sultan Makhmud Badaruddin II, maka secara bertahap dalam bidang pemerintahan diadakan perombakan secara total terhadap struktur pemerintahan di atas sistem Marga.<sup>31)</sup> Perombakan secara total ini berarti penghancuran konsep tradisional mengenai “State and Kingship” yang selama berabad-abad dipegang oleh rakyat di daerah ini. Sebagai pejabat pemerintah kolonial tertinggi di wilayah Keresidenan Palembang, diangkat seorang Residen Belanda yang dibantu oleh beberapa Asisten Residen dan Kontrolleur. Berdasarkan Staatsbald 1918 Nomor 612, wilayah ini terbagi atas empat Afdeeling :

---

<sup>31)</sup> Mengenai sistim Marga yang berlaku di daerah ini pernah diseminarkan oleh Fakultas Hukum Unsri Palembang 1979; Lihat Simbur Tjahaja, halaman 1-5 dan kemudian diatur dalam IGOB 1919.

- a. Hoofdplaats Palembang dan sekitarnya
- b. Palebangsche Benedenlanden ibukota Sekayu <sup>32)</sup>  
Palembang
- c. Komerling dan Ogan Ulu ibukota Baturaja
- d. Palebangsche Bovenlanden ibukota Lahat <sup>33)</sup>

Masing-masing Afdeeling di bawah kekuasaan Asisten Residen terbagi atas beberapa Onderafdeeling yang dikepalai oleh seorang Kontrolleur. Jabatan Residen, Asisten Residen dan Kontrolleur di pegang oleh orang-orang Belanda yang dikenal dengan nama Nederlandse Binnenlands Bestuur (NBB). Mengingat banyak kendala bagi para kontrolleur untuk mengadakan hubungan langsung dengan rakyat bumiputra di daerah Onderafdeeling, maka dalam melaksanakan tugasnya dia didampingi oleh Demang, Asisten Demang, Mantri Polisi dan Mantri Pajak (Belasting) yang disebut Inlandse Binnenlands Bestuur (IBB).

Onderafdeeling terbagi atas District dan Onderdistrict. Yang masing-masing dikepalai oleh Demang dan Asisten Demang. Pembagian District dan Onderdistrict tersebut berdasarkan Staatblad 1916 Nomor 208, sehingga untuk seluruh wilayah Keresidenan Palembang tercatat 15 District dan 40 Onderdistrict. Onderdistrict terbagi atas beberapa Marga yang di kepalai oleh seorang Pesirah atau Depati <sup>34)</sup> Marga membawahi beberapa buah dusun yang masing-masing dikepalai oleh seorang Kario yang dibantu oleh perabot desa (Khotip, Penggawa, Juru tulis). Khusus mengenai jabatan khotip hanya menangani masalah antara lain agama, perkawinan, rujuk-talak dan kematian. Sistem Marga yang kita jumpai di wilayah ini memiliki hak otonom yang diakui pemerintah kolonial Belanda, dan secara yuridis formal statusnya di perkuat lagi oleh Staatblad 1922 Nomor 564, yang

---

<sup>32)</sup> Berdasarkan Gouvernements Besluit No. 13 tertanggal 3 Desember 1918, untuk sementara Asisten Residen berkedudukan di Palembang.

<sup>33)</sup> Algemene Memorie Van Overgave Van D.A.F Brautigam (Residen Palembang), Arsip Nasional, Jakarta, halaman 3

<sup>34)</sup> Dadameuraxa, Sejarah kebudayaan Sumatra, Firman Hasmar, Medan, 1974 halaman 705-706; IDKD Sumsel, Sejarah Pengaruh Pelita terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan Daerah Sumsel, Dep. P&K DirektoratSej.& Nilai Tradisional 1981/1982, halaman 18



kemudian di perbaharui dalam pengaturan Inlandshe Gemeente Ordonantie Buitengewesten atau IGOB dengan Staatsblad Nomor 490 tahun 1938.<sup>35)</sup> Otonomi Marga yang diakui oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang desentralisasi di wilayah ini, merupakan usaha pemerintah kolonial untuk menghapus sisa-sisa kebiasaan masyarakat tradisional yang dianggap menghalang-halangi perkembangan administrasi modern. Prinsip memecah belah terkandung di dalamnya, karena otonomi yang diterapkan di wilayah ini tidak didasarkan pada prinsip teritorial melainkan prinsip etnisitas (kekuasaan), dimana Marga-marga dibiarkan hidup terpisah satu sama lain menurut sukunya masing-masing, yang telah diperkecil kekuasaan dan pengaruhnya.

Sistim marga didaerah Uluang sebenarnya sudah ada jauh sebelum jaman Kesultanan Palembang.<sup>36)</sup> Marga yang diperintah oleh seorang Pesirah/ Depati selaku kepala pemerintahan dan kepala adat setempat, secara tradisional memiliki kekuasaan otonom yang dianggap sebagai “ Republik Desa” yang berdaulat di daerahnya masing-masing. Ketika sistim Kesultanan dihapus oleh pemerintah kolonial Belanda, sistim marga ini masih berjalan seperti pada jaman pemerintahan Kesultanan, bahkan sistem itu berlangsung sampai pada akhir abad ke-19. Baru menjelang abad ke-20 pemerintah kolonial Belanda mulai ikut campur dalam urusan pemerintah Marga, setelah Belanda menjalankan politik pasifik dengan mengintensifikasikan kekuasaannya di seluruh wilayah bekas kesultanan Palembang.

Dalam masyarakat pedusunan terdapat dua tingkat administrasi yaitu : Marga dan Dusun/ Desa. Kedua pola ini sejak jaman Hindia Belanda telah berkembang sedemikian rupa menurut keinginan pemerintah kolonial, sehingga terciptalah apa yang disebut sistim Marga yang mengelola beberapa buah dusun sebagai unit pemerintahan terendah dalam masyarakat pedusunan di daerah Musi Banyuasin.

---

<sup>35)</sup> M g s.A bdurrachm an (Residen), “Pemerintahan N egri dalam propinsi Sumatera Selatan Menurut Sejarah”, dalam SOELOEH MARGA, No.4 Th. I April 1950.

<sup>36)</sup> “Monografi Marga Kayuagung”, dalam SOELOEH MARGA OENTOEKKERESIDENAN PALEMBANG, No. 9 Maret 1932, halaman 128-135; Kementrian Penerangan, op cit, halaman 87

Seperti yang umumnya berlaku pada beberapa daerah Tk.II di Sumatera Selatan. Masyarakat di daerah Uluang yang terbagung dalam wilayah onderafdeeling seperti yang diuraikan diatas, nampaknya terdapat persentuhan antara unsur-unsur administrasi pedusunan yang tradisional. Unsur administrasi pusat yang terendah berada pada tingkat Onder-district di pegang oleh Asisten Demang, yang ditentukan dari atas berdasarkan pendidikan dan kecakapan serta pengalaman kerja yang berorientasi pada daerah setempat. Sebaliknya unsur administrasi marga dengan perangkat dusun (Pembesar/ Kerio, Penggawa, dan Penghulu/ khotip), yang lebih banyak ditentukan oleh faktor “kharisma”. Tradisi pemilihan yang telah melahirkan pemimpin-pemimpin “formal tradisional” dan kemudian memperoleh legitimasi dari administrasi pusat, digunakan sebagai jalur vertikal untuk memasukan kekuasaannya kedalam masyarakat pedusunan.

Bertolak dari realitas ini, betapa penting fungsi dan peranan penguasa formal tradisional yang dipilih langsung oleh masyarakat, nampak didalam segala aspek kehidupan masyarakat sendiri, merupakan tumpuan harapan masyarakat sepanjang waktu sesuai dengan sifat ketergantungan yang melekat pada masyarakat itu. Sifat ketergantungan itu dapat kita lihat pada peristiwa-peristiwa yang menyangkut kepentingan bersama, yaitu apa yang akan terjadi atau yang akan dikerjakan oleh seluruh masyarakat. Tanpa melalui penguasa formal tradisional, akan sia-sia belaka atau tidak akan memberikan hasil yang memuaskan. Mungkin sekali konsep peninggalan masa lampau yang masih terasa pengaruhnya pada masa sekarang ini, dimana bentuk konsentrasi dan pengawasan terhadap masyarakat ada di tengah penguasa setempat.

Terbentuknya wilayah administrasi Kabupaten Musi Banyuwasin sekarang ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor Gb/53/1951 dan Nomor Gb/54/1951 tanggal 9 Mei 1951, dan tindak lanjut kemudian dengan Ketetapan Gubernur Sumatera Selatan Nomor Gb/113/1951 tertanggal 17 September 1951 beserta amandemen Nomor Gb/3/29/10/22 tahun 1952,<sup>37)</sup> yang pada jaman Belanda termasuk Marga Panukul, terbagi atas dua Onderafdeeling

---

<sup>37)</sup> Kementrian Penerangan, op cit, halaman 108-166

yaitu : Onderafdeeling Musi Iilir dengan ibukota Sekayu dan Onderafdeeling Banyuasin dengan ibukota Talang Betutu.<sup>38)</sup> Adapun Onderafdeeling Musi Iilir terdiri dari atas dua distrik, yaitu District Sekayu dan District Babat. District Sekayu membawahi dua onderistrict: Onderistrict Sekayu dan tebing Bulang. Sedangkan disrict Babat membawahi Onderdistrict Babat dan Ulak Paceh. Onderdistrict Sekayu terbagi atas beberapa Marga : Marga Menri Melayu, Marga Epil dan Marga Teluk Kijing. Onderdistrict Tebing Bulang terbagi atas Marga Abab, Marga Panukal dan Marga Sungai Keruh. Onderdistrict Babat membawahi dua Marga yitu : Marga Punjang dan Marga Sanga Desa. Sedangkan Onderdistrict Ulak Paceh membawahi Marga Lawang Wetan, Marga Pinggap dan Marga Batanghari Leko.

Onderafdeeling Banyuasin terbagi atas Dua District yaitu : District Talang Betutu dan District Bayung Lincir. District Talang Betutu membawahi tiga Onderdistrict : Onderdistrict Talang Betutu, Pangkalan Balai dan Prajen. Sedangkan District Buyung Lincir terbagi atas dua Onderdistrict : Buyung Lincir dan Dawas. Onderdistrict Talang Betutu membawahi Tiga Marga: Marga Gasing, Marga Tanjung Laga dan Marga Talang Kelapa. Kemudian Onderdistrict Pangkalan Balai terbagi atas: Marga Pangkalan Balai, Marga Swak Tapeh, Marga Rimba Asem, Marga Babat, Marga Panuguan dan Marga Rantau Bayui. Onderdistrict Prajen membawahi : Marga Sungai Rengas, Marga Upang, Marga Sungsang, Marga Muarta Talang, Mata Kumbang dan marga Sungai Aren. Mengenai district Buyung Lincir yang terdiri dari Onderistrict Buyung Lincir dan Dawas, di man Onderdistrict Buyung Lincir membawahi Marga Kubu Lalan, Marga Kubu Bayat dan Marga Kubu Tungkal. Akhirnya Inderdistrict Dawas terbagi atas Marga Dawas, Marga Supat dan Marga Kubu Tungkal Iilir. Ketika terbentuk Daerah Tingkat II Musi Banyuasin setelah pengakuan kedaulatan, ada beberapa Marga yang dulu secara administatif termasuk Onderafdeeling Musi Iilir, sekarang dimasukkan kedaerah tingkat II Lematang Iilir Ogan Tengah (LIOT).

---

<sup>38)</sup> Memorie Van Overgave C. Van De Valde (Residen Palembang), Arsip Nasional, Jakarta

Pendudukan Balatentara Jepang di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1942-1945, khususnya di wilayah Keresidenan Palembang sejak media Februari 1942,<sup>39)</sup> pada dasarnya tidak mengubah struktur organisasi pemerintahan yang ada pada jaman kolonial Belanda.<sup>40)</sup> Tetapi ditinjau dari segi pemerintahan, pada jaman Hindia Belanda hanya terdapat satu macam bentuk pemerintah sipil yang dikendalikan dari kota Batavia. Gagasan melanjutkan bentuk pemerintahan yang ada ditegaskan di dalam pasal 3 Osamu Seirei Nomor 1/ 1942 yang berbunyi sebagai berikut :

“Semua badan-badan pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang dahulu, tetap diakui sah buat sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah Militer.<sup>41)</sup>

Walaupun secara struktural pemerintahan tidak banyak mengalami perubahan, namun pada jaman pendudukan Jepang kita dapatkan tiga pusat konsentrasi penguasa militer di seluruh kepulauan Nusantara yaitu :

- a. Pemerintah Militer Angkatan Darat ke-25 (Riku-Gun) untuk seluruh Sumatra, yang pada mulanya dipusatkan di Syonanto (Singapura) dan kemudian dipindahkan ke Bukit Tinggi.
- b. Pemerintah Militer Angkatan Udara ke-16 (Riku-Gun) untuk Jawa dan Madura dipusatkan di Jakarta.
- c. Pemerintah Militer Angkatan Laut (Riku Gun) yang dikenal Armada Selatan ke-2 untuk Sulawesi, Kalimantan, pulau-pulau Sunda kecil dan Maluku di pusatkan di Makasar.<sup>42)</sup>

Jabatan Gubernur Jendral pada Jaman Hindia Belanda diganti dengan gubernur-gubernur Jepang yang mengambil tempat di Bukit Tinggi, Jakarta, dan Makassar (Ujung Pandang). Pusat-pusat konsentrasi

---

<sup>39)</sup> Asia Raya, Jakarta, 29-4- 2602 Tahun I Nomor I: Sartono Kartodirejo et. al., Sejarah Nasional Inonesia IV, Balai Pustaka, Jakarta, 1977, halaman 1

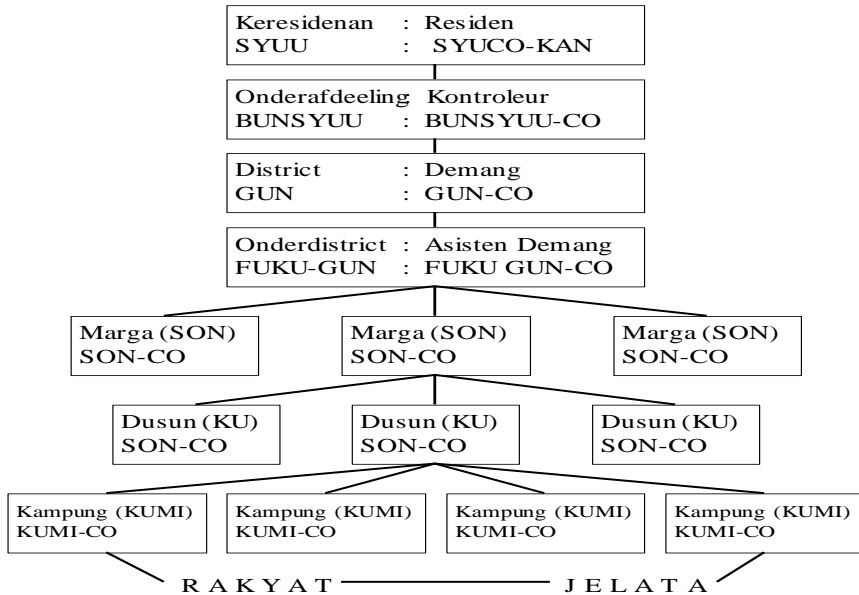
<sup>40)</sup> Kementrian Penerangan, Op cit, halaman 89

<sup>41)</sup> Byu Suryaningrat, Sejarah Pemerintahan di Inonesia, Dewaruci Press, Jakarta, 1981, halaman 69.

<sup>42)</sup> Sartono Kartodiredjo et. al, Op-cit, halaman 5.

penguasa tersebut merupakan kepala pemerintahan Militer Jepang yang dikenal dengan nama “Gunseikan”.

Memang secara mendasar struktur pemerintahan tidak mengalami perubahan, tapi nyatanya badan-badan legeslatif di tingkat keresidenan dan Marga di bekukan sama sekali, sehingga kekuasaan pemerintah militer Jepang pada waktu itu bersifat otoriter. Semua jabatan penting di daerah ini, yang dulu di pegang oleh orang-orang Belanda, diganti oleh orang-orang Jepang. Tidak hanya badan-badan legeslatif saja yang dibekukan, tetapi kedudukan Asisten Residen sebagai pembantu Residen di wilayah inipun ditiadakan. Perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Militer Jepang, yaitu mengganti nama-nama pejabat atau istilah pada jaman Hindia Belanda dengan nama Jepang. Keresidenan diganti dengan nama SYUU dan kepalanya di sebut SYUU-COKAN, Onderafdeeling diganti dengan BUN-SYUU yang dipimpin oleh BUNSYU-CO, District dan Onderistrict diganti dengan nama GUN dan FUKU-GUN yang masing-masing dikepalai oleh GUN-CO dan FUKU GUN-CO. Fuku Fun yang membawahi seperangkat penguasa formal tradisional didalam sistim pemerintahan Marga yang memiliki beberapa buah dusun., masing-masing disebut SON dan KU. Kepala Marga yang lazim disebut Pesirah/ Depati ditukar dengan nama SON-CO, sedang kepala dusun (kerio) diganti dengan nama KU-CO. Pembantu-pembantu Kerio yang dikenal dengan nama Penggawa ditukar dengan nama KUMI-CO atau BARAKU-CO. Lihatlah bagan bawah ini :



Pada jaman revolusi kemerdekaan, terutama pada masa-masa setelah pengakuan kedaulatan 1949, Struktur organisasi pemerintahan di daerah ini tidak mengalami perubahan dan berjalan apa adanya. Bahkan untuk menjaga kelancaran roda pemerintahan di daerah Uluwu, dikeluarkan Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan Nomor: Gb/54/1991 tertanggal 9 Mei 1951,<sup>43)</sup> yang mengandung isi pengakuan atas lembaga yang berbentuk sistim Marga di daerah Uluwu, mengatur cara pemilihan, syarat-syarat kepala Marga yang dapat diangkat, masa jabatan dan pemecatan kepala Marga atau yang setingkat dengan itu dalam Wilayah Propinsi Sumatera Selatan. Di dalam ketetapan itu pengertian “Marga” adalah daerah yang berdasarkan kesatuan hukum serta berhak mengatur atau mengurus rumah tangganya sendiri, yang pada mulanya dibentuk atas dasar hukum asli menurut Inlandche Gameente Buitengewesten (IGOB) Staatblad 1930 Nomor 390 jo. Staatblad Nomor 68.

Sifat kebinekaan masyarakat Indonesia (plural society) merupakan alasan yang cukup kuat bagi pemerintahan Republik Indonesia, untuk meninjau kembali dan melakukan pembaharuan di

<sup>43)</sup> Kementerian Penerangan, Op cit, halaman 120-133

dalam struktur organisasi pemerintahan di daerah-daerah. Dalam hubungan ini pulalah pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan setelah mendengar laporan Panitia Pembentukan Daerah Kabupaten dan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi, dikeluarkanlah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: Gb/3/29/10/22 yang menetapkan, bahwa propinsi Sumatera Selatan, termasuk Bangka-Belitung terbagi atas beberapa daerah Tingkat II (Kabupaten) seperti yang berlaku di pulau Jawa. Dengan diberlakukannya Surat Keputusan itu, maka secara yuridis berakhir sudah sistem pemerintahan Keresidenan yang diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Jabatan Residen selama ini dilimpahkan pada gubernur dengan segala kewenangannya (bevoegheden) sesuai dengan isi yang terkandung di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, sesungguhnya secara historis masyarakat di daerah ini tidak mengenal istilah “kabupaten” seperti yang terdapat di pulau Jawa. Secara tradisional masyarakat Sumatra Selatan hanya mengenal penguasa-penguasa seperti: Demang/ Asisten Demang, Wedana/ Asisten Wedana, Pesirah/ Depati, Pembarap/ kerio, Penghulu/ Khotib, sirah kampung dan Penggawa.

Apa yang kita temukan di daerah Uluhan pada waktu itu, adanya dua macam “penguasa” apabila dilihat dari segi saluran untuk menjadi pegawai. Pertama saluran administrasi pusat yang berdasarkan jalur kekuasaan formal dalam pemerintahan seperti: Bupati atau Wedana/ Camat beserta aparatnya. Penguasa-penguasa ini diangkat dan digaji oleh pemerintah yang lebih menitikberatkan pada syarat-syarat pendidikan formal, kecakapan dan pengalaman kerja, yang dalam hal ini lazim disebut “Penguasa Formal”.<sup>44)</sup> Kedua, saluran lain untuk menjadi penguasa melalui tradisi masyarakat pedusunan berdasarkan pemilihan, yang kemudian mendapatkan legitimasi dari pemerintahan pusat dan digunakan sebagai jalur vertikal untuk memasukkan segala kebijaksanaan pemerintah pusat kedalam masyarakat pedusunan. Penguasa-penguasa yang dimaksud adalah : Pesirah/ Depati beserta Dewan Marganya, Pembarap/ Kerio, Penghulu/

---

<sup>44)</sup> Aparat Pemerintah atau pegawai negeri yang digaji menurut Peraturan Gaji Pegawai Sipil (PGPS) Th.1968 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1967.

Khotib dan para penguasa yang lazim disebut penguasa "formal tradisional" Kedua macam type penguasa ini didalam penampilannya membawakan kekuasaannya masing-masing, yang kadang-kadang menunjukkan persaingan wibawa yang sifatnya kontrofisial. Penguasa formal tradisional sendiri merasa dirinya lebih sah dari pada yang lain, karena eksistensinya mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat pedusunan. Keadaan seperti ini sangat berlarut-larut, dan secara tidak langsung akan mengurangi kewibawaan aparat pemerintah pusat dalam melaksanakan tugasnya di daerah Uluu, dan secara psikologis telah menimbulkan „sikap” curiga masyarakat terhadap kebfaksanaan penguasa formal di daerah ini. Interaksi masyarakat di daerah pada dasarnya sedang mengalami masa transisi, dimana unsur tradisi belum banyak dilepaskan dan sementara unsur-unsur baru yang relatif rasional mulai dianut.

Sebelum berlaku Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 diwilayah Propinsi Sumatera Selatan, sistim pemerintahan di daerah Uluu masih tetap berjalan sebagai mana mestinya, sekalipun sudah ada Surat Keputusan Gubernur yang menetapkan adanya daerah Tingkat II yang disebut Kabupaten. Sistim Marga di daerah ini usianya cukup lama sampai menembus masa pendudukan Jepang, bahkan pada masa pembentukan Negara Republik Indonesia, sistim itu tetap dipergunakan sebagai sumber hukum didalam pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan di tingkat Marga. Pada tahun 1974 terbit Undang-undang Nomor 5/ 1974 mengenai Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini tidak hanya mengatur Pemerintahan daerah melainkan juga keterlibatkan pemerintah pusat di daerah, lembaga pemerintah dan sebagainya. Khusus mengenai "Desa" disinggung dalam bagian V pasal 88 yang berbunyi: Pengaturan tentang pemerintahan di desa ditetapkan dengan Undang-undang. Dalam hubungan ini, maka keluar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, sebagai usaha untuk menyeragamkan pola pemerintahan desa diseluruh Indonesia. Didalam Undang-undang itu diatur pulabentuk kelurahan, yaitu bagian yang bersikap administratif dari wilayah kecamatan yang setingkat dengan desa. Sebagai unit organisasi pemerintahan yang terendah. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sampai



sekarang ini, hanya ada dua Undang-undang yang mengatur hal-hal pokok mengenai pemerintahan desa yaitu:

- a. I.G.O dan I.G.O.B (Inlandsche Gemeente Stbl. Nomor 831906 dan Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten Stbl. Nomor 490/1938).
- b. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa.

Dengan adanya satu Undang-undang berarti adanya desa yang seragam di seluruh wilayah Indonesia, dimana pengertian “desa” menurut isi yang terkandung didalam Undang-undang tersebut pada pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”<sup>45)</sup>

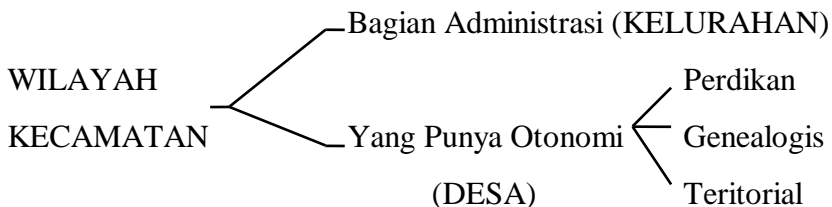
Dari rumusan diatas dapat disimpulkan adanya empat unsur desa yaitu: wilayah, penduduk, pemerintah dan otonomi. Khusus dibidang pemerintah desa yang merupakan pilihan sendiri, oleh, dari, dan untuk penduduk desa sendiri membedakan desa dengan jenis lain bagian dari wilayah kecamatan yang disebut “kelurahan”. Bagian wilayah kecamatan ini mempunyai pemerintah yang terdiri dari pegawai negeri, dimana mereka diangkat dan digaji oleh pemerintah daerah. Berdasarkan kenyataan yang ada di daerah Sumatera Selatan sekarang ini, adanya dua macam bagian dari wilayah kecamatan; pertama, ada yang disebut “desa” yang memiliki empat unsur diatas, dan kedua adalah “kelurahan” yang tidak memiliki otonomi. Bentuk kelurahan ini bersifat administratif, penduduknya bukan merupakan masyarakat hukum dan pemerintahannya tidak dipilih penduduk, melainkan terdiri dari pegawai negeri yang diangkat oleh pemerintah. Dengan kata lain, apa yang disebut kelurahan adalah bagian administratif dari wilayah

---

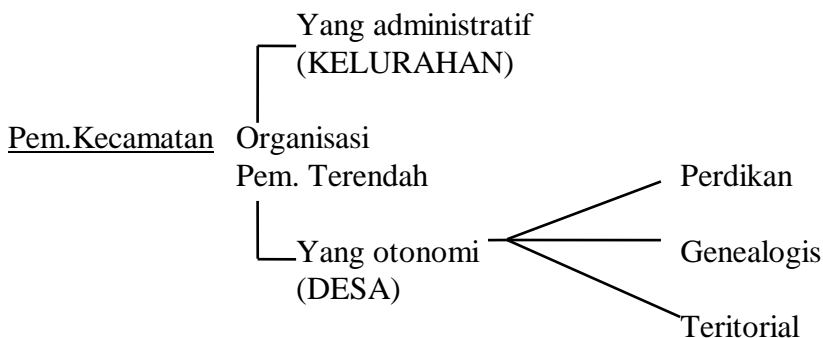
<sup>45)</sup> Marsono, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1980, halaman 8.

kecamatan yang tidak memiliki otonomi dan bukan Desa. Untuk lebih memperjelas wawasan dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

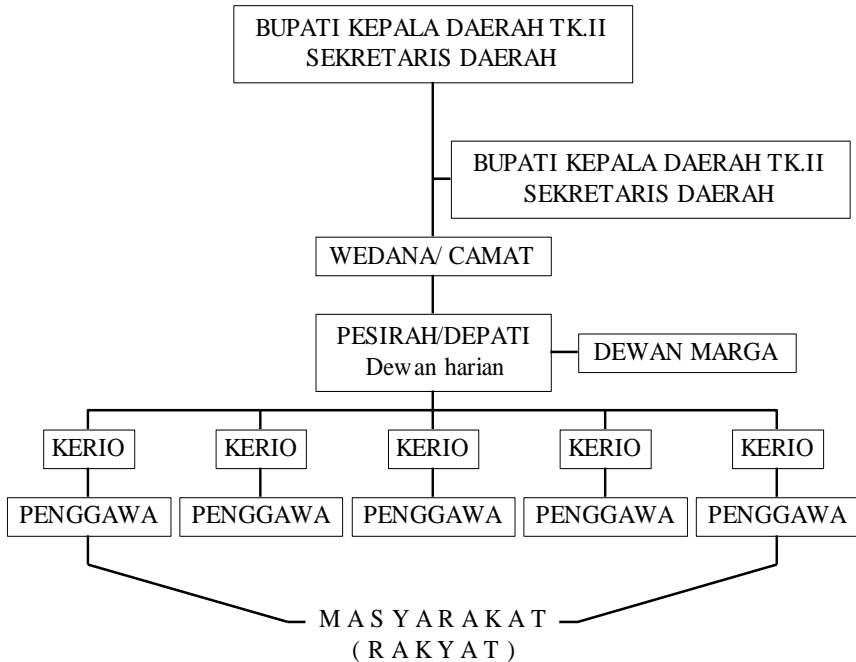
### I. SEGI WILAYAH



### II. SEGI ORGANISASI PEMERINTAHAN



sebagai bahan perbandingan mengenai setruktur pemerintahan sebelum diberlakukan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979, pada halaman berikut ini dapat dilihat bagan yang dibuat Tim Penulis



Pemuka-pemuka masyarakat yang pernah menjadi Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin hingga saat ini adalah sebagai berikut:

- Usman Bakar
- Abdulah Awam
- Haji Syaibani
- Haji Amir Hamyah
- Soelistyono

Dalam melaksanakan program pembangunan desa, lembaga Sosial Desa (LSD) yang sejak tanggal 31 Maret 1980 dengan keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980, LSD dirubah menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang merupakan penunjang pemerintah desa, dan pembangunan disegala bidang, terutama dalam rangka membangun desa dari desa swadaya menjadi desa swakarya yang selanjutnya menjadi desa swansembada. LKMD merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/ kelurahan, merencanakan dan melaksanakan pembangunan di desa. Berdasarkan keputusan Presiden tersebut, maka LKMD bertujuan untuk membantu pemerintah desa/ kelurahan untuk dalam meningkatkan pelayanan

pemerintah dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa atau swakarsa masyarakat pedusunan dalam proses pembanguann. Disamping itu diharapkan pula, Dengan melalui LKMD kemampuan masyarakat ditingkatkan untuk memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan serta hambatan dalam pembinaan wilayah. Secara Organisatoris LKMD terdiri dari: Kepala Desa/ Lurah sebagai ketua umum, pemuka-pemuka masyarakat setempat sebagai ketua I dan ketua II bersama dengan sekertaris dan bendahara serta ketua-ketua Saksi:

1. Keamanan ketentaman dan ketertiban.
2. Pendidikan dan kebudayaan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
3. Penerangan.
4. Perekonomian.
5. Pembangunan prasarana dan lingkungan hidup.
6. Agama
7. Pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK)
8. Kesehatan, kependudukan dan Keluarga Berencana (KB)
9. Pemuda, olahraga dan kesenian.
10. Kesejahteraan sosial.

Mengancah dan merencanakan proyek-proyek apa yang diprioritaskan untuk dibangun. Hasil musyawarah LKMD di usulkan pada Camat dan kemudian diteruskan ke Gubernur oleh pemerintah Daerah Tingkat II (Bupati/ Walikota). Akhirnya oleh pemerintah Tingkat I di teruskan di pusat dalam bentuk DUP yang kemudian dikembalikan dalam bentuk DIP oleh Mentri Dalam Negeri atau yang mewakilinya kepada Kepala Daerah Tingkat I (Gubernur).

Sebelum kita membahas mengenai susunan pemerintah di daerah Uluan pada umumnya dan daerah Musi Banyuasin khususnya, terlebih dahulu harus dibedakan antara istilah “Pemerintah” dan “Pemerintahan”. Pemerintah, adalah perangkat (organ) negara yang menjalankan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, bertitik tolak dari pengertian ini, maka pemerintah desa dapat diartikan sebagai kegiatan (aktivitas) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintah yang terendah langsung di bawah

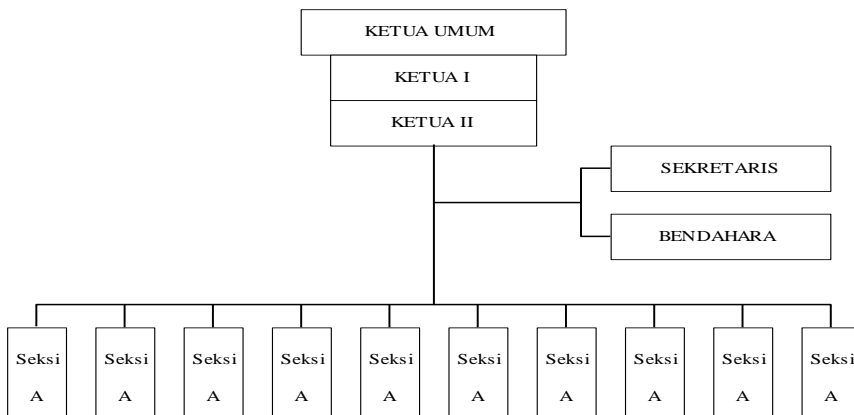
Camat, yaitu desa. Pemerintah Desa itu sendiri terdiri dari Kepala Desa (Kades) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Sebagai alat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan sebagai alat desa, Kepala Desa (Kades) bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Mengenai urusan rumah tangga, kepala Desa berhubungan dengan pemerintah Daerah Tingkat II seperti: pengesahan anggaran penerimaan, pengesahan pengeluaran keuangan desa, pengesahan jumlah anggota pamong, dan sebagainya. Seperti apa yang telah dikatakan diatas, Lembaga Musyawarah Desa (LMD) merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga bentuk dan susunan desa mempunyai corak nasional yang menjamin hidupnya demokrasi Pancasila. Di dalam melaksanakan tugasnya pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari : Sekretaris Desa dan kepala-kepala dusun. Unsur-unsur pembantu ini disebut “STAF”, karena tugasnya hanyalah membantu pimpinan. Selain itu pimpinan memerlukan perangkat lain sebagai unsur pelaksana, sehingga dalam organisasi pemerintah desa terdapat tiga unsur pokok yaitu : Pimpinan, Pembantu/ Staf dan Pelaksana.

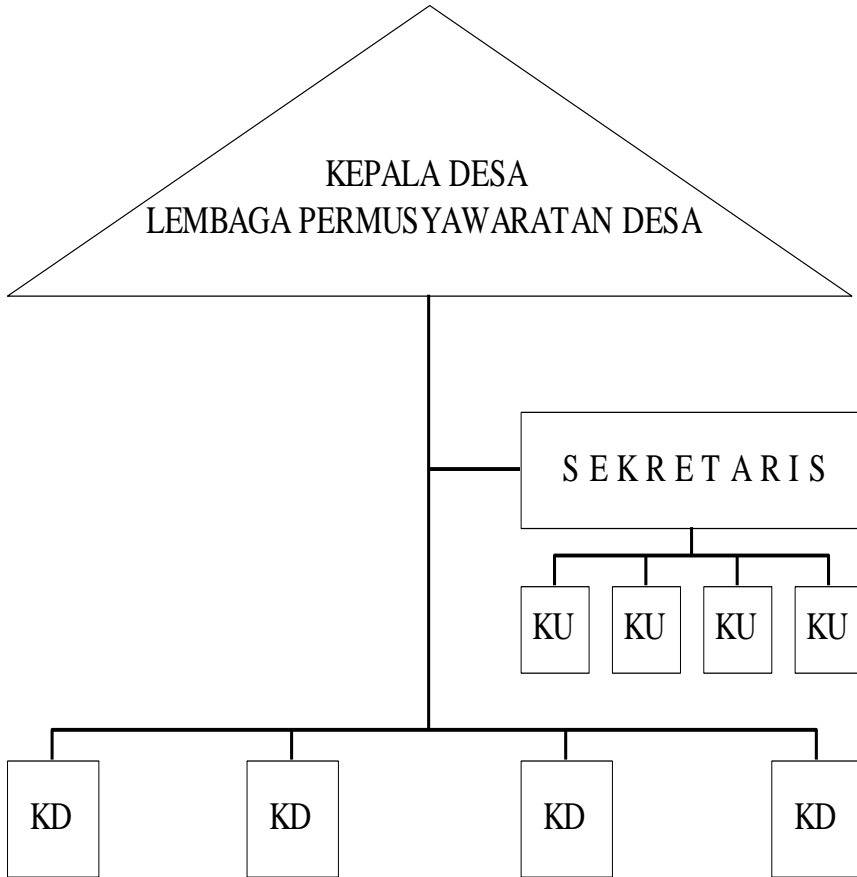
Pengembangan suatu desa lebih banyak terletak pada unsur pimpinan, karena yang menjadi pimpinan adalah Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa (KADES) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Pengembangan pada unsur pembantu/ staf ialah dengan mengangkat seorang Sekretaris dan Kepala-kepala Urusan (KU). Sekretaris Desa merupakan perangkat desa yang berfungsi sebagai pembantu Kepala Desa, khususnya dalam melaksanakan tugas administrasi atau tata usaha. Sekretaris Desa terdiri dari Kepala-kepala Urusan yang dipimpin oleh Sekretaris Desa. Apabila jabatan Sekretaris Desa mengajukan calon kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat. Dengan kata lain, Sekretaris Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah Tingkat II, sedangkan Kepala-kepala Urusan hanya cukup diangkat/ diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Apabila Kepala Desa berhalangan, Sekretaris Desa dapat menjalankan tugas atau wewenang sehari-hari Kepala Desa. Berikut ini tertera bagan struktur organisasi

LKMD, organisasi pemerintah Desa dan pemerintahan Kelurahan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979.

**SUSUNAN ORGANISASI LKMD**



STRUKTUR ORGANISASI  
PEMERINTAHAN DESA



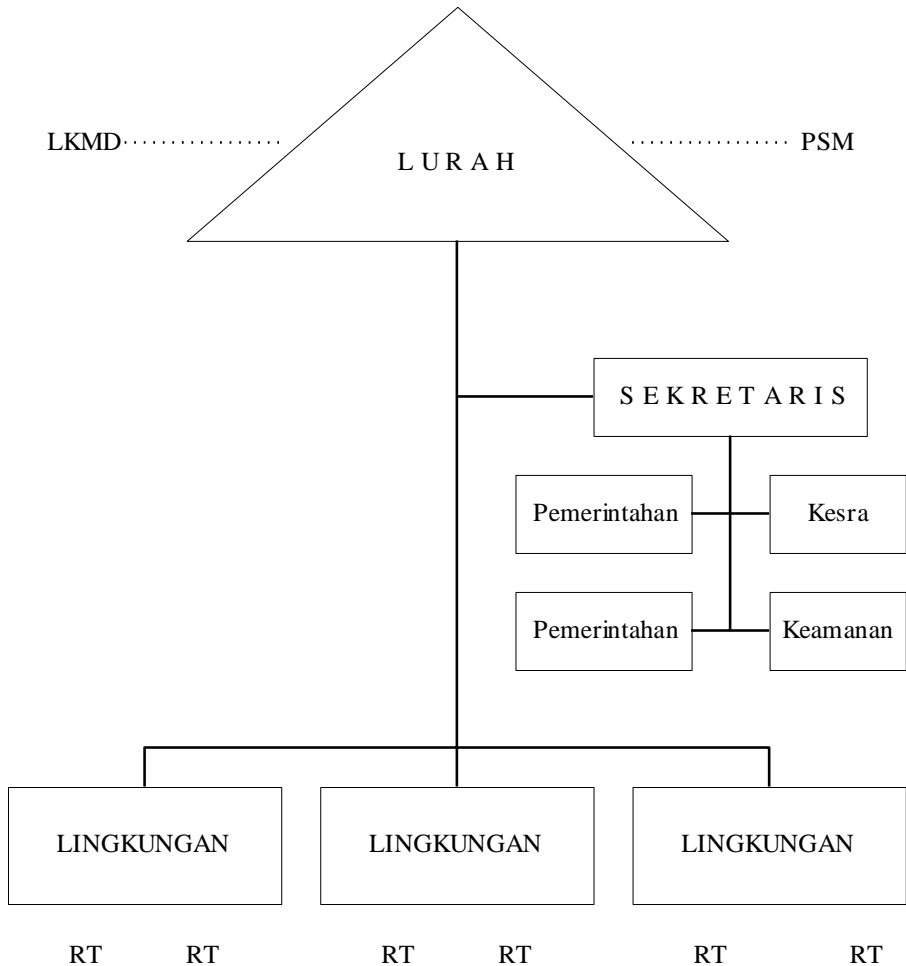
Keterangan :

KU - Kepala Urusan

KD - Kepala Dusun

Baik KU maupun KD disebut STAF

STRUKTUR ORGANISASI  
PEMERINTAHAN KELURAHAN



Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 memberikan perumusan “K elurahan” sebagai berikut : Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang tidak



menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Berdasarkan perumusan tersebut, dapat disusun unsur untuk terbentuknya Kelurahan sebagai berikut :

- 1). Wilayah
- 2). Penduduk
- 3). Pemerintah

Wilayah kelurahan merupakan bagian dari wilayah administratif kecamatan. Kecamatan yang dimaksudkan harus terletak di ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten/ kotamadya dan kota administratif yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Unsur wilayah ini sama dengan unsur wilayah pada desa tetapi penduduknya tidak berbentuk kesatuan masyarakat yang di dalamnya termasuk kesatuan masyarakat hukum. Berbeda halnya dengan kesatuan masyarakat hukum yang kita jumpai di desa.

Mengenai penduduk kelurahan berbeda dengan penduduk desa, karena mereka berasal dari beraneka ragam suku bangsa atau kesatuan masyarakat dengan adat yang berbeda-beda.

Pemerintah kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan dan perangkat kelurahan. Tidak ada Lembaga Musyawarah Desa yang menjadi wadah atau penyalur aspirasi masyarakat. Pemerintah Kelurahan bukanlah hasil pilihan penduduk, tetapi mereka diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dari Pegawai Negeri. Yang merupakan penyelenggara urusan pemerintahan umum dan urusan daerah tingkat II dan tidak mempunyai rumah tangga sendiri. Anggaran kelurahan adalah tanggung jawab daerah tingkat II setempat.

Secata formal Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, baru dilaksanakan di daerah Propinsi Sumatera Selatan bulan April 1984. Mengingat pelaksanaan Undang-undang ini sangat baru sehingga dalam pelaksanaannya, terutama yang menyangkut seksi-seksi, belum lagi menunjukkan suatu mekanisme yang diharapkan. Sebagai rekayasa sosial untuk stabilitas politik yang mendukung pembangunan jelas bahwa produk hukum (UU.No.5 Th.79) ini menunjukkan suatu kemajuan desa ke poros sentralisasi kebijaksanaan sektoral dan regional. Pola ketergantungan desa yang ditempatkan sebagai unit pemerintahan terbawah di bawah Camat semakin besar kelihatannya.

### **III. PERLAWANAN RAKYAT DALAM ABAD KE-20**

Perlawanan berdari kata “lawan” yang berarti musuh atau menentang. Jadi kata perlawanan itu sendiri berarti “perbuatan melawan” atau “perbuatan menentang”<sup>1)</sup> atau perbuatan memusuhi. Adapun yang dimaksud dengan perlawanan masyarakat dalam abad ke-20 dalam tulisan ini, ialah perbuatan melawan/menentang dari masyarakat Keresidenan Palembang, khususnya masyarakat Onderafdeeling Moesi Ilir dan Onderafdeeling Moesi Banyoeasin (Musi Banyuasin sekarang) terhadap pemerintah kolonial (Belanda/Jepang) pada masa sebelum masa revolusi kemerdekaan. Perbuatan melawan atau menentang dari masyarakat di daerah ini diwujudkan dalam bentuk perlawanan fisik (kekerasan/mengangkat senjata) maupun nonfisik (tanpa kekerasan/membanggang), merupakan manifestasi protes terhadap kesewenag-wenangan pemerintahan kolonial di daerah ini. Motif perlawanan-perlawanan itu adalah rasa tidak senang/tidak puas terhadap peraturan-peraturan kolonial (dengan kecurangan-kecurangan yang ditimbulkan) seperti bermacam-macam peraturan pajak, kerja rodi, pelanggaran hak dan tradisi. Pahlawan-pahlawan rakyat pada abad ke-20 di daerah ini boleh dianggap sebagai lanjutan atau masih berkaitan dengan perlawanan-perlawanan abad sebelumnya (abad ke-9) yang semuanya diilhami oleh antara lain ajaran islam dan semangat jihad.

Masuk dan berkembangnya serikat islam dan organisasi-organisasi politik lainnya (parindra) di daerah ini, menambah semangat perlawanan masyarakat terhadap segala macam bentuk penindasan, terutama melawan kolonialisme dan imperialisme. Dalam menanamkan pengaruhnya di daerah ini serikat Islam tampaknya lebih berhasil dibandingkan dengan organisasi lainnya, mengingat sifatnya yang kerakyatan. Disamping itu serikat Islam merupakan organisasi politik yang mula-mula sekali masuk dan berkembang di daerah ini sehingga peranan Serikat Islam adalah Serikat Islam dalam setiap perlawanan rakyat terhadap kolonialisme atau imperialisme lebih menonjol daripada organisasi sosial politik yang lain.

#### **A. Perlawanan terhadap Kolonial Belanda :**

---

<sup>1)</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, halaman 571-572.

## 1. Latar belakang politik

Setelah pemerintah Kolonial Belanda memperoleh kedudukan atas daerah bekas kekuasaan Kesultanan Palembang pada awal abad ke-19, maka kemudian dalam bidang pemerintahan diatas tingkat Marga, dimana sistim kesultanan dan jabatan kepala daerah yang dulunya dipegang oleh para Pangeran (anak Sultan) di tiadakan. Beratus-ratus Pangeran atau bangsawan yang merupakan tulang punggung pemerintahan Kesultanan, karena dianggap berbahaya, disingkirkan atau dibuang ketempat-tempat diluar wilayah Kesultanan. Tindakan pemerintah kolonial ini berarti menghancurkan konsep tradisional mengenai "Setate and King Ship" yang selama ini dipegang oleh rakyat didaerah ini. Belanda sendiri tidak dapat mengganti kedudukan dan peranan sultan sebagai pelindung dan pemelihara tradisi dan agama. Sebagai pejabat kolonial tertinggi diwilayah ini, diangkatlah dua orang Residen Belanda, yaitu seorang untuk Keresidenan Palembang, sedangkan yang satunya untuk Keresidenan Bangka-Belitung.<sup>2)</sup>

Pada struktur pemerintahan, bahwa Keresidenan Palembang terbagi atas empat Afdeeling. Tetapi kemudian diperkecil menjadi tiga Afdeeling yaitu :

- a. Daerah palembang dan tanah datar serta sekitarnya dengan ibukota palembang.
- b. Daerah pegunungan Palembang dengan ibukota Lahat.
- c. Daerah Ogan dan Komering Ulu dengan ibukota Baturaja.<sup>3)</sup>

Afdeeling Palembang dan tanah datar meliputi Onderafdeeling. Palembang kota, Onderafdeeling Talang Betutu (Banyuasin), Onderafdeeling Musi Iilir,<sup>4)</sup> Iilir, Onderafdeeling Ogan Iilir dan

---

<sup>2)</sup> Bangka-Belitung pada jaman Kesultanan Palembang adalah bagian wilayah kesultanan, dan oleh belanda dijadikan keresidenan tersendiri sebagai realisasi politik pintu terbuka, karena daerah ini menghasilkan biji timah.

<sup>3)</sup> Tim pelaksana kegiatan proyek IDKN,Sumsel ditinjau dari sudut geografi-sejarah dan kebudayaan, dirjen kebudayaan RI, Jakarta, 1972,halaman 134.

<sup>4)</sup> Mula-mula (pada puluhan I/ II abad ke-20 Onderafdeeling Musi Iilir bagian dari Afdeeling pegunungan Palembang. Tetapi kemudian setelah PD.I daerah tersebut dimasukkan ke Afdeeling Palembang dan Tanah Datar bahkan

Onderafdeeling Rwas. Pada jaman Pemerintah Belanda, Kabupaten Musi Banyuasin sekarang ini, terdiri dari dua Onderafdeeling yaitu : Onderafdeeling Musi Ilir dengan ibukotanya Sekayu dan Onderafdeeling Banyuasin dengan ibukota Talang Betutu. Dengan kata lain, dikota Sekayu maupun Talang Betutu masing-masing berkedudukan seorang Kontroleur sebagai kepala pemerintahan dari kedua daerah Onderafdeeling tersebut.

Sistim pemerintahan kolonial belanda di daerah Keresidenan Palembang sam pai tahun 1905 diselenggarakan secara “Sentralistis” berdasarkan pasal 71 Regeeringsreglement (RR)<sup>5)</sup> meskipun dinegara belanda sendiri bersifat desentralistis. Bertolak dari sudut pandangan ini, berarti tidak ada partisipasi dari perangkat lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan didaerah ini. Segala sesuatu berasal dan diatur dari pusat serta diselenggarakan oleh pemerintah pada tingkat pusat, betapapun sederhananya atau tidak beratinya urusan tersebut. Badan atau Lembaga untuk mengurus sendiri tidak ada, bahkan tidak dapat dibayangkan eksistensinya,<sup>6)</sup> kecuali marga sebagai organisasi pemerintahan yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia.

Kemenangan kaum liberal di negeri Belanda dalam Staten General (Parlemen), telah menstimulir politik Belanda di tanah air kita ini. Dengan masuknya lapisan sosial baru (kaum borduis) sebagai anggota sermpurna dalam negara jajahan ini, berarti terpadunya kekuasaan politik dan ekonomi, sehingga setiap ada perubahan politik di Hindia Belanda, berasal dari saran kaum penguasa (golongan Borduis) pimpinan tentara kepada pejabat di negara Belanda, yang sebagian besar dari mereka itu kurang memiliki pengetahuan tentang Hindia Belanda. Pemberian otonomi Hindia Belanda, terutama statusnya sebagai badan hukum dengan anggaran belanja yang dipisahkan dari negeri Belanda, demikian pula adanya perubahan sistim

---

kemudian menjelma menjadi onderafdeeling Musi Ilir an koeboestrecken : lihat Memorie Van overgave 1914/ 1915.

<sup>5)</sup> Bayu Suryaningrat, Sejarah Pem. Di Indonesia Babak Hindia Belanda dan Jepang, Dewaruci press, Jakarta, 1981, halaman 11.

<sup>6)</sup> Ibid. loc cit.

pemerintahan dari sistim sentralisasi ke desentralisasi, yang diundangkan pada tahun 1903 (Ind. Staatblad 1903 Nomor 329 “Decentralisatie”), telah membuka kemungkinan-kemungkinan untuk mewujudkan dewan-dewan lokal (dalam keresidenan dan bagian-bagiannya) serta memberikan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (1906)<sup>7)</sup>

Undang-undang Desentralisasi tersebut berlaku juga di daerah keresidenan Palembang. Pada tanggal 1 April 1906, kota Palembang sebagai ibukota keresidenan dijadikan Gemeente yang ditegaskan dalam Staatblad 1906 Nomor 126.<sup>8)</sup> Dengan demikian kota Palembang sejak tahun 1906 menjadi Gemeente-stad yang dipimpin oleh seorang walikota (Burgemeester) dan memiliki Dewan Lokal dengan diberi hak otonomi terbatas. Dalam hal ini, Gemeente hanya berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sedangkan polisi dan pengadilan (Catatan Sipil) berada di bawah kekuasaan residen. Yabg dimaksud dengan Dewan Lokal bukanlah Dewan Perwakilan Rakyat yang sebenarnya, karena anggota-anggotanya hanya terdiri dari beberapa orang pejabat pemerintah,<sup>9)</sup> dan Burgemeester Palembang diangkat secara terpilih baru mulai tahun 1919 (dijabat oleh orang Belanda).

Politik desentralisasi ini mendapat dukungan dari orang-orang Belanda yang berada di daerah-daerah, karena mereka ingin ikut campur dalam pemerintahan di daerah-daerah keresidenan.<sup>10)</sup> Sebagai akibat politik Pintu Terbuka (Open Door Policy) jumlah orang-orang Belanda di daerah keresidenan Palembang semakin banyak setelah meluasnya penanaman modal swasta asing di daerah seberang, terutama di dalam sektor pertambangan dan perkebunan. Boleh dikatakan bahwa sumber keuangan pemerintah kolonial di daerah ini, berasal dari pengusaha-pengusaha asing (onderneming-onderneming),

---

<sup>7)</sup> G.J.Wolhod, Penghantar ilmu hukum Tata negara Republik Indonesia, Timun ma NV., Makassar, 1955,halaman 52-53.

<sup>8)</sup> Humas Kodya Palembang, Buku Penemuan Hari Jadi Kota Palembang, Pemma Kodya, Palembang, 1973, halaman 13.

<sup>9)</sup> Bayu Suryaningrat, Op cit, halaman 15.

<sup>10)</sup> H.J. de Graaf, Geshiedenis van Indonesia, Uit geverij W van Hoeve-Gravenhage, Bandung, 1949, halaman 352-459.

sehingga secara tidak langsung kepala-kepala onderneming itulah yang berkuasa di seluruh wilayah ini. Onderneming-onderneming itu seolah-olah menjadi raja tanpa mahkota di daerah keresidenan pada umumnya,<sup>11)</sup> dan demikian juga halnya di wilayah keresidenan Palembang.<sup>12)</sup>

Kemudian setelah tahun 1908, desentralisasi di keresidenan Palembang diperluas dengan mewujudkan beberapa Gemeente pada beberapa onderafdeeling seperti : onderafdeeling Ogan Ilir, Komering Ilir dan lain-lain.<sup>13)</sup> Selanjutnya politik desentralisasi di daerah ini diperluas lagi dengan memperkuat hak otonomi pada Marga-marga di daerah Uluu oleh pemerintah kolonial Belanda, yang pada dasarnya bukanlah hal yang baru bagi Marga-marga tersebut. Berdasarkan Geente Ordonantie untuk keresidenan Palembang (Staatblad 1919 Nomor 814),<sup>14)</sup> maka Marga-marga secara keseluruhan dijadikan Gemeente, yang merupakan daerah otonomi tingkat rendah dan disebut "Inlandsche Gemeente", atau dengan kata lain hak otonomi yang ada pada Marga-marga selama ini diakui secara resmi oleh pemerintah kolonial Belanda. Status Marga-marga itu diperkuat lagi dengan Staatblad 1922 Nomor 564 yang diatur dalam IGOB dengan Staatblad Nomor 490 tahun 1938. Dengan demikian Marga-marga dalam wilayah Onderafdeeling Musi Ilir en Koeboestrecken dan Onderafdeeling Banyuasin, secara resmi juga diakui hak otonominya oleh pemerintah kolonial Belanda dan dijadikan Gemeente-gemeente yang selanjutnya secara bertahap statusnya diperkuat.

Motivasi daripada pelaksanaan politik desentralisasi di wilayah ini. Adalah untuk menghapuskan sisa-sisa masyarakat tradisional, yang dianggap sebagai penghalang perkembangan administrasi modern. Sedangkan otonomi yang diciptakan di daerah ini tidak didasarkan pada prinsip teritorial, melainkan pada prinsip etnisitas (kesukuan),

---

<sup>11)</sup> C.S.T. Kansil & Julianto, Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia, Erlangga, Jakarta, halaman 12.

<sup>12)</sup> Di daerah Muba terdapat onderneming : Melania, Musi Landas, Musi Pait dan Tebenan. Sekarang menjadi PT.Perkebunan X.

<sup>13)</sup> G.J.Wonlhoof, Op cit, halaman 220.

<sup>14)</sup> Simpoeelan dari Peratoeran-peratoeran, Industrielee Mij, Palembang (tanpa tahun).

dimana Marga-marga dibiarkan hidup terpisah satu sama lain menurut selera sukunya masing-masing yang telah diperkecil kekuasaan dan pengaruhnya. Bagi kepala Marga yang setia dan lama mengabdikan kepada pemerintah kolonial, diberi gelar “Pangeran” yang sebenarnya bukan keturunan bangsawan. Mungkin pemberian gelar itu untuk menandingi Pangeran-pangeran berdasarkan kelahiran atau bekas pengikut setia Sultan Mahmud Badharuddin II yang lari ke daerah Uluu. Tetapi nyatanya di antara mereka itu tidak dapat diasut atau diadu domba, karena faktor agama dan rasa solidaritas keagamaan mereka lebih kuat. Campur tangan pemerintah kolonial Belanda dalam urusan pemerintahan Marga-marga, menimbulkan rasa tidak puas. Kebencian di kalangan masyarakat pedusunan kepada pemerintah kolonial punya alasan kuat, apabila di lihat pada pengalaman mereka masa lampau yang telah tertanam sejak jaman Sultan Badharudin II. Kondisi dan situasi di daerah Uluu itu sering mengganggu stabilitas politik di daerah ini, lebih-lebih setelah kehadiran Serikat Islam sebagai organisasi massa yang pertama dalam sejarah Indonesia modern. Gerakan-gerakan rakyat di daerah Uluu untuk menentang pemerintah kolonial pada waktu itu, merupakan gerakan “pure-nationalism” yang timbul dari rasa “kebangsaan” (kedaerahan) yang murni dalam membela hak mereka untuk hidup menurut ajaran agama dan tradisi.

## **2. Latar Belakang Ekonomi :**

Dalam sistem kesultanan Palembang, Sultan memang menganggap dirinya sebagai satu-satunya pemilik tanah,<sup>15)</sup> dan memberikannya kepada Pangeran/ Bangsawan hanya sebagai pinjaman dan bukan sebagai hak milik. Sebagai imbalan, para peminjam tanah tersebut diwajibkan membantu Sultan baik waktu perang (prajurit dengan prahu-prahu yang dipersenjatai) maupun diwaktu damai (balok-balok kayu atau barang-barang yang dibutuhkan oleh Sultan). Bagi golongan rakyat yang tinggal dipusat kerajaan hanya diwajibkan mengabdikan atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ringan saja, sedangkan mereka yang tinggal di daerah Uluu harus membayar “pajak” (upeti) kepada Sultan.

---

<sup>15)</sup> J.I. Van Sevenhoven, Lukisan tentang Ibukota Palembang, Bheataru, Jakarta, 1971 halaman 22.

Di daerah Uluan pada umumnya, onderatdeeling Musi Ilir en Banyuasin khususnya, masyarakat pedusunan (mata-gawe) bebas mengambil apasaja yang terdapat di dalam hutan atau di lebak-lebak/sungai seperti : kayu, rotan, menjangan, ikan dan lain-lain. Tetapi telah menjadi kebiasaan yang turun temurun bagi masyarakat, untuk memberikan sebagian dari hasilnya kepada penguasa tradisional timbal balik antara rakyat dengan penguasa.<sup>16)</sup> Adapun para pesirah/ Depati yang merupakan wakil Sultan di daerah Uluan, hanyalah diwajibkan membayar upeti (milir-seba) kepada Sultan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu tiga tahun sekali<sup>17)</sup> dengan membawa hasil daerahnya masing-masing, atau dalam keadaan darurat/ perang diharuskan membantu Sultan. Dengan demikian tugas kewajiban yang dibebankan pada rakyat dipusat kesultanan dibebaskan dari membayar pajak. Tetapi setelah wilayah ini ketangan pemerintah Kolonial Belanda, keadaan menjadi berubah. Menurut prinsip kolonial, suatu daerah yang diperoleh dari hasil petang, para penggarap tahah/ rakyat dianggap sebagai penyewa tanah milik pemerintah. Untuk menyewakan tanah itu mereka diwajibkan membayar sewa tanah (Landrent),<sup>18)</sup> yang didaeah ini lebih dikenal dengan “pajak kepala” yang sebelumnya tak pernah dikenal oleh penduduk.

Pajak kepala yang merupakan pajak rutin sangat memberatkan masyarakat pedusunan yang sebagian besar hidup bertani. Tidak hanya pajak kepala itu saja yang harus dibayar, tapi juga harus membayar bermacam-macam pajak lainnya kepada pemerintah kolonial melalui pegawai-pegawai pribumi (Mantri Pajak yang bekerja sama dengan Demang, Asisten Demang dan Mantri Polisi yang harus dibayar penguasa formal tradisional (Pasirah, Pembarap, Kerio) yang tidak

---

<sup>16)</sup> Pemberian sebagian hasil kepada penguasa tradisional itu mula-mula bersifat sukarela dan sudah menjadi tradisi dalam sistem patrimonial. Tetapi kemudian oleh Pemerintah Kolonial tradisi ini dirasionalisasikan menjadi pajak yang harus dibayar oleh masyarakat pedusunan dengan sanksi.

<sup>17)</sup> P de Roo De Faille, Dari Zaman Kesultanan Palembang, Bhratara, Jakarta, halaman 16.

<sup>18)</sup> Sartono Kartodirdjo, et.al., Sejarah Nasional Indonesia IV, Balai Pustak, Jakarta, 1977, halaman 66-67.



mendapat gaji dari pemerintah kolonial Belanda.<sup>19)</sup> Pelaksanaan sistim pajak yang diatur oleh pemerintah Kolonial menurut cara barat itu, telah membawa akibat yang buruk bagi masyarakat di daerah ini. Masyarakat mulau dihadapkan pada kecurangan-kecurangan dan segala macam bentuk penindasan dan pemerasan dari para ambtener pribumi yang akan memperkaya diri. Oleh karena itu maka mengharapkan kedatangan Ratu Adil atau Imam Mahdi, atau pemimpin maupun organisasi yang dapat membela kepentingan mereka. Tumpuan harapan ini ditampung oleh golongan agama, yang memang sejak masuk dan berkembangnya agama Islam diwilayah ini memang peranan penting di masyarakat petani di daerah Ulu.

Kecurangan-kecurangan dan penindasan semakin dirasakan oleh masyarakat pedusunan, khususnya yang berdomisili di Onderafdeeling Musi Ilir/ Banyuasin, setelah sistim pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi. Sistim desentralisasi tersebut secara teoritis mungkin mempunyai tujuan yang baik, namun dalam prakteknya berakibat sebaliknya bagi rakyat secara keseluruhan. Untuk mendapatkan uang guna membiayai kebutuhan daerahnya masing-masing (pendidikan, kesehatan, perbaikan jalan, dan lain-lain). Pemerintah Marga telah mengeluarkan bermacam-macam peraturan seperti : peraturan cacar, pancung alas, peraturan tebang kayu, peraturan tebus surat kawin, sutat cerai/ rujuk dan lain-lain,<sup>20)</sup> yang kesemuanya ini dikeluarkan atas persetujuan pemerintah kolonial. Semua peraturan itu disertai dengan sanksi yang sangat berat bagi rakyat, yaitu bagi siapa saja yang melanggar peraturan itu, akan dikenakan hukuman (denda atau hukuman penjara/ kurungan).

Dipraktekkannya semacam "cultur procent" di daerah ini yang merupakan sumber kecurangan bagi penguasa formal tradisional, berarti itulah sebagai sumber malapetaka bagi rakyat seluruhnya. Sebagai contoh : dari pajak kayu ditetapkan 70 % untuk kas Marga, 30 % untuk Pesirah/ Kerio dan lain-lain (yang ikut memeriksa kayu

---

<sup>19)</sup> Soeloeh Marga Oentoe Keresidenan Palembang, nomor 18 Tahun II, 15 Desember 1932, Palembang, halaman 278.

<sup>20)</sup> Soeloeh Marga Oentoe Keresidenan Palembang, No. 9 Th. II, 15 Mei 1932, halaman 136-139.

tersebut). Hasil penjualan kayu yang dirampas karena si pengambil kayu tidak mematuhi peraturan yang berlaku, 50 % disetorkan ke kas Marga dan sisanya dibagi-bagikan pada penguasa formal tradisional setempat, <sup>21)</sup> dengan peraturan-peraturan seperti tersebut diatas, dapat dibayangkan kecurangan-kecurangan yang ditimbulkan dan dapat pula diperkirakan akibat-akibat apa yang menimpa masyarakat pedusunan. Ini hanyalah salah satu contoh dari hal-hal yang telah menimbulkan penderitaan rakyat. Mungkin masih banyak lagi hal-hal yang membawa akibat negatif bagi masyarakat di daerah ini.

Biasanya semakin potensial suatu daerah bagi perekonomian dan keuangan pemerintah kolonial, berarti semakin banyak campur tangan Belanda terhadap daerah itu, dan berarti semakin banyak pula penindasan/ penderitaan rakyat yang ditimbulkan. Ketika diketahui bahwa di daerah-daerah pedalaman banyak mengandung mineral seperti minyak bumi, maka mengalir modal-modal swasta asing ke daerah ini. Di daerah Onderafdeeling Musi Ilir & Banyuasin yang banyak mengandung minyak dan gas bumi mulai di buka usaha pertambangan di Sungai Lilin/ Keluang, Mangun Jaya, Talang Akas dan Pendopo <sup>22)</sup> oleh modal-modal swasta asing sebagai akibat politik pintu terbuka. Untuk menjangkau lokasi-lokasi perminyakan, maka dibukalah sarana komunikasi (jalan/ jembatan) yang pada umumnya dibebankan kepada rakyat setempat dalam bentuk "gaw e-raja" (heren diensten). Selain itu daerah ini sangat cocok untuk ditanami dengan tanaman-tanaman dagang yang mempunyai prospek yang cukup baik di pasaran Internasional (karet, kelapa sawit, kopra/ kelapa), maka mengalir pulalah modal-modal Eropa ke daerah ini. Sehubungan dengan ini mulai abad ke-20 dibukalah Onderneming-Onderneming seperti : perkebunan karet di Melania, Musi Pait, Musi Landas, Tebenan yang pada umumnya dikuasai oleh orang Belgia, perkebunan kelapa sawit di Betung dan kopra di pulau Kemarau (Kembara).

Meningkatnya permintaan akan karet di pasaran dunia disamping memberikan nilai tambah masyarakat di pedusunan (pada tahun 1929-an telah di buka Perkebunan-perkebunan Karet Rakyat)

---

<sup>21)</sup> Ibit, Luc cit.

<sup>22)</sup> Tim Pelaksana Kegiatan Proyek IDKN, Op cit, halaman 33.

sekaligus juga merupakan sumber kecurangan di kalangan penguasa formal tradisional. Para Pesirah, Pembarap, Kerio, dan lain-lain. Memanfaatkan situasi pada waktu itu untuk memperkaya pribadi diri mereka.

Oleh karena itu para penguasa formal tradisional pada umumnya kaya raya dan memiliki kebun karet yang cukup luas<sup>23)</sup> Tindakan yang bersifat pemaksaan (gawe raja) telah menimbulkan kebencian dan dendam di hati rakyat pada umumnya, yang acap kali menimbulkan semacam “protes” atau membangkang dengan menghindarkan dari tugas gawe raja.

### 3. Latar Belakang Sosial :

Pada mulanya perbedaan-perbedaan antara golongan penguasa (formal tradisional) dengan golongan rakyat tidak begitu tajam atau menyolok di daerah ini. Tetapi setelah daerah ini mendapat pengaruh dari luar, pengaruh itu terutama dari Jawa masuk ke dalam kesultanan, mulai tampak adanya perubahan dalam struktur masyarakat ; yaitu raja/sultan berada pada puncak piramida sosial dengan penguasa tertinggi, kemudian golongan rakyat jelata yang terdiri dari orang-orang Miji, Senen dan budak belian atau orang yang tergadai oleh hutang.<sup>24)</sup> sebaliknya masyarakat pedusunan yang sebagian besar hidup bercocok tanam, susunannya sangat sederhana yaitu : golongan penguasa formal tradisional dan golongan rakyat (mata-gawe). Secara historis masyarakat tradisional di daerah ini terdiri dari suku kelompok yang dikepalai oleh Poyang-poyang (empu hyang). Yang oleh sultan dianugrahi gelar “pangeran” atau Depati (Adipati)<sup>25)</sup> yang dapat disamakan dengan golongan Elit Desa di Jawa.<sup>26)</sup> Menurut tradisi yang

---

<sup>23)</sup> Untuk menggalakkan rakyat menanam karet, pemerintah kolonial memberikan insentif kepada rakyat berupa “kupon” berharga semacam cek giro yang dapat ditukarkan dengan uang/ di jual belikan, dengan dalih untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Jam an ini lazim disebut “jam an kupon”.

<sup>24)</sup> J.I.Sevenhoven, Op cit, halaman 25-28.

<sup>25)</sup> Soeloe Marga untuk Keresidenan Palembang, Nomor 9 Maret 1932 Tahun II, Margakassen Palembang, halaman 128-135.

<sup>26)</sup> Soeyatno, “Feodalisme dan Revolusi di Surakarta 1945-1950” dalam PRISMA Nomor 7 Agustus 1978 Tahun VII, Jakarta, halaman 50.

berlaku, golongan penguasa tersebut dipilih oleh mata-gawe yang berhak memilih, walaupun dalam prakteknya pemilihan itu lebih banyak ditentukan oleh faktor status sosial dan kharisma.

Setelah timbul sistim kesultanan Palembang, daerah-daerah Uluu secara keseluruhan diatur oleh hukum adat berdasarkan Undang-undang Simboertjaja yang dikodifikasikan oleh Rata Sinuhun. Kepala-kepalaMarga dan Dusun yang dibantu oleh jurai-jurai tuo merupakan kelas penguasa tradisional, yang kemudian diangkat dan disahkan oleh Sultan sebagai wakilnya di daerah Uluu. Untuk memperkuat kedudukan mereka sebagai penguasa setempat, Sultan menganugrahi semacam regalia dan tanda kebesaran lainnya sebagai simbol kekuasaan.<sup>27)</sup> Hubungan antara penguasa dengan rakyat jelata pada waktu itu tersimpul dalam ungkapan tradisional di dalam masyarakat melayu : “Raja Adil disembah, Raja lalim disaggah”. Pada jaman Hindia Belanda, struktur sosial seperti diuraikan diatas tidak mengalami perubahan. Kedudukan sultan dalam pemerintahan digantikan oleh Residen Belanda yang dibantu oleh beberapa orang Asisten Residen dan kontoleur (bandingkan dengan Sentana-Menteri didalam Sistim kesultanan Palembang). Bahkan stratifikasi sosial yang sudah maupun itu dipupuk sedemikian rupa oleh Belanda dalam mengukuhkan kekusaannya di wilayah ini.

Dengan mengetengahkan penguasa-penguasa formal tradisional dan formal (Demang, Asisten Demang, Mantri Polisi Pajak, Pesirah, Pembarap, Kerio, dan lain-lain) dan memperkokoh kedudukannya di daerah ini, maka terciptalah “agen-agen kolonial” yang harus berorientasi kepada Pemerintahan Hindia Belanda. Akibatnya para penguasa tersebut makin lama makin jauh dari rakyat, dan tindakan-tindakan mereka selalu ditekan oleh pemerintah Kolonial Belanda untuk mengeksploitasi rakyat secara optimal. Berbagai macam aturan yang menimpa rakyat sehingga menimbulkan bermacam-macam kasus yang memungkinkan lahirnya berbagai bentuk perlawanan untuk menentang segala macam bentuk penindasan. Tindakan-tindakan para penguasa yang berorientasi pada pemerintah

---

<sup>27)</sup> Soeloeh Marga untuk Keresidenan Palembang, Nomor. 9 Maret 1932 Th. II Op cit, halaman 130.

Kolonial Belanda yang pada umumnya melakukan kecurangan-kecurangan, telah menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat pedusunan. Kebutuhan yang minim, pendidikan dan kesehatan kurang mendapat perhatian dari pemerintah setempat, adanya kesenjangan antara Bumiputera dengan golongan orang Eropa dan tidak ada pemerataan untuk memperoleh pendidikan di kalangan Bumiputera. Kepincangan-kepincangan yang tersebut di atas, telah menyuburkan benih-benih kebencian terhadap pemerintah kolonial. Nampak betul orang-orang Bumiputera yang mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak, hanyalah terbatas pada mereka dari golongan keluarga Demang, Asisten Demang, Pesirah/ Depati dan Kerio beserta orang-orang yang mengapdi kepada Kolonial Belanda saja.

Dulu, pada jaman Kesultanan para Pesirah atau Depati sebagai kepala Marga merupakan pelindung dan pengayom rakyat di daerah Uluan. Pada jaman kolonial Belanda, orang-orang yang tidak setia pada Belanda jangan diharapkan dapat menjadi penguasa formal tradisional. Tetapi bagi mereka yang setia, pasti akan diangkat menjadi penguasa setempat, walaupun secara formalitas melalui pemilihan. Itulah sebabnya, sebagian besar bekas-bekas penguasa di daerah-daerah Uluan pada masa revolusi kemerdekaan, banyak yang meninggalkan desanya karena takut. Tidak mengherankan apabila mereka selalu mengingatkan masa lampau serta mengharapkan kedatangan juru selamat (Imam Mahdi) untuk keluar dari penderitaan lahir batin sehingga pada jaman revolusi fisik di daerah ini tidak benar perjuangan melawan Belanda hanya di monopoli oleh kelompok atau golongan tertentu saja tetapi didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.

#### **4. Latar Belakang Budaya/ Pendidikan :**

Kalau di Jawa, kebanyakan orang-orang tua menginginkan anaknya mendapatkan kesempatan untuk memasuki sekolah-sekolah Gouvernement, agar kelak mendapatkan kesempatan bekerja di pemerintahan. Tetapi di daerah ini sebaliknya khususnya di daerah Onderafdeeling Musi Ilir dan Banyuasin, masyarakat pedusunan pada umumnya enggan mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah Gouvernement yang dianggap sebagai sekolah "Kafir". Tingkat

pendidikan anak dianggap cukup apabila sudah khatam/ tamat “mengaji” Al Quran, bahkan jika perlu melanjutkan ke pendidikan yang tinggi ke Singapura/ Johor, ke Mesir atau Mekkah sambil menunaikan ibadah haji.<sup>28)</sup> Biasanya orientasi pendidikan mereka hanyalah terbatas pada pendidikan yang bernafaskan agama/Islam yang terdapat dinegara-negara Islam saja, tanpa memperhatikan pengetahuan umum yang berorientasi pada kebudayaan Barat. disamping itu pelaksanaan Politik Etika di bidang pendidikan tidaklah merata di wilayah kekuasaan Hindia Belanda, karena pelaksanaannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politis, ekonomis dan lain-lain, disamping terbatasnya biaya yang tersedia. Dengan kata lain pemerintah kolonial Belanda tidak banyak membuka sekolah di daerah ini.

Sejalan dengan intensifikasi kekuasaan kolonial dan perluasan penanaman modal swasta di daerah ini, maka dibutuhkan tenaga-tenaga terdidik yang murah, baik untuk keperluan perkebunan-perkebunan asing/ swasta. Dalam konteks ini pulalah, maka pada tahun 1900 di daerah ini mulai dibuka sekolah rendah, sekedar untuk memenuhi tenaga terdidik dan terampil bagi keperluan administrasi pemerintahan kolonial<sup>29)</sup>, terutama di tingkat Marga. Itulah sebabnya jumlah sekolah-sekolah gubernemen sangat terbatas, dan kurikulumnya sangat sederhana. Sekolah rendah itu terkenal dengan nama “Sekolah Desa” (Volksschool) dan hanya dibuka di dusun-dusun yang dianggap penting.<sup>30)</sup> Kemudian dalam perkembangannya sekolah desa tersebut di tambah dengan sekolah sambungan (Vervolgschool) yang lama belajarnya dua tahun.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mengingat penduduk di daerah ini pada waktu itu relatif sangat tipis, maka tidak setiap dusun ada sekolah desa. Demikian pula mengenai Sekolah Sambungan (Vervolgschool), tidak semua ibukota Marga memiliki sekolah tersebut. Hal inilah barang kali yang merupakan salah satu

---

<sup>28)</sup> A. Malik SH, Wawancara, Palembang 1978; Perdiat “haji” bagi masyarakat pedusunan memiliki kebanggaan tersendiri, walaupun kadang-kadang way of life-nya sangat bertentangan.

<sup>29)</sup> Mamoen Abdullah et. al., Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Selatan, Proyek IDKD 1980/1981, halaman 42.

<sup>30)</sup> Ibid, halaman 42-43.

faktor mengapa masyarakat di daerah ini sampai sekarang agak terbelakang, jika dibandingkan dengan masyarakat di wilayah kabupaten lain di dalam Propinsi Sumatera Selatan, lebih-lebih pada tahun-tahun permulaan kemerdekaan Faktor lain yang tidak kurang pentingnya mengenai sistem persekolahan yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda tidak demokratis, karena didasarkan pada stratifikasi sosial yang ada menurut golongan kebangsaan yang berlaku pada waktu itu.<sup>31)</sup> Oleh sebab itu di daerah Keresidenan Palembang terdapat sekolah-sekolah yang diperuntukkan bagi golongan-golongan tertentu. Sidamping sekolah desa yang diperuntukkan bagi rakyat jelata, dibuka pula pada tahun 1920 (Holiandsch Chinese School (HIS) di kota Palembang (dua buah) dan masing-masing di kota Lahat, di Muara Enim, di Martapura dan di Baturaja yang diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari penguasa formal tradisional.<sup>32)</sup> Bagi anak-anak keturunan Belanda dan orang bumiputera yang dipersamakan kedudukannya dengan Belanda (Demang dan Asisten Demang) didirikan europesche Lagere School Hollandsch Chinese School (HCS) di ibukota Keresidenan.

Penyelenggaraan pendidikan seperti yang diuraikan di atas, tentu saja akan membawa dan menimbulkan kesenjangan-kesenjangan di kalangan masyarakat, yang sedikit banyaknya ikut mempertajam pertentangan dan menambah keresahan masyarakat. Di samping itu sekolah-sekolah Gubernur tidak selalu memenuhi kebutuhan semua golongan dalam masyarakat pedusunan, karena selalu dikaitkan pada kebutuhan/ kepentingan pemerintah kolonial sendiri, dan pada umumnya hanya mementingkan segi kecerdasan yang berorientasi pada pengetahuan dan kebudayaan Barat. Oleh karena itu, masyarakat di daerah ini, yang sebagian besar taat kepada ajaran Islam, menginginkan pendidikan agama bagi anak-anak mereka. Kegiatan masyarakat tersebut dapat ditampung oleh golongan agama, apakah mereka

---

<sup>31)</sup> BP3K, Pendidikan di Indonesia 1900-1974, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 37.

<sup>32)</sup> R.A. Rani (eks Kakanwil P&K Sumsel), Wawancara, Palembang, 1980; Abas Surapati SH, Wawancara, Palembang, 1981.

tergolong “Kaum Tuo”<sup>33)</sup> ataukah “kaum mudo” yaitu mendirikan sekolah-sekolah di mana unsur agama mendapat tempat khusus di dalam pengajarannya.

Sehubungan dengan kegiatan masyarakat tersebut atas usaha golongan-golongan agama di daerah ini pada tahun 30-an, mulai didirikan sekolah-sekolah yang bernafaskan agama/ Islam oleh kedua golongan tersebut. Boleh dikatakan hampir setiap Marga dan Dusun di daerah Onderafdeeling Musi Ilir dan Banyuasin terdapat sekolah-sekolah Governemen yang berorientasi pada pengetahuan dan kebudayaan Barat dan sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh missi dan Zending yang berorientasi pada ajaran kristus, juga untuk mendidik kader-kader Muslim dalam menyebarkan ajaran Islam di kalangan umat yang belum memiliki keimanan yang tangguh serta menanamkan pribadi muslim. Sekolah-sekolah tersebut diharapkan akan menghasilkan pemuka-pemuka muslim yang dapat menampung aspirasi umat, melindungi dan mengayomi masyarakat pedusunan dari segala macam bentuk penindasan yang datang dari pemerintah kolonial beserta antek-anteknya.

## **5. Latar Belakang Agama :**

Palembang sebagai kota bandar yang terletak jauh dari urat nadi lalu lintas pelayaran dan perdagangan Internasional melalui Selat Malaka, merupakan kota yang berperan ganda. Ia tidak hanya sebagai pusat kegiatan administrasi pemerintah kesultanan dan kota dagang, tetapi juga sebagai pusat kegiatan penyebaran agama Islam ke daerah Ulu pada umumnya dan daerah Onderafdeeling Musi Ilir dan Banyuasin pada khususnya. Penetrasi Islam di daerah ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat pada umumnya dan kehidupan negara pada khususnya. Walaupun Islam pada mulanya hanya tersebar

---

<sup>33)</sup> Istilah “kaum tuo” dan “kaum mudo” tidak hanya terbatas pada Islam sebagai agama, tetapi dapat juga dikaitkan pada segi kehidupan masyarakat pedusunan. Di daerah ini sekelompok orang-orang yang menamakan dirinya kaum mudo yang memisahkan diri dari golongan adat, karena mereka menghendaki adanya pembaharuan dan tidak terikat pada tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Tapi nyatanya “kaum tuo” relatif lebih banyak pengikutnya daripada “kaum mudo”.



di kalangan para pedagang dan lingkungan kraton di pusat kerajaan, tetapi dalam abad ke-17 akhirnya menjadi agama negara pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman. Sejak abad ke-17 itu boleh dikatakan Islam secara resmi menggantikan kedudukan negara yang lama (Budha Mahayana).

Setelah Islam menjadi agama resmi dalam sistim kesultanan Palembang, pemuka-pemuka gama juga di rangkul oleh Sultan sedemikain rupa, sehingga kadang-kadang dijadikan tangan-kanan Sultan atau dijadikan penguasa setempat. Hukum Islam mendampingi hukum adat. Mesjid dan Langgar atau tempat-tempat ibadah lainnya dijadikan pusat kegiatan dakwa, sehingga dengan demikian Islam betul-betul memegang peranan penting dalam mempengaruhi kehidupan keagamaan serta pendidikan masyarakat di pusat Kesultanan pada umumnya. Dengan ditetapkannya Islam sebagai agama negara, berarti para ulama/ mubaligh mendapat dukungan moral dari penguasa dalam melakukan penyebaran agama di daerah Uluu.

Penyebaran agama Islam di daerah-daerah pedalaman khususnya di daerah Onderafdeeling Musi Ilir dan Banyuasin, sering dihubungkan dengan bermacam-macam cerita rakyat atau legenda seperti : “adu kesaktian” yang pernah dilakukan oleh Kiayi Delamat (alias Abdurrachman yang pesariannya disamping Mesjid Suro Palembang) dalam mendirikan bangunan mesjid di dusun-dusun yang terletak di pinggir sungai Musi sampai ke Rawas. Metode seperti ini mempunyai arti tersendiri bagi masyarakat pedusunan karena kondisi masyarakat pada waktu itu masih diliputi oleh suasana religius-magis. Adapun sejarah penyebaran Islam pada hari-hari pertama di daerah ini menunjukkan adanya hubungan yang erat dengan sejarah hidup dan perjuangan seseorang yang lazim disebut “U lam a” atau K iayi. Salah seorang ulama besar yang terkenal di pusat Kesultanan dan memiliki reputasi Internasional adalah Abd al-Samad al Palimbani.<sup>34)</sup> Dapat dikatakan pada akhir abad ke-19 ketika pemerintah kolonial Belanda mengintensifkan kekuasaannya di seluruh wilayah kesultanan

---

<sup>34)</sup> Ibrahim Alfian, et.al., Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme di daerah Sumatera Selatan, Direktorat Sejarah & Nilai Tradisional, Jakarta, 1983/1984, halaman 16.

Palembang masyarakat Uluan telah menjadi penganut agama Islam yang patuh.

Pengaruh Islam di kalangan masyarakat daerah ini cukup besar, dan ajaran-ajaran agama Islam yang pernah diajarkan oleh Ulama Besar Abd al Samad al Palimbani, terutama mengenai ilmu Tasawwuf, nampaknya cukup berpengaruh pada setiap individu Muslim dalam usaha mendekatkan diri kepada Tuhan.<sup>35)</sup> “R atib Sam an” yang dianjurkan oleh beliau dalam usaha mendekatkan diri kepada Illahi, yang lazim dilakukan setelah melakukan sembahyang lima waktu, merupakan ritual masyarakat pedusunan. Metode pendekatan diri kepada Tuhan itu tidak hanya menyangkut hubungan manusia dengan khaliknya, tetapi juga terdapat unsur-unsur untuk menentang segala macam bentuk ketidakadilan, termasuk usaha perjuangan menentang orang kafir. Semangat “Jihad” yang terkandung di dalam ritual itu. Di samping sejarah masa lampau di daerah ini pernah dimanfaatkan oleh Sultam Makhmud Badharuddin II dalam menentang Belanda/ Inggris. Kemudian pada abad ke-20, ketika Serikat Islam telah memainkan peranannya dan mendalangi perlawanan-perlawanan rakyat di daerah ini, Islam juga dijadikan senjata yang ampuh dalam menentang penguasa kolonial Belanda. Bahkan pada jaman pendudukan Jepang dan revolusi kemerdekaan, agama berperan dan sekaligus menjadi motor penggerak dalam menggelorakan “semangat jihad” untuk menentang penjajahan.

Ketika Belanda berkuasa di daerah ini, mereka menyadari bahwa Islam secara potensial tidak dapat dianggap enteng. Oleh karena itu, meskipun golongan agama masih mendapat tempat dalam sistem pemerintahan kolonial, pada dasarnya mereka itu masih tetap dicurigai dan wewenangnya sangat terbatas. Tentu saja kedudukannya tidak sama dengan kondisi mereka pada jaman kesultanan, dimana kaum Ulama menjadi tangan kanan dan sangat menentukan. Pengadilan agama pada jaman kolonial, hanyalah di beri tugas untuk mengadili hal-hal yang berhubungan dengan masalah warisan, talak-rujuk berdasarkan hukum Islam mendampingi pengadilan sentral

---

<sup>35)</sup> K.H.O.Gajahnata & Sri Edy Swasono, Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan, UI-Press, Jakarta, 1986, halaman 47-50.

(Gouvernementsrechts). Meskipun golongan ini diberi wewenang dalam masalah tertentu, namun di balik itu pemerintah kolonial selalu waspada dan terus mengawasi gerak-gerik golongan ini, karena mereka sangat disegani dan menjadi panutan masyarakat di dalam aspek kehidupan secara keseluruhan.

Di daerah Uluhan khususnya di daerah Onderafdeeling Moesi Ilir dan Banyuasin, Penghulu dan Khotib sebagai pembantu Pesirah/ Pembarap-Kerio dalam sistem pemerintahan Marga/ Dusun yang telah berorientasi pada pemerintahan kolonial, kelihatannya dalam penampilannya lebih bersifat “dwi muka”. Keatas mereka melayani penguasa formal dan kesamping melayani pemimpin-pemimpin informal. Fungsi dan peran dwi-muka yang mengkombinasikan tugas-tugas formalnya dengan keadaan masyarakat setempat, sebagaimana yang lazim terjadi dengan tingkah laku Kepala Desa/ Lurah di dalam masyarakat agraris di Jawa. Selama kombinasi ini dapat dilakukan oleh mereka (penguasa formal-tradisional), selama itu pula hubungannya dengan penguasa formal berjalan dengan lancar dan baik, dan demikian pula peranannya di dalam masyarakat sebagai pemuka Agama/ Adat tetap terjaga, sehingga mereka disegani dan dihormati oleh rakyatnya. Tetapi apabila tidak terdapat keseimbangan antara hubungan itu, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, di mana mereka akan dipecat dari jabatannya oleh penguasa formal.

Pada jaman pendudukan Jepang di daerah Keresidenan Palembang (Palembang-Syuu), khususnya di daerah Onderafdeeling Moesi Ilir & Banuyuasir (Bun-Syuu). belum diketemukan data mengenai shumubu (Kantor Urusan Agama) seperti yang dikenal di Jawa. Oleh karena itu, semua urusan agama ditangani oleh pemerintah Militer Jepang setempat, yang dalam hal ini oleh bunsyu-co sebagai wakil Syuu-cokan.<sup>36)</sup> Bagaimanapun juga dalam kenyataannya pemerintah Jepang tetap menjalankan konsep politik yang memisahkan Islam dari kehidupan politik praktis. Itulah sebabnya di daerah ini, Jepang mengawasi secara ketat mengenai gerakan dan lembaga pendidikan Islam sambil memberikan “indokrinasī” kepada penguasa

---

<sup>36)</sup> Penulis sendiri menyaksikan hal itu, dimana bunsyu-co di dampingi oleh juru bahasa (Anwar Daud) selalu pergi ke desa-desa berpidato di muka rakyat.

formal-tradisional yang menangani masalah agama. Hampri setiap minggu para penghulu/ khotib harus berkumpul di ibukita Bun-syu untuk mendengar pidato dari Bunsyu-co. Seriap ada kesempatan Bunsyu-co yang didampingi oleh juru bahasanya, mengunjungi/ mengadakan tatap muka dengan masyarakat pedusunan. Rpa-rupanya orang-orang Jepang dengan sengaja menciptakan suasana akrab dengan masyarakat pedusunan melalui pemuka-pemuka Islam lokal. Hal ini adalah suatu keadaan yang trisak pernah dijumpai oleh umat Islam di pedesaan di masa penjajahan Belanda.

Di daerah ini tidak m engenal apa yang disebut “ G erakan tiga A ”, tetapi setiap kali Bunsyu-co memberikan pidato kepada masyarakat ujum - Nippon cahaya pelindung dan pemimpin Asia,merupakan isi pokok pembicaraanya melalui juru bahasanya. Disamping kebijaksanaan politik praktis yang dilakukan oleh penguasa Jepang setempat, mereka jug berusaha untuk menanamkan keyakinan akan persamaan ajaran Shinto dan Islam. Perwujudan keinginan Jepang dalam menyelipkan nilai-nilai Shintoisme, diantaranya melalui “Seikerei”, suatu gerakan setengah badan m enundukkan ke arah istana Tokyo, yang m enyerupai ruku dalam sholatnya orang Islam . Keharusan melakukan seikerei bagi setiap anak sekilah, merupakan salah satu di antara banyak kasus yang telah menyinggungorang-orang Islam pada umumnya dan kaum Ulama/ Kiyai khususnya. Dengan di berlakukannya aturan tersebut di atas bagi semua sekilah tanpa terkecuali, maka terpaksa sekilah-sekolah yang bernapaskan agama di daerah ini membubarkan diri atau ditutup.

## **B. Peranan organisasi sosial-politik dan sosial-budaya :**

Seperti yang telah diketahui bahwa organisasi sosial-politik yang mula-mula memasuki daerah keresidenan Palembang adalah Serikat Islam. Masuknya organisasi tersebut di kita Palembang di perkirakan pada tahun 1991, yang dibawa oleh orang tokoh - (R.M. Tirtohadisuryo dan Rd. Gunawan), ternyata mendapat tanggapan positip dari pemuka-pemuka masyarakat di kita ini. Dan sebagai tindak lanjut, oleh tokoh-toloj masyarakat di daerah ini seperti : Raden Nangling dan M. Yahya, dibentuklah cabang organisasi tersebut dengan Raden Nangling sendiri sebagai Ketua Cabang (Presiden lokal)

untuk Keresidenan Palembang.<sup>37)</sup> Mengingat organisasi itu bersigat kerakyatan, azas dan tujuannya berorientasi pada kepentingan rakyat, maka dalam waktu relatif singkat organisasi tersebut menjadi sangat populer dan pengaruhnya cepat tersebar ke daerah Uluu.

Bedirinya Serikat Islam merupakan jawaban terhadap kecongkakan pedagang-pedagang Cina dan rencana “Kristianisasi” dari Missi dan Zending,<sup>38)</sup> Serta menentang unsur-unsur yang keliru dalam agama Islam. Ia memiliki massa yang cukup luas sampai ke lapisan bawah masyarakat Indonesia, lapisan yang sejak berabad-abad hampir tidak pernah mengalami perubahan nasib dan paling menderita. Dengan kata lain, organisasi ini paling penting dalam dekade awal abad ke-20, gerakan massa pertama dalam sejarah Indonesiasampai tahun 1920-an,<sup>39)</sup> karena berhasil mempersatukan dan membangkitkan perasaan kebangsaan di kalangan masyarakat Indonesia yang bernapaskan Islam. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila kehadirannya mendapat tanggapaan yang baik tidak hanya di kalangan masyarakat Timur Asing dan daerah ini seperti : orang-orang Arab, India, bahkan orang-orang Cina Muslim yang merupakan suatu golongan secara ekonomis memegang peranan penting. Berbeda dengan di Jawa, di mana Serikat Islam dalam bidang ekonomi menghantam pedagang-pedagang perantara Cina. Di wilayah Keresidenan Palembang antara golongan pribumi dengan orang-orang Cina tampaknya terdapat saling pengertian dan kerja sama di bidang tersebut, meskipun keduanya masih menganggap asimilasi (pembauran) sebagai suatu hal yang tabu.<sup>40)</sup>

Organisasi tersebut merupakan organisasi sosial-politik pertama yang bersifat Kerakyatan, yang dalam tahun 1914 (bahkan mungkin sebelumnya) sudah masuk dan tersebar ke daerah-daerah Uluu/ Pedalaman Keresidenan Palembang, seperti ke daerah Afdeeling Pegunungan Palembang, Onderafdeeling Rawas dan lain-

---

<sup>37)</sup> A.S. Mattjik (eks tokoh PSII Sumsel), Wawancara, Palembang

<sup>38)</sup> Sartono Kartidirdjo et. al., Op cit, halaman 187

<sup>39)</sup> Colin Wild & Peter Carey, Gelora api Revolusi, Sebuah Ontologi Sejarah, BBC-Gramedia, Jakarta, halaman 20-21.

<sup>40)</sup> Ibrahim alifian et.al., Op-cit, halaman 78.

lain. Proses penyebarannya dipercepat dengan kehadiran Raden Gunawan di daerah-daerah ini pada tahun 1914,<sup>41)</sup> yang mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Tampaknya kegiatan Serikat Islam di daerah ini, terutama di tujukan ke daerah Afdeeling Pegunungan Palembang dan daerah sekitarnya. Mungkin hal ini merupakan reaksi terhadap Missi Katholik yang sudah bercokol dan mengadakan operasi secara aktif di daerah ini sejak abad ke-19, dengan pusat konsentrasinya di Tanjung Sakti. Sasaran Missi tersebut ditujukan pada bidang pendidikan, kesehatan dan penyebaran agama, sehingga sebelum kedatangan Serikat Islam di daerah ini, banyak penduduk yang memeluk agama Nasrani terutama di dusun Tanjung Sakti dan sekitarnya. Besarnya pengaruh Serikat Islam dalam membendung penetrasi Katholikisme di daerah ini dan memperluas penyebaran ajaran Islam dikalangan masyarakat yang belum memiliki dasar keimanan yang kuat, dapat dihubungankan dengan pemberitaan seorang Pastor bernama Sigerbertus Debber.<sup>42)</sup>

Berkat usaha para aktifis yang berhasil mempengaruhi pemuka-pemuka masyarakat setempat (Pamong Desa, Pemuka-pemuka Agama ataupun Guru-guru ngaji), maka antara tahun 1914-1920 telah terbentuk cabang-cabang Serikat Islam hampir di seluruh wilayah keresidenan Palembang, lengkap dengan pengurusnya dan memiliki jumlah anggota yang cukup banyak. Di samping cara pendekatannya yang tepat, keberhasilan Serikat Islam untuk mendapatkan anggota yang banyak dalam waktu yang relatif singkat, sangat ditujang oleh program sosialnya yang dapat menarik massa, yaitu melakukan kegiatan sosial yang nyata, misalnya tolong menolong di kalangan sesama anggota, terutama bagi warga anggota yang sedang ditimpa musibah, atau mewujudkan semangat gotong royong pada sasaran tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa Serikat Islam pada waktu itu merupakan satu-satunya wadah penampungan aspirasi rakyat yang tertindas, dan juga sebagai motor penggerak untuk melawan dan mengusir penjajah.

---

<sup>41)</sup> Dinas Sosial Daerah Tk. I sumsel, Op cit, halaman 9.

<sup>42)</sup> Majelis Agung Waligereja Indonesia, Sejarah Gereja Katholik Indonesia, Arnoldus-Ende-Flores, Jakarta, 1974, halaman 169.

Apabila kita kaitkan dengan peristiwa yang pernah terjadi di daerah Rawas, yang lazim disebut “perang Kelam bit” 30 Oktober 1916,<sup>43)</sup> dimana daerah ini tidak begitu jauh dari wilayah Onderafdeeling Moesi Iilir, maka tidak mustahil organisasi Serikat Islam yang mendalangi protes sosial itu menjalar ke daerah Onderafdeeling Moesi Iilir. Pada tahun 1918 di Muara Rupit telah berdiri cabang Serikat Islam di bawah pimpinan Daoed Wijaya, Akib dan Djabar.<sup>44)</sup> Dari daerah ini faham baru dalam ke-Islaman itu mulai merembes ke daerah Marga Mantri Melayu. Berkat usaha Kgs. Abdurrachman (guru). Serikat Islam berdiri di ibukota Sekayu yang mendapat dukungan dari pemuka-pemuka masyarakat setempat seperti: Haji Abdurrachman, A. Gopar, Akib, tolib, Abuhasan, dan lain-lain. Oleh karena Kgs. Abdurrachman sebagai pegawai negeri yang dibawah awasan kepala Marga, maka terpaksa ia mengundurkan diri sebagai pengurus organisasi dan jabatan ketua diserahkan pada Haji Abdurrachman bin Haji Toher. Orang-orang yang duduk dalam pengurus tersebut adalah sebagai berikut :

1. Presiden/ Ketua : H. Abdurrachman bin H. Toher.
2. Vice Prsiden/Wkl. Ketua : A. Goper.
3. Sekretaris : Abuhasan bin H. Azhari dan Tolib bin Djamakamin.
4. Pembantu : Akib bin Matadi, dll.<sup>45)</sup>

Serikat Islam yang telah berdiri di kota Sekayu ini usianya tidak lama, karena mendapat tekanan dari pemerintah kolonial Belanda setempat dan dianggap sebaai gerakan lanjutan dari kelambit yang pernah melakukan aksi di daerah Rawas.

Meskipun Serikat Islam pernah tumbuh di daerah Marga Mantri Melayu antara tahun 1933 organisasi tersebut bangkit kembali sebagai organisasi sosial-politik setelah terbentuk Resort Comisararis di daerah Moesi Iilir, seperti apa yang dikatakan oleh Abdul Saleh Matjik:

---

<sup>43)</sup> Dokumentsi Data Sejarah Militer Kodam IV Sriwijaya; R.H. Moh. Akip, Wawancara, Palembang 1980.

<sup>44)</sup> Ibrahim Alfian, et. al., Op cit, halaman 81.

<sup>45)</sup> Haji Rozali Rozak, Wawancara, Sekayu, 1988.

”... ..dalam menjalankan tugas ini, saya mengadakan perjalanan keliling keseluruhan Sumatra Selatan. Pertama saya mengunjungi Sekayu. Disini saya membantu Resort Comisaris PSII (Partai Serikat Islam Indonesia) yang di ketahui oleh Haji Zaenuri, dan terus berkunjung ke dusun-dusun antara lain dusun Epil sampai ke Air Balai, ke marga Pwnukal, marga Air Item, Marga Abab dan dusun-dusun lainnya dalam daerah Moesi Banyuasin.<sup>46)</sup>

Setelah terbentuk Resort Comisaris di Sekayu yang memakan waktu cukup lama yaitu sejak tahun 1933 sampai dengan tahun 1936, maka tersusulah anggota pengurus yang lengkap dengan susunan sebagai berikut :

I. Dewan Afdeling :

Ketua : Yasin Ohip.  
Anggota-anggota : Rozali Kudir, Mahmud Husin, Uhib bin Ujud dan Moh. Zen H.Sulaiman.

II. Lajnah Afdeeling:

- a. Ketua : Husin Napis  
Wakil ketua : A. Kudir H. Hulik
- b. Sekretaris : Yasin Kudir  
Wakil Sekretaris : A. Halim Mustoga
- c. Bendahara : A. Kudir Haji Hulik dan Haji Adji
- d. Seksi Pendidikan : Salik Sayip  
Anggota-anggota : Moh. Zen H. Sulaiman, Uhip bin Ujud Oemar Hasan dan Mahmud Husin.
- e. Seksi Ibadah : Rozali Rozak, A.Halim Mustofa,  
A. Hamid Anang dan Kopli haji Ismail.
- f. Seksi Pemuda : A. Somad Haji Oni.

---

<sup>46)</sup> Dinas Sosial Daerah Tk. I Sumsel, Op cit, halaman 52.



Untuk memantapkan Setruktur organisasi PSII yang baru terbentuk maka pada bulan Februari 1937 Aruji Kartawinata sebagai wakil dari pucuk pimpinan PSII datang ke Sekayu dan sekaligus meresmikannya.<sup>47)</sup>

Dengan diresmikannya PSII di Sekayu oleh pucuk pimpinan, maka secara psykologis telah memberikan dorongan pada anggota-anggotanya untuk mendirikan ranting -ranting pada seriap dusun di daerah Onderafdeeling Moesi Iilir en Koeboestrecken. DHmpir setiap dusun di daerah ini terdapat penganjuran-penganjuran Serikat Islam, yang lazim disebut oleh masyarakat waktu itu “golongan kaum mudo”. Apabila kita melihat perkembangan organisasi ini di daerah Musi Iilir sedang menampakkan diri dengan pesat pada saat historis, yaitu saat mana Serikat Islam yang tadinya dianggap sebagai induk organisasi politik di Indonesia sedang mengalami kemunduran.<sup>48)</sup> Para pemimpin Serikrt Islam nampaknya sedang dilanda perselisihan pendapat mengenai strategi partai dalam menghadapi pemerintahkolonial Belanda. Di satu pihak tetap menjalankan garis politik “noncooperation” dan dilain pihak tetap menjalankan “cooperation”. Tuduh menuduh antara para pemimpin Serikat Islam, merupakan kelemahan intern bagi organisasi yang sangat didambakan oleh seluruh masyarakat Muslim pada waktu itu. Dengan kalab lain, sejak adanya perbedaan fahamn antara pemimpin-pemimpin Serikat Islam dil pusat, tokoh-tokoh Serikat Islam dil daerah ini lebih menitikberatkan pada perjuangan m\untuk membentuk kader-kader mulalui jalur pendidikan formal.

Baik lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh spemerintah kolonial maupaun yang diselenggarakan oleh swasta/yayasan, dapat dianggap sebagai tempat untuk mencetak manusia berfikir secara sistematis, yang pada akhirnya mereka itu memiliki pandangan hidup tradisional yang semakin menipis. Cara berfikir yang didapatkan dari sekohah, tahap demi tahap akan menggantikan cara berpikir yang digunakan oleh masyarakat awam

---

<sup>47)</sup> Haji Rozali Rozak, Wawancara, Sekayu, 1988.

<sup>48)</sup> L.M. Sitorus, Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia, Pustaka Rakyat, Jakarta, 1951, halaman 20-21.

yang tidak bersekolah. Mengapa hal itu dapat terjadi, karena pengetahuan dan pengajaran tradisional itu sendiri tidak diajarkan di sekolah. Mungkin ada benarnya, apabila ada orang mengatakan bahwa pendidikan pada umumnya merupakan kunci proses sosial dalam jangka panjang. Dengan berdirinya sekolah-sekolah Gouvernement dan munculnya sekolah-sekolah pemerintah waktu itu walaupun dalam jumlah relatif kecil, berarti ia telah ikut serta berperan meningkatkan pengetahuan masyarakat, dan sekaligus melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pedesaan. Untuk membicarakan hal ini secara menyeluruh dapat dilihat pada Bab V, tentang sejauh mana peranan pendidikan sebagai faktor dinamisasi sosial.

### **C. Perlawanan terhadap Jepang :**

Seperti telah diketahui, tujuan Jepang menduduki kepulauan Indonesia, ialah untuk menguasai sumber bahan mentah dan tenaga manusia yang sangat besar artinya bagi kelangsungan Perang Asia Timur Raya (Dai Toa no Senso). Wilayah Keresidenan Palembang yang dipandang dari potensi perang adalah unsur yang sangat menentukan, karena merupakan penghasil bahan bakar yang cukup kaya, sehingga pada tanggal 14 Februari 1942 daerah ini diserbu dan diduduki oleh balatentara Jepang. Dengan demikian berakhir masa penjajahan bangsa Belanda dan mulailah era baru di daerah ini, yakni jaman pendudukan Militer Jepang dengan segala macam penderitaan.

Sebagai bangsa yang telah cukup lama mengalami pahit getirnya kehidupan akibat penjajahan Belanda, maka kedatangan Balatentara Jepang mula-mula disambut dengan hangat oleh bangsa Indonesia, dengan harapan akan memperoleh perubahan nasib rakyat dan kemerdekaan. Jepang dianggap sebagai "juru selamat" yang telah berhasil mengusir orang Belanda dari bumi Indonesia. Dengan berbagai semboyan atau slogan yang muluk-muluk seperti : "Asia untuk bangsa Asia", "Kerjasama Bersama Asia Timur Raya", "Indonesia Nippon sama-sama" dan lain-lain., Jepang berhasil memikat hati rakyat. Tetapi kemudian sikap dan persepsi rakyat berubah karena ucapan dan semboyan atau slogan yang muluk-muluk yang digembar-

gemborkan itu tidaksesuai dengan tindak-tanduk perbuatan orang-orang Jepang itu sendiri. Rakyat menjadi ragu-ragu, gelisah dan penuh ketakutan.

Sebagai mana di daerah-daerah lain di Indonesia, penguasa Jepang setempat telah membekukan organisasi rakyat di daerah ini terutama partai-partai politik, radio disegel, surat-surat pos disensor dan rakyat yang bepergian diawasi dengan ketat. Dalam segi Ekonomi, penguasa baru ini telah mengubah tata ekonomi yang sudah ada menjadi ekonomi perang. Di dalam pelaksanaan sistem itu di daerah Bunsyu/ Onderafdeeling dipimpin langsung oleh bunsyu-co, yaitu mem berlakukan suatu sistem yang dikenal dengan nama "autarkī". Rupa-rupanya sistem seperti ini tidak hanya berlaku di daerah ini saja, tapi di terapkan pula oleh Jepang di seluruh Indonesia,<sup>49)</sup> Dengan menerapkan sistem tersebut, diharapkan daerah inisecara keseluruhan menjadi sumber penjangk untuk kepentingan perang. Dalam kaitan ini secara monopoli pemerintah mengambil alih semua kegiatan dan pengawasan ekonomi perdagangan. Semua potensi ekonomi di daerah ini seperti : minyak bumi, sandang pangan dan beras dikuasai sepenuhnyaoleh penguasa Militer Jepang setempat. Rakyat dilarangmembawa beras dari satu tempat ke tempat lain melebihi dari kebutuhan. Pada waktu itu semua harta-harta termasuk hak milik orang-orang Belanda di daerah ini, disita oleh Jepang antara lain : tanah-tanah perkebunan (karet dan kelapa sawit). Bank. Pabrik-pabrik, telekomunikasi, dan sebagainya. Sesuai dengan kepentingan perang melawan sekutu, maka pemerintah militer Jepang setempat mengumumkan pula nama-nama barang yang dianggap penting, yaitu barang-barang yang langsung digunakan untuk perangan barang-barang yang tidak langsungdigunakannya, yang menyangkut kebutuhan primer masyarakat seperti : gulapasir, garam, minyak tanah, minyak goreng, sabun, tekstil, korek api, dan lain-lain.

Barang-barang yang dianggap penting oleh Jepang antara lain : sepeda motor, mobil, kapal, perahu motor dan jenis-jenis barang yang terbuat dari besi/ baja. Barang-barang tersebut harus dilaporkan pada

---

<sup>49)</sup> Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia IV, Direktorat Sejarah & Nilai Tradisional, Jakarta, 1982/1983, halaman 44.

penguasa Jepang setempat. Sejalan dengan pelaksanaan politik Autarki, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhan daerah sendiri tanpa ketergantungan daerah lain yang ditujukan untuk kepentingan perang. Di bidang perdagangan pemerintah Jepang menggunakan sistem “monopoli” dalam arti Jepang menguasai sepenuhnya barang-barang kebutuhan pokok, harga barang yang dijual ditentukan harganya dan rakyat memperoleh barang yang dibutuhkan melalui badan penyalur yang dikoordinir oleh Kumisi. Kantor Kumisi Pusat di ibukota keresidenan/ Syuu menunjuk warung/ toko tertentu yang lazim dikenal dengan nama “Toko Gabungan” (toko distribusi bahan makanan/ sandang).<sup>50)</sup> Di dusun-dusun dalam menyalurkan kebutuhan pokok itu dilakukan oleh kepala-kepala Marga dan kepala-kepala dusun dalam jumlah relatif kecil, karena pekerjaan seperti ini bukal hal yang tidak mungkin bisa terjadi manipulasi atau korupsi. Dengan adanya peraturan dan pengawasan ketat oleh Pemerintah Jepang terhadap barang-barang itu di pasaran, maka mendorong timbulnya pasar gelap bagi barang-barang tertentu yang cukup tinggi harganya dan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat pedusunan.

Adanya pengaturan-pengaturan pembatasan-pembatasan dan penguasaan sarana produksi oleh pemerintah, adalah ciri khas dari sistem ekonomi perang yang berlaku pada waktu itu. Pula ekonomi itu dilakukan secara konsekuen di dalam wilayah yang diduduki oleh angkatan perang Jepang, dimana sumber daya alam dan manusia dikerahkan untuk kepentingan perang Asia Timur Raya (Dai Toa-no Senso). Oleh sebab itu tugas utama dari pengusaha Jepang setempat adalah memenuhi kebutuhan sendiri untuk tetap bertahan, dan tugas berikutnya mengusahakan produksi barang-barang logistik untuk kepentingan perang.<sup>51)</sup> Atas dasar pemikiran itu pulalah maka seluruh penduduk di daerah pedalaman/ pedusunan beserta hak miliknya dikorbankan untuk pelaksanaan tersebut dengan melalui para Kumi-co/ Penggawa setempat dilakukan inventarisasi yang dikawal oleh tentara Jepang, baik mengenai kekayaan maupun jumlah hasil produksi sawah/

---

<sup>50)</sup> Kementerian Penerangan Sumsel, Op cit, halaman 369.

<sup>51)</sup> Nugroho Notosusanto, Op cit, halaman 45.

ladang setiap tahun yang harus disetorkan/ diserahkan kepada penguasa Jepang tanpa ganti rugi.

Sementara balatentara Jepang menghadapi situasi yang semakin gawat pada segala front pertempuran melawan sekutu, tuntutan/ tekanan dari Mileter Jepang semakin berat, akibatnya penderitaan dan kemiskinan rakyat semakin hebat di daerah ini. Di dalam kerangka menyusun pertahanan yang didasarkan atas konsepsi “perang gerilya” di daerah ini seluruh rakyat, kecuali orang-orang yang telah lanjut usia dan anak-anak sekolah dikerahkan untuk membangun prasarana perang seperti : membangun lapangan terbang, parit-parit/ kubu pertahanan, jalan-jalan raya, gua-gua di dalam tanah dan lain-lain. Semuanya ini dilakukan oleh rakyat dengan kerja paksa yang lazim dikenal dengan nama “Kuli BPP” (BPP = badan Pembantu Pemerintah). Pengerahan tenaga rakyat sebagai kuli BPP ini biasanya melalui kepala-kepala Dusun (Ku-co), yang kadang-kadang memberikan peluang kepada para Penggawa/ Kumi-co untuk memperoleh kesempatan dalam kesempitan, yaitu mencari keuntungan materi dari penduduk yang tidak mau dikirimkan sebagai kuli BPP, tetapi harus membayar sejumlah uang tertentu sebagai tanda bebas dari pekerjaan tambahan yang bersifat wajib itu. Dengan kata lain para Kumi-co dengan bekerja sama sama dengan Ku-co telah melakukan komersialisasi jabatan<sup>52)</sup> terhadap rakyat yang telah dikuras kekayaannya serta jasmaninya sampai ke balung sumsumnya. Pekerjaan tambahan yang bersifat wajib ini telah banyak menyita tenaga dan waktu bagi petani, sehingga tidak ada waktu lagi mengerjakan sawah ladangnya sendiri, yang secara langsung telah mempengaruhi perekonomian desa. Dapat dikatakan bahwa tindakan Jepang yang telah mengerahkan tenaga manusia tanpa berprikemanusiaan, merupakan kontradiksi dengan gagasan untuk meningkatkan produksi bahan makanan untuk keperluan perang.

Kuli BPP tersebut diperlakukan sangat buruk tanpa prikemanusiaan sejak dari pagi hingga petang hari mereka di paksa melakukan pekerjaan kasar tanpa diberi makanan dan perawatan yang

---

<sup>52)</sup> Syargaw i Hulip (eks Kepala Ibtidayah), Wawancara, Lumpatan, 1987; Muh.Hasyim, Wawancara, Palembang, 1988.

cukup. Karena kondisi fisik yang sangat lemah, mereka hampir tidak punya kekuatan lagi untuk berjalan. Jika ada di antara mereka yang berani mencuri waktu untuk beristirahat, sekalipun hanya sebentar saja maka hal ini akan mengundang hardikan yang disertai pukulan-pukulan dari pengawas yang terdiri dari serdadu Jepang. Hanya pada malam hari mereka berkesempatan melepaskan lelah sambil menghadapi kutu busuk dan nyamuk, hingga tidak sedikit di antara mereka itu terserang penyakit malaria dan kudisan. Pekerjaan tanpa banyaran ini sering tidak sempat memasak air untuk minum dan buang air di sembarang tempat, sehingga mereka tidak bisa menghindarkan diri dari sejuknya angin bertiup dan basah kuyup karena turunnya hujan lebat. Kesehatan tidak terjamin, makanan yang tidak cukup dan pekerjaan yang terlalu berat, menyebabkan banyak kulit BPP meninggal dunia di tempat kerjanya. Oleh sebab itu, kerja paksa ini merupakan momok bagi rakyat di daerah, dan bagi keluarga yang ditinggalkan harapan tipis untuk bertemu kembali dengan mereka yang menjalankan tugas itu.

Masalah lain yang tidak kalah kurang pentingnya menyangkut kehidupan masyarakat pedusunan waktu itu, selain mengenai pangan juga dalam hal sandang. Memang semenjak sebelum Perang Dunia II meletus, masalah sandang di Indonesia pada umumnya dan di daerah ini pada khususnya sangat tergantung pada impor dari luar negeri. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah Jepang mewajibkan para penduduk menanam biji kapas di daerah Palembang<sup>53)</sup> dan daerah Musi Ilir dan Banyuasin. Pada waktu pendudukan Jepang di daerah ini, perusahaan atau pengrajin yang bergerak di bidang tekstil masih meneruskan usahanya. Tetapi kemudian karena bahan baku dan pemasarannya ke luar daerah kurang lancar, usaha mereka selama ini terpaksa ditutup. Sebagai akibat tidak adanya kegiatan perusahaan atau pengrajin waktu itu, maka bahan sandang di seluruh wilayah ini sangat langka dan sulit didapati di pasar-pasar. Jalan keluar untuk mengatasi masalah itu, terpaksa rakyat dimana-mana menggunakan “pakaian Lantung”<sup>54)</sup> atau pakaian yang terbuat dari “Karung Goni”. Kesulitan untuk

---

<sup>53)</sup> Nugroho Notosusanto, *Op cit*, halaman 49.

<sup>54)</sup> Pakaian Lantung adalah suatu busana yang terbuat dari kulit kayu yang dipakai oleh para Petani di daerah Uluang.

mendapatkan bahan sandang, menyebabkan munculnya tempat-tempat penjualan barang bekas (second-hand) untuk ditukarkan dengan kain belacu yang sukar diperoleh waktu itu. Masalah sandang ini merupakan masalah serius yang menimpa masyarakat di daerah ini secara keseluruhan.<sup>55)</sup> Yang paling menyedihkan apabila ada keluarga yang mendapat musibah (kematian), terpaksa tikar anayaman sebagai pengganti kain kapan pembukus mayat.

Sejalan dengan semakin terdesaknya balatentara Jepang di setiap medan pertempuran, masyarakat di daerah ini menerima tekanan dan penderitaan di atas garis maksimal di bawah bayangan sangkur bayonet Kempetai, menyebabkan rakyat kehilangan kesabarannya. Oleh karena itu timbulah pergolakan/ perlawanan di dusun Item Marga Panukal, yang digerakkan oleh bekas aktifitas Partai Serikat Islam Indonesia antara lain Abdul Saleh Mattjik dan Hamzah Kuntcit.<sup>56)</sup> Seperti apa yang telah diuraikan diatas, setelah Jepang menduduki daerah ini, semua kegiatan organisasi politik dibekukan oleh pemerintah Militer Jepang. Karena adanya larangan itu, maka pimpinan pusat PSII mengeluarkan maklumat yang berisi pernyataan bahwa seluruh anggota Partai Serikat Islam Indonesia supaya menghentikan kegiatannya untuk sementara waktu dan menganjurkan supaya bergerak secara diam-diam (bawah tanah) menurut kemampuan masing-masing. Pemerintah Militer Jepang setempat tidak tinggal diam saja, karena dengan melalui kaki-tangannya (bekas antek-antek Belanda) dengan cepat mengetahui siasat perjuangan organisasi tersebut.

Sehubungan dengan itu, maka gerak-gerik orang-orang bekas anggota Serikat Islam di daerah ini selalu diawasi dan dicurigai oleh Jepang. Sudah menjadi kebiasaan anggota Serikat Islam di dusun Ait Itam dan sekitarnya bahkan jauh sebelumnya daerah ini dimasukkan Serikat Islam, melakukan sholat pada suatu tempat tertentu dimana khotbahnya menggunakan bahasa Indonesia dan tidak menggunakan

---

<sup>55)</sup> H.Rasyad Nawawi, Wawancara, Palembang, 1980.

<sup>56)</sup> T.Ibrahim Alfian, et. al., Op cit, halaman 109 ; lihat Sej.Mi.Daerah Mil.IV Sriwijaya, Kenangan 30 tahun, Daerah Militer IV Sriwijaya, Palembang, 1975, halaman 18.

bahasa Arab. Pada jaman kolonial Belanda apakah khotbah itu berbahasa Arab ataukah bahasa Indonesia, tidak dilarang oleh penguasa setempat. Tetapi setelah daerah ini diduduki Jepang, maka mulailah adanya larangan khotbah yang menggunakan bahasa Indonesia dan sembahyang/ sholat Jumat diharuskan di Mesjid. Ikut campunya pemerintah Militer Jepang dalam masalah agama ini disamping tingkah laku orang-orang Jepang yang tidak manusiawi terhadap rakyat pedusunan menambah kebencian rakyat terhadap orang-orang Jepang yang berlaku kasar. Akhirnya kebencian itu tak dapat dikendalikan dan rakyat kehilangan kesabarannya.

Pada awal tahun 1943 mulailah aksi protes melawan pemerintah Militer Jepang setempat, perlawanan rakyat terhadap Jepang secara terang-terangan, yaitu ketika penguasa Jepang bersama beberapa orang penguasa bangsa kita datang ke dusun Air Itam, mendapat tembakan sebelum sampai di dusun Air Itam, dimana diantara rombongan itu kena peluru senapan kecepek. Peristiwa itu membuat orang Jepang sangat marah, dan dengan bantuan agen-agen penguasa Jepang setempat, banyak diantara orang-orang yang dahulu simpatisan para Serikat Islam ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Peristiwa ini telah membuat orang-orang Jepang bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat di Marga Panukal dengan menggunakan kekerasan, bahkan tokoh-tokoh Serikat Islam yang berdomisili di kota Palembang seperti : Abdul Saleh Mattjik dan Hamzah Koentjik ikut juga ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara Palembang. Diperkirakan jumlah orang-orang yang di tangkap sebagai rentetan peristiwa di Air Itam itu, yang dimasukkan ke penjara Palembang ± 92 orang.<sup>57)</sup>

Setelah setahun lebih di tahan di dalam penjara, di antara sekian banyak yang di tahan hanya tinggal beberapa orang saja yang masih hidup, karena akibat siksaan dan tidak diberi makan mereka itu mati semua. Diantara mereka yang masih hidup itu adalah : Hamzah Koentjit, Nashur bin Mahadam, Achmad Rivai bin Mahadam, Rasyidin bin H.Bachtum dan Abdul Saleh Mattjik. Mereka semua ini

---

<sup>57)</sup> Dinas Sosial Daerah Tk.I Sumsel. Op cit, halaman 54.



dihadapkan ke meja hijau dan hakimnya terdiri dari orang-orang Jepang. Keputusan terakhir mereka dijatuhi hukuman :

- a. Abdul Saleh Mattjik selama lima tahun penjara.
- b. Hamzah Koentjit selama empat tahun penjara.
- c. Nashar bin Mahadam tiga tahun penjara dan meninggal dunia dalam bulan Juli 1945 waktu menjalani hukuman di penjara.
- d. Achmad Rivai bin Mahadam selama tiga tahun.<sup>58)</sup>

Setelah proklamasi kemerdekaan RI mereka yang masih hidup dibebaskan dari penjara dan ikut aktif dalam perjuangan pada masa revolusi fisik di daerah ini sebagai kepala lasykar Hizbullah, yang telah mengambil bagian penting di antara anggota TNI lainnya.

Protes sosial yang pernah terjadi di daerah Onderafdeeling Musi Ilir pada masa pendudukan Jepang tidak hanya dalam bentuk fisik saja, tapi juga bersifat “non fisik” yaitu sebagian besar penduduk di pedusunan banyak yang mengungsi ke talang-talang atau kebun-kebun yang letaknya jauh dari dusun untuk menghindarkan diri dari tindakan kekerasan / pemaksaan yang datang dari penguasa Jepang setempat. Sulit untuk memberikan penilaian yang positif terhadap orang-orang Jepang selama mereka berkuasa di daerah ini mungkin juga hal seperti ini terjadi juga di daerah-daerah lain di Indonesia, di mana Kenpetai Jepang dengan sangkurnya yang terhunus sebagai ujung tombak yang sewaktu-waktu berbicara tanpa moralitas. Mereka tidak kepalang tanggung apabila pedang Samurai telah beraksi menghantam leher manusia yang tidak sejalan dengan kehendak penguasa Jepang setempat, seperti yang pernah terjadi/ menimpa diri seorang penduduk bernama Tais yang di tuduh mencuri minyak.<sup>59)</sup> Karena tindakan dan perlakuan orang-orang Jepang terhadap penduduk di luar perikemanusiaan itu mungkin dampak positifnya yang kita lihat pada waktu itu berkurangnya pencurian di dusun-dusun yang sepi penduduknya, karena mereka lebih terjamin keselamatannya

---

<sup>58)</sup> Ibid, halaman 24.

<sup>59)</sup> Penulis sendiri pernah mendengar dari orang-orang yang menyaksikan peristiwa tersebut : Zaidir Rasyid, Wawancara, Sekayu, 1988.

hidup di talang-talang atau di kebun-kebun yang sulit dijangkau oleh penguasa-penguasa Jepang setempat.

#### **IV. KEADAAN DI DAERAH MUSI BANYUASIN SEKITAR PROKLAMASI KEMERDEKAAN**

Sebelum membicarakan kondisi sosial kemasyarakatan di daerah ini mengenai tanggapan terhadap berita Proklamasi Kemerdekaan, akan diberikan penjelasan mengapa naskah ini menggunakan istilah “Perjuangan Rakyat” dan bukan Perjuangan Angkatan Bersenjata. Pengertian “Perjuangan Rakyat” di sini mempunyai arti : tidak hanya kekuatan fisik, militer, gerilya atau kekuatan politik diplomasi saja, tapi seluruh kekuatan yang ada dalam masyarakat. Rakyat di mana saja yang akan menghalangi kemerdekaan Indonesia. Semua ini merupakan perjuangan dalam bidang politik yang sangat menentukan pada permulaan revolusi.

Dalam pertempuran-pertempuran yang pernah terjadi di daerah Onderafdeeling Moesi Ilir dan Banyuasin, yang ikut bertempur adalah kesatuan-kesatuan rakyat. Pada pertempuran melawan Belanda dalam Aksi Militernya, peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI) lebih terkoordinir dan menonjol. Sementara itu peranan pemerintahan sipil bersama dengan pemuda dan rakyat pedusunan yang berjuang di bidang nonmiliter sangat besar pula. Khusus dalam menjalankan roda pemerintahan sipil yang berpindah-pindah, bidang penerangan yang membangkitkan semangat patriotisme terhadap kolonialisme Belanda dan menganjurkan semangat berkorban apa saja yang diperlukan guna perjuangan.

Perjuangan melawan Belanda selain perlawanan bersenjata juga perlawanan politik diplomasi, yang akhirnya menghasilkan beberapa perjanjian seperti : Linggarjati 25 Maret 1947; Renville 19 Januari 1948, Statemen Rum-Royen 7 Mei 1949 dan Konferensi Meja Bundar di Den Haag 27 Desember 1949. Semua perjanjian itu merupakan kesatuan dari perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

## A. Berita Proklamasi dan Sikap Pemerintah Jepang :

Dengan menyerahnya Jepang kepada pihak sekutu, maka berakhirilah kekuasaan Jepang atas seluruh wilayah Indonesia dan semua bekas jajahan berikut inventarisnya harus diserahkan kepada pihak Sekutu. Sejak peristiwa kapitulasi itu, kekuasaan atau kepulauan Indonesia berada di tangan Sekutu. Dengan lain perkataan, Indonesia harus diserahkan sebagai inventaris yang utuh dan lengkap kepada Laksamana Lord Louis Mountbatten dari SEAC (Inggris) dan kepada Jenderal Blamer dari Australia. Akan tetapi karena Sekutu terlambat datang ke Indonesia dan baru beberapa bulan kemudian, maka selama itu di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan (vacuum of power). "Momentum yang baik ini telah digunakan oleh para pemimpin Indonesia untuk memproklamkan kemerdekaan atas nama seluruh rakyat Indonesia."<sup>60)</sup>

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan oleh Soekarno-Hatta atas dorongan para pemuda di Jakarta<sup>61)</sup> pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat pukul 10.00 bertepatan dengan bulan Ramadhan, di Pengangsaan Timur 56 Jakarta. Berita Proklamasi itu tidak serentak dapat didengar oleh rakyat di seluruh pelosok tanah air, termasuk rakyat yang berada di daerah Sumatera Selatan. Masyarakat di daerah ini baru mendengar atau mengetahui berita itu beberapa hari sesudah tanggal 17 Agustus 1945. Bahkan penduduk yang tinggal di daerah yang terpencil, yang komunikasinya kurang lancar atau sama sekali belum ada sarana komunikasi, baru mendengar beberapa bulan kemudian. Hal ini umumnya disebabkan antara lain oleh :

- ☐ "Kesulitan komunikasi antara Jakarta dengan daerah-daerah keresidenan di Sumatera bagian Selatan, baik melalui darat/ laut dan udara, sehingga berita-berita dari Jakarta seringkali terlambat datangnya.

---

<sup>60)</sup> Nasution, A.H., Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia I, Angkasa, Bandung, 1977, halaman 187.

<sup>61)</sup> Adam Malik, Riwayat Proklamasi 17 Agustus 1945, Widjaya, Jakarta, 1950, halaman 42-66.

- ⇒ Radio-radio rakyat di segel atau di rampas oleh Jepang, dengan tujuan agar penduduk hanya mendengarkan berita dari radio Jepang saja.
- ⇒ Kemudian ada rakyat yang mendengar berita itu secara diam-diam, tapi keraguan karena Jepang masih kuasa penuh di daerah ini”.<sup>62)</sup>

Berita Proklamasi Kemerdekaan untuk pertama kali di dengar oleh segelintir penduduk Sekayu melalui radio kepunyaan Said menelus beberapa hari sesudah tanggal 17 Agustus.<sup>63)</sup> Tetapi secara resmi berita itu di terima di Palembang melalui Dr.Moh.Amir, Mr.Abbas dan Mr.Teuku Mohammad Hasan selaku wakil-wakil Sumatera dalam Panitia Pusat Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pada tanggal 24 Agustus 1945 tiba di Palembang dengan pesawat Jepang terakhir mendarat di pelabuhan Talang Betutu. “mereka menginap di Palembang dan pada malam harinya mengadakan pertemuan dengan pemuka-pemuka masyarakat antara lain : Dr.A.K.Gani, Dr.Moh.Isa, Asaari, Ir.Ibrahim, Mursodo, Rz.Fanani, Abdul Rozak dan Nungcik Ar”.<sup>64)</sup> Sebelum ada pertemuan itu, pada tanggal 22 Agustus 1945 beberapa orang pemuka masyarakat di Palembang : Abdul Rozak, Nungcik Ar, Raden Hanan, Asaari, Ir.Ibrahim, Bay Salim, Haji Tjikwan, Salim Paiman, Parmono dan Yap Tinag Ho dipanggil oleh syu-co-kan (Myako Tosio) untuk datang ke tempat kediamannya. “Dalam pertemuan itu pemuka-pemuka masyarakat mendapatkan informasi dari penguasa Jepang, bahwa Tenno Heika telah memerintahkan supaya berperangan dihentikan”.<sup>65)</sup>

Bertolak dari berita penghentian perang yang disampaikan sendiri oleh Syu-co-kan Myako Tosio itu, maka pada malam harinya di tempat kediaman A.k.Gani diadakan pertemuan yang dihadiri pula oleh pemuka-pemuka masyarakat dari luar kota. Dalam pertemuan itu antara lain disepakati untuk memulai “pengambilalihan kekuasaan” dari tangan Jepang, dalam hal ini diupayakan sampai ke daerah-daerah

---

<sup>62)</sup> Kementerian Penerangan, Republik Indonesia Sumatera Selatan, Palembang, 1954, halaman 259.

<sup>63)</sup> Moh.Haris, Wawancara, Sekayu, 1987.

<sup>64)</sup> Kementerian Penerangan, Op cit, halaman 37.

<sup>65)</sup> Ibid, halaman 35.

terutama ada pemusatan kekuasaan Jepang. Sekayu sebagai ibukota Kewedanaan Musi Ilir yang sekarang sebagai ibukota Kabupaten Musi Banyuasin, terdapat penguasa Jepang (Bunsyu-co) yang didampingi oleh Gun-co Azahari. Disamping Bunsyu-co terdapat tiga orang serdadu Jepang yang bertugas sebagai intel yang sering berhubungan dengan para pemuda setempat, yang secara tidak sadar telah membocorkan berita kekalahan Jepang, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945 Tenno Heika telah memberhentikan peperangan.<sup>66)</sup> Selamaet sebagai seorang dokter pemerintah sejak masa akhir pemerintah kolonial Belanda dan jaman pendudukan Jepang di Sekayu, merupakan tokoh potensial yang berperan ganda : di satu pihak beliau sebagai pelayan pemerintah dan di lain pihak beliau sebagai tokoh pergerakan yang bergerak di bawah tanah. Sebagai ketua Badan Kebaktian Rakyat pada jaman pendudukan Jepang di Sekayu, beliau tidak dapat dilalui begitu saja oleh pemerintah Militer Jepang di daerah ini, karena organisasi yang dipercayakan kepadanya itu merupakan satu-satunya organisasi resmi yang mempersatukan antara pegawai dan pamong dengan pemimpin pergerakan/ pemuka masyarakat di daerah ini.<sup>67)</sup>

Sebelum tanggal 24 Agustus 1945, situasi di daerah pedalaman umumnya dan daerah Musi Ilir khususnya tidak menentu, karena di satu pihak ada yang mengatakan bahwa Jepang akan digantikan oleh (Inggris) yang dikuasakan pada Cina dan pihak lain mengatakan bahwa kita ini sudah merdeka. Bahkan informasi yang berasal dari penguasa setempat waktu itu (Gun-co, Fuku Gun-co, dan lain-lain) mengatakan bahwa berita mengenai kemerdekaan itu tidak benar karena Soekarno-Hatta tertangkap oleh Sekutu. Tetapi setelah terbentuk Komite

---

<sup>66)</sup> A. Gattam Idrus, Wawancara, Epil, 21 September 1986 (salah seorang pemuda yang ada hubungannya dengan intel Jepang).

<sup>67)</sup> Hampir semua informan menyebutkan bahwa beliau adalah pemuka masyarakat di daerah ini yang disegani, yang secara diam-diam telah memainkan peranannya, dan oleh karena itu beliau diangkat sebagai wakil Dr.Muh.Isa setelah pertempuran lima hari lima malam di Palembang ketika pembentukan KNI daerah Musi Ilir, beliau telah ditunjuk sebagai Ketua KNI Kewedanaan Musi Ilir, di mana ia telah memainkan peranannya dalam menyebarluaskan berita Proklamasi di daerah ini.

Nasional Indonesia di Indonesia di Palembang dengan ketua/ wakil ketua Muh. Isa dan Abdul Saleh Mattjik pada tanggal 3 September 1945,<sup>68)</sup> maka beberapa hari kemudian datanglah utusan dari Palembang, dibawah pimpinan A.S.Mattjik dan Wasyik (Agen Bank) ke Sekayu untuk menemui dr.Selamaet dan sekaligus memberitakan tentang Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia.<sup>69)</sup> Setelah terbentuk susunan Pemerintah RI di Palembang, berita tentang Proklamasi tersebut disebarkan pula oleh Abdul Hamid sebagai pegawai Penerangan waktu itu, mudik ke Sekayu dengan membawa ratusan “bendera” Merah Putih untuk dikibarkan pada setiap dusun yang dilaluinya. Kedatangan utusan dan berita yang dibawah oleh Abdul Hamid dari Palembang tersebut, merupakan jawaban terhadap berita yang tidak menentu dan secara spontanitas di sambut oleh seluruh masyarakat pedusunan. Sebagai hasil pertemuan dr.Selamat dengan pemuka-pemuka masyarakat di Sekayu, diputuskan untuk mengirim “kurir” ke dusun-dusun untuk menemui pemuka-pemuka agama setempat mengenai berita Proklamasi.<sup>70)</sup>

Berdasarkan hasil informasi analisis sementara, maka berita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia walaupun dalam lingkungan terbatas ada yang mendengar berita itu melalui radio gelap, tetapi secara resmi berita itu baru sampai di ibukota Musi Iilir sesudah tanggal 3 September 1945. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan apabila dr. Selamat sendiri telah mendengar berita tersebut dari radio pribadi, tetapi tidak menyampaikannya dan situasi waktu itu tidak mengijinkan untuk berbuat sesuatu. Penguasa Jepang masih lengkap persenjataannya, yang sewaktu-waktu dapat membahayakan diri berhadapan dengan Kenpetai yang bertangan besi.

---

<sup>68)</sup> Kementerian Penerangan, Op cit, halaman 39.

<sup>69)</sup> Haji Thahir, Wawancara, Palembang 1987; Haji Moenir, Wawancara, Palembang, 1985.

<sup>70)</sup> M a m o e n A b d u l l a h (salah seorang Tim penulis) sendiri ikut hadir mendengarkan pidato yang disampaikan oleh orang-orang dari Sekayu al.Guru Bakar dkk. Di Gedung Sek.Rakyat Islam di Lumpatan. Pertemuan itu dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat antara lain; H.Amir Hamzah, H.Madhani, H.Abdullah, H.Munir dan Kerio Syahri H.Abdullah bin H.Rozak, Wawancara, Lumpatan, 1985.

Tetapi setelah berita itu dibawa oleh utusan dari Palembang ke Sekayu, maka dr.Selamet dengan giat mengatur siasat dalam menghadapi gerak gerik orang-orang Jepang yang masih ada di ibukota Kewedanaan Musi Ilir. Bahkan setelah berakhir pertempuran lima hari lima malam di Palembang, dr.Selamet yang berfungsi sebagai Badan Pekerja ditunjuk wakil Residen di Palembang mendampingi Gubernur Muda dr.Muh.Isa.<sup>71)</sup>

Sementara para pemuka masyarakat diliputi oleh pemikiran sehubungan dengan berita Proklamasi yang belum jelas, dan tindakan apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Jepang setelah mengalami kekalahan, di lain pihak rakyat pedusunan di cekam rasa ketakutan dan kebingungan; tiba-tiba di kota Palembang pada tanggal 22 Agustus 1945 pimpinan Badan Kebaktian Rakyat menerima undangan dari Syu-ko-kan Tosio. Undangan Syu-ko-kan itu mula-mula ditanggapi dengan perasaan ragu-ragu dan penuh kecurigaan oleh para pemuka masyarakat yang duduk didalam badan tersebut (Palembang Hokokai). Keraguan dan rasa takut itu selalu dihubungkan dengan isu-isu pembunuhan (masacre) yang pernah dilakukan oleh Jepang di daerah Kalimantan. Oleh sebab itu dalam memenuhi undangan Syu-ko-kan tersebut, ada beberapa orang yang tidak ikut serta antara lain : dr.A.K.Gani dengan maksud apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka masih ada orang yang meneruskan perjuangan. Pada pertemuan itu sama sekali tidak disinggung mengenai kemerdekaan Indonesia tetapi Syu-ko-kan meminta pada para pemuka masyarakat supaya bersama-sama bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di daerah ini.<sup>72)</sup>

Setelah kembali undangan Syu-ko-kan, maka mulailah A.K.Gani menyusun rencana untuk membentuk pemerintahan bangsa Indonesia di dalam wilayah keresidenan Palembang dengan ketua dan wakilnya : A.K.Gani dan Abdul Rozak. Nampak dengan jelas bahwa kekuasaan Jepang sudah mulai merosot dari hari ke hari semakin longgar. Praktis mereka tidak dapat lagi menguasai dan mengontrol alat-alat pemerintahan. Dapat kita perkirakan bahwa orang-orang

---

<sup>71)</sup> Kementerian Penerangan, Op cit, halaman 62.

<sup>72)</sup> Ibid, halaman 35-36.

Jepang pada waktu itu dalam kondisi trauma, yaitu di satu pihak mereka akan di hadapkan di muka pengadilan perang sebagai orang yang kalah perang, sedangkan di lain pihak mereka sewaktu-waktu akan menerima “balas dendam” dari rakyat Indonesia sebagai akibat perbuatannya selama ini. Bertolak dari analisis ini, maka sejak tanggal 14 Agustus 1945 orang-orang Jepang yang bertugas di ibukota Kewedanaan Musi Ilir tanpa diketahui dengan jelas oleh rakyat sekitarnya, semakin hari semakin menghilang dari peredaran entah kemana mereka pergi.<sup>73)</sup> Rupanya menjelang malam mereka bergerak ke kota Palembang dengan membawa alat perlengkapan, kecuali orang-orang Jepang yang bertugas di daerah-daerah sumber minyak seperti : Mangunjaya, Keluang, Pendopo dan Sungai Angit masih tetap berada di tempat.

Ada suatu hal yang lain dari biasanya yaitu baik di kota Palembang maupun di Sekayu orang-orang Jepang dengan baik hati telah menjual barang-barang kebutuhan pokok secara besar-besaran. Dengan kata lain, Jepang melepaskan semua barang logistik sebagai persediaan perang selama ini, terutama bahan-bahan makanan yang di rampas dari rakyat pedusunan. Di kota Sekayu sendiri barang-barang yang selama ini sulit didapatkan, dengan mudah dapat di beli oleh rakyat antara lain : minyak goreng, gula, minyak tanah, sabun, kain belacu dan garam. Tugas melucuti dan menggembalikan pasukan Jepang ke negeri asalnya berada dalam tanggung jawab pasukan Sekutu. Khususnya di Indonesia berada di bawah komando Asia Tenggara (South East Asia Command) dengan komandannya Laksamana Lord Louis Mountbatten. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Mayor Greenhigh pada tanggal 19 September 1945 adalah orang pertama dari utusan Sekutu menginjakkan kakinya di lapangan terbang Kemayoran (Jakarta) dengan terjung payung.<sup>74)</sup> Di Palembang dengan tugas yang sama telah dikirim pula Mayor Fordice pada

---

<sup>73)</sup> H.M.Harris, Wawancara, Sekayu, 1987; Haji Gani bin H.Baidjuri, Wawancara, Lumpatan, 1983.

<sup>74)</sup> Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI, Dep.P & K Direktorat Sejarah & Nilai Tradisional, Jakarta, 1982/1983, halaman 109.



tanggal 15 Oktober 1945.<sup>75)</sup> Mengingat pasukan Jepang di daerah-daerah pada umumnya sudah banyak berkumpul di kota Palembang, maka dalam pelaksanaan tugas untuk mengangkut mereka ke negeri asalnya tidak banyak mengalami kesulitan.

## **B. Tanggapan Masyarakat Terhadap Proklamasi :**

Kebangkitan Nasional sejak tahun 1908 telah menyebar pula hampir ke seluruh pelosok tanah air tidak terkecuali di daerah yang kini terkenal dengan sebutan Kabupaten Musi Banyuasin, berbagai partai dan organisasi sosial kemasyarakatan yang pada tahun-tahun 30-an terdapat pula di daerah ini sesuai dengan identitasnya seperti : Serikat Islam yang kemudian bernama Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Muhammadiyah, Nadhatul Ulama (NU) Partai Nasional Indonesia (PNI), Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dan sebagainya. Sebagai suatu organisasi dengan segala kegiatannya yang dilaksanakan oleh pusat pada akhirnya sampai juga ke anak cabang, ranting dan selanjutnya pada anggota-anggotanya. Baik pada masa akhir pemerintahan Hindia Belanda maupun Jepang pengalaman pahit yang sangat berharga sebagai konsekuensi logis dari upaya menjadi bangsa yang merdeka, mendapatkan iklim baru pada masa pendudukan Jepang, terutama ditujukan pada golongan Islam waktu itu. Permusuhan Jepang dengan Sekutu sekaligus dengan pemerintah kolonial Belanda mencerminkan adanya unsur-unsur yang sama dengan golongan Islam yaitu mengusir dan menyingkirkan pemerintah Hindia Belanda dari bumi Indonesia. Faktor inilah yang menimbulkan hasrat yang kemudian menjadi kenyataan historis untuk para pemimpin dan rakyat Indonesia dalam hal tertentu dapat “bekerja sama” dengan Jepang.

Ketika Jepang menduduki daerah ini, tokoh-tokoh partai yang ada di Palembang waktu itu antara lain : A.K.Gani, Nungtjik Ar, AS.Sumadi, Muh.Isa, As.Mattjik bersepakat untuk menerima petunjuk dan pedoman dari Bung Karno yang pernah singgah di Palembang dalam perjalanannya ke Jakarta. Selama beliau berada beberapa hari di Palembang, telah banyak hal yang dibicarakan terutama yang

---

<sup>75)</sup> Kementerian Penerangan, Op cit, halaman 44.

menyangkut bagaimana sikap kaum pergerakan terhadap Jepang. Bung Karno menganjurkan kepada pemuka-pemuka masyarakat di daerah ini agar menjaga ras persatuan dan kesatuan di kalangan para pemimpin dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat secara keseluruhan, dalam menghadapi totaliterisme Jepang<sup>76)</sup> Fatwa dan anjuran Bung Karno ini merupakan pedoman pokok dalam langkah selanjutnya dapat di atur dengan dua cara : bergerak secara diam-diam (*ondergrond*) dan bergerak dalam penam pilan “Indonesia-Nippon sama-sam a”. Apa yang kita tem ukan di atas ini, merupakan lanjutan perjuangan bangsa Indonesia sejak bangkitnya Boedi Oetomo 1908. Dengan kata lain walaupun semua partai politik di jaman pendudukan Jepang telah dibubarkan, semangat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan tetap menyala, sehingga kontiyuitasnya terpelihara sampai Jepang menyerah kepada Sekutu 14 Agustus 1945.

Di daerah Kewedanaan Musi Ilir, baik yang melalui jalan damai dalam arti bekerjasama dengan fasis Jepang maupun bergerak di bawah tanah (*ondergrond*) melawan penguasa baru merupakan fakta sejarah yang ada di daerah ini. Golongan yang tergolong atau termasuk melalui jalan damai, yaitu adanya Badan Kebaktian Rakyat, dimana kita dapati para pemimpin masyarakat di daerah ini sebagai anggotanya. Sedangkan peristiwa yang pernah terjadi di dusun Air Itam dapat dianggap sebagai perwujudan dari gerakan di bawah tanah. Sebgaik akibat peristiwa itu, penguasa Jepang di daerah ini telah mengambil sikap yang lain jika dibandingkan tempat lain di dalam wilayah keresidenan Palembang. Masyarakat pedusunan selalu dalam pengawasan yang ketat dan segala kegiatan yang menyangkut kehidupan masyarakat, selalu dimata-matai oleh intelegent Jepang setempat. Hampir setiap minggu harus menghadap ke ibukota Kewedanaan untuk mendengarkan wejangan dari Bunsyu-co, sehingga tidak di beri kesempatan kepada mereka itu untuk lebih dekat dengan rakyat pedusunan, mengingat peranannya selama ini sebagai panutan di segala aspek kehidupan masyarakat. Dengan segala macam cara penguasa baru menjauhkan diri dari para pemuka-pemuka agama (Penghulu atau Khotib) dari rakyat di dalam kerangka menekan

---

<sup>76)</sup> *Ibid*, halaman 32.

semangat perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan, secara ideologi Jepang tidak berhasil menguburkan “semangat” rakyat yang ingin bebas dari segala macam bentuk penindasan.

Ketika masyarakat di Ibukota Kewedanaan Musi Iilir mendengar berita proklamasi, secara spontanitas di sambut hangat oleh golongan yang selama ini aktif dalam organisasi sosial politik. Mereka sadar akan proklamasi tersebut, karena selama ini merupakan idaman mereka yang selalu mendapat tantangan dari pihak penguasa, baik penguasa kolonial Belanda maupun penguasa Jepang yang baru saja menyerah kalah pada Sekutu. Tetapi bagaimanapun juga masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat pedusunan di daerah ini memiliki ciri “kebhinekaan”, terutama sikap atau persepsi mereka dalam menghadapi berita proklamasi waktu itu. Tidak hanya masyarakat di perkotaan saja yang memiliki pandangan yang berbeda, tetapi juga masyarakat pedusunan yang sebagian besar terdiri dari petani tradisional, memiliki sikap yang demikian yaitu :

1. Kelompok masyarakat yang bersiap-siap untuk menyambut kembalinya pemerintah kolonial Belanda. Mereka itu pada umumnya tidak senang bahkan menentang kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan, dan menganggap suatu hal yang tidak mungkin dicapai atau hayalan semata-mata. Secara realitas mereka ini terdiri dari orang-orang yang pada masa kolonial Belanda memperoleh status sosial yang menguntungkan terutama dalam lingkungan keluarga penguasa formal-tradisional di daerah ini. Karena mereka bersikap demikian, maka tidak heran apabila mereka menjadi sasaran para pejuang pada waktu berlangsung revolusi fisik.
2. Kelompok yang betul-betul sadar dan mendambakan kemerdekaan tanpa ragu-ragu, terjun ke medan perjuangan dengan semboyan “Merdeka atau Mati”, “Sekali Merdeka Tetap Merdeka”, yang pada dasarnya memiliki semangat juang rela berkorban untuk kemerdekaan bangsa dan tanah air. Golongan ini pada jaman kolonial Belanda dan Jepang sering masuk keluar penjara, dan selalu dicemoohkan oleh kelompok pertama dan dianggap sebagai orang-orang utopis. Untuk daerah Musi Iilir dan sekitarnya,

mereka ini sebagian besar berasal dari aktifis-aktifis Serikat Islam atau Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) dan yang bergerak dalam organisasi-organisasi politik lainnya.

3. Kelompok rakyat jelata yang sebagian besar terdiri dari petani dan pada umumnya nonfaktor dalam dunia politik,<sup>77)</sup> dimana mereka ini tidak tahu apa-apa tentang kemerdekaan hidupnya statis. Sebagai petani tradisional mereka erat sekali hubungannya dengan pemuka-pemuka agama setempat yang pada umumnya sepanjang masa memiliki nasib yang kurang menguntungkan.

Barangkali agak sulit bagi generasi yang tidak mengalami. Menyaksikan dan merasakan langsung masa perjuangan kemerdekaan bangsanya, untuk menghayati situasi masyarakat pedusunan di daerah ini. Apa yang dilukiskan dalam buku-buku sejarah untuk semua jenjang sekolah di tanah air kita, khususnya yang menyangkut kurun waktu revolusi kemerdekaan Indonesia, bahwa perjuangan/ perlawanan terhadap Belanda merupakan “perang rakyat semesta” memang benar. Fenomena sosio-kultural yang dikemukakan di atas merupakan fakta historis karena masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat pedusunan daerah ini khususnya adalah masyarakat majemuk (plural society), seperti apa yang pernah dikemukakan oleh Vera Micheles Dean.<sup>78)</sup> Meskipun adanya persepsi yang berbeda terhadap berita proklamasi, sebagian besar masyarakat pedusunan dan perkotaan, tetap berada di belakang pemuka-pemuka agama yang menginginkan Kemerdekaan dan lepas dari penjajahan. Apakah pemuka-pemuka agama itu tergolong “kaum tuo” atau “kaum mudo”, dalam masalah menentang kafir (Belanda), mereka berada pada suatu garis untuk menerima berita proklamasi.

### **C. Lahirnya BKR/ Lasyar dan Pembentukan Pemerintahan KNI di Ibukota Kewedanaan :**

---

<sup>77)</sup> Sartono Kartodirdjo, “Kepemimpinan Dalam Sejarah Indonesia”, dalam Bulletin Yaperna, No.1 Th.I, Juni 1984.

<sup>78)</sup> Vera Merchelesa Dean, The Nature of The Non-Westren World, Mentor Book (the New American Library), 1960, halaman 135.

Seperti telah diketahui bahwa dalam sidangnya tanggal 19 Agustus 1945, PPKI telah memutuskan untuk membentuk tentara kebangsaan sebagai aparat pertahanan. Tetapi berdasarkan pertimbangan politis dalam sidang berikutnya Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai bagian dari Badan Penolong Korban Perang. Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 1945 di instruksikan kepada daerah-daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk membentuk suatu Badan Keamanan, Intruksi tersebut adalah hasil keputusan rapat PPKI pada tanggal 22 Agustus, yang menyatakan berdirinya tiga lembaga baru yaitu : Komite Nasional, Partai nasional dan Badan Keamanan Rakyat.<sup>79)</sup> Atas dasar intruksi itu di Palembang diadakan pertemuan dengan wakil-wakil dari golongan masyarakat pada tanggal 29 Agustus 1945 di bawah pimpinan A.K.Gani. Pada pertemuan itu telah menghasilkan kata sepakat bahwa keamanan dan ketertiban umum akan di jaga bersama demi kelancaran tindakan yang akan di tempuh selanjutnya. Untuk memperkuat tekad tersebut, maka pengumuman ditandatangani oleh pemuka-pemuka dari masing-masing golongan etnis :

1. Wakil golongan Indonesia : A.K.Gani dan Rz.Fanani.
2. Wakil golongan Tionghoa : Lauw Goean dan Tan Ban San.
3. Wakil golongan India : SA.Kitcher Maricar dan Lilaram.
4. Wakil golongan Arab : SA. Almenoar dan A. Racham Asegaf.<sup>80)</sup>

Sehari sesudah berdirinya KNI Daerah Keresidenan Palembang, diresmikan pula Badan Penjaga Keamanan Rakyat pada tanggal 4 September 1945 yang tugasnya membantu Kepolisian Republik Indonesia, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pucuk pimpinan BPKR mula-mula adalah Hasan Kasim dan Wakilnya Moh.Arief. Badan Penjaga Keamanan Rakyat ini melalui proses kemudian menjelma menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) dan akhirnya TNI hingga kini. Apa yang terjadi di kota

---

<sup>79)</sup> Nugroho Notosusanto, op cit, halaman 94.

<sup>80)</sup> Kementerian Penerangan. Op cit, halaman 101.

Palembang sebagai pusat Pemerintahan Daerah Keresidenan, segera diikuti oleh daerah-daerah Uluhan termasuk daerah Kewedanaan Musi Ilir. Badan Keamanan Rakyat di Jawa sebagai besar terdiri dari pemuda-pemuda bekas anggota Peta, KNIL, Heiho (Heitassen=tentara dan ho=pembantu) yang telah memiliki pengalaman militer. Dalam perkembangan selanjutnya, BKR dimanfaatkan sebagai wadah perjuangan. Mengingat pemerintah RI belum sempat membentuk Tentara Nasional sebagai wadah satu unsur aparatur negara, maka para pemuda yang kurang puas dengan kehadiran BKR waktu itu membentuk badan-badan perjuangan yang kemudian menyatukan diri dalam sebuah "komite van aksi" yang bermarkas di Jalan Menteng 31 Jakarta dibawah pimpinan Adnan Malik, Sukarni, Chairul Saleh, M.Nitimiharjo dan lain-lain.<sup>81)</sup> Di antara organisasi-organisasi yang bernaung di bawah komite van aksi tersebut adalah Angkatan Pemuda Indonesia (API) Barisan Rakyat Indonesia (BARI) dan barisan Buruh Indonesia (BBI). Kemudian terbentuk badan-badan perjuangan antara lain : Barisan Banteng Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), Hizbullah, Sabillillah, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI). Di samping itu ada pula badan-badan yang bersifat khusus seperti : Kesatuan-kesatuan Pelajar (Tentara Pelajar, Tentara Genie Pelajar dan Tentara Republik Indonesia Pelajar) yang berhubungan dengan tentara reguler terdekat. Organisasi-organisasi atau badan-badan perjuangan ini, kemudian menyebar ke seluruh tanah air termasuk Sumatera.

Di ibukota Kewedanaan Musi Ilir/ Sekayu pada akhir-akhir kekalahan Jepang terhadap Sekutu, terdapat Badan Kebaktian Rakyat yang diketuai oleh dr.Selamet Prawironoto sebagai sarana pemerintah Jepang untuk mendapatkan bantuan sepenuhnya dari rakyat, baik dalam bentuk bantuan tenaga maupun bahan makanan. Badan Kebaktian Rakyat itu dirubah dengan nama badan Perjuangan Rakyat Indonesia (BPRI) Musi Ilir, setelah menerima berita Proklamasi 17 Agustus 1945. Badan ini merupakan suatu wadah bagi pemuda-pemuda yang aktif dalam menyambut berita proklamasi dengan

---

<sup>81)</sup> Kementerian Penerangan, Op cit, halaman 101.

anggota-anggotanya antara lain A.Rivai (Air Item), Haji Moh.Noer, haji A.Moenir Zainuddin, H.M.Qoriq Ujud, Haji Moh.Yasin Yazid,H.A.Halim Mustopa dan Sazili bin H.Mufti.<sup>82)</sup> Dengan giat mereka menyebarkan berita proklamasi, sambil membangkitkan semangat juang untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diumumkan pada seluruh lapisan masyarakat di daerah ini. Untuk keringanan tugas tersebut, Wedana Tjek Oetih memberikan bantuan/pinjaman alat transportasi dalam bentuk perahu dan mobil merk Ford, untuk mendatangi dusun-dusun dan daerah-daerah yang kemungkinan dapat di jangkau. Fungsi dan peranan dr.Selamet Prawironoto waktu itu tidak kecil bahkan dianggap sebagai “figgur” di bali layar dalam menentukan sikap untuk menghadapi segala kemungkinan,<sup>83)</sup> karena utusan dari Palembang yang membawa berita proklamasi ke ibukota Kewedanaan Musi Iilir, beliaulah yang dituju semula sebelum bertemu dengan pemuka-pemuka masyarakat yang lain. Demikian pula pada waktu terjadi benturan antara orang-orang Jepang yang akan mengabungkan diri ke Pendopo melalui Sekayu menyeberangi Sungai Musi yang akhirnya terjadi tembak menembak, keputusan terakhir ada di tangan beliau bersama dengan Kiayi Haji Zainuri, dan pelaksanaannya dipegang Usman Bakar dan kawan-kawan.

Badan Perjuangan Rakyat Indonesia<sup>84)</sup> Musi Iilir ini bermarkas di rumah/ pavillium yang dulu ditempati oleh Kontroleur. Kemudian Badan Perjuangan seperti ini berdiri pula di dusun Epil yang di pimpin oleh Umar Hasan.<sup>85)</sup> Ketika diadakan pertemuan antar pemuda di

---

<sup>82)</sup> Haji Moh.Yasin, Wawancara, Sekayu 1988; Menurut keterangan H.Romli Rozak, anggota-anggotanya terdiri dari A.Moenir Utih, Ali Bakar, Romli Rozak dan Alikomar Wasik. Badan itu diketuai oleh Syazili H.Mukti dan sekretarisnya Romli Rozak, nampak dengan jelas para pemuda tersebut berasal dari anggota Lasykar yang bernafaskan agama.

<sup>83)</sup> M a m oen A bdullah sebagai nonparticipan yang pada waktu itu sedang berada di Sekayu sebagai murid Kyoing-yo Seijo, nampaknya peranan dr.Selamet Cs. Sebagai tokoh sentral dalam memutuskan segala kebijakan untuk menghalang-halangi orang Jepang yang akan menyeberangi Sungai Musi.

<sup>84)</sup> Ada yang mengatakan Badan itu adalah Badan Pemberontak Rakyat Indonesia. Yang jelas badan itu timbul sebelum lahirnya BKR yang dipimpin Usmar Bakar.

<sup>85)</sup> Haji Romli Rozak, Wawancara, Sekayu, 1988.

rumah A.K.Gani jalan Kepandean BPRI Musi Ilir diwakili oleh dr.Selamet, Haji M.Yasin Yazid dan Haji A.Moenir. Dengan kata lain, kelompok-kelompok pemuda yang ada di dalam Badan Perjuangan Rakyat Indonesia ini merupakan “Cikal Bakal” dalam proses pembentukan Angkatan Bersenjata di daerah Musi Ilir, yang akhirnya kita kenal sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Beberapa hari setelah terbentuknya BPKR di Palembang atas himbauan Selamet Prowinoto dan H.Zainuri di ibukota Kewedanaan Musi Ilir/ Sekayu terbentuklah Badan seperti itu pada tanggal 27 September 1945 dengan susunan sebagai berikut :

1. Pimpinan Umum : Usmar Bakar (bekas perwira Gyugun)
2. Wakil Pimpinan I : A.Munandar Wasyik.
3. Wakil Pimpinan II : A.Kosim Dkahayat dan Nawawi Gaffar<sup>86)</sup>

Badan tersebut beranggotakan para pemuda sebanyak 30 orang diantaranya Gatam Idrus, Manaf, Alamsyah Godek, Abunikman, A.Rivai Air Item, Abdurachman, Wahiduddin, Basri, H.udjud, Dahlan, Dulbari, Saleh, Umar Djawa, Harun Abuasi, Yazid dan Abdullah Awam. Mereka ini dilengkapi dengan senjata api buatan sendiri, senjata tajam (tombak, golok dan pedang) dan bambu runcing. Kemudian mereka memiliki senjata otomatis hasil rampasan senjata Jepang di Pendopo yang dilakukan oleh para pemuda Air Item antara lain : sebuah senapan mesin Lewis Gun, satu peti granat tangan dan 10 pucuk Karabin.

Sejalan dengan perkembangan BPKR di Palembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat di Kewedanaan Musi Ilir Sekayu berubah menjadi Kompi IV bagian dari Batalyon II, dengan susunan Pimpinan sebagai berikut :

1. Komandan Kompi : Kapten Usman Bakar
2. Wakil Komandan Kompi I : Lettu. Wahidin
3. Wakil Komandan Kompi II : Letda. A. Munandar Wasik  
Letda. Nawawi Gaffar  
Pembantu Letnan A. Dhahayat

---

<sup>86)</sup> Usmar Bakar, Wawancara, Palembang, November 1984.



Markasnya dipindahkan ke jalan Merdeka (Sekarang Bank Rakyat) dengan asramanya mengambil tempat Hotel Rangonang sekarang. Sebagai basis anggota BPKR adalah para pemuda yang pernah mengikuti latihan militer atau Heyho pada jaman pendudukan Jepang. Pristiwa penghadangan orang-orang Jepang yang akan menggabungkan diri ke Pendopo. Merupakan sikap kebersamaan antara anggota BPKR dengan rakyat yang dipimpin oleh pemuka-pemuka masyarakat di daerah ini. Persatuan yang muncul secara spontanitas antara pemuka-pemuka masyarakat di daerah ini, apakah itu tergolong kaum tua atau kaum muda, merupakan modal yang cukup besar dalam Sejarah Perjuangan Rakyat di daerah ini dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Semangat jihad yang telah berkobar di dalam hati sanubari telah melahirkan beberapa badan perjuangan/ lasykar sebagai bagian dari BPKR Musi Ilir seperti :

1. Lasykar Hisbullah di bawah pimpinan A. Koriq dan kawan-kawan.
2. Lasykar Sabilillah yang dipimpin oleh Haji Umar bin H. Kodir.
3. Lasykar Mujahiddin dipimpin oleh Kiayi H. Rasyid Sidiq.
4. Lasykar Pemuda di bawah pimpinan Murod Senin dan Suhud.
5. Badan Pelopor Rakyat Indonesia dipimpin oleh Sazili bin Haji Mukti.

Semua Badan perjuangan/Lasykar yang lahir pada waktu itu dibawah tanggung jawab komite Nasional Indonesia (KNI) Kewedanan Sekayu yang diketuai oleh Selamat Prawinoto. Secara Organisatoris badan-badan tersebut masing-masing berdiri sendiri. Namun demikian mereka seolah-olah terikat oleh tekad “hidup atau mati” dalam mempertahankan kemerdekaan. Untuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan serta memperlancar jalannya perjuangan, maka tercapailah kesepakatan bersama untuk menjadikan BPKR yang dipimpin Kapten Usman Bakar menjadi komando tertinggi, karena badan ini satu-satunya yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia di Palembang.

Khusus untuk daerah Kewedanan Musi Ilir pada awal revolusi, peranan Pemuka-pemuka masyarakat dalam menggerakkan massa waktu itu, merupakan fenomena sosio- kultural yang perlu diperhitungkan, apabila kita berbivara mengenai perjuangan rakyat semesta,<sup>87)</sup> Hampir setiap dusun terdapat pemuka-pemuka masyarakat, yang cukup besarperanannya dalam menakinkan rakyat pedusunan untuk mempertahankan kemerdekaan. Pemuka-pemuka masyarakat itu antara lain : Kiyai H. Zainuri, H. Amir Hamzah, H. Moh Noer, H. Abdullah. H. Oemar Mustopa, H. Abdulkohar, H. Abdurrachman, H. Abdul Hasan, H. Yasin, H. Ayat dan Abdulwahid. Di antara mereka ini ada yang terus menjadi anggota Angkatan Bersenjata sampai akhir hayatnya, dan ada pula yang berjuang melalui jalur pendidikan setelah Pengakuan Kedaulatan.

Kemerdekaan Indonesia yang disiarkan melalui radio keseluruhan tanah air, selanjutnya diiringi pula oleh instruksi Pemerintah RI yang baru dibentuk, untuk melaksanakan pemindahan kekuasaan didaerah-daerah dengan selusin tuntutan proklamasi. Berdasarkan instruksi itu ditetapkan untuk membentuk suatu Lembaga Komite Nasional Indonesia didaerah-daerah di seluruh wilayah tanah air dengan pusatnya di Jakarta. Lembaga ini merupakan penjelmaan kebulatan tekad dan cita-cita bangsa sIndonesia untuk menyelenggarakan Kemerdekaan Indonesia, yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan akan berusaha untuk :

1. “M enyatakan kem auan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka.
2. Mempersatukan rakyat dari segalalapisan dan jabatan smpaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia, persatuan kebangsaan yang bulat dan erat.
3. Membantu menentramkan rakyat dan turut menjga keselamatan umum.

---

<sup>87)</sup> A. H. Nasution, Pokok-pokok Grilya, Pembimbing, Jakarta, 1954, halaman 9-12.

4. Membantu pemimpin dalam meyenggarakan cita-cita bangsa dan di daerah membantu Pemerintah Daerah untuk kesejahteraan umum”<sup>88)</sup>

Dalam instruksi tersebut ditegaskan pula, bahwa Komite Nasional Indonesia pusat (Jakarta) memimpin dan memberi petunjuk kepada Komite Nasional di daerah-daerah. Baik di pusat maupun di daerah-daerah dipimpin oleh seorang ketua dan beberapa anggota pengurus yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional.

Sehubungan dengan instruksi itu dan setelah diadakan pertemuan antara para pemimpin, maka pada tanggal 3 September 1945 ditetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Daerah Keresidenan Palembang. KNI daerah Keresidenan Palembang ketika mula-mula dibentuk, diketuai oleh A.K. Gani dengan 40 orang anggota. Tetapi A.K. Gani ditetapkan menjadi Residen Palembang oleh pusat, maka Moh. Isa adalah seorang anggota KNI daerah Keresidenan Palembang, di tetapkan menjadi ketua dengan susunan pengurus sebagai berikut :

1. Dr. Moh. Isa : Ketua
2. Abdul Saleh Mattjik : Wakil ketua
3. Nungtjik Ar. : Penulis
4. Hamid Husin : Pembangu
5. Agus Rachman : Bendahara.<sup>89)</sup>

Kepada masing-masing anggota diberi tugas untuk menyusun organisasi-organisasi perjuangan, dan bila perlu menduduki pimpinan dalam berbagai jabatan instansi. Pembentukan KNI di kota Palembang sebagai pusat kegiatan Pemerintah RI, selanjutnya di daerah-daerah kewedanan di dalam wilayah Keresidenan Palembang.

Kewedanan Musi Ilir dengan ibukotanya Sekayu, yang sekarang menjadi ibukota Kabupaten Musi Banyuwasin, setelah menerima berita proklamasi yang dibawah Abdul Salwh Mattjik dan kawan-kawan, oleh Selamat Prawironoto yang menjabat sebagai

---

<sup>88)</sup> Osman Raliby, dokumentasi Historica, Bulan Bintang, Jakarta, 1953, halaman 16.

<sup>89)</sup> Kementian Penerangan, Op cit, halaman 39.

kepala Rumah Sakit Sekayu, dibentuk pula KNI di daerah ini dengan ketua Selamat Prawironoto sendiri dan sekretaris Abdul Mustopa. Adapun anggota-anggotanya antara lain Kiayi H. ainuri, Ismail H. Yusuf dan Kiayi H, Abdullah.<sup>90)</sup> Dalam kegitannya sehari-hari KNI daerah ini menggantikan aktivitas Pemerintah Sipil yang dipimpin Gunco Fuku Gun-co - Son-co beserta pegawai-pegawai lainnya. Meskipun para penguasa tidak ada di tempat setelah Jepang bertekuk lutut pada Sekutu, Pemerintah Sipil di Sekayu tetap menjalankan tugasnya di bawah Pengawasan KNI Daerah Kewedanan Sekayu.

Rencana KNI Daerah Kewedanaan Musi Iilir beserta badan-badan perjuangan lainnya adalah mengambil alih kekuasaan seutuhnya dari tangan Jepang sebelum tentara Sekutu tiba di Sekayu. Hal ini sesuai dengan tuntutan proklamasi 17 Agustus 1945. Untuk melaksanakan rencana pokok itu, mereka belum memiliki kekuatan/senjata yang dapat diandalkan dalam menghadapi Jepang yang lengkap perseniataannya. Oleh karena itu jalan yang di tempuh untuk mencapai maksud tersebut adalah sebagai berikut : di satu pihak melalui jalur perundingan/ diplomasi dengan pembesar-pembesar Jepang setempat supaya bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Sedangkan di lain pihak memperlemah kekuasaan Jepang dengan meniupkan isu-isu yang akan mengurangi kewibawaannya. Dengan cara demikian mereka akan berhasil mencapai tujuannya tanpa menimbulkan insiden yang akan membawa korban. Tetapi dengan cara yang demikian ini tidak sesuai dengan alam “revolusi”, terutama bagi pemuda yang menginginkan perubahan yang cepat. Oleh sebab itu pada awal pengambilan alihan kekuasaan di daerah ini, telah menciptakan situasi dan kondisi yang dualisme dalam pemerintahan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, yaitu adanya pegawai-pegawai pemerintah yang masih ragu-ragu dalam bertindak apalagi bagi masyarakat awam yang tidak tahu soal politik. Tetapi kemudian setelah pemerintah RI di Palembang menerima telegram dari Pemerintah Pusat pada tanggal 5 September 1945,<sup>91)</sup> maka beberapa

---

<sup>90)</sup> A. Kalam, Wawancara, Lumpatan, 1980; H. Romli Rozak, Wawancara.

<sup>91)</sup> Kementrian Penerangan, Op cit, halaman 39.

hari kemudian di ibukota Kewedanan Musi Ilir/Sekayu mulai terpasang bendera merah Putih pada setiap instansi pemerintahan, bahkan pada rumah-rumah penduduk bendera itu terpasang siang malam.

#### **D. Sikap masyarakat pedusunan terhadap Jepang :**

Berbicara mengenai masyarakat pedusunan yang sebagian besar adalah petani, sehingga secara keseluruhan dapat digolongkan sebagai petani tradisional. Seperti apa yang telah dilukiskan pada Bab II mengenai penduduk di daerah ini, hanya mengenal dua macam golongan petani yaitu : pemikik tanah/kebun dan golongan penggarap/buruh tani. Tetapi apabila dilihat dari sisi lain, adanya golongan penguasa dalam jumlah yang relatif kecil dan rakyat jelata yang hidupnya sepanjang masa kurang menguntungkan dan dalam jumlah yang besar. Stratifikasi sosial yang berdasarkan kelahiran seperti yang ada di dalam masyarakat Palembang asli, tidak terdapat lagi daerah Uluan/pedalaman. Mereka tidak mengenal “gelar-gelar” sebagai simbol status kelahiran. Tetapi kemudian dalam proses perkembangan masyarakat agraris tradisional akhir-akhir ini, yang sedang tumbuh dan berkembang dengan segala tradisi masa lampau, faktor uang dan tinggi rendahnya pangkat dalam sistem birokrasi kepegawaian atas dasar pendidikan formal, dianggap sebagai golongan elit di dusun-dusun.

Betolak dari gambaran umum mengenai masyarakat pedusunan yang didasarkan pada faktor sosial-ekonomi maka dalam sejarah rakyat atau petani yang dipandang sebagai “non faktor” dalam politik, pada dasarnya bersikap pasif dan apatis.<sup>92)</sup> Kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang tidak menguntungkan pada jaman kolonial Belanda merupakan akibat dari tindakan sewenang-wenang pada agen kolonia setempat. Hal ini menimbulkan rasa kecewa atau frustrasi. Ketika Jepang menduduki daerah ini, masyarakat berharap dapat merubah nasib mereka yang selama ini tidak beruntung, oleh karena itu pada mulanya “saudara tua” ini disambut sebagai “juhuselamat” oleh rakyat, terutama sekali orang-orang Jepang yang mula-mula menginjakkan kakinya di daerah Musi Ilir. Mereka ini didampingi oleh pemuka

---

<sup>92)</sup> Sartono kartodirdjo, Op cit, halaman 9.

masyarakat yang berasal dari pemuka masyarakat yang berasal dari Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). Tetapi ternyata harapan masyarakat terhadap penguasa baru itu jauh panggang dari api. Semakin dekat menghadapi keruntuhannya semakin banyak tuntutan, peraturan, pembatasan, pengawasan seta penindasan terhadap penduduk yang selama ini hidup tidak beruntung. Perekonomian rakyat di pedusunan mengalami kehancuran, katena penduduk melalui para Kumi-co/ Penggawa, dipaksa untuk menyerahkan sebagian besar hasil sawah/ladang mereka kepada pemerintah, dengan dalih untuk kemakmuran bersama. Sebagai akibatnya timbul kelaparan dan berjangkitnya penyakit serta pengerahan tenaga Badan pembantu pemerintah (BPP) / Romusha, sehingga tidak sedikit penduduk di daerah ini pada waktu itu menemui ajalnya.<sup>93)</sup> Dengan kata lain, penderitaan masyarakat pedusunan pada tahun-tahun terakhir kekuasaan Jepang mencapai puncak kulminasinya, lebih-lebih setelah Jepang ikut campur dalam masalah agama yang pernah terjadi di Air Item.

Penderitaan yang dialami oleh sebagian besar rakyat yang menjalani kerja paksa BPP tanpa diberi makan-minum oleh orang Jepang yang menjadi mandor di lapangan, disaksikan sendiri oleh para pemuda Gyugun atau Heyho. Mereka melihat bangsanya dihini sebagai bangsa yang terjajah, diperas tenaganya tanpa prikemusiaan. Kejadian ini sangat menyentuh hati mereka, perlakuan “saudara tua” yang menginjak-nginjak bangsa sendiri ini menimbulkan benuh kebencian dan rasa tidak bersahabat dengan saudara tua. Oleh karena itu lunturlah apa yang selama ini menjadi semboyan “Indonesia dan Nippon sama-sama”. Kebencian yang pada akhirnya mendapatkan latihan militer dari Jepang (Gyugun dan Heyho), Ketika Jepang mengaku kalah pada sekutu, pemuda-pemuda tersebut secara spontan bergabung dalam menggerakkan rakyat untuk merampas senjata-senjata yang dimiliki oleh balatentara Jepang setempat. Jalan yang

---

<sup>93)</sup> Hampir semua semua informan/ narasumber mengatakan, bahwa siapa yang dikirimkan/kerja paksa jangan diharapkan kembali dengan selamat; Haji Gani, Wawancara, Lumpatan, 1980; Haji Moenir, Wawancara, Palembang, 1980.

ditempuh oleh para pemuda itu, ada yang melalui jalan kekerasan dan ada juga melalui jalan damai.

Tekanan-tekanan dan penindasan yang melegihi jaman Belanda, hampir seluruh rakyat Indonesia mengalaminya, termasuk masyarakat pedusunan di daerah Musi Iilir. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila di mana-mana terjadi semacam “protes sosial” yang pada umumnya dipimpin oleh pemuka agama atau Pemuda,<sup>94)</sup> walaupun pada akhirnya dapat dipatahkan oleh Jepang dengan kekerasan.

“Sebagai awal protes sosial yang pernah terjadi di Wilayah Palembang Syuu, yaitu perlawanan rakyat di tanah Basemah yang digerakkan oleh Kiayi Haji Oemar bin H. Mgs. Praudipe dan Badil Juraituo Semidang Pelangedida”<sup>95)</sup>

dan perlawanan rakyat di AirItem yang digerakkan oleh orang-orang bekas anggota PSII. Kedua peristiwa ini merupakan perwujudan nyata perlawanan rakyat di wilayah ini pada masa pendudukan Jepang.

Setelah masyarakat pedusunan mendengar kekalahan Jepang terhadap Sekutu, Menyusul adanya berita Prokalasi 17 Agustus 1945 dan terbentuknya Badan Keamanan Rakyat beserta Komite Nasional Indonesia Kewedanaan Musi Iilir/ Sekayu, semangat menentang yang diselubungi rasa “dendam” terhadap orang-orang Jepang di daerah ini tak dapat dikendalikan. Semangat perlawanan rakyat terhadap Jepang sebagai akibat perbuatannya selama ini, didorong pula oleh keinginan parta pemuda untuk memperoleh senjata, spontanitas rakyat yang berasal dari dusun-dusun pergi ke Sekayu untuk menghadapi orang-orang Jepang yang akan memusatkan kekuatannya di Pendopo pada akhir bulan November 1945,<sup>96)</sup> Tentara Jepang yang berkuatan satu seksi bersenjata lengkap itu berasal dari Keluang dan Lubuk Buci/Betung di bawah pimpinan Faruta bertujuan untuk mengabungkan diri dengan kesatuan jepang di Pendopo. Sebelum orang-orang Jepang itu samapi di Sekayu, telah tiba dua orang

---

<sup>94)</sup> A. H. Basution (Jilid I), Op cit, halaman 110 - 115.

<sup>95)</sup> Ahmad Bestari Suan, dalam Minggu Merdeka 10-2-1985.

<sup>96)</sup> Kosim Dhahayat, Wawancara, Sekayu, 1987; Haji Chomsah h. Daud, Wawancara, Sekayu, 1988; bandingkan Sumidjan, Sejarah Kemerdekaan di Sumatra 1945-1950, Dinas Sej. TNI-AD, Bandung, 1972, halaman 79 (Brosur).

pemuda dari Pendopo (A. Cholik Gaffar dan Am.Siregar) menyampaikan berita penting kepada pemuka masyarakat/ kepala BKR, bahwa orang-orang Jepang yang akan ke Pendopo itu untuk mengambil kembali senjata-senjata yang telah dirampas oleh para pemuda setempat. Mereka minta supaya KNI Daerah dan BKR Daerah dan BKR setempat untuk melarang orang-orang Jepang mencapai Pendopo. Akhirnya diputuskan oleh KNI bersama BKR untuk melarang orang Jepang pergi ke Pendopo.<sup>97)</sup> Keputusan ini merupakan momentum historis, karena merupakan awal reaksi masyarakat pedusunan terhadap Jepang di dalam kurun waktu revolusi fisik. Ia telah memberikan semangat juang untuk melenyapkan segala macam bentuk penindasan di daerah ini, dan sekaligus sebagai modal di dalam revolusi kemerdekaan.

Ketika orang-orang Jepang sampai di Sekayu, terjadilah perundingan antara Faruta dengan pimpinan BKR (Usman Bakar), yang pada dasarnya dipihak kita melarang Jepang untuk meneruskan perjalanan ke Pendopo. Karena jalan buntu yang dihadapi oleh pasukan Jepang, maka mereka memaksa diri untuk menyerbetangi Sungai Musi setelah mendapat bantuan alat penyeberangan (ponton) dari Mangunjaya. Sementara itu pimpinan BKR telah menunjuk Kosim Dhahayat (bekas Heyho) untuk siap tempurb di seberang sungai. Dengan menggunakan senjata senapan mesin yang baru saja didapatkan dari hasil rampasan di Pendopo. Kira-kira menjelang solat Magrib, pasukan Jepang mulai bergerak menebertangi sungai Musi, dan setelah ponton yang membawa kendaraan mobil sampai ditengah-tengah sungai, letusan yang beruntun tetuju pada alat penyeberang itu tepat letusan yang beuntun tetuju pada alat penyeberangitu tepat pada sasarannya, di mana orang-orang Jepang sudah dalam keadaan panik. Diantara letusan senapan mesin, diselingi pula letusan senapan “kecepek” dari segala penjuru, yang telah ikut serta meram aikan suasana, dan membuat orang-orang Jepang yang ada di darat dan di atas sungai waktu itu kehilangan tempat berpijak. Dapat kita bayangkan betapa panik orang-orang Jepang yang sedang di atas

---

<sup>97)</sup> Haji Usman Bakar, (Wawancara), Palembang, 1988; H. Romli Rozak, Wawancara, Sekayu, 1988.



Ponton tanpa dapat memberikan perlawanan, kecuali menceburkan diri ke air sambil berpegang dipinggir ponton untuk menghindari hujan peluru yang datang dari segala penjuru. Orang-orang Jepang yang belum sempat menyeberang sungai, terpaksa balik belakang kembali ke Lubuk Guci sambil menantikan kedatangannya kawan-kawannya yang berada di atas ponton menghilir sungai sampai ke dusun Teluk. Di dusun Teluk mereka bergabung kembali dengan membawa korban terus ke Lubuk Guci/ Betung. Korban di pihak Jepang tidak kita ketahui secara pasti sedangkan di pihak kita sendiri terdapat beberapa orang di rawat di rumah sakit Sekayu.

Peristiwa yang cukup mengejutkan ini karena Jepang tidak mengira akan ada perlawanan sengit telah memaksa orang-orang Jepang untuk berkeras hati menghadapi tantangan itu dengan alat persenjataan yang lebih lengkap. Oleh sebab itu beberapa hari kemudian mereka kembali lagi ke Sekayu dengan maksud semula. Pada awal bulan Desember 1945 pasukan Jepang dalam jumlah yang lebih banyak dan menggunakan sembilan kendaraan truk dan dan sebuah sedan, ingin mencoba lagi datang ke Sekayu untuk menggabungkan diri ke pasukan induknya di Pendopo. Sebelum mereka datang ke Sekayu telah diperhitungkan sebelumnya dan pasti mereka akan menebus kekalahan. Dalam hubungan ini maka semua rakyat dikerahkan untuk menghadapi serbuan Jepang yang akan datang, yaitu membuat rintangan-rintangan di jalan raya pada suatu tempat strategis di hilir dusun Sekayu. Batang-batang kayu tembesu yang ada di pinggir jalan di tebang oleh rakyat untuk menghambat gerak maju kendaraan Jepang, sementara di kiri kanan jalan telah disiapkan anggota lasykar dan anggota-anggota BKR dalam keadaan siap tempur. Komandan pertempuran ada di tangan Usman Bakar yang di kawal oleh penembak Lewis Gun dalam keadaan siap siaga.<sup>98)</sup> Tidak jauh dari pos Komando terdapat satu regu (15 orang) pasukan pelempar granat yang di pimpin oleh Sersan Nazori. Agak ke depan sedikit ditempatkan anggota pasukan golok/ pedang dan tombak untuk mengawasi musuh, apabila mereka melakukan terobosan melalui

---

<sup>98)</sup> H.Usman Bakar, Wawancara, Palembang, 1988; Kosim Dhahayat, Wawancara, Sekayu, 1988; Koriq, Wawancara, Sekayu, 1988.

pinggir sungai Musi. Tugas khusus untuk menjaga hubungan telepon sebagai alat penghubung dengan sentral dan anggota pasukan di garis depan, di tunjuk Ali Bakar (adik kandung Usman Bakar). Lokasi pertanahan yang dibangun dalam waktu yang relatif singkat ini dimana seluruh lapisan masyarakat sekitar Sekayu yang telah berpartisipasi dengan tekad “Hidup atau Mati” merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut.

Detik-detik yang menegangkan segera tiba, setelah menerima informasi melalui telepon dari Epil, bahwa pasukan Jepang yang siap dengan sangkurnya telah melewati dusun Epil dengan kendaraan yang cukup cepat larinya. Dengan kata lain, mereka hanya memerlukan waktu satu jam saja telah sampai di Sekayu. Khosim Dhahayat ditugaskan untuk memegang satu-satunya Lewis Gun telah siap membidikkan senapan mesin itu pada sasaran, apabila kendaraan Jepang berhenti di hambatan kayu tembesu yang melintang jalan. Dalam situasi yang menegangkan itu, tiba-tiba bantuan senjata berupa senapan Lee Enfield yang di bawa oleh Utju Sugandi, Frans dan Ahmad Rivai dari Pendopo telah menambah kekuatan di pihak kita dan dapat dianggap sebagai “pucuk dicinta ulam tiba. Kira-kira jam 16.00 mulailah pertempuran melawan Jepang dan korban pertama adalah sopir truk terdepan yang berhenti dekat kayu tembesu sebagai penghalang di tengah jalan. Dalam suasana tembak menembak antara kedua belah pihak, terdengar suara azan di antara letusan bedil. Hal ini telah menciptakan suasana perang “Jihad” dalam mengobarkan semangat menentang orang kafir yang terkenal dalam Sejarah Islam pada masa awal perkembangan agama itu di Jazirah Arab. Rupa-rupanya Kiai Haji Muh.Nur memberikan semangat Jibako yang bernafaskan Agama Islam bagi mereka yang sedang terlibat dalam pertempuran itu. Ketika orang-orang Jepang mendengar suara azan tersebut maka semangat perlawanannya mulai mundur. Sebaliknya di pihak kita semakin hebat walaupun senjata yang digunakan tidak seimbang dengan senjata yang dimiliki oleh orang-orang Jepang. Dalam suasana tembak menembak seruan azan tidak putus-putusnya dan cahaya matahari mulai condong ke Barat, tiba-tiba terdengar suara klakson yang panjang beserta bunyi mesin yang dihidupkan. Suara itu memecah kesunyian dan hutan sebelah menyebelah jalan mulai

kelihatan gelap rupaya suara klakson yang panjang itu merupakan tanda dari komando orang-orang Jepang untuk menghentikan perlawanan, dan segera putar haluan untuk kembali ke arah Palembang. Tidak lama kemudian didapatkan informasi dari penduduk Dusun Kayu Ara, bahwa beberapa buah truk telah melewati dusun menuju Palembang.

Setelah mendapatkan informasi tersebut, tiba-tiba anggota lasykar muncul di balik semak-semak hutan dengan membawa enam tawanan Jepang dengan mengangkat tangan dihadapkan pada Komandan. Sambil mengucapkan kata-kata “Tom odaci-Tom odaci”, orang-orang Jepang tersebut di depan Komandan dikeroyok oleh rakyat yang bersenjata golok dan pedang, tanpa menghiraukan seruan Komandan (Usman Bakar). Suasana penuh emosi tanpa terkendali, dan ini merupakan pembalasan rakyat yang sudah marah. Untuk kedua kalinya orang-orang Jepang berhadapan dengan masyarakat, dan untuk kedua kalinya pula mereka membawa kenangan yang pahit. Sebaliknya bagi masyarakat di daerah ini, momentum itu merupakan titik awal dari semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa pada kurun waktu revolusi fisik di daerah Kewedanaan Musi Ilir/ Sekayu.

Ketika orang-orang Jepang mengundurkan diri dari tepat palagan itu, tiba-tiba di hulu dusun Epil mereka di cegat oleh para pemuda di bawah pimpinan Samsul Hamid, Usman Hasan dan lain-lain.<sup>99)</sup> Tembak-menembak terjadi antara kedua belah pihak, bahkan terjadi perkelahian man to man yang telah menimbulkan korban di pihak pemuda antara lain : Ali berasal dari dusun Epil, Leman berasal dari dusun Danau Cala, dan Sujak berasal dari Petaling.<sup>100)</sup> Usaha pencegahan yang terjadi di hulu dusun Epil (Liku Teluk Kijing) ini, peristiwa tempat penyeberangan/ pasar kajang Sekayu dan palagan yang terjadi di hilir dusun Sekayu melawan Jepang, merupakan “Event” yang cukup menarik dan telah memberikan warna heroistis

---

<sup>99)</sup> H.Usman Bakar, Wawancara, Palembang, 1987; H.Romli Rozak, Wawancara, Sekayu, 1988.

<sup>100)</sup> Syamsul Hamid, Wawancara, Sekayu, 1988; Kosim Dhahayat, Wawancara, Sekayu, 1988; Muh.Ali Mansyur, Wawancara, Palembang, 1987.

sebagai ilustrasi perjuangan rakyat, sebelum Belanda menguasai daerah Kewedanaan Musi Ilir. Ia tetap menjadi sumber inspirasi, bergema sepanjang masa sebagai nilai perjuangan dan otomatis sebagai titipan peristiwa untuk melengkapi sejarah lokal sebagai bahan untuk meramu sejarah Indonesia.

Peristiwa-peristiwa tersebut punya arti tersendiri bagi daerah ini, karena dianggap sebagai tahap pertama semangat juang pemuda yang ditujukan pada pusat-pusat konsentrasi Jepang di daerah ini seperti :

1. Penculikan atau pengecatan terhadap tentara Jepang dalam perjalanannya menuju induk pasukan dari Lubuk Guci ke Betung/ Tabanan yang dipimpin oleh pemuda M.Yazid.
2. Mencuri atau membongkar gudang logistik senjata Jepang di Pendopo, yang dilakukan oleh Amad Jagok dan kawan-kawan dan berhasil mendapatkan sebuah mobil dan beberapa pucuk senjata karabin.
3. Markas-markas Jepang di serang oleh pemuda-pemuda lasykar bersama rakyat setempat. Hal ini pernah terjadi di Pendopo, di bawah pimpinan Utju Sugandi dan Frans mereka berhasil merampas satu granat 10 pucuk karabin dan sebuah senapan mesin (Lewis Gun).
4. Ada juga dengan cara kompromi, yaitu berpura-pura Jepang di serang oleh rakyat bersama pemuda lasykar, sebagai alasan bagi orang Jepang untuk mempertanggungjawabkan pada Sekutu. Hal ini pernah terjadi di Sekayu di bawah pimpinan Usmar Bakar.<sup>101)</sup>

Apa yang dikeluarkan di atas merupakan rentetan peristiwa dari awal revolusi fisik di daerah ini, sebelum menghadapi Belanda/ NICA secara langsung. Bagi orang-orang Jepang yang merasa simpati pada perjuangan bangsa Indonesia, karena yang paling ditakuti pembalasan dendam dari rakyat, ada di antara mereka itu ikut bersama dengan anggota Tentara Keamanan Rakyat melawan Belanda.

## **V. PERJUANGAN RAKYAT DALAM**

---

<sup>101)</sup> Usmar Bakar, Wawancara, Palembang, 1984.

## **MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN**

Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, bahwa hampir seluruh lapisan masyarakat di daerah keresidenan Palembang umumnya, daerah Musi Iilir khususnya menyambut proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan rasa syukur dan gembira. Secara spontan mereka bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dalam mempertahankan kemerdekaan itu. Pemerintah keresidenan Palembang yang telah terbentuk di daerah ini dan Angkatan Bersenjata/ BKR selaku aparat pemertintah yang telah diorganisir disamping Badan-badan Perjuangan/ Lasykar Rakyat, mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat setempat. Para pegawai bangsa Indonesia yang telah bekerja pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, dengan segera dan serentak menyatakan kesediaannya membantu dengan segenap tenaga untuk menegakkan pemerintah Republik Indonesia yang baru itu.

Sementara pemuka-pemuka masyarakat setempat sibuk menyusun kelengkapan aparatatur pemertintahan dan Badan Keamanan Rakyat, pemerinth pendudukan Jepang di daerah ini masih tetap berkuasa sambil menunggu kedatangan tentara Sekutu. Jepang yang sudah kehilangan gigi taringnya berada pada posisi terjepit terpaksa harus tunduk pada pemerintah Sekutu, sehingga menunjukkan sikap yang tidak bersahabat terhadap bangsa Indonesia, bahkan dalam tindak tanduknya memusuhi dan menentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kedatangan tentara sekutu yang di boncengi oleh serdadu Belanda/ aparat Netherlands Indies Civil Administreation (NICA) yang jelas-jelas bermaksud menjajah kembali tanah air kita, di tambah dengan sikap bermusuhan dari tentara Jepang, telah mengubah sifat perjuangan bangsa kita dari kegiatan-kegiatan untuk melengkapi segala sesuatunya bagi kepentingan kemerdekaan menjadi perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Dengan demikian dalam waktu bersamaan bangsa kita harus menghadapi empat tantangan sekaligus yaitu : pertama ; tentara Jepang yang masih berada di daerah ini meskipun telah kehilangan taringnya, kedua ; tentara Sekutu/ Inggris yang ditugaskan menerima penyerahan dan melucuti serdadu Jepang serta mengurus tawanan perang/ internir, ketiga ; tentara Belanda

Nederlands Indies Civil Administration (NICA) yang membonceng Sekutu dan bermaksud menegakkan kembali kekuasaannya di daerah ini, empat ; disamping tantangan yang datang dari luar tidak kalah pentingnya dan sangat berbahaya adalah dari bangsa sendiri yang merupakan musuh dalam selimut , yang selalu muncul di sepanjang sejarah perlawanan bangsa Indonesia, sebagai suatu fenomena umum dari masyarakat majemuk yang memiliki persepsi yang berbeda-beda.

### **A. Interaksi Masyarakat Terhadap Sekutu/NICA di Palembang**

Setelah Jepang bertekuk lutut terhadap Sekutu, bagi balatentara Jepang yang ada di Indonesia di Palembang khususnya hanya tinggal menunggu nasib. Untuk selanjutnya dilucuti dan kemudian dipulangkan ke negeri asalnya. Untuk menerima penyerahan Jepang di wilayah Asia Tenggara Sekutu menugaskan South East Asia Command (SEAD) yang dipimpin oleh Panglimanya Laksamana Lois Mountbatten. Sedangkan di wilayah bagian Timur di Indonesia berhadapan dengan Australia dan kepulauan Pasifik ditugaskan kepada Pasifik Command di bawah pimpinan Jenderal Mac Arthur. Secara umum tugas komando Sekutu di Asia Tenggara antara lain sebagai berikut :

1. Menerima penyerahan dari tangan Jepang.
2. Membebaskan tawanan perang dan interniran Sekutu.
3. Melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk kemudian di pulangkan ke negerinya.
4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada Pemerintah Sipil masing-masing.
5. Mengumpulkan keterangan-keterangan dan mengadili penjahat-penjahat perang di depan pengadilan Sekutu.<sup>102)</sup>

Dalam melaksanakan tugas menerima penyerahan Jepang di Indonesia Panglima South East Command telah mempercayakan tugas itu kepada satuan-satuan Tentara Inggris. Oleh karena Lord Louis Mounbatten belum sempat memberangkatkan pasukannya ke Indonesia, sebab pasukan Inggris banyak dikerahkan untuk membantu

---

<sup>102)</sup> Independent, 29 Agustus 1945.

pelaksanaan tugas tersebut dimintakan dari pasukan Australia. Berdasarkan keputusan markas besar Sekutu pasukan Inggris akan ditugaskan di Jawa dan Sumatera sedangkan untuk Indonesia bagian Timur diserahkan pada Pasukan Australia.<sup>103)</sup> Menjelang kedatangan tentara Sekutu, Jepang atas nama markas besar Sekutu bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia. Sementara itu bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya yang sama sekali di luar dugaan penguasa Jepang apalagi Sekutu. Dalam kaitan ini, dan untuk menyesuaikan politik kebijaksanaannya terhadap gerakan di Indonesia seperti halnya dengan daerah-daerah lain yang sedang bergolak, Lord Louis Moubatten mengatakan sikapnya bahwa SEAT tidak akan menghalangi “National Movement” di Indonesia.<sup>104)</sup>

Sikap Sekutu/ Inggris tersebut dapat diterima oleh Pemerintah RI yang baru saja berdiri, sehingga pada tanggal 8 September 1945 diterjunkanlah tujuh orang perwira Sekutu/ Inggris dilapangan terbang Kemauryoran di bawah pimpinan Mayor A.C. Greenhalgn. Ketuju perwira tersebut merupakan rombongan dari Allied Mission, yang bertugas untuk mempersiapkan pembentukan Markas Bear Sekutu di Jakarta dan memberikan informasi mengenai situasi di Indonesia kepada pimpinan SEAC, yang pada waktu itu berkedudukan di Singapura.<sup>105)</sup> Pada tanggal 16 September 1945, armada Sekutu tersebut diboncengi oleh Penjabat-penjabat NICA/Opsir-opsir Belanda,<sup>106)</sup> yang terdiri dari C.H.O. Van der Plas (mewakili Dr. H. J. Van Mook Kepala Nedherlands Indies Civil Administration), Jendral Van Straten, kolonel Abdoelkadir Wijojoadmojo dan lain-lain dengan

---

<sup>103)</sup> Dr. A.H.Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia (jilid II), di sejarah AD-Angkasa Bandung, 1976, halaman 3-9.

<sup>104)</sup> Ibid, halaman 10-11.

<sup>105)</sup> Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia IV , Direktorat Sejarah & Nilai Tradisional/Proyek IDSN, Jakarta, 1982/1983 halaman 109; May.Inf. M. Suhaini & Lettu. Inf. Kusnani Ridwan, Pertempuran Lima Hari Lima Malam di Palembang, Markas Besar TNI AD, Dinas Sejarah, Bandung, 1982, halaman 37 (Brosur).

<sup>106)</sup> Di dalam Civil Affair Agreement yang diasakan di Chaquer (beberapa mil dari London) antara Inggris-Belanda pada tanggal 24 Agustus 1945 bahwa SEAC akan memegang kekuasaan atas nama pemerintah Belada.

m enggunakan kapal penjelajah Belanda “TROMP” mendarat di Tanjung Priok.

Baru pada tanggal 29 September 1945, seluruh pasukan Inggris uyangakan menduduki Indonesia tiga di Jakarta, langsung dipimpin Panglima Allied Forces Netherland East Indies (AFNEI) yang baru Lenan Jendral Sir Philip Chirtion. Pasukkan yang dibawasebanyak tiga Devisi dan di dalamnya terdapat satu Kompi sersadu Kkoninklijk Nederlandsch indieshe Lager (KNIL), yang terdiri dari :

1. Divisi India ke-23 di bawah Pimpinan Mauyor Jendral B.C. Howthorn akan menduduki Jakarta.
2. Divisi India ke-5 di bawah pimpinan Mayor Jendral E.C. Mansergh akan menduduki Surabaya.
3. Divisi India ke-26 dil bawah pimpinan Mayor Jendral H.M. Chamber untuk menduduki Palembang dan Medan.<sup>107)</sup>

Sebelum pendaratan tentara Sekutu di atas, Radio SEAC telah mengantarkan rombongan itu dengan penjelasan tentang maksud kedatangan mereka ke Indonesia yaitu untuk :

1. Melindungi dan mengungsikan tawanan perang (Prioner of War=POW) dan tawanan biasa
2. Melucuti dan mengembalikan Jepang ke negeri asalnya.
3. Menjaga keamanan dan ketenteraman agar kedua maksud di atas dapat terlaksana dengan baik.

Sehubungan dengan tugas-tugas tersebut diatas serta mengikuti kebijakan Lord Louis Mountbatten terhadap National Movement di Indonesia, Letnan Jenderal Christison mengemukakan bahwa jakarta dan Surabaya di Jawa, Medan dan Palembang di Sumatera akan diduduki oleh AFNEI. Semua Badan bersenjata Republik Indonesia tidak akan dilucuti, bahkan pada tanggal 11 Oktober 1945 Christison mengakui adanya Tentara (TKR).<sup>108)</sup> Sesuai dengan tugas dan pernyataan rtemi panglima AFNEI tersebut di atas, maka pada tanggal 12 Oktober 1945 tentara Sekutu/ Inggris di bawah pimpinan Letkol Carmichael dengan melalui Sungai Musi mendarat di kota palembang.

---

<sup>107)</sup> May. Inf. M. Suhaini & Lettu. Kusnadi Ridwan, Op cit, halaman 38.

<sup>108)</sup> Ibid, halaman 39.



Kedatangan pasukan Sekutu tersebut dilengkapi dengan badan Pemerintah seperti Allied Military Administration Civil Affair Branch (AMACAB) dan Alied Military Administration (AMA), dan di dalam badan-badan tersebut turut pula NICA membonceng. Bagi kita sulit untuk membedakan antara Inggris dengan NICA yang ada di dalam badan tersebut.

Kedatangan tentara Sekutu yang berkekuatan satu Brigde yang terdiri dari kesatuan-kesatuan berkebangsaan Inggris. India/ Gurka dan Belanda yang sama sekali tidak dicurigai oleh pihak RI karena sebelumnya ( 5 Oktober 1945) Residen Palembang A.K. Gani telah menerima surat kawat dari komite Nasional Sumatera (Adinegoro) yang menerangkan, bahwa Sekutu telah mengakui Republik Indonesia secara de facto dan berjaji tidak akan memperbolehkan Belanda mendatangkan pasukannya.<sup>109)</sup> Berdasarkan surat kawat tersebut, Residen Palembang memberi ijin kepada Tentara Sekutu untuk menempati daerah Talang Semut. Dan untuk memperlancar tugas-tugas Sekutu di wilayah ini, telah disetujui pula oleh kedua belah pihak (Republik-Sekutu), bahwa tentara Sekutu dibenarkan melalui jalan-jalan tertentu di dalam kota Palembang, yang pada waktu itu dikenal dengan istilah corridor yaitu :

1. Jalan antara kamp Talang Semut dengan lapangan udara Talang Betutu (Sekarang lapangan Udara Sultan Makhmud Badaruddin II)
  2. Jalan antara Kamp Talang Semut dengan pelabuhan Boom Yetty.
- Selanjutnya secara bertahap tentara Sekutu terus masuk ke Palembang, sehingga dari hari ke hari jumlah mereka semakin banyak.

Seperti telah diketahui bahwa pada tanggal 12 Oktober 1945 bertepatan dengan kehadiran tentara Sekutu di Kota Palembang, Badan Keamanan Rakyat (BKR) di daerah ini dilebur menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sesuai dengan instruksi Pemerintah di Jakarta. Sehubungan dengan itu Residen Palembang mengeluarkan sesuatu maklumat yang berisi seruan dan tujuan kepada para pemuda di seluruh wilayah keresidenan Palembang, agar mereka mendaftarkan

---

<sup>109)</sup> Kementrian Penerangan, Republik Indonesia Propinsi Sumatra Selatan, Palembang, 1954, halaman 261.

diri untuk menjadi anggota TKR. Selanjutnya pada tanggal 19 November 1945, oleh pimpinan tentara Sekutu di Palembang, TKR di daerah ini diakui secara sah sebagai suatu tentara dari pemerintah Republik Indonesia.<sup>110)</sup> Pristiwa-pristiwa penting apa yang telah terjadi di kota Palembang selaku ibukota dan pusat kegiatan pemerintah daerah keresidenan, pada umumnya segera diikuti oleh daerah-daerah Kewedanan di pedalaman. Sejalan dengan telah dileburnya BKR di Palembang menjadi TKR maka BKR di Kewedanaan Musi Ilir/ Sekayu yang telah berdiri sejak tanggal 27 September 1945, segera pula dilebur menjadi TKR pada bulan Oktober 1945,<sup>111)</sup>

Seruanatau himbauan dari Residen Palembang yang mengandung semangat/jiwa patriotisme, bergema ke seluruh pelosok wilayah ini dan telah berhasil membangkitkan semangat juang rakyat, khususnya masyarakat/ pemuda di daerah Musi Ilir dan Banyuasin. Luapan serta gelora semangat untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan bangsa dan tanah air dari para pemuda di daerah ini, disalurkan kedalam barisan-barisan perjuangan/Lasykar-lasykar Rakyat dan mendorong mereka dengan sukartela untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat. Dengan demikian Badan Perjuangan yang merupakan apaatur pemerintah Ri di daerah ini yang semula bernama BKR (Badan Keamanan Rakyat) beranggotakan ± 30 orang, setelah dileur menjadi TKR jumlah personil bertambah, sehingga dapatlah dibentuk satu Kompi TKR, yang selanjutnya menjadi Kompi IV Batalyon II setelah terwujudnya Komandemen Sumatera pada tanggal 25 Desember 1945.

Unutuk diketahui bahwa Residen A.K. Gani pada tanggal 5 Desember 1945 menerima sebuah telegtram dari markas Tertinggi TKR di Yokyakarta, yang menunjukkan sebagai koordinator TKR seluruh Propinsi Sumatera. Dengan demikian kekuatan Militer dan Sipil sepenuhnya dipegang oleh A.K. Gani. Berdasarkan wewenang yang dimiliki itu, A.K. Gani mengangkat pula R. Soehadjo hardjowardoyo (Kepala Polisi Lampung) untuk mengorganisir suatu tentara yang modern. Dalam hubungan ini, maka pada tanggal 25

---

<sup>110)</sup> Ibid, Loc cit.

<sup>111)</sup> Usman Bakar, Wawancara, Palembang, Desember 1984.

Desember 1945 tersusunlah “Komandemen Sumatera” dengan R. Soehardjo Hardjowardodjo sebagai Panglima dengan pangkat Jendral Mayor, dan sebagai kepala staf diangkat Muhammad Nuh dengan pangkat Kolonel.<sup>112)</sup> Struktur organisasi Komandemen Sumatera terdiri dari enam Divisi, yaitu:

1. Divisi I Lahat, Komandannya kolonel M. Simbolon.
2. Divisi II Palembang, Komandannya Kolonel Hasan Kasim.
3. Divisi III Bukittinggi, Komandannya Kolonel Dahlan Djambek.
4. Divisi IV Sumatera Timur, Komandannya Kolonel A. Tahir.
5. Divisi V Aceh, komandannya Kolonel Semaun Gaharu.
6. Divisi VI Simbolga, Komandannya Kolonel Mohammas Din.<sup>113)</sup>

Kompi IV yang disebut diatas termasuk dalam jajaran Batalyon II/ Residen I Divisi II Palembang di bawah pimpinan Mayor Deni Effendi yang bermarkas di Palembang. Sedangkan kompi IV itu sendiri dipimpin oleh Kapten Usman Bakar selaku Komandan Kompi, Lettu. Wahid-udin selaku wakil Komandan. Kompi IV TKR bermarkas di Kampung I Sekayu (Pasang frahan konselir) sedangkan asrama TKR berlokasi kampung I juga ( Pasanggrahan Pasirh Bond).<sup>114)</sup> Dengan kehadiran TKR di tengah-tengah massa pejuang lainnya seperti : Lasykar Hizbullah, Sabillilah, Mujahiddin dan Lasykar Rakyat, maka kesibukan masyarakat pejuang/ para pemuda di daerah ini semakin tampak. Latihan-latihan Kemiliteran, baris-berbaris dan sebagainya boleh dikatakan hampir seriap hari diasakan, meskipun mereka hanya memiliki senjata apa adanya seperti : bambu runcing, senjata kecepak dengan beberapa karabin sebagai hasil rampasan dari serdadu Jepang di Pendopo. Pelatih-pelatihnya adalah orang-orang yang dulu pernah mendapat latihan militer Jepang (Pemuda Heyho).<sup>115)</sup> Sementara itu para pemuda dari dusun-dusun datang ke Sekayu dan menggabungkan diri ke dalam Kesatuan-kesatuan, sehingga jumlah anggota pasukan

---

<sup>112)</sup> A.H. Nasution (Jilid III), Op cit, halaman 228.

<sup>113)</sup> Jarahdam IV Sriwijaya, Kenangan Tiga Puluh Tahun Daerah Militer IV Sriwijaya, Palembang, 1975, Halaman 27-28.

<sup>114)</sup> Usman Bakar, Wawancara, Palembang, 1984; Kosim dhahayat, Wawancara, Sekayu, 1988.

<sup>115)</sup> Karim Umar Hasan, Wawancara, Palembang, 1988.

semakin banyak. Kenyataan ini merupakan jawaban dari himbauan pemerintah RI di Palembang, yang menjurus pada bentuk mobilisasi umum. Kenyataan ini menambah semangat perjuangan rakyat, mempertebal keyakinan mereka sebagai bangsa yang telah merdeka dan mendorong mereka untuk lebih aktif berperan, ikhlas berkorban demi kemerdekaan, baik mereka itu petani, Pedagang, buruh, maupun pegawai Pemerintah.<sup>116)</sup>

Sementara itu kedudukan tentara Sekutu di kota Palembang semakin mapan, bahkan dengan datangnya rombongan kedua tentara Inggris pada tanggal 13 Maret 1945 di lapangan udara Talang Betutu, seluruhnya menjadi batalyon di bawah pimpinan Brigadir Jendral Hutchinson. Sulit untuk membedakan antara orang Inggris/ Sekutu dengan orang-orang Belanda, sehingga seriap pendaratan Sekutu di Palembang selalu diboncengi oleh serdadu Belanda/NICA,<sup>117)</sup> dengan bertambahnya pasukan Sekutu itu, terpaksa A.K. Gani memberikan ijin kepada mereka untuk mendiami tempat-tempat baru, yang semula menjadi tujuan Belanda untuk melokalisir kita dari segala penjuru tanpa disadari oleh pemerintah RI di Palembang pada waktu itu . Diketahui bahwa tugas tentara Sekutu antara lain melucuti senjata Jepang, tapi dalam pelaksanaannya seringkali keluar dari ketentuan yang telah di tetapkan. Mereka bukan saja melakukan hal-hal yang telah disepakati bersama, tetapi juga melakukan penggeledahan rumah-rumah penduduk dengan dalih mencari senjata api, menahan dan mengintrograsi penduduk, bahkan seringkali menuiksa secara fisik orang-orang yang dicurigai. Tindakan tentara Sekutu itu jelas telah melanggar ketentuan. Sikap dan tindakan yang kurtang simpati dan adanya bekas-bekas interniran yang diparsenjantai dikenal oleh penduduk setempat pada jaman pendudukan Jepang,<sup>118)</sup> menyebabkan masyarakat Palembang yang mula-mula kurang menanggapi (apatis) terhadap kedatangan tentara Sekutu itu mulai curiga dan timbul

---

<sup>116)</sup> Usman Bakar Wawancara, Palembang, 1984.

<sup>117)</sup> Kementrian Penerangan, Op cit, halaman 262.

<sup>118)</sup> Orang-orang interniran/Belanda setiap pagi berlari keliling kota, dikawal oleh serdadu Jepang, mereka di kenal penduduk dari bentuk fisik maupun rupanya.

pertanyaan dalam hati kecil rakyat di dalam kota. Dari hari ke hari tindakan mereka itu menunjukkan sikap yang bermusuhan dan tidak bersahabat. Lebih-lebih setelah ternyata tentara Sekutu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Belanda untuk menyusun kekuatannya pada waktu akhir-akhir menjelang Sekutu meninggalkan Indonesia.

Situasi dan kondisi kota Palembang beserta daerah sekitarnya sudah hangat pada waktu itu, hal ini disebabkan aksi-aksi para pemuda yang merampas senjata-senjata Jepang, menjadi semakin eksplosif oleh tindakan-tindakan Sekutu/ NICA. Sementara itu, keluar perintah-perintah keras dari Panglima Sekutu dan Panglima Jepang di Sumatera pada bulan Nopember 1945, agar tentara Jepang yang jumlahnya  $\pm$  50.000 orang di Palembang merebut kembali kekuasaan Pemerintah RI dan mempertahankan kekuasaan-kekuasaan yang masih berada di tangan Jepang untuk diserahkan kepada Belanda <sup>119)</sup> membuat suasana kota Palembang semakin meningkat dan sulit terkendali.

Seirama dengan sifat perjuangan pada waktu itu, badan-badan perjuangan dipaksa menyesuaikan dirinya dengan kondisi setempat yaitu dengan terus meningkatkan profesionalis dan semangat juang serta melebarkan sayapnya. Angkatan bersenjata kita terus melakukan penyempurnaan atau reorganisasi terhadap sistem pertahanan maupun personilnya, baik di pusat maupun di daerah dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Dalam kaitan itu pulalah di daerah ini lahir komandemen Sumatera seperti yang telah disinggung di atas.

Melihat proses perkembangan kekuatan kemiliteran itu, dari badan-badan perjuangan yang belum terorganisir dengan baik menjadi satu sistem pertahanan daerah yang kompak, tentara Sekutu/ NICA sengaja melancarkan provokasi serta memancing bentrokan dengan tentara kita, sehingga timbul insiden-insiden kecil di sana sini, yang pada akhirnya berkembang menjadi komplik senjata secara terbuka. Setiap insiden selalu di mulai lebih dahulu oleh tentara Sekutu/ NICA seperti yang terjadi pada tanggal 29 Maret 1946 berkembang menjadi suatu pertempuran antara kita melawan tentara Sekutu/ NICA selama

---

<sup>119)</sup> Kementerian Penerangan, Op cit, halaman 223.

tiga hari tiga malam (29 sampai 31 Maret 1946).<sup>120)</sup> Penembakan Mesjid Agung oleh tentara Sekutu/ NICA dalam pertempuran itu yang kemudian dijadikan tempat bertahan mereka, atelah mengundang kemarahan umat Islam. Tidak hanya umat Islam di dalam kota Palembang, tetapi juga umat Islam di Sumatera bagian Selatan (Lampung-Bengkulu dan Jambi). Mereka mengajukan protes kepada pimpinan tentara Sekutu. Pertempuran baru dapat dihentikan setelah diadakan perundingan antara Hutchinson dengan para pemuka masyarakat yang dipimpin oleh A.K.Gani. Meskipun telah diadakan perundingan dan pertempuran dapat dihentikan dan tentara Sekutu/ NICA menarik diri dari tempat ibadah, namun sikap anggota Lasykar dan TKR di kota Palembang tetap tegang. Selanjutnya insiden kecil terjadi susul-menyusul, sehingga situasi dan kondisi di dalam kota semakin tegang dan menggelisahkan. Hal itu membuat tentara dan barisan-barisan perjuangan/ Lasykar-lasykar Rakyat kita selalu siap siaga menghadapi kemungkinan yang akan terjadi. Sementara itu tentara Sekutu/ Inggris terus saja memberikan peluang kepada Belanda untuk memperkuat posisinya.

Situasi dan kondisi di kota Palembang, sedikit banyak berpengaruh pada kegiatan-kegiatan perjuangan masyarakat di daerah-daerah Uluan, khususnya di daerah Musi Ilir dan sekitarnya. Secara geografis maupun administratif daerah ini merupakan bagian dari kota Palembang, berita tentang tindak tanduk tentara Sekutu/ NICA yang menimbulkan kebencian rakyat di dalam kota, sampai juga ke telinga paara pejuang dan pemuda di daerah Musi Ilir, dan akhirnya meluas di kalangan masyarakat pedusunan. Hal itu telah mendorong para pejuang/ pemuda untuk meningkatkan kesiagaan dan kegiatan di segala bidang, terutama sekali di bidang pertahanan/ kemiliteran dan penerangan. Sebagian besar juru penerangan adalah pemuka agama di daerah ini yang pada awal revolusi fisik memegang peranan penting dalam membangun semangat “Jihad” di kalangan masyarakat pedusunan. Mereka memberikan penjelasan kepada rakyat tentang arti kemerdekaan. Fatwa-fatwa yang diberikan itu telah menyentuh hati

---

<sup>120)</sup> Kementerian Penerangan, Op cit, halaman 262.

masyarakat di daerah ini, dimana masyarakat berperan aktif membantu para pejuang baik dari segi moral maupun material.

Seirama dengan gerak langkah perjuangan, maka organisasi TKR-pun diselaraskan dengan tuntutan kebutuhan perjuangan pada waktu itu. Dalam konteks ini pada tanggal 17 Mei 1946 diadakan konferensi di Bukit Tinggi yang telah menghasilkan sub-sub Komandemen sebagai berikut :

1. Sub Komandemen Sumatera Utara yang terdiri dua Divisi : Divisi Gajah I dan Divisi Gajah II.
2. Sub Komandemen Sumatera Tengah terdiri dari dua Divisi : Divisi Banteng I dan Divisi Banteng II.
3. Sub Komandemen Sumatera Selatan terdiri dua Divisi : Divisi Garuda I dan Divisi Garuda II.

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1946 dan Tentara Keamanan Rakyat dilebur menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Berdasarkan keputusan itu kekuatan militer di Sumatera bagian Selatan (Palembang, Jambi, Bengkulu dan Lampung) adalah satu Sub Komandemen, yaitu Sub Komandemen Sumatera Selatan (SUBKOSS) yang membawahi dua Divisi, Komandannya Kolonel Hasan Kasim.<sup>121)</sup>

Pembentukan SUBKOSS ini tidak banyak mengalami perubahan mendasar : Divisi Lahat menjadi Divisi Garuda I, Divisi II Palembang menjadi Divisi Garuda II dan mengalami penciutan karena pada akhir bulan Maret 1946 daerah Bangka Belitung telah diduduki oleh Belanda sehingga Resimen III Babel dihapuskan. Divisi Garuda II yang merupakan penjelmaan dari Divisi II Palembang tetap membawahi tiga Resimen :

1. Resimen XV Divisi Garuda II di Palembang.
2. Resimen XVI Divisi Garuda II di Jambi.
3. Resimen XVII Divisi Garuda II di Prabumulih.<sup>122)</sup>

---

<sup>121)</sup> Jarahdam IV Sriwijaya, Op cit, halaman 36.

<sup>122)</sup> Letkol. Iskandar, Pertempuran Lima Hari Lima Malam di Palembang, Magelang, 1982, halaman 24; Jarahdam IV Sriwijaya, Op cit, halaman 36-37.

Dengan adanya reorganisasi di dalam tubuh TKR, maka Tentara Keamanan Rakyat Kompi IV di daerah Musi Ilir yang sebelumnya termasuk dalam jajaran Batalyon II Resimen I/ Divisi II Palembang, sekarang Batalyon II Resimen XVII/ Divisi Garuda II Palembang. Kemudian markasnya dipindahkan dari Sekayu ke Keluang yang sebelumnya selaku Komandan Kompi IV Batalyon II Resimen I. Adapun Komandan Batalyon Resimen XVII/ Divisi Garuda II ialah Mayor Dani Effendi yang berkedudukan di Prabumulih, sedangkan Komandan Divisi Garuda II ialah Kolonel Bambang Utoyo yang berkedudukan di Palembang. Batalyon II/ Resimen XVII terdiri dari lima kompi, termasuk kompi Markas dan ditambah satu seksi istimewa yaitu :

1. Kompi I berlokasi di Sekayu dengan komandannya Lettu.Haji Munir.
2. Kompi II di Mangunjaya dengan komandannya Lettu.Wahid Udin.
3. Kompi III berlokasi di Tebenan (Betung) dengan komandannya Haji.Moh.Noer.
4. Kompi IV di Sungai Lilin dengan komandannya Kapten Soetomo.
5. Kompi Markas Besar di Keluang dengan komandannya Sersan Mayor Kadir Abdullah Awam.
6. Satu pasukan Seksi Istimewa yang beranggotakan ± 60 orang yang dipimpin oleh Pembantu Letnan A.Kosim Dhahayat berlokasi di Dusun Betung. Seksi Istimewa ini tidak termasuk dalam Kompi, tetapi langsung di bawah Komandan Batalyon yang dilengkapi dengan senjata otomatis antara lain beberapa SMK dan senapan pilihan dan anggota-anggotanya sangat selktif dan profesional.<sup>123)</sup>

Untuk menjaga stabilitas organisasi dan menghindari “Patriotisme Lokal”, selalu diadakan mutasi kompi-kompi dari Palembang kota ke daerah Uluan atau sebaliknya, atau dari Divisi I ke Divisi II dan sebaliknya, termasuk mutasi personalia. Sehubungan itu pada bulan Juni 1946 Komandan Batalyon II Resimen XVII, Kapten Usman Bakar dipindahkan ke Prabumulih menjadi Kepala Staf pertama

---

<sup>123)</sup> Usman Bakar, Wawancara, Palembang, 1984; A.Kosim Dhahayat, Wawancara. Sekayu 1988.



Resimen XVII. Sedangkan yang menggantikan kedudukannya sebagai Komandan Batalyon II Resimen XVII ditunjuk Kapten Animan Achyat.<sup>124)</sup> Selanjutnya terus menerus diadakan penyempurnaan dalam tubuh tentara kita untuk penyegaran dan pelaksanaan tugas, serta dalam pencapaian daya dan hasil guna yang optimal.

Sementara terjadi reorganisasi di dalam tubuh kemiliteran, secara diam-diam Belanda memantapkan kekuatannya untuk mengembalikan kekuasaannya. Dengan segala macam cara Belanda memanfaatkan segala kemungkinan dan kesempatan untuk mencapai tujuannya. Belanda yang sangat memahami kondisi daerah-daerah yang didiami oleh berbagai suku di samping selalu menggunakan pengaruh dan kekuatan Sekutu/ Inggris, juga memanfaatkan “kemajemukan” masyarakat di wilayah ini khususnya. Politik *divide et impera* yang merupakan senjata ampuh di masa lampau, dengan mengadakan pendekatan terhadap golongan yang menghendaki kembalinya kekuasaan Belanda di daerah ini, dan memanfaatkan barisan perjuangan kita yang ragu terhadap kebijaksanaan pemerintah RI yang sah, seperti yang pernah terjadi pada golongan PKI di daerah Pagaralam di bawah pimpinan Zen Sanibar Sadan. Politik *adu domba* Belanda ternyata sangat paten, karena Partai Komunis Indoneisa yang dipimpin oleh Zen Sanibar Sadan itu dapat diperalatnya.<sup>125)</sup> Politik semacam ini diterapkan pula di kalangan para pemimpin di kota Palembang dan terhadap barisan pejuang kita di daerah Musi Ilir melalui kelompok masyarakat, yang pada jaman kolonial Belanda menduduki status sosial tinggi.

Kemajemukan masyarakat kota dan perbedaan persepsi masyarakat pedusunan yang buta politik khususnya bagi masyarakat di daerah Musi Ilir, merupakan daerah yang sangat rawan bagi berseminya politik *adu domba* Belanda.

Dengan memanfaatkan segala kemungkinan dan kesempatan yang ada serta menghalalkan segala cara, secara berangsur kekuatan Belanda di daerah ini semakin bertambah, dengan harapan jika tiba

---

<sup>124)</sup> Jarahdam IV Sriwijaya, Op cit, halaman 43.

<sup>125)</sup> Data Sejarah Perjuangan Rakyat Sumbagsel (Jilid 2), Yayasan Bhkati Pejuang, Palembang, 1976/ 1977, halaman 212.

saatnya nanti mereka telah siap atau mampu menggantikan kedudukan tentara Sekutu/ Inggris di wilayah ini. Sebagai jawaban dari tantangan itu, bangsa Indonesia terus meningkatkan kewaspadaan dan persatuan dalam perjuangan di segala bidang, terutama di bidang pertahanan kemiliteran. Khusus mengenai Resimen XVII yang bertempat di Prabumulih terdiri dari kesatuan-kesatuan sebagai berikut :

1. Yon Istimewa berkedudukan di Prabumulih dan sebagai Komandannya dirangkap oleh Mayor Dani Effendi.
2. Yon Pengawal Kereta Api berkedudukan di Prabumulih di bawah pimpinan Kapten Syanaf, dengan daerah operasionalnya meliputi semua jalur kereta api di wilayah Sumatera bagian Selatan.
3. Kompi Penangkis Udara Resimen XVII/ II berkedudukan di Prabumulih dipimpin oleh Lettu. Haji Djuni.
4. Yon 30 Resimen XVII sebagai penjelmaan dari Yon 2/ XVII berkedudukan di Keluang/ Musi Ilir yang dipimpin oleh Kapten Animan Achyat.
5. Yon 31 Resimen XVII sebagai penjelmaan dari Yon 1/ XVII berkedudukan di Air Itam di bawah komandannya Kapten A. Rivai.<sup>126)</sup>

Sejalan dengan perubahan struktural dan perbaikan dalam tubuh SUBKOSS untuk memperoleh hasil yang optimal, kemudian dibentuk pula suatu badan lain yang diberi nama "Pusat Perjuangan Rakyat". Tujuan dibentuknya badan ini untuk menghimpun tenaga massa secara efektif, terutama dalam segi pertahanan sipil seperti : Palang Merah, Penjaga Keamanan, Pengungsian dan Dapur Umum. Kedalam Pusat Perjuangan Rakyat itu pula dihimpin Badan-badan Perjuangan serta Lasykar-lasykar yang sangat potensial seperti : Diivisi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Lasykar Husni Achmad, yang terbentuk hampir bersamaan waktunya dengan kedatangan Divisi 7 Desember Belanda di Palembang. Divisi 17 Agustus ini mempunyai satu resimen di bawah pimpinan Mayor Lasykar Udjang Rachman, di mana ia membawahi : Yon Lasykar Napindo, Yon Lasykar Hizbullah,

---

<sup>126)</sup> Dani Effendi, Lama Perang Rakyat di Sumatera Selatan 1945-1959, (Dokumentasi), Jakarta, 1973, halaman 9-11.

Yon Lasykar Pesindo, Yon KRIS, Lasykar Soeroto, Lasykar Harimau Kumbang, Lasykar Sabilillah, Lasykar API, Pasukan Burung Hantu, Angkatan Muda Sriwijaya dan lain-lain.<sup>127)</sup> Dengan demikian Lasykar-lasykar dan Badan-badan Perjuangan yang tadinya berjuang dan bertindak sendiri-sendiri untuk kepentingan golongannya, setelah di himpun dalam satu wadah perjuangan mereka bersatu padu dan bah membahu dengan TKR/TRI, bersama-sama membela dan mempertahankan Negara Republik Indonesia yang baru saja dibentuk.

Untuk memudahkan komunikasi dengan tentara, maka sebagai pimpinan Pusat Perjuangan Rakyat ditetapkan Komandan Resimen XV Mayor Zyubi Bustam yang menggantikan Letkol.NS.Effendi, karena beliau dialih tugaskan ke sub Komandemen Sumatera Selatan. Pada sektor-sektor tertentu di dalam kota Palembang, Pusat Perjuangan Rakyat Palembang, kota Seberang Ilir dipegang oleh Dan Yon 32/ XV dan Seberang Ulu dipegang Dan Yon 34 Resimen XV.<sup>128)</sup> Demikian pula mengenai Pusat Perjuangan Rakyat di daerah Musi Ilir dan sekitarnya dipegang atau dibawah komando Komandan Batalyon 30 Resimen XVII, Gambaran di atas merupakan persiapan dari segi kemiliteran di dalam kota yang secara langsung akan berhadapan dengan tentara Sekutu/ NICA pada waktu itu, seluruh rakyat juga mengambil bagian dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, baik rakyat di kota maupun rakyat yang hidup di daerah Uluan.

Mengingat tugas tentara Sekutu/ Inggris melucuti dan mengembalikan tentara Jepang ke negerinya dan mengurus tawanan perang sudah selesai, maka pada tanggal 24 Oktober 1946 mereka meninggalkan kota Palembang, kedudukannya digantikan oleh Belanda/ aparat NICA. Dengan perginya tentara Jepang dan Sekutu dari daerah ini, tinggal Belanda sendiri yang harus menghadapi perlawanan rakyat di wilayah ini. Belanda telah menyiapkan satu Brigade yang dikenal dengan nama "Brigade Y" yang berintikan anggota pasukan Gajah Merah KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch

---

<sup>127)</sup> Ibid, halaman 25; Semalam IV Sriwijaya, Peranan dan Dharma Bakti Kodam IV Sriwijaya (Brosur), Palembang, 1969, halaman 71.

<sup>27)</sup> Letkol.Iskandar, Op cit, halaman 29.

Leger).<sup>129</sup> Pasukan Gajah Merah KNIL ini sebelumnya sebelumnya telah mematahkan perjuangan rakyat di Bali dalam Puputan Margarana. Brigade ini dibantu oleh pasukan Koninklijk Leger (KL) dari Divisi 7 Desember, yang langsung didatangkan dari negeri Belanda dengan tujuan untuk menunjang berdirinya Pemerintah Sipil Belanda di daerah ini.<sup>130</sup>

Dengan menggunakan pasukan Gajah Merah KNIL dalam menghadapi perlawanan rakyat dan menduduki daerah ini, berarti Belanda telah mempraktekkan pula politik “adu dom ba”, justru anggota pasukan KNIL tersebut terdiri dari : diantaranya suku bangsa Ambon, Jawa, Menado yang dengan berbagai alasan telah menjadi anggota KNIL.

Pada tanggal 24 Oktober 1946 itu juga Kolonel Molinger menerima penyerahan kedudukan-kedudukan tentara Sekutu di Palembang dan tentara inggris segera meninggalkan kota ini. Selain menjadi Komandan Brigade Y, Kolonel Molinger juga merangkap menjadi wakil Komandan Territorial Sumatera bagian Selatan. Sebagai Wakilnya Letkol.D.J.van Weel, sedangkan Kepala Stafnya Mayor van der Vee yang berkedudukan di Talang Semut. Adapun Pemerintahan Sipil Belanda di Palembang dikepalai oleh Mr.M.J.Wijnmalen.<sup>131)</sup>

## **B. Kegiatan Masyarakat di Segala Bidang Sebagai Akibat Pertempuran Lima Hari Lima Malam :**

Seperti apa yang dikemukakan, kehadiran tentara Sekutu di Indonesia pada umumnya dan di kota Palembang khususnya, merupakan tantangan yang cukup berat bagi bangsa Indonesia yang baru saja memproklamkan kemerdekaan. Berdasarkan surat kawat dari Komite Nasional Sumatera, tentara Sekutu diberi ijin oleh Pemerintah RI di Palembang untuk menempati beberapa lokasi di dalam kota, untuk

---

<sup>129)</sup> KNIL didirikan pada 4 Desember 1830 oleh Gub.Jend.G.van den Bosch, yang kemudian dilegalisir oleh Ratu Belanda pada 10 maret 1832, Tugasnya adalah untuk menegakkan kekuasaan Belanda di hindia Belanda (Nusantara).

<sup>130)</sup> Semdan IV Sriwijaya, Op cit, halaman 28-67.

<sup>131)</sup> Ibid, halaman 28.

melaksanakan tugasnya dengan bantuan pemerintah RI di daerah ini. Sementara tentara Sekutu menyelesaikan tugasnya, serdadu NICA telah menggunakan kesempatan untuk menambah anggota pasukannya dengan mendatangkan bala bantuan dari negeri Belanda, untuk memperkuat posisinya di dalam kota. Pada bulan Maret 1946 di Tanjung Periok/ Jakarta telah merapat kapal-kapal Belanda yang mengangkut bekas KNIL dan anggota sukarelawan yang dikenal dengan nama Oorlogs Vrijwilligers (OVW).<sup>132)</sup> Di bawah panji-panji Sekutu, Belanda secara berangsur mengkonsolidasikan kekuatannya di wilayah ini. Dalam waktu relatif singkat akhirnya Belanda berhasil merebut dan menduduki Bangka-Belitung pada bulan Maret 1946.

“Tentara Inggris yang bertindak selaku tentara pendudukan Sekutu di Indonesia, ternyata bertindak sebagai pelopor penjajahan kembali Belanda, menyelundupkan alat-alat atau unsur-unsur penjajahan Belanda, melindungi tindakan-tindakannya semua, dan selanjutnya menciptakan peluang waktu dan kesempatan kepada pihak Belanda untuk menyusun sedemikian, sehingga diperkirakan akan mampu berhasil merampungkan usaha-usaha penjajahan kembali. Untuk itu, maka didoronglah kedua belah pihak ke meja perundingan untuk menengulur waktu”.<sup>133)</sup>

Daerah Keresidenan Palembang pada masa-masa menjelang Pertempuran Lima Hari Lima Malam, memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan daerah-daerah Indonesia lainnya yang telah diduduki oleh Sekutu/ NICA seperti : Medan, Padang, Jakarta, Bandung dan lain-lain. Kota Palembang adalah satu-satunya kota Pendudukan yang di dalamnya masih terdapat Pemerintahan RI lengkap dengan pasukan TRI/ Badan-badan perjuangan dan Lasykar-lasykar Rakyat, berkat kelincahan diplomasi yang dipimpin A.K. Gani selaku Kepala Pemerintahan RI di daerah ini. Posisi dan petranan Palembang seperti itu merupakan hasil optimal pemerintahan RI setempat. Tetapi karena pihak Sekutu/NICA menunjukkan sikap dan

---

<sup>132)</sup> Nasution, H.H. (Jilid III), Op cit, halaman 148.

<sup>133)</sup> Nasution, A.H. (Jilid II), Op cit, halaman 22.

tindakan yang tidak bersahabat, maka timbulah pernyataan apakah perjuangan diplomasi yang telah berjalan akan tetap terpelihara. Nyatanya sebelum dan sesudah tentara Sekutu/ Inggris meninggalkan daerah ini, terjadi beberapa “insiden” sebagai indikator kearah permusuhan menjadi perang terbuka.

Setelah terjadi insiden dalam bulan Maret 1946, kegiatan di segala bidang kehidupan masyarakat di dalam kota Palembang dan di daerah Uluu berjalan seperti biasa, meskipun ada kecenderungan kearah konfrontasi. Bahkan kegiatan dalam lapangan administrasi pemerintahan yang menyangkut bidang ekonomi dan sosial-budaya (pendidikan) berkembang. Hal ini dapat dibuktikan dari laporan resmi Residen Palembang kepada Pemerintah Pusat yang bunyinya sebagai berikut :

“ Pekerjaan bersama dengan Sekutu ada baiknya. Mau tak mau mereka harus minta pertolongan kepada Pemerintah Republik Indonesia di Keresidenan Palembang, sebab semua perusahaan keperluan sehari-hari berjalan lancar (all public work are running well) dibawah kekuasaan republik... .. .

Perlucutan senjata dari tentara Jepang sudah mulai dari bulan Januari dan mereka mulai diangkut ketempat pengasingan...

Keadaan makanan di Keresidenan Palembang cukup, yaitu tidak bisa “gemuk” tetapi juga tidak bisa mati kelaparan, berhubungan dengan perhubungan bertambah bagus dan cepat dengan Keresidenan Lampung dan Bengkulu (kedua daerah inilah gudang makanan Sumatera Selatan). Mungkin Palembang yang cukup dalam segala hal dari seluruh Sumatera Selatan sebab segala jalan dipakai untuk mendapatkan ongkos dan keperluan sehari-hari. Memang daerah Palembang adalah daerah dagang kemana-mana dan dalam segala lapangan ekonomi, kelebihan bahan-bahan seperti minyak bensin, minyak tanah, batu bara, para/karet, kopi dan sebagainya ditukar dengan keperluan lain sampai ke Jawa, Singapura dan Siam.

36 perusahaan kecil dan besar di tangan Jepang sudah diambil over oleh pemerintah RI dan berjalan terus. Tambang minyak bensin/tanah Plaju diusahakan oleh pegawai Republik Indonesia. Sementara tambang batu bara akan dipercepat

penghasilannya berhubung bisa ditukar oleh Sekutu dengan beras dari Siam ... ..

Pada tanggal 4 Februari telah dilakukan sekolah menengah Pertama, Sekolah Guru Menengah dan Sekolah Rumah Tangga. Jumlah pelajar kini ada 1000 orang... ..

Selain dari itu pun juga telah dibuka Sekolah Opsir Muda TRI (Sekolah Kadet) di kita Palembang, Bengkulu, Jambi dan Bangka. Sebanyak 250 pemuda akan dididik dalam tiga bulan.

Penyingkiran orang Belanda terlambat dikerjakan, masih ada kira-kira 4000 orang dengan kaki tangannya dalam RAPWI Kamp Talang Semut. Selain 1000 Inggris-India di kita Palembang ada juga Tentara laut Inggris dengan lima kapal perang kecil... ..

Tanggal 11 Februari 3000 Tentara Sekutu (Belanda) telah mendarat di Mentok (Bangka). Behubung dengan pendaratan itu telah terjadi pertempuran dan balabantuan dari Palembang telah dikirim ke sana dengan tidak mengurangi pertahanan di Sumatera Selatan".<sup>134)</sup>

Atas inisiatif Residen Palembang diselenggarakan Konfrensi Ekonomi seluruh Sumatera Bagian Selatan, yang telah berlangsung selama dua hari (tanggal 10 s/d 11 Maret 1946) untuk membicarakan masalah transportasi dan penukaran surplus hasil produksi dari daerah satu dengan daerah lain.

Sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah ini tidak hanya terbatas pada hasil hutan dan tanaman keras saja, berbagai bahan strategis potensial dihasilkan juga pada masa sebelum maupun sesudah Perang Dunia ke-2. Pada jaman pendudukan Jepang, jumlah produksi minyak mentah berdasarkan catatan 1 Pebruari 1949 sebesar 55.000 barel sehari (1 barel = 42 x 3.785 liter). Sedangkan luas perkebunan karet di daerah Sumatera Selatan tercatat 338.017 hektar dengan 158.427.499 batang karet. Di Keresidenan Palembang diperkirakan luas areal tanaman karet ± 321.914 hektar dengan 1.527.756.846

---

<sup>134)</sup> Osman Raliby, Documenta Historica, Bulan Bintang, Jakarta, 1983, halaman 432; Lihat Dispen komando Daerah TNI- AD / IV Sriwijaya, Unutuk diingatdan dikenang, Palembang, 1972, halaman 57.

batang karet. Berkat upaya A.K.Gani sebagai kepala Pemerintahan RI terjalan hubungan bilateral yang baik, terutama hubungan dagang antara Palembang dengan Singapura pada awala masa revolusi kemerdekaan. Penyediaan kebutuhan sandang pangan di daerah ini memperlihatkan kenyataan yang cukup menggembirakan pada waktu itu.

Hingga September 1946 pemerintah RI di Palembang masih memiliki otonomi penuh, terutama dalam penguasaan jalur lalu lintas perdagangan luar negeri melalui Sungai Musi. Kapal-kapal Belanda yang memasuki alur Sungai Musi harus mendapat pengawalan dari tentara Sekutu. Dengan kata lain, hanya kapal-kapal Sekutu saja yang boleh melayari Sungai Musi hingga ke muka Benteng. Akhirnya setelah Belanda menerima daerah-daerah pendudukan Sekutu di Palembang pada tanggal 28 Oktober 1946,<sup>135)</sup> mulailah mereka mengintensifkan segala kegiatan dan kekuatannya dengan cara mengumpulkan semua anggota pasukan Brigade “Y” serta mendatangkan pasukan Gajah Merah/ KNIL sebanyak 1.300 orang. Kemudian menyusul batalyon-batalyon lain seperti Batalyon Infanteri “X” dibawah pimpinan Letkol.van Eak yang bermarkas di sebelah Rumah Sakit Charitas dan pasukan-pasukan tank dibawah komando Mayor Cassa yang mengambil tempat di konsesi minyak Plaju. Pada November 1946 Belanda memperkuat pasukannya di Palembang dengan basis-basis seperti :

1. Batalyon Infanteri XI di Palju dan Bagus Kuning yang diperkuat mobil Tank/ Panser yang dipersenjatai meriam-meriam kecil, senjata berat maupun ringan dibawah pimpinan Mayor Cassa dan Kapten Ref,
2. Batalyon Infanteri VII di Sungai Gerong,
3. Batalyon Infanteri VIII di Sungai Rendang dan Gedung Borsumij/ IMP yang dilingungi tank,
4. Batalyon Infanteri VII di Benteng, Boom Yetty dan Gedung Jacobson van der Berg,

---

<sup>135)</sup> Osman Raliby, *Documenta Historica*, Bulan Bintang, Jakarta, 1983, halaman 432; Lihat Dispen Komando Daerah TNI-AD/IV Sriwijaya, Untuk Diingat dan Dikenang, Palembang, 1972, halaman 57.



5. Sebagian Batalyon Infanteri VIII di BPM Handelzaken,
6. Sebagian Batalyon Infanteri VIII pada Markas Komando Brigade “Y” di Talang Sem ut.
7. Batalyon X di Kompleks Rumah Sakit Charitas dibawah komando Letkol.van Beck.
8. Beberapa pesawat Mustang, Capung dan Bomber beserta VIC VELD ART dan PAWC di Lapangan Terbang Talang Betutu.
9. Beberapa Kapal Krovet (Kapal Perang) dan motor boat di Boom Plaju dan Boom Sungai Gerong.

Untuk menjawab kegiatan pasukan Belanda yang siap tempur, pihak kemiliteran kitapun mengadakan rapat-rapat para Komando di Slogarde Subkoss. Dalam rapat-rapat itu telah diputuskan untuk melakukan alih tugas personalia untuk memperkuat staf dan pimpinan pasukan dari tingkat Batalyon ke atas. Kolone M.simbolon diangkat sebagai komandan Sub Komandemen Sumatera Selatan, tadinya bermarkas di Tanjung Enim, yang bermarkas di Palembang.<sup>136)</sup> Kolonel Bambang Utoyo tetap menjadi Komandan Divisi Garuda II dengan Kepala Staf mayor Rasyad Nawawi. Sedangkan Resimen XV ditempatkan pada daerah pertahanan dalam kota Palembang dan Ogan Komeriing Ilir (Tanjung Raja dan Kayu Agung) Komandannya Mayor Zubir Bustam dengan Kepala Staf Kapten Sulaiman Amin.

Berdasarkan persiapan yang telah dilakukan Belanda mulai berupaya merebut dan menguasai kota Palembang dengan melakukan provokasi untuk memancing kemarahan penduduk. Menjelang Natal serdadu-serdadu Belanda justru melakukan kegiatan di luar kebiasaan yang berlaku dalam agama Kristen. Pada malam Natal yang disucikan, serdadu-serdadu Belanda keluar dari kamp konsentrasinya seperti orang mabuk dan membuat keonarandi jalan-jalan raya. Lasykar Napindo (Dungtjik) yang sedang bertugas di muka Benteng tewa di tembak oleh serdadu Belanda dalam insiden itu. Berbagai rentetan peristiwa yang sengaja diciptakan oleh serdadu-serdadu Belanda terus berkelanjutan. Pada malam 28 Desember 1946 beberapa serdadu Belanda yang mengendarai Jeep menuju Rumah Sakit Charitas sambil

---

<sup>136)</sup> Semdam IV Sriwijaya, Op cit, halaman 69.

melepaskan tembakan-tembakan yang diarahkan ke atas. Tindakan-tindakan itu dilakukan pihak Belanda untuk memancing emosi TRI/Lasykar kita. Namuin untuk sementara kejadian-kejadian itu tidak ditanggapi, karena Panglima Komandemen Sumatera Mayor Jenderal R.Soeharjo Hardjowardojo sedang mengadakan inspeksi di daerah ini. Sebelum mengakhiri tugasnya, sebuah peristiwa yang mengejutkan terjadi. Letnan Rivai Komandan Detasemen Markas Divisi Garuda II, yang sedang menjalankan tugas rutin ditembak di atas sepeda motor Harley Davidsonnya ketika sedang melintas di depan Rumah Sakit Charitas (kini Jalan Sudirman). Korban masih dapat tertolong dan segera dibawa ke sebuah klinik di Jalan Dempo.

Peristiwa tersebut mempengaruhi penduduk kota, mereka takut melewati jalan-jalan besar untuk menghindari kejadian serupa. Menjelang “Pertempuran Lima Hari Lima Malam”, corridor yang pada hari-hari sebelumnya menjadi tempat lalu lintas penduduk kota menjadi lengang. Kota Palembang dalam suasana yang terkecam dan tegang, yang kontak senjata antara kedua belak pihak seaktu-saktu dapat terjadi. Kondisi sudah mengarah pada pertempuran, setidaknya-tidaknya hal ini tercermin dari perintah harian Panglima Sumatera (Mayor Jenderal R.Soeharjo Hardjowardojo) pada tanggal 29 Desember 1946 yang ditujukan kepada seluruh pasukan TRI/ Lasykar rakyat di daerah pendudukan Belanda di Medan, Padang, dan Palembang. Perintah harian yang disiarkan melalui radio itu berisi : agar selalu siap siaga dan waspada sambil menunggu instruksi Pemerintah Pusat yang sekarang sedang berunding. Komandan Sub-Koss Kolonel M.Simbolon turut berpidato untuk melengkapi perintah harian itu.<sup>137)</sup> Kesiapsiagaan di tingkatkan; bukan hanya oleh pasukan-pasukanyang berada dalam kota, tetapi juga oleh kesatuan-kesatuan di luar kota, antara lain Batalyon 30/ Resimen XVII yang markas besarnya dipindahkan ke perkebunan karet Musi-Pait ( $\pm$  30 Km dari Palembang).

Kota Palembang secara alamiah terbagi dua oleh sugai Musi: daerah Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Seberang Ulu meliputi Sungai Geroang/Plaju, Bagus Kuning, Sriguna, Kampung 10 Ulu dan 7 Ulu

---

<sup>137)</sup> Jarahdan IV Sriwijaya, Op cit, halaman 63.

hingga ke Kertapati yang menjadipeusat terminal kereta api. Secara riil kekuatan fisik di pihak kita menjelang Pertempuran Lima Hari Lima Malam adalah sebagai berikut :

1. Devisi Garuda II bermarkas di Sungai Jeruju.
2. Resimen XV/II bermarkas di Sekolah Schakel 15 Ilir
3. Batalyon 32/XV di bawan Komando Kapten Makmun Muros bermarkas di Sungai Tawar (Bioskop "Rex").
4. Batalyon 34/XV dengan Komandan Raden Mas Bermarkas di daerah 7 Uluan (Sekolah Cina)
5. Devisi Laskar 17 Agustus yang membawahi laskar dan badan perjuangan lainnya dibawah pimpinan Kolonel Laskar Husin Achmad yang tersebar di berbagai tempat.
6. Pasukan ALRI.
7. Pasukanv Polisi Tentara ditambah Kompi Guard,
8. pasukan-pasukan dari Resimen XVII,
9. Batalion 230/XVII.<sup>138)</sup>

Sehubungan terjadi Pertempuran Lima Hari Lima Malam, kontak senjata kecil-kecilan sering terjadi yang merupakan prolog dari pertempuran sebenarnya. Pada 28 dan 29 Desember 1946 yang terkenal sebagai "Pertempuran 13 Jam" dimulai oleh Belanda, yang pada dasarnya untuk mulai pertempuran yang lebih besar, dengan harapan dapat menawan Panglima Suamtera yang sedang melakukan inspeksi di kota Palembang. Untuk memperkuat pasukan kita yang berada di dalam kota, didatangkan pasukan-pasukan dari Resimen XVII/ II ± 10 hari sebelum terjadi pertempuran yang dinilai cukup besar.<sup>139)</sup> Atas inisiatif komandan resimen untuk memperkuat kedudukan pasukan TRI/ Lasykar. Untuk menghadapi situasi perang yang mungkin segera terjadi, pimpinan militer (TRI dan Lasykar) membentuk suatu kekuatan yang kompak. Komando Operasi dipimpin oleh Panglima Devisi Garuda II (Kolonel Bambang Utomo) yang di bantu oleh perwira operasi Kapten Alamsyah beserta staf lainnya yang bermarkas di Sungai Jeruju. Dalam tugas pelaksanaannya di lapangan,

---

<sup>138)</sup> Ibid, Halaman 68.

<sup>139)</sup> Haji Umar Bakar, Wawancara, Palembang, 1988

komandan operasi akan dipegang langsung oleh Komandan Resimen XV/ II yang telah berkedudukan di dalam kota bersama Yon ALRI. Mayor Dhani Effendi, Komandan Resimen XVII/ II yang datang dari luar kota bersamapasukannya antara lain Kompi Hantu Udara yang tanpa diperintah melibatkan pasukannya dalam Pertempuran Lima Hari Lima Malam sebagai suatu realita historis.<sup>140)</sup>

Resimen XVII/ II dengan seluruh anggota pasukannya berlokasi di daerah Talang Betutu, Talang Semut, sekitar mesjid Agung, Bukit Besar dan Pasar Lingis (sekarang pasar Cinde) hingga samapai ke sekitar Rumah Sakit Charitas. Pada 31 Desember 1946 malam, seluruh anggota pasukan sudah berada di Seberang Ilir kota dan menduduki tempat-tempat strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu anggota pasukan Batalyon II Tesimen XVII yang dipimpin Kapten Animan Achyat sudah mengambil tempat di dusun Sukarami dan siap tempur. Dengan demikian seluruh anggota pasukan yang tergabung di dalam Resimen XVII sudah berada di lokasi-lokasi sebagai berikut :

1. Satu seksi bersenjata lengkap yang dipimpin Letnan Sudhayat dan Vandrig Imron Effendi mengambil tempat di muka Mesjid Agung.
2. Satu seksi yang dipimpin Komandan Kompi Letda Ilyas berada di sekitar Rumah Sakit Charitas,
3. Satu regu penangkis Serangan Udara (PSU) dipimpin Serma Arifin berada di lokasi Pancawarna ( sekarang Bioskop Mawar).
4. Satu seksi pasukan cadangan di tempatkan di lapangan Hatta,
5. Satu regu Penangkis Serangan Udara (PSU) dipimpin Sersan Syaruddin diperbentukan pada Yon ALRI di Boom Baru,
6. Satu regu Penangkis Serangan Udara (PSU) dipimpin Sersan Madjid berada di daerah Pasar Lakis,
7. Satu regu Penangkis Serangan Udara (PSU) dipimpin Pembantu letnan Bachtiar berada di Lapangan Hatta.<sup>141)</sup>

---

<sup>140)</sup> Dhani Effendi, M., Op cit, halaman 7-17; Lihat A. Zawawis Said, Perang Kota 120 Jam Rakyat Palembang , PT. Grafitas offset, Jakarta, 1985, halaman 107.

<sup>141)</sup> Iskandar Op cit, halaman 72-73;Bandingkan Dhani Effendi, Op cit, halaman 17-18.

Sebelum terjadinya pertempuran yang melibatkan seluruh rakyat pada 31 Desember 1946, unsur pasukan Resimen XVII/ II telah terlibat tembak- menembak yang terjadi di muka Mesjid Agung dan sekitar kubu pertahanan Belanda di Rumah Sakit Charitas. Kontak senjata terjadi karenakonvoi yang keluar dari Talang Semut Melalui jalan Merdeka melewati jalan di depan Mesjid Agung (jalan Jendral Sudirman sekarang) menuju Charitas, decara membabi-buta melepaskan tembakan. Tembakan itu dilepaskan dari mobil yang sedang berlari kencang. Hal ini membuat suasana pagi yang cerah menjadi panas, dan rakyat yang berada disana berlari mencari tempat berlindung. Jalan menjadi sepi seketika dan suara letusan bedil yang tidak tahu datangnya dari mana menyebabkan suasana pagi menjadi semakin ramai.<sup>142)</sup>

Di antara mobil-mobil Belanda yang keluar dari Talang Semut menuju jalan jendral Sudirman ada yang lolos dari penghadangan di depan Mesjid Agung dan terus ke Charitas sambil memuntahkan plurunya kekiri-kanan jalan. Didepan pasar Lingkis Belanda berhadapan dengan anggota pasukan Lasykar dan TRI yang di pimpin Sersan Mayor Madjid. Kontak senjata pada hari pertama ini telah memperlihatkan kekuatan fisik yang tidak seimbang, dimana Belanda telah mengerahkan mobil-mobil tank yang dipersenjatai dengan senjata otomatis dan kapal-kapal perang/ Korvet di perairan Sungai Gerong/Plaju mulai bergerak kearah benteng sebagai pusat konsentrasi Belanda. Usaha Belanda untuk merebut daerah-daerah ke luar corrdor pada hari pertama ini gagal, banyak jendela Mesjid Agung rusak warung-warung kopi beserta toko-toko di pinggir Jalan tengkuruk terbakar disebabkan ledakan mortir yang ditembakkan dari benteng. Kontak senjata yang terjadi di depan pasar Linggis memakan korban yang tidak sedikit, sedangkan di pihak Belanda sendiri tidak diketahui. Korban dipihak kita berjumlah + 150 orang, 50 orang sipil meninggal

---

<sup>142)</sup> Syargawi Hulip, Wawancara, Lumapatan, 1987; Usman Gani, Wawancara, Palembang, 1987. Kedua informan dan penulis sendiri sebagai murid SMP dan SGM sedang berada di lokasi Mesjid Agung, menyaksikan sendiri kontak senjata di depan Mesjid Agung.

dunia dan 500 penduduk luka berat/ringan.<sup>143)</sup> Walaupun korban dipihak kita cukup banyak, namun kedudukan pasukan TRI/ Lasykar di sekitar lokasi rumah sakit Charitas waktu itu sangat menguntungkan karena pusat konsentrasi Belanda (Charitas) telah terkepung.

Mengingat posisi Pasukan Belanda di Charitas tidak menguntungkan maka pimpinan tertinggi militer Belanda Mollinger meminta untuk beunding dengan Pimpinan TRI/ Lasykar dalam rangka penghentian tembak menembak (Cease Fire). Usulan Belanda tersebut diterima oleh Panglima Divisi Garuda II dan Gubernur Moh. Isa selaku Kepala Pemerintahan RI di daerah ini. Peluang itu oleh Belanda digunakan untuk mendistribusikan amunisi/ senjata dan personel ke tempat-tempat pertahanan terdepan. Disamping itu Belanda menggerakkan segala kekuatannya untuk menghadapi lawan, baik melalui udara maupun sungai. Menjelang malam, diatas kota Palembang pesawat Capung terbang agak rendah untuk melakukan pengintaian, baik di daerah Beberang Ulu maupun di Seberang Iilir.<sup>144)</sup> Akhirnya diwaktu tengah malam, dimana suasana kita sedang lengang dan penduduk sedang terdidur nyenyak, tiba-tiba terdengar suara dentuman mortir secara beruntun. Sasaran tembakan mortir dari Benteng itu adalah tempat-tempat dimana anggota pasukan kita berada, baik di lokasi Seberang Ulu maupun di lokasi Seberang Iilir. Penghentian tembak-menembak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sudah tidak berlaku lagi. Ketika menjelang subuh di sana-sini terdengar azan “yang diikuti oleh suara kom ando “S iap dan M aju” beserta teriakan “A llah A kbar.. .. A llah A kbar.. .” Yang dipekirakan oleh para pemuda yang tergabung pada salah satu Badan Perjuangan/Lasykar.

Menjelang hari kedua, masing-masing sektor pertahanan TRI/ anggota laskar mendapat dukungan logistik terutama nasi bungkus. Hubungan antara pusat “dapur umum” ketempat anggota pasukan

---

<sup>143)</sup> Dhani Effendi, Op cit, halaman 21-22.

<sup>144)</sup> Usman Gani, Wawancara, Palembang, 1986; Moh. Hasyim, Wawancara, Palembang, 1988; Penulis sendiri waktu itu sedang berada di kapal roda lambungtersebut berada di hilir Boom Mary sebagai tempat penyeberangan, yang sekarang di kaki jembatan Ampera.

cukup lancar, karena jalan-jalan di dalam kota masih terjamin keamanannya. Sebagai pusat kegiatan dapur umum, kampung 17 Ilir membagikan nasi bungkus untuk pasukan. Demikian pula pusat pelayanan kesehatan yang terletak di jalan Dempo (pulo Mas sekarang) di bawah pimpinan Ibnu Sutowo yang dibantu oleh beberapa orang juru rawat, subuk menampung orang-orang yang luka berat/ ringan. Dari hari ke hari jumlah korban yang dirawat semakin banyak, sehingga tempat penampungan semula tidak memungkinkan lagi sehingga terpaksa menggunakan bangunan Sekolah Pendidikan Gukru yang terletak di jalan Inderapura.<sup>145)</sup> Pada hari kedua pertempuran dan seterusnya, kantor pos, telegraf telah dikuasai Belanda, walaupun anggota Lasykar di Seberang Ulu berhasil menenggelamkan sebuah kapal motor pengangkut bahan Logistik di depan Benteng.

Kemajuan yang dicapai pihak musuh, memaksa TRI/ anggota Lasykar di beberapa sektor pertahanan bergerak mundur sambil menyusun kekuatan baru seperti : anggota pasukan di dekat Masjid Agung mundur ke lokasi Kebon Duku - jalan Pandean dan Talang Jawa Lama- anggota pasukan di belakang benteng (Kompi 32/XV) mengundurkan diri ke jalan Kelurak Madu dan menyebar ke kampung bergabung dengan pasukan anggota pasukan di Sungai Tawar jengudurkan diri ke arah Tatang/ Gandus sampai ke daerah Pebom (tempat yang pernah menjadi pusat latihan Perwira Opsir Muda). Demikian pula pasukan TRI/ Anggota Lasykar di Seberang Ulu di bawah Komandan Yon 34/XV Kapten Raden Mas tidak banyak memperoleh kemajuan, bahkan Komandan Kompi Lettu. Raden Abdullah yang bertugas di Plaju gugur dalam tembak-menembak melawan Belanda.

Kegiatan untuk melokalisir kekuatan Belanda di lapangan udara Talang Betutu yang ditugaskan pada anggota pasukan batalyon 30 Resimen di bawah pimpinan Kapten Animan Achyat, tidak banyak mengalami kemajuan. Bahkan anggota pasukan yang tesebar di sepanjang jalan yang menghubungkan Charitas dan lapangan terbang, terpaksa maju-mundur karena terus-menerus mendapat serangan dari udara. Batalyon 30/ XVII yang didukung oleh Divisi-devisi dengan

---

<sup>145)</sup> A. Zawawie Said, Op cit, halaman 159.

Kompi diantaranya : Lettu Munir, Letda. H. Moh. Noer, Letda. Majid, Letda. Wahiuddin, Pembantu Letnan Kosim Dhahayat. Lettu Muksin dan perwira-perwira lainnya dengan semangat juang yang tinggi melakukan pengecatan serdadu-serdadu Belanda yang keluar masuk lapangan terbang Talang Betutu.<sup>146)</sup> Disektor inipun tidak banyak kemajuan yang berarti, bahkan serdadu-serdadu Belanda yang dibantu oleh pesawat taktis, dengan bebas keluar masuk lapangan terbang menuju lokasi Charitas.

Belanda sadar, mereka tidak hanya berhadapan dengan TRI/ anggota Lasykar yang ada didalam kota saja, tetapi langsung dengan seluruh Fund & Forces di daerah keresidenan Palembang. Seluruh rakyat terlibat dalam pertempuran, baik langsung maupun tidak langsung. Mobilisasi umum yang terjadi di daerah terutama di daerah Ulu, disebabkan oleh faktor religius yang telah berakar pada tradisi rakyat yang sangat kompleks. Kolonel Mollinger memerintahkan kapal-kapal perang untuk memutuskan hubungan yang melalui sungai dan pesawat-pesawat pembom untuk melumpuhkan semua bantuan yang datang dari luar kota. Jalan raya yang menggabungkan lapangan terbang ke arah Sekayu, jalan raya/ kereta api yang menghubungkan kota Palembang ke arah Kayu Agung merupakan daerah operasi pesawat terbang setiap hari. Sementara itu kapal-kapal perang yang dipimpin oleh kapal perang "Piet Hein" yang tidak dapat dijangkau oleh tembakan dari para pejuang, bergerak hilir-mudik di sepanjang perairan Sungai Musi sambil menembakkan peluru mortir dan senapan mesin ke darat Belanda mulai mengerahkan segala kekuatannya, baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara untuk melumpuhkan pasukan TRI/ Anggota Lasykar di segala sektor. Palembang menjadi lautan Api, karena hampir seluruh kota kebakaran dan terjadi tembakan menembak.

Para pemuka masyarakat termasuk kepala pemerintahan sipil dan beberapa orang pimpinan pasukan TRI, mencari jalan keluar untuk melakukan pendekatan dengan pihak musuh, sejalan dengan anjuran Pemerintah Pusat di Jakarta.<sup>147)</sup> Akhirnya setelah mendengar

---

<sup>146)</sup> Jarahdam IV/ Sriwijaya, Op cit, halaman 74.

<sup>147)</sup> Haji Rasyid Nawawi, Wawancara, Palembang, 1981.



dari segala pihak terutama laporan hasil inspeksi mendadak oleh Kepala Polisi Mursodo dan Moh. Isa di lapangan, maka tercapailah kata sepakat untuk menghentikan pertempuran yang telah memakan waktu lima hari lima malam (1 Januari s/d 5 Januari 1947).

Setelah ada kata sepakat antara pihak pemerintah sipil dengan militer, sekarang masalahnya bagaimana mengungsikan seluruh anggota pasukan kita keluar kota. Untuk mengungsikan seluruh anggota pasukan yang terpecah di dalam kota, di pimpin sendiri oleh masing-masing komandan. Kesepakatan ini diputuskan pada suatu pertemuan di Bioskop Elit<sup>148)</sup> pada saat terakhir menjelang malam untuk melakukan dialog dengan kolonel Mollinger. Setelah terjadi dialog antara pihak RI dengan Belanda, maka kedua belah pihak menyetujui :

1. TRI Anggota Lasykar dan badan-badan perjuangan lainnya harus meninggalkan kota Palembang sejauh radius 20 kilometer.
2. Yang masih tetap di Palembang, hanyalah kesatuan ALRI di bawah pimpinan Kapten Saroinsong dan Pemerintah Sipil Republik Indonesia.<sup>149)</sup>

Setelah persetujuan itu diterima oleh kedua belah pihak, maka Komandan Divisi Garuda II (Kolonel Bambang Utoyo) memberikan penjelasan tentang keputusan tersebut, untuk mundur keluar kota sejauh 20 kilometer. Kebijakan yang diambil oleh Kepala pemerintahan RI bersama dengan Kepala Pimpinan TRI ini, mendapat restu dari A.K. Gani yang baru saja tiba dari Jakarta.

Pada tanggal 6 Januari 1947, semua anggota pasukan TRI/ Anggota Lasykar dan badan-badan Perjuangan lainnya mulai melaksanakan keputusan tersebut. Divisi Teuku Muda VIII sebagai induk Laykar Hizbullah berhijrah ke Muara Enim,<sup>150)</sup> Sebelum mereka berkumpul di Kertapati, semua anggota pasukan dikumpulkan di lapangan Golf, Kenten dan kemudian diangkut oleh kapal keruk yang disediakan sebelumnya. Dari Kertapati, mereka disebarkan ketempat-

---

<sup>148)</sup> Haji Moh. Yasin, Wawancara, Sekayu, 1988

<sup>149)</sup> Kementerian Penerangan, Op cit, halaman 61-62; Lihat Jarahdam IV/ Sriwijaya, Op cit, halaman 78-79.

<sup>150)</sup> Haji Royali Harom, Wawancara, Sekayu, 1987.

tempat yang telah ditentukan : di Tanjung Sejaru, Pemulutan, Kayu Agung, Sirih Pulau Padang, Batun dan Prabumulih. Ditempat-tempat yang baru, mereka mengkonsolidasikan diri untuk meneruskan perjuangan.

Demikian pula anggota pasukan yang berlokasi sekitar lapangan Talang Betutu, terpaksa mundur ke Musi Pait, dan oleh karena salah pengertian antara TRI dengan Belanda, pasukan kita harus mundur lagi ke Desa Langkan. Perbedaan interpretasi antara pasukan kita dengan Belanda ini dapat diselesaikan, setelah Kapten Saroinsong datang sendiri ke lokasi dengan membawa pesan dari pemerintah RI di kota Palembang.<sup>151)</sup>

Peistiwa Lima Hari Lima Malam di Palembang merupakan salah satu palagan yang pernah terjadi pada jaman revolusi fisik di seluruh Nusantara, dimana Belanda mengakui adanya pemerintah Republik Indonesia di daerah pendudukannya walaupun sebagian besar anggota pasukan TRI / anggota Lasykar harus meninggalkan kota sejauh 20 kilometer.

Genjatan senjata yang mengakhiri palagan di Palembang secara de facto Belanda mengakui adanya Pemerintahan RI di wilayah ini dan di daerah pendudukannya. Pengakuan yuridis-formal itu jauh lebih penting dari hasil akhir pertempuran itu sendiri, karena permusuhan antara kedua belah pihak akan diselesaikan tidak hanya decara militer namun juga melalui jalur diplomasi. Untuk lebih memantapkan hasil perundingan soal-soal yang penting sebagai tiandak lanjut perjuangan yang akan datang.<sup>152)</sup> Penghentian tembak menembak waktu itu tidak hanya terjadi di keresidenan Palembang saja, tetapi juga daerah-daerah lain di seluruh wilayah RI, dalam rangka politik global pemerintah pusat RI untuk melakukan pendekatan dengan pihak Belanda melalui jalur diplomasi.

Kesimpulan sementara mengenai kegagalan pasukan kita dalam pertempuran tersebut, disebabkan kemampuan logistik yang kurang. Dalam hal ini tidak hanya bahan makanan saja, tetapi juga sarana komunikasi dan transportasi biasanya sangat menentukan pada setiap

---

<sup>151)</sup> Syukri, Wawancara, Palembang, 1988.

<sup>152)</sup> Nasution, A.H. (Jilid II), OP cit , halaman 365.

pertempuran, lebih-lebih letak Palembang secara alamiah terbagi atas dua sektor. Ketika kantor pos dan Telegraf dan pengairan sungai Musi dikuasai sepenuhnya oleh musuh, maka secara teknis dan strategis perang telah melumpuhkan daya juang pasukan kita. Pasukan yang ada diseberang Irir dan seberang Ulu telah bertindak sendiri-sendiri tanpa keseragaman waktu. Inilah faktor historis yang pernah dialami oleh para pejuang kita ketika terjadi melawan Belanda di dalam kota.

Akhir dari pertempuran itu Belanda menguasai kota dan lalu lintas perairan Sungai Musi dari kota ke Muara Sungsang. Secara ekonomis ini merupakan pukulan hebat bagi kita di bidang perdagangan, karena mulai saat itu perdangan bergabung pada good will musuh. Siasat Belanda untuk menciptakan keamanan di dalam kota betul-betul sukses. Seperti yang pernah dialami orang-orang Aceh ketika terjadi perang Aceh 1873-1904, yang kita kenal dengan istilah "gecentreerde linie" (pemusatan pertahanan Belanda).<sup>153)</sup> Tepat-tempat yang menjadi tapal batas kota dijaga ketat, untuk menahan serbuan kembali TRI / anggota Lasykar dari daerah pedalaman. Dengan terciptanya ketertiban dan keamanan di dalam kota dan tersedianya bahan sandang pangan yang berlimpah disediakan oleh algemene Distributie Dienst sebagai penyalur tunggal, maka fungsi dan peranan pasar mulai ramai kembali. Ini merupakan daya tarik tersendiri dan secara psikologis telah memberikan "angin segar" pada orang-orang tertentu untuk hidup berdampingan dengan pihak Belanda. Sandang pangan yang berlimpah itu secara tidak langsung ikut menciptakan situasi terhadap orang-orang yang beranggapan klasik mengenai kehadiran Belanda di daerah ini. Faktor keamanan dan ketertiban dan tersedianya sandang pangan dengan harga relatif dapat dijangkau oleh rakyat, telah mendorong arus urbanisasi. Terutama orang-orang yang dulunya pernah berperan sebagai "agen kolonial" atau orang-orang yang bekerja sama dengan penguasa Jeang.<sup>154)</sup>

---

<sup>153)</sup> Soeroto, Indonesia di tengah-tengah Dunia dari Abad ke abad (jilid III), Jembatan, Jakarta, 1961, halaman 102.

<sup>154)</sup> M a m o e n A b d u l l a h et. al., Kota Palembang sebagai kota dagang dan industri, IDSN, Jakarta, 1984/ 1985, halaman 125-126.

Sebelum Belanda menguasai kota Palembang, telah terjalin kerjasama antara Jawatan Ekonomi RI setempat dengan Overseas Chinese Federation . Adanya kerjasama ini menjadikan Palembang sebagai bandar untuk melakukan hubungan langsung dengan Singapura di bidang perdagangan. Dalam waktu yang relatif singkat hubungan dengan luar negeri pulih kembali bahkan dalam bulan Februari kapal dagang yang keluar masuk pelabuhan Palembang tercatat 42 kapal yang penuh muatannya.<sup>155)</sup> Peluang baik ini dipergunakan oleh pedagang-pedagang perantara (Cina) di dalam kota untuk memperoleh keuntungan yang tidak sedikit. Kegiatan ekspor-impor berjalan lancar dan barang-barang kebutuhan berlimpah, sehingga prospek barang sandang untuk semnetara menurun. Kondisi yang mencolok merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang berdomisili di dalam kota, yang secara sengaja dibuat oleh Belanda agar penduduk memihak padanya dan memusuhi Republik. Sebaliknya kehidupan rakyat pedusunan, khususnya di daerah Musi Ilir berbeda dengan kehidupan rakyat di kota.

Sementara penduduk di kota bergelimang dengan barang-barang impor dan penduduk di daerah Uluan hidup dalam keadaan prihatin, para komandan pasukan sibuk menciptakan sektor pertahanan yang baru, sehingga akibat pertempuran di kota selama lima hari itu didapati diskolasi-diskolasi TRI/ anggota Lasykar di : Langkan, Dusun Tebing Abang di pinggir Sungai Musi, Sri Banding, Sarang Alang/ Talang Pangeran, Modong, Muara Batun, dan Km.32 Simpang Kayu Agung. Khusus mengenai front Langkan di jalan raya yang menghubungkan Palembang-Sekayu, merupakan lini terdepan yang telah disiapkan tiga bulan sebelum terjadi “pertempuran Langkan” dibawah pimpinan Usman Bakar sendiri.<sup>156)</sup>

## DISLOKASI TRI / LASYKAR PEMUDA SETELAH PERTEMPURAN LIMA HARI LIMA MALAM/

---

<sup>155)</sup> Nasution A.H. , (Jilid IV ),Op cit, halaman 367.

<sup>156)</sup> Usman Bakar, Wawancara, Palembang, 1988; Kosim Dhahayat, Wawancara, Sekayu, 1987.

## MENJELANG AKSI MILITER BELANDA I

Peta diatas ini menunjukkan tempat-tempat dimana TNI/ Pemuda Lasykar berada dalam menghadapi tentara Belanda.

\*) Front TNI/ Pemuda Laskar.

Diantara anggota pasukan TRI/ Lasykar yang melakukan hijrah ke luar kota, terdapat pula para pelajar sekolah menengah yang menggabungkan diri ke dalam masing-masing kelompok pasukan. Mereka tidak membentuk pasukan sendiri tetapi bagian dari pasukan TRI yang ikut berjuang memanggul senjata melawan Belanda.

### **C. Peran Yon 30/ Resimen 45 di Daerah Musi Ilir :**

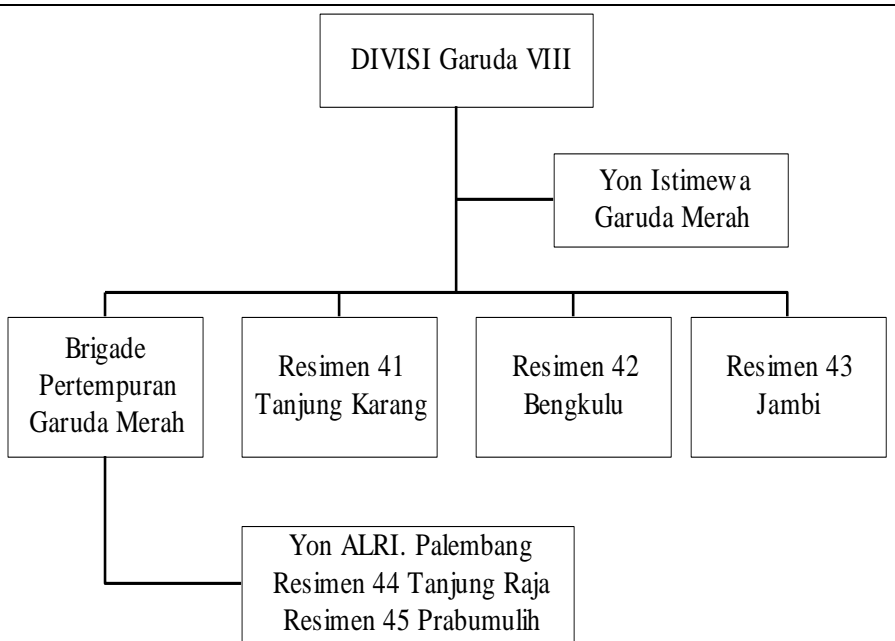
Apa yang diutarakan di atas merupakan usaha anggota pasukan TRI/ anggota Lasykar membentuk front baru di luar kota Palembang. Hal ini merupakan akibat Pertempuran Lima Hari Lima Malam di dalam kota. Khusus bagi Yon 30/ 45 bersama anggota Lasykar yang telah mengambil bagian di dalam pertempuran itu, terpaksa mematuhi segala apa yang telah diputuskan pimpinan tertinggi kemiliteran yaitu

mundur sejauh 50 kilometer dari kota. Mula-mula anggota pasukan berada di Musi Pait, kemudian terpaksa mudur lagi ke desa Langkan apabila garis demarkasi itu diukur dari lapangan terbang Talang Betutu.

Setelah berada di luar kota terjadi pula reorganisasi dalam tubuh TRI dalam rangka “penyegaran” dan alih tugas para komandan pasukan. Alih tugas antara komandan pasukan secara rutin untuk menghindari kejenuhan. Semua tempat yang dianggap mungkin bagi Belanda untuk melakukan serbuan melalui jalan air/ sungai, ditempatkan pasukan TRI/ anggota Lasykar seperti di induk Sungai Musi, Sungai Lematang, Sungai Komerling dan Sungai Ogan. Demikian pula pada jalan-jalan raya/ mobil (Palembang-Sekayu, Palembang-Prabumulih dan Plaju-Kayu Agung); jalan Kereta Api (Kertapati-Prabumulih ke arah Baturaja dan Lubuk Linggau) dan jalan-jalan pipa minyak yang menghubungkan Sungai Gerong/ Plaju dengan daerah pedalaman. Mengingat medan yang semakin luas, maka usaha ke arah konsolidasi organisasi, taktis dan strategis menjadi keharusan dalam penyempurnaan pasukan. Oleh karena itu pada 10 Januari 1947 Sub Komandemen Sumatera Selatan (SUBKOSS) di hapus dan dijadikan satu divisi dengan nama Divisi Garuda III, yang membawahi tiga resimen, satu brigade tempur Garuda Merah dan satu batalyon Istimewa Garuda Merah. Untuk jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

## REORGANISASI TRI DI SUMATERA SELATAN

(Tanggal 10 Januari 1947)



Setelah reorganisasi, Divisi Garuda VIII bermarkas di Lahat dengan komandan Kolonel Moh.M\Nuh, yang kemudian diganti oleh Kolonel M.Simbolon dengan Kepala Staf Kolonel Barlian. Brigade pertempuran Garuda Merah bermarkas di Prabumulih yang dipimpin oleh Kolonel Bambang Utoyo dengan Kepala Staf yang pertama Kapten Alamsyah dan yang kedua Letkol.Zainal Abidin Ning.<sup>157)</sup> Resimen 44 Tanjung Raja dengan Komandan Mayor Rasyad Nawawi yang membawahi tiga batalyon dan satu pos :

1. Yon 32 di Tanjung Sejaru dengan Komandan Kapten Makmun Murod,
2. Yon 34 di sirah Pulau Padang dibawah pimpinan Kapten Sumadinata.
3. Yon 36 di Kayu Agung dipimpin Kapten Syanaf.
4. Pos Modong dibawah pimpinan Lettu. Yusuf (ALRI).

<sup>157)</sup> Jarahdam IV/ Sriwijaya, Op cit, halaman 46-47.

Dengan terbentuknya Brigade Garuda Merah dalam rangka restrukturisasi dalam tibun angkatan bersenjata, mulailah diadakan mutasi antara personil. Sesuai dengan kebijaksanaan Komandemen sebagai pemegang pucuk pimpinan militer wilyah ini, maka secara menyeluruh semua anggota pasukan dinaikkan pangkat setingkat. Instruksi ini mendapat tantangan dan jawaban, terutama anggota pasukan yang berada dalam ruang lingkup Brigade Garuda Merah yang menolak kebijaksanaan tersebut.<sup>158)</sup> Mereka tetap pada pangkat semula tanpa perubahan.

Brigade Garuda Merah merupakan pasukan tempur yang berhadapan langsung dengan musuh. Oleh sebab itu terbentuklah “front-front” sebagai terugval basis yang terbagi atas tiga sektor pertempuran untuk menghadapi Belanda. Adapun front lini yang dibentuk itu adalah :

1. Lini sektor I meliputi Pampangan, Muara Batun, Talang Pangeran, Simpang Payakabung dibawah Komandan Resimen 44 (Mayor Rasyad Nawawi),
2. Lini Sektor II meliputi simpang Payakabung, Sungai Selincah, Sungai Musi (Modong, Muara Lematang sampai ke Sungai Musi) dibawah Komandan Resimen 45 (Mayor Dhani Effendi) beserta anggota pasukan yang terdiri dari anggota Lasykar Napindo, Lasykar Permiri, AURI DI Karang Enda, ALRI dll.
3. Lini Sektor III meliputi daerah Muara Lematang, Lebong, Langkan, Sungai Lilin dibawah Komandan Batalyon 30 bermarkas di Keluang dibawah pimpinan Kapten Usmar Bakar yang dibantu oleh anggota Lasykar Hizbullah dan anggota Lasykar lainnya.

Komandan Sektor III ini pada dasarnya merupakan bagian dari Komandan 4 45/ II yang bermarkas di Prabumulih. Kepada staff Resimen ini (Kapten Usman Bakar) di tunjuk untuk menggantikan Kapten Animan Achyat sebagai komandan Yon 30.

Dengan terbentuknya sektor III dibawah komandan kapten Usman Bakar, Batalyon 30/ 45 memperoleh bantuan sebagai berikut:

---

<sup>158)</sup> Haji Usman Bakar, Dokumen, Palembang, 1988.



1. Tambahan senjata berupa : satu Snel Vuur Kanon, dua Juki (LMG buatan Jepang), berupa pucuk senapan karabin, satu Truk 10 ton buatan USA, satu Truk dan satu mobil sedan.
2. Tambahan perwira yang diperbantukan : Kapt. Makmun Murod, Leda. Ismairin, Leda. Sudayat, Zaini Somad, Serma Sofyan Bs dan beberapa orang bintang serta tantama lainnya.<sup>159)</sup>

Sekitar tiga bulan sebelum Agresi Militer I, semua anggota pasukan dengan segala perlengkapannya bergerak menuju markas Batalyon 30/45. Perjalanan dilakukan dari prabumulih melalui Talang Akar dan Tebiang Bulan dan akhirnya sampai di kota Sekayu. Setelah diadakan beberapa mutasi dan penempatan-penempatan tenaga-tenaga baru, maka ditetapkan suatu garis kebijaksanaan mengenai pertahanan yang paling urgen yaitu :

1. Meningkatkan ketrampilan keprajuritan anggota-anggota Lasykar yang masih berada di dusun-dusun sebagai cadangan untuk keperluan masa depan. Anggota-anggota Lasykar dengan jadwal yang diatur akan dikumpulkan di Lubuk Guci untuk mengikuti latihan kilat. Latihan ini diserahkan/ditugaskan kepada Kapten Makmun Murod.
2. Meningkatkan kemampuan dan keampuhan pertahanan yang sudah ada antara lain laykar Sungai Lilin, Poros Pangkalan Balai, dan Teluk Kijing (pinggir Sungai Musi),
3. Menyeleksi pasukan dan persenjataan bagi anggota-anggota yang berada di pertahanan.
4. Membangun pertahanan minyak.

Kecuali Kapten animan Achyat, Lettu. Wahidudin serta anggota staff lainnya di Lubuk Guci sudah pula berada Letnan M. Alamsjah (alamsjah Godek) yang juga diperbantukan sebagai perwira intelijen dari staf BGM ke Sektor III. Dari pusat komando dikeluarkan instruksi :

1. Memanggil anggota Lasykar dari dusun-dusun untuk mengikuti latihan kilat dibawah pimpinan Kapten Makmun Murod,

---

<sup>159)</sup> Haji Usman Bakar, Wawancara, Palembang, 1988.

2. Merencanakan dan membuat pos pengawas front Langkan sebagai ujung tombak pertahanan Sektor III di garis depan.

Mulai saat ini front Langkan dibangun secara rahasia dan tak seorangpun diluar pasukan mengetahui rencana tersebut. Semua anggota pasukan tidak diijinkan mengambil cuti dan selalu berada di tempat dalam keadaan siap tempur. Segala sesuatu yang menyakutkan cara membangun “menghambat” mobil tank, pembuatan parit-parit dan kawat barikade untuk menahan gerak maju Belanda di Langkan. Hal ini dibicarakan oleh komandan Yon 30 bersama anggota staf dan kepala-kepala regu. Untuk menjaga kemungkinan musuh bergerak melalui jalan sungai, atas inisiatif Haji Umar bin Haji Kudir dibuatlah alat penghambat yang terbuat dari kawat seling. Kawat itu diikatkan pada kedua sisi tebing Sungai Musi (daerah Teluk Kijing dan Ulak Kabur/ Bailangu). Kawat seling itu terendam dalam air, sehingga mempersulit gerakan kapal motor untuk maju atau mundur, karena kipas buritannya akan tersangkut pada kawat tersebut. Cara ini pernah dilakukan Sultan Mahmud Badaruddin II dalam membuat pertahanan di Pulau Kembara, ketika Jenderal de Kock memimpin ekspedisi ke Palembang melalui Sungai Musi.<sup>160)</sup> Dengan menggunakan kawat seling pada kedua lokasi merupakan strategi usaha menghambat gerak maju pasukan Belanda ke daerah Musi Ilir yang dilakukan melalui sungai maupun melalui darat.

Di dalam tubuh TRI terdapat Lasykar-Lasykar. Salah satu Lasykar yang sangat berperan di daerah Musi Ilir adalah Lasykar Hizbullah. Timbulnya Lasykar dan Badan Perjuangan di wilayah ini, tidak dapat dilepaskan dengan terbentuknya struktur organisasi kemiliteran pada bulan Oktober 1945, sebagai hasil pertemuan para perwira Gyugun di Pagar Alam yang dipimpin oleh Jendral Mayor Pangeran Emir Noer. Organisasi yang baru itu disempurnakan, setelah A.K. Gani ditunjuk/diangkat oleh Markas Besar TKR sebagai Koordinator Tentara Keamanan Rakyat di seluruh Sumatera.<sup>161)</sup>

---

<sup>160)</sup> Pem. Tk. I Sumsel, Sejarah Perjuangan St. Macmud Badharuddin II, Propinsi Sumsel, Palembang, 1984, halaman 16-38

<sup>161)</sup> Dinas Penerangan TNI-AD, Patah tumbuh hilang berganti, untuk diingat dan dikenang, Komandan IV Sriwijaya, 1972, halaman 54-55.

Diantara anggota-anggota TKR yang ada didalam kota Palembang, terdapat Lasykar-lasykar pemuda yang lahirsecara spontan. Dalam bulan November 1945, Badan-badan perjuangan yang berbau agama muslim, dan salah satu diantaranya “lasykar hisbullah”.

Timbulnya Lasykar Hizbullah di dalam dan diluar kota Palembang, tak dapat dilepaskan dengan kehadiran organisasi Islam yang telah berakar dalam masyarakat. Oleh karena itu, di tujukan Ulu Palembang Devisi Teluk Muda VII, sebagai induk Lasykar Hizbullah di bawah pimpinan Kolonel Sasykar Hamzah Kuntjit dengan Kepala Stafnya Lerkol. Lasykar A. Baidjuri. Devisi Teluk Muda VII ini membawahi dua resimen : Resimen I berkedudukan di Palembang dengan Komandannya Letkol . Lasykar Nungtjik Akib, dan Resimen II berkedudukan di Sekayu di bawah pimpinan letkol. Lasykar Haji. Moh Yasin dengan kepala stafnya Mayor Lasykar Djuaidi. Resimen II memiliki dua bataluyon yaitu : Batalyon I berkedudukan di Sekayu dengan komandannya Kapten Lasykar Abdus Somad, dan batalyon II bermarkas di Air Item di bawah Komandan Lasykar Syahulik. Adapun Batalyon I yang bermarkas di Sekayu membawahi tiga kompi :tiga kompi ini merupakan bagian dari Tentara Republik Indonesia (TRI) di bawah satu komando pertempuran. Kompi I bermarkas di Sekayu di pimpin oleh Kapten Lasykar A. Qorik Ujud; Kompi II bermarkas di Ulak Paceh di pimpin oleh Kapten Laskar Haji Wahid dan kompi III bermarkas di dusun Epil dipimpin oleh Kapten lasykar Umar Hasan.<sup>162)</sup> Secara organisatoris Lasykar Hisbullah di daerah Uluan berorientasi pada lasykar Induk di Palembang. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila dalam pertempuran Lima Hari Lima Malam di kota Palembang, terdapat anggota-anggota Hizbullah yang berasal dari Uluan/ Musi Ilir ikut berperan dan berlokasi di 17 Ilir dekat Hotel Matahari.

Meskipun telah diumumkan Cease-fire (genjatan senjata) oleh Panglima Tertinggi Persiden Ir. Soekarno (12 Pebruari 1947).<sup>163)</sup> dan persetujuan Linggarjati ditandatangani oleh kedua belah pihak, namun tidak berarti pasukan kita harus beristirahat dan boleh cuti. Mereka

---

<sup>162)</sup> Haji rozali, Wawancara, Sekayu, 1988.

<sup>163)</sup> Marwati Djuned Puspongoro, Sejarah Nasional Indonesia IV, Proyek IDSN, Jakarta 1982/1983, halaman 123.

dipersiapkan sedemikian rupa, latihan kewaspadaan semakin ditingkatkan baik dari segi profesionalisme maupun segi teknis. Latihan-latihan kemiliteran diadakan terus, antara lain mengenai latihan penembakan senjata penangkis serangan udara yang langsung dipimpin oleh Komandan Resimen 45. Betapa sibuknya anggota pasukan di Prabumulih dan ditempat-tempat lain melakukan latihan-latihan fisik kemiliteran. Sementara itu serdadu Belanda selalu saja melakukan provokasi dan penyergapan-penyergapan terhadap anggota pasukan kita di wilayah ini, dan yang lebih penting mengenai perundingan antara Republik-Belanda acapkali tidak terdapat titik temu. Tanda-tanda seperti ini merupakan indikator bahwa pertempuran yang lebih besar tak dapat dielakkan. Berdasarkan informasi, gerak-gerik Belanda yang berada di perbatasan front Langkan, menunjukkan adanya suatu usaha melakukan penyerangan secara besar-besaran de daerah Musi Ilir. Dalam hubungan ini, maka Komandan Yon 30 menginsrruksikan pada seluruh anggota pasukan untuk terus melakukan latihan-latihan intensif.

Informasi mengenai gerak-gerik Belanda yang akan melakukan penyerbuan itu, diperkuat pula oleh isyarat formal dari Wakil Presiden Moh. Hatta, yang dalam bulan Juni 1947 sempat mampir di Palembang bersama rombongan Gubernur Sumatera (Mr. Teuku Moh. Hasan) dalam perjalanan dinas menuju kota Bukittinggi. Keadaan di Wilayah ini nampaknya dari hari kehari semakin tegang, sehingga Brigade Pertempuran yang telah dibentuk berda di posisi yang melingkari garis demarkasi, di tempat mana terdapat titik-titik lemah yang diperkirakan akan dapat diterobos oleh Belanda. Oleh karena itu, terciptalah tiga front terdepan untuk menghadapi trobosan Belanda yaitu :

1. Front Payakabung yang dikuasakan pada Yon Pertempuran Resimen 45.
2. Front Kanan yang dibagi atas tiga lokasi :
  - a. Lokasi Talang Pangeran.
  - b. Lokasi Tanjung Sejaro.
  - c. Lokasi Sirah Pulau Padang
3. Front kiri terbagi atas dua lokasi :
  - a. Lokasi Langkan yang dikuasakan pada Yon 30 Resimen 45.

- b. Lokasi Modong yang dikuasakan pada ALRI/TRI dan anggota Lasykar.

Front Kiri yang terdiri dari Front Modong dan Front Langkan, merupakan tanggung jawab sepenuhnya Resimen 45 yang bermarkas di Prabumulih. Modong adalah lokasi yang terletak antara Payakabung dengan kota Prabumulih dialiri oleh sungai Lematang yang bermuara ke sungai Musi, dikuasakan pada Komandan Rasyad Nawawi yang dibantu oleh anggota Lasykar Napindo (Rono Hamid).<sup>164)</sup> Dusun Langkan yang didiami oleh beberapa kepala keluarga, terletak di daerah Musi Ilir pada jarak  $\pm$  32-33 Km dari kota Palembang dikuasakan mula-mula pada kapten Amin Achyat sebagai komandan Yon 30/45<sup>165)</sup> yang dibantu oleh Lettu. Wahid Uddin, Letnan A. Kosim Dhahayat, Setan Mayor Muchsin Syamsudin, Letnan Ibnu Salim.<sup>166)</sup> Front Langkan merupakan front terdepan dalam menghadapi langsung tentara Belanda dari Talang Betutu.

Pentingnya peranan Yon 30/45 dalam usaha menghambat trobosan Belanda ke daerah ini tidak diragukan lagi, dimana front Langkan merupakan „ujung tombak” yang mendapat dukungan dari semua anggota pasukan yang berada di Tebing Abang, markas Komando di Lubuk Guci (Betung), Keluang, Kertajaya/ Pendopo, Sungai Guci (di hilir dusun Bailangu), Ulak Tebrau dan Mangunjaya. Lokasi front Langkan cukup terlindung oleh pohon duren dan duku. Mengingat daerah ini tertutup oleh pohon-pohon yang tinggi, maka secara alamiah sulit untuk diintai dari pesawat udara. Andai kata Belanda mendapat informasi tentang front pertahanan di Langkan dari agen-agenya, secara rinci sukar untuk mengetahui dengan tepat letak pertahanan yang sebenarnya. Keadaan medan yang sangat menguntungkan penuh dengan hutan lebat disela-sela pohon durian/ duku, penuh rawa-rawa sebelah timur lokasi yang sulit dilalui dan dijaga oleh anggota pasukan terpilih, merupakan prakondisi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Lobang-lobang “perangkap Tank” (Tank-

---

<sup>164)</sup> Haji Usman Bakar, Wawancara, Palembang, 1988.

<sup>165)</sup> Menurut Usman Bakar, Resimen 17 diganti dengan nama Resimen 45 sejak Front Langkan terbentuk.

<sup>166)</sup> M. Arsyat Yahya, Wawancara, Sekayu, 1984.

fall) yang realitanya hanya ada sebuah loang dan yang lain sebagai tipuan, telah membantu pasukan kita untuk memumpin pertempuran pada babak pendahuluan, ketika Belanda melakukan penyerbuan ke daerah Musi Ilir.

#### **D. Agresi Militer I, Interaksi masyarakat dan Reorganisasi TNI**

Meskipun Persetujuan Linggarjati telah ditandatangani kedua belah pihak, namun hubungan Indonesia-Belanda tidaklah bertambah baik. Perbedaan interpretasi mengenai beberapa pasal persetujuan, merupakan pokok pangkal perselisihan. Seminggu setelah persetujuan itu disetujui, secara terang-terangan Belanda melanggar gencatan senjata (Cease fire) yang diumumkan bersama pada tanggal 12 Pebruari 1947. Sebaliknya Pemerintah RI bersama pihak militer di daerah ini tetap mematuhi keputusan tersebut, walaupun di pihak Belanda sendiri cenderung untuk melanggarnya. Akibat pertempuran itu kota Palembang dikuasai sepenuhnya oleh Belanda dan dengan bebas melakukan tindakan prokatif, yaitu menangkap siapa saja yang dicurigai. Peluang yang baik ini digunakan pula oleh NICA untuk melakukan pendekatan pribadi pada orang-orang Indonesia yang dapat diajak kompromi. Demikian pula mengenai hubungan pelayaran antara Palembang-Singapura, sering terjadi indien dengan marinir Belanda yang lalu lalangi Selat Bangka. Sementara itu orang-orang Republik beanggapan bahwa perjuangan setrategis yang lebih menekankan oada hakyr “diploasi” untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda, menjukkan tanda-tanda yang kurang efektif.

Kedatangan Wakil Presiden Moh. Hatta bersama rombongan Gubernur Sumatera (Mr. Teuku Moh. Hasan) di Palembang dalam perjalanan dianas ke Bukittinggi, sempat juga para Kepala Pemeritahan Sipil dan Militer di daerah ini menjadi isyarat bahwa perjuangan kita melawan Belanda banyak memerlukan waktu. Persetujuan Linggarjati yang baru disepakati oleh kedua belah pihak, belum dapat dijadikan jaminan untuk mengakhiri perjuangan. Mengingat gerak-gerik Belanda selam ini dan hasil pertemuan dengan Bung Hatta tersebut, prakondisi di daerah ini sudah menjuruh kearah situasi perang terbuka. Sebagai jawaban terhadap situasi yang tidak menentu ini, terutama setelah

mendengar langsung dari Wakil Presiden, Divisi Garuda VIII di bawah pimpinan Kolonel Simbolon segera mengatur persiapan pertahanan untuk menghambat penetrasi Belanda ke daerah pedalaman.

Brigade Pertempuran yang dipimpin oleh Kolonel Bambang Utoyo siap menghadapi segala kemungkinan dalam penerobosan musuh di daerah Uluan, telah menempatkan Resimen 44 dibawah Komandan Mayor Rasyad Nawawi di Tanjung Raja, Resimen 45 dibawah Komandan Mayor Dhani Effendi di Prabumulih, Batalyon Garuda Merah yang dipimpin oleh Mayor Iskandar diperbantukan dan bertugas di dusun Meranjat, dan Kapten Usman Bakar ditunjuk sebagai pengganti Kapten Animan Achyat sebagai Komandan Yon 30 di Musi Ilir.

Berdasarkan pengamatan Intel di garis demarkasi, serangan Belanda diduga akan ditujukan pada wilayah yang sekarang dinamakan LIOT dan MUBA. Melihat kesibukan Belanda di Palembang di perairan Sungai Musi sebagai pangkalan kapal perangnya, serangan Belanda ke daerah Uluan akan menggunakan jalur sungai yaitu : Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Lematang dan Sungai Batanghari Leko untuk menunjang gerakan militer Belanda melalui jalan kereta api, jalan pipa minyak dan jalan mobil. Secara teoritis tanggung jawab Resimen 45 cukup berat, karena menyangkut wilayah lini pertempuran dari Langkan sampai ke front/ Modong.

Brigade musuh di bawah pimpinan Kolonel Mollinger adalah “B rigade M odern” yang lengkap dengan persenjataan prima. Kekuatan personilnya  $\pm$  6.000 orang prajurit terlatih, sedangkan Divisi Garuda VIII hanya memiliki lima Resimen yang terdiri dari 22 Batalyon Infanteri. Persenjataan yang dimiliki sebagian besar senjata bekas (second hand) dari Jepang dan senapan-senapan tradisional (kecepek). Walaupun dari segi persenjataan kurang memadai dan tanpa pengalaman perang, namun semangat juang untuk keluar dari penindasan kolonial adalah modal utama TNI bersama Badan-badan Perjuangan lainnya. Semangat untuk mempertahankan kemerdekaan berjuang tanpa pamrih dan nilai-nilai kejuangan 45 merupakan modal metalitas setiap pejuang waktu itu. Hampir di mana-mana Belanda melakukan insiden secara beruntun, yang pada dasarnya untuk memancing kemarahan rakyat. Insiden-insiden tersebut meupakan

indikator bahwa perang secara terbuka dan lebih besar tidak dapat dihindari lagi. Pada tanggal 20 Juli 1947 tiba-tiba hubungan Kereta Api Kertapati-Prabumulih terputus tanpa diketahui sebabnya.

Sementara Kereta Api tidak berjalan seperti biasa, dua buah pesawat terbang musuh (tupe Capung dan tupe B.29) terbang diatas garis demarkasi, untuk melihat dan mengukur jarak tembak lokasi yang akan menjadi sasaran tembakan mortir atau sepan mesin yang dimuntahkan dari udara. Prakondisi yang sangat menengangkan ini, merupakan isyarat bagi anggota pasukan di front terdepan, untuk siap sedia menunggu komando dalam menghadapi gempuran Belanda. Untuk menghadapi serangan Belanda ke arah Musi Iilir, front Langkan dan kawat sling yang memotong Sungai Musi siap dipertaruhkan oleh Yon 30/ XVII.

Front Langkan yang terletak kira-kira 32 kilometer dari kota Palembang, merupakan trugval basis Yon 30/ XVII yang memiliki sistem pertahanan yang unik, dengan dikawal oleh anggota pasukan terpilih. Front tersebut telah dirancang sedemikian rupa, dibangun di pinggir jalan raya yang berjarak kira-kira satu kilometer dari pos Belanda di dusun Pulau. Tidak jauh dari lokasi terdapat pemukiman penduduk yang memiliki 10 buah bangunan rumah dari kayu yang telah dikosongkan, di mana mereka mengungsi ke talang-talang. Di belakang front Langkan, yaitu di sekitar Air Puncung, seakan-akan dibangun front yang sebenarnya. Sekitar jembatan itu tidak banyak pohon yang menjulang tinggi, sehingga dengan mudah dapat dilihat oleh musuh dari pesawat udara. Tidak mengherankan apabila serangan Belanda pada tanggal 21 Juli 1947, lokasi ini benar-benar mengalami kerusakan berat. Di front Langkan telah dibangun “perangkat tank” yang dikelilingi oleh lobang-lobang perlindungan, untuk menantikan musuh dalam jarak dekat. Selain perangkat tank (Tank fail) di jalan raya terdapat balok-balok kayu dan barikade kawat berduri untuk menghambat gerak maju mobil tank Belanda. Lobang-lobang pelindung ditempati oleh anggota pasukan kita, yang dikoordinir oleh Jinji-Komando (Jinji=kubu pertahanan) yang dipimpin oleh Yusuf.<sup>167)</sup>

---

<sup>167)</sup> Jinji Komando, adalah salah satu lobang pelindung yang ditempati oleh Yusuf untuk memberikan aba-aba sebagai tanda untuk menembak musuh



Pada tanggal 21 Juli 1947 serdadu Belanda melancarkan serangan serentak melalui semua jalur, yang mendapat dukungan pesawat. Hampir semua lokasi pertahanan Brigade pertempuran TNI dapat diterobos dalam waktu satu hari, termasuk lokasi pertahanan di Langkan dan dusun Tebing Abang (Marga Panukal) yang terletak di pinggir Sungai Musi. Di darat musuh menggunakan senjata berat/Panser, sedangkan di jalur sungai menggunakan kapal-kapal kecil dan motor boat yang dipersenjatai lengkap. Pertempuran frontal terjadi di Langkan beserta tembak menembak dalam jarak dekat, dan demikian pula terjadi kontak senjata di dusun Tebing Abang di pinggir Sungai Musi yang telah menewaskan beberapa orang anggota lasykar antara lain : B a i t bin G u y u t, S a h i m a n bin D u r r a c h m a n dan L a n a n g B i k K e c i k D j a m a s i d a.<sup>168)</sup> Keterpaduan operasi Belanda waktu itu telah mempersulit ruang gerak TNI/ Anggota Lasykar di segala front, walaupun pada pendahuluan hari pertama pasukan kita memimpin pertempuran. Semangat “jibaku” yang diteladani oleh prajurit Yusuf dan kawan-kawan, telah menegangkan urat syaraf dan bulu roma serdadu Belanda, karena mereka diserang secara mendadak dalam jarak dekat, sehingga pasukan kita yang berperan disana diberi nama “Setan Langkan” oleh Belanda.<sup>169)</sup>

Menjelang fajar pertempuran mulai meletus, tembakan mortir yang dilepaskan dari dusun Pulau secara berturut-turut jatuh di belakang garis pertahanan yang sebenarnya. Sementara itu bunyi panser dan mobil berlapis baja mulai bergerak menuju dusun Langkan, jarak antara dusun Pulau dengan Langkan kira-kira 1½ km. Perang frontal antara pasukan TNI dengan serdadu Belanda sudah dapat diperhitungkan, dan memakan korban di kedua belah pihak. Mereka semua bertekad “Merdeka atau Mati” ... .. Sampai tengah hari 21 Juli, anggota TNI bersama anggota Lasykar lainnya masih tetap bertahan di sekitar dusun Langkan, walaupun gempuran dari

---

dalam jarak dekat secara tiba-tiba. Mereka terlindung dari tembakan musuh, dan apabila musuh sudah dekat mereka keluar seketika terus menembak.

<sup>168)</sup> A.Gatam Iderus, Wawancara, Epil 1980.

<sup>169)</sup> A.Kosim Dhahayat, Wawancara, Sekayu 1981; Muchsin Samsuddin (Letkol TNI), Wawancara, Palembang 1981.

pihak musuh yang menggunakan persenjataan yang lebih lengkap datang dari segala penjuru. Karena pertahanan kita di pinggir Sungai Musi (Pengumbuk dan Tebing Abang) dapat diterobos oleh motor boat Belanda, dukungan sepenuhnya dapat dari pesawat taktis dan semakin banyaklah bala bantuan serdadu Belanda dari Talang Betutu, praktis pertempuran diopimpin pihak musuh. Kondisi ini kurang menguntungkan, terpaksa komandan front memerintahkan pada seluruh anggota pasukan untuk mundur sambil memberikan perlawanan. Front Langkan, ditinggalkan, dan pasukan kita mundur ke dusun Satrio, Pangkalan Panji, Pangkalan Balai, Lubuk Lancang dan seterusnya ke Betung.<sup>170)</sup>

Keesokan harinya yaitu pada hari kedua, gerakan mundur Pasukan TNI/ Anggota Lasykar dilakukan secara bertahap sambil merusak jembatan-jembatan yang akan dilalui oleh musuh dan membakar minyak mentah yang sebelumnya sudah dialirkan ke sungai-sungai apabila musuh mendekati tempat tersebut, minyak mentah yang telah mengapung di atas air mengikuti alur sungai, telah menghambat serdadu Belanda untuk melakukan serangan. Untuk mengatasi hambatan amukan api tersebut, esok harinya terpaksa Belanda megebom sumber minyak di Keluang dengan menggunakan pesawat taktis.<sup>171)</sup> Sementara itu terobosan Belanda melalui jalur Sungai Musi terhenti sementara waktu, karena motor boatnya/ kapal motor tersangkut pada kawat seling. Operasi non stop Belanda di daerah Musi Ilir baik melalui darat maupun sungai, menemui hambatan-hambatan yang cukup berarti. Terlambatnya pasukan maju, telah memberikan peluang bagi TNI/ anggota Lasykar untuk menyusun pertahanan baru seperti Front Sungai Guci, Front Muara Teladan dan Front di Sungai Keruh/ Tebing Bulang. Sungai Guci sebagai front yang baru dipimpin oleh Kapten Makmun Murod terletak di ilir dusun B ailangu, merupakan lokasi historis yang pernah dijadikan “benteng” Sultan Mahmud Badaruddin II, untuk menahan penetrasi Inggris ke daerah Musi.

---

<sup>170)</sup> M.Arsyad Yahya, Wawancara, Sekayu 1988.

<sup>171)</sup> haji Usman Bakar, Wawancara, Palembang 1988.

Sementara gerak maju serdadu Belanda mengalami hambatan pesawat taktis yang beroperasi setiap hari untuk memaksa TNI mundur lebih jauh ke belakang sampai di kota Sekayu. Karena kekuatan senjata yang tidak seimbang maka hampir di segala front yang dipertahankan oleh TNI/ anggota Lasykar waktu itu tak dapat bertahan lama. Walaupun kondisi kurang menguntungkan, para pejuang di garis depan masih bersemangat untuk mempertahankan kemerdekaan sampai Belanda dipaksa oleh dunia Internasional untuk maju ke meja perundingan.

Pada hari kedua (22 Juli 1947) Pangkalan Panji diserbu oleh musuh, karena pasukan kita mundur dan membuka front baru di Pangkalan Panji. Daerah inipun tak dapat dipertahankan, sehingga pasukan makin kita mundur ke Pangkalan Balai, yang sebelumnya di kawal oleh Kompi II dibawah pimpinan Kapten Animan Achyat. Dengan segala kekuatan yang ada, Belanda mengerahkan pesawat taktisnya untuk membersihkan Pangkalan Balai dari pasukan TNI/ anggota Lasykar. Malam harinya terpaksa TNI/ Lasykar meninggalkan Pangkalan Balai menuju dusun Lubuk Lancang. Mengingat anggota TNI/ Lasykar yang dipimpin Kosim Dhahayat telah menurun staminanya, maka mereka diperintahkan untuk mundur dan ditarik ke dusun Betung. Dari dusun Betung anggota pasukan itu dapat beristirahat sebentar, dan kemudian harus mundur ke dusun Epil, sambil membuat lini di dusun Lais. Komandan pasukan di lini yang baru ialah Letda.Ibnu Salim. Beberapa hari kemudian dusun Lais diserang oleh Belanda tanpa diduduki.

Kondisi yang kurang menguntungkan ini, disegala lokasi yang menjadi pusat konsentrasi pertahanan TNI/ Lasykar, Komandan Batalyon (Kapten Usman Bakar) memerintahkan pada dua Seksi di bawah pimpinan Kosim Dhahayat dan A.Gattam Idrus untuk menyerbu dusun Betung, ternyata Betung tidak diduduki oleh Belanda. Informasi yang diterima mengatakan bahwa Belanda bertahan di dusun Lubuk Karet. Sesuai dengan perintah Komandan batalyon, anggota pasukan dipersiapkan untuk menyerbu dusun Lubuk Karet. Ketika anggota pasukan TNI/ Lasykar sampai di dusun Pancur, tiba-tiba mendapat serangan dari musuh, sehingga terjadilah tembak menembak yang cukup seru. Mengingat kondisi anggota pasukan kita sudah terlalu

lelah berjalan kaki dari Lais-Betung-Pancur, maka usaha merebut kembali daerah pertahanan yang ditinggalkan itu tidak berhasil, dan pasukan kita terpaksa kembali ke dusun Epil.<sup>172)</sup>

Rencana untuk membangun front baru di Epil tidak memenuhi syarat, karena letaknya kurang menguntungkan. Hal ini disebabkan musuh dapat menerobos melalui Sungai Musi dan sampai di dusun Bailangu, maka pasukan akan tekepung. Untuk itu maka lini pertahanan dipindahkan ke Sungai Guci yang terletak  $\pm 1\frac{1}{2}$  kilometer di hilir dusun Bailangu, yang dipimpin oleh Kapten Makmoen Murod dan dibantu oleh Letda Wahid Udin. Untuk memantapkan lini pertahanan di Sungai Guci ini, di Talang Ubi yang terletak di seberang dusun Bailangu dibuat pos pengintai dibawah pimpinan Sersan Muhammadiyah beserta enam anggota pasukan. Pos pengintai tersebut untuk menjaga kemungkinan Belanda yang akan menyerbu dari dusun Air Itam. Perkiraan tersebut terbukti setelah anggota pasukan yang bertugas di Talang Ubi mendapat serangan dari Belanda pada saat hujan turun dengan lebat dan situasi yang tidak menguntungkan (pasukan ini sedang berteduh di bawah pondok). Demikian juga di jembatan Langaran dibangun front baru untuk membendung musuh yang datang dari Pendopo.

Mengenai lini pertahanan di Langaran, merupakan bagian pertahanan TNI/ anggota Lasykar di daerah Tebing Bulang. Ketika Belanda melakukan Agresi Militer, daerah pertahanan di Tebing Bulang mendapat serangan dari Belanda melalui Pendopo. Sebagai Komandan di daerah tersebut Kapten Animan Achyat yang dibantu oleh anggota pasukan TNI/ anggota Lasykar. Ketika serdadu Belanda melakukan patroli ke desa Lesung Batu dan Lubuk Kepayang, terjadilah kontak senjata antara pasukan kita dengan Belanda pada tanggal 30 Juli 1947. Di dusun tersebut terdapat anggota TNI Serma Mardikun dan Serma Marimin, keduanya Polisi Tentara/ PT. Akibat kontak senjata itu telah gugur antara lain : Mahun bin Masian dari Kertayu, Anang bin Sohe dari dusun yang sama, Amin bin Arip,

---

<sup>172)</sup> A.Kosim Dhahayat, Wawancara, Sekayu 1988.

M adjas bin M atjik, M esik bin H anan, Sai bin Sya ir, T anding bin U m an, U sin bin D juang, Ihun bin D ja I, T ani bin U m ar dan A ziz.<sup>173)</sup>

Setelah terjadi kontak senjata di Lesung Batu dan Lubuk Kepayang, pasukan TNI/ anggota Lasykar dipimpin oleh Lettu.Sunardi.DM, bersama dengan anggota Polisi Tentara menyerang kedudukan Belanda di Jirak pada tanggal 1 Agustus 1947. Serangan mendadak itu tidak berhasil, karena musuh telah pindah. Karena tidak berhasil, maka anggota Lasykar dikerahkan untuk menghancurkan jembatan-jembatan, pohon-pohon ditebang untuk menutupi jalan, sebagai usaha untuk menutupi jalan, sebagai usaha untuk menghambat gerak maju musuh dari jurusan Talang Akar ke Pendopo. Ketika mereka sedang menghancurkan jembatan dan menebang pohon, tiba-tiba terjadi tembak-menembak. Dalam kejadian ini seorang gugur yaitu Djibun. Sementara itu terjadi pula kontak senjata antara anggota pasukan kita dengan Belanda di Pagar Kaya pada tanggal 4 Agustus 1947. Korban di pihak kita adalah : Hanfyah (Lasykar Hizbullah), Adid bin Tjai (Lasykar), gimbar Djahri (Lasykar), Yasin (anggota TNI) dan Muhammad (anggota TNI).

Menjelang medio Agustus 1947, hampir di segala sektor di daerah Tebing Bulang, secara sporadis terjadi kontak senjata dengan serdadu Belanda, yang pada akhirnya anggota TNI/ Lasykar mengundurkan diri ke Sekayu. Seperti yang pernah terjadi di sekitar Jembatan Tebing Bulang pada tanggal 10 Agustus, komandan di pegang oleh Letda.A.Kosim Dhahayat, dibantu oleh anggota pasukan terpilih, tidak mampu menahan gerak maju Belanda yang memiliki persenjataan lengkap. Kontak senjata yang telah terjadi di sekitar jembatan tersebut, telah meminta korban antara lain : M.Zen Achmad (Kopral PT), Djamiun (Lasykar) dan beberapa orang rakyat Tebing Bulang.<sup>174)</sup> Di dusun Gajahmati yang dipertahankan oleh Lasykar Hizbullah dibawah pimpinan Letda.Loein (Lasykar Hizbullah) yang kemudian diambil alih oleh Qorik Dedjud (Kapten Lasykar), telah berhadapan pula dengan serdadu Belanda pada tanggal 12 Agustus. Dari tembak menembak itu telah gugur di pihak kita antara lain : Haji

---

<sup>173)</sup> Haji Rozali Harom , wawancara, Sekayu 1988.

<sup>174)</sup> Abbas Kurib (eks Polisi Tentara), Wawancara, Palembang 1988.

Kopli (Lasykar), Dajamusin (Lasykar), Abuhanipah (Lasykar), Nudin bin Asnen, Aman bin Yusuf.

Setelah terjadi kontak senjata di dusun Gajahmati, anggota TNI/ Lasykar mengundurkan diri ke Rantau Sialang dan mendapat bantuan dari anggota Seksi yang dipimpin oleh Letda.A.Kosim Dhahayat. Kontak senjata yang terjadi di Rantau Sialang ini menyebabkan di pihak kita gugur adalah : Djamiun bin Leman, Nurdin, Husni, Husin bin Hasan, Mardjuan bin Yahya, Kudir bin Leman dan seorang lagi bernama Daud Zamzam cacat matanya sebelah. Hampir pada waktu yang bersamaan terjadi pula kontak senjata di dusun Kertajaya yang dipimpin langsung oleh Kapten Animan Achyat, yang dibantu oleh Polisi Tentara, anggota Lasykar dan para pemuda setempat dibawah pimpinan Ali Basyah dan Hamid Rantau Kasih. Dalam peristiwa di Kertajaya ini telah gugur sersan Idris dan Amin bin Arip (anggota Lasykar GPII). Di antara kontak senjata yang pernah terjadi di daerah Tebing Bulang pertempuran di jembatan sungai Lenggaran termasuk yang paling akhir dan merupakan “titik balik” lini pertahanan TNI di seberang Sekayu. Hampir seluruh anggota pasukan terlibat dalam pertempuran di sungai lenggaran dengan maksud untuk menahan gerak maju Belanda ke arah Sekayu. Pihak musuh telah mengerahkan segala kekuatan tempurnya yang ditunjang oleh pesawat taktis, sehingga perlawanan yang datang dari pihak kita tidak membawa hasil yang memuaskan, dan seluruh anggota Tni/ anggota Lasykar terpaksa meninggalkan lokasi tersebut sambil melakukan bumi hangus.<sup>175)</sup>

Tidak hanya dari daerah Pendopo Belanda melakukan serangan serentak, tetapi juga dari sungai Musi yang beerhdapand dengan lini pertahanan di Sungai Guci (Hilir Dusun Bailangu) dan sungai Batang Hari Leko yang menerobos lini pertahanan di dusun Muara Teladan. Dengan jatuhnya lini pertahanan LARI di dusun Muara Teladan dan mundurnya TNI/ anggota Lasykar di jebatan Sungai Lenggaran pada tanggal 17 September 1947,<sup>176)</sup> Praktis lini pertahanan di Sungai Guci

---

<sup>175)</sup> Haji Rozali Harom, Wawancara, Sekayu 1988; A.Kosim Dhahayat, Wawancara, Sekayu 1988.

<sup>176)</sup> A. kosim Dhahayat, Wawancara, Sekayu 1988 (Dokumen).

terancam. Kapten Makmun Murod dan pembantunya Letda Wahid Uddin menggerakkan semua anggota pasukan untuk mundur ke Dusun Sukarami. Pada saat pasukan Belanda dari arah Pendopo menuju Sekayu, terjadi pula tembak menembak di seberang Sekayu, dimana seorang kurir yang sedang menyeberang Sungai Musi (Ishak bin Tuyib) tertembak dan tenggelam.

Kota Sekayu terancam dari segala jurusan sehingga Ulak Tebrau dijadikan Markas Natalyon 30/XVII. Di dusun Ulak Tebrau sudah ada balabantuan pasukan yang dipimpin Kapten Wahab Sarobu.<sup>177)</sup> Untuk menjaga posisi Ulak Tebrau sebagai pusat Batalyon, dusun Sukarami dengan Ulak Tebrau ditempatkan anggota Pasukan TNI/ Anggota Lasykar dalam keadaan siap tempur. Sebatgai hasil akhir Agresi Militer Belanda I termasuk pula daerah Musi Ilir, telah mempersulit posisi Belanda di dunia internasional. Pangakuan de facto atas Jawa, Madura dan Sumatera berdasarkan persetujuan Linggarjati (25 Mater 1947), adalah dasar hukum yang kuat bagti Dewan Keamanan PBB untuk ikut campur dalam sengketa Indonesia-Belanda. Itulah sebabnya atas desakan anggota-anggota PBB, masalah Indonesia-Belanda dicantumkan kedalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB. Akhirnya pada tanggal 1 Agustus 1947 di mana Belanda sedang giat-giatnya menyerang daerah RI, Dewan Keamanan PBB menyerukan kedua belah pihak untuk menghentikan tembak menembak. Seruan itu secara resmi diterima oleh kedua belah pihak pada tanggal 4 Agustus, tapli nyatanya Belanda masih saja melancarkan gerakan militernya di daerah ini sampai media September 1947.

Masyarakat pedusunan langsung atau tidak langsung telah ikut berpartisipasi dalam perjuangan. Pada setiap dusun di daerah Musi Ilir terutama antara lini pertahanan di Langkan sampai kota Sekayu, telah terbentuk apa yang disebut “inspek to rat”<sup>178)</sup> Badan ini bertugas untuk mengumpulkan bahan makanan dari rakyat yang diperlukan oleh parapejuang di garis depan (TNI/ Lasykar) di markas atau di front. Para inspektur itu pada umumnya adalah orang-orang yang ditunjuk

---

<sup>177)</sup> A. Karim Umarhasan, Wawancara, Palembang 1987.

<sup>178)</sup> H. Usman Bakar, Wawancara, Palembang 1987.

oleh para penguasa. Bahkan makanan seperti nasi bungkus atau makanan ringan lainnya didapatkan dengan sukarela dari rakyat, disamping makanan yang dimiliki oleh TNI dalam jumlah yang relatif besar. Makanan yang didapatkan dari rakyat tersebut, sifatnya seponitanitas apabila terjadi pertempuran. Selain ini, ada pula dapur-dapur umum yang dikoordinir oleh rakyat pedusunan setempat. Semua pangan yang ada pada rakyat, merupakan sumber logistik bagi pejuang rakyat waktu itu. Semua jenis ternak dalam ukuran kecil dan besar, apabila diperlukan siap dipotong untuk lauk-pauk. Demikian pula buah-buahan, selalu tersedia. Ini merupakan sikap kebersamaan dan solidaritas atas para pejuang dan rakyat.

Disamping adanya partisipasi masyarakat dalam masalah makanan, tidak kurang pentingnya Seksi Palang Merah. Pembentukan Palang Merah Indonesia (PMI) yang didirikan pada tanggal 17 September 1945 atas inisiatif dr. Buntara Martoatmodjo ternyata sangat urgen dan berfaedah sekali di waktu Revolusi Kemerdekaan.<sup>179)</sup> Sevara organisatoris, PMI di atur oleh Departemen Kesehatan, dan oleh karena itu pimpinan Palang Merah di daerah Musi Ilir dan Banyasin ditangani oleh orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan Rumah Sakit setempat. Dalam hal ini Rumah Sakit Umum Sekayu yang pada jaman Jepang dikepalai oleh dr. Selamat, merupakan lembaga kesehatan yang berperan aktif pada masa revolusi di daerah ini. Anggota-anggota Palang Merah waktu itu antara lain: dr Selamat, Syamsiah, Nurlala, Nurbaya Bakir.<sup>180)</sup> Dengan adanya Palang Mwerah, mak korban dapat terbantuan tertolong walaupun mungkin secara darurat.

Ketika Belanda melancarkan Agresi Militer I, terpaksa pusat Markas Divisi Garuda VIII berhijrah ke Lubuk Linggau, yang pada tanggal 1 Juni 1948 mengadakan perubahan struktur organisasi kemiliteran secara menyeluruh, sesuai dengan apa yang pernah diucapkan oleh Wakil Presiden dalam BPKNI Puasat, ketika beliau

---

<sup>179)</sup> Iwa Kusuma Sumantri, Sejarah Revolusi Indonesia, Masa Revolusi Bersenjata, Jakarta (tt), halaman 45-46.

<sup>180)</sup> Haji Chomsah Daud, Wawanvara, Sekayu 1988.



menggantikan Kabiner Amir Syarifudin.<sup>181)</sup> Reorganisasi dan rasionalisasi di dalam tubuh Angkatan Bersenjata itu, adalah kelanjutan dari mosi Baharuddin dkk. Di BPKNI Pusat untuk penyerahan tugas wewenang Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Intisari usaha tersebut terletak pada pemusatan Pimpinan Administratip dan strategis organisasi teknis angkatan Bersenjata, sehingga Menteri Pertahanan dapat mempertanggung jawabkan pimpinannya pada Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan adanya Reorganisasi dikalangan kemiliteran, maka menteri Pertahanan secara utuh dapat menguasai sepenuhnya Tentara Nasional Indonesia. Ia dibantu oleh Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) dan Sekretaris Jendral. Kepala staf Angkatan Petang memiliki tugas dibidang militer setrategis, KSAP dibantu oleh setiap angkatan yaitu : Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Darat. Wilayah Republik Indonesia terbagi atas beberapa Territorium Angkatan Darat, Territorium Angkatan Udarta dan Territorium Angkatan Laut yang secara langsung dikuasai oleh Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP).

Dengan adanya reformasi dan rasionalisasi Angkatan Bersenjata Repulik Indonesia di tingkat Pusat, maka pada tanggal 1 juni 1948 di daerah Sumatera bagian Selatan terjadi perubahan struktur organisasi, dimana Divisi Garuda VIII membawahi lima BRIGADE :

1. Brigade Garuda Putih berkedudukan di jambi dengan Dkomandannya Lerkol. Abunjani.
2. Brigade Garuda Emas di Lahat dengan komandanya Lerkol Barlian.
3. Brigase Garuda Dempo di Pagar Alam dengan komandannya Kolonel Hasan kasim
4. Brigase Garuda Hitam di Tanjung karang dengan komandannya Lerkol. Semaun Gaharu.
5. Brigade Pertempuran Garuda Merah di Prabumulih dengan komandannya Letkol. Bambang Utoyo.<sup>182)</sup>

---

<sup>181)</sup> Nasution, A.H., (Jilid IV), Op.cit, Halaman 477.

<sup>182)</sup> Dokumentasi Usman Bakar, 1988, halaman 51.

Khusus mengenai Brigade Pertempuran Garuda Merah menguasai wilayah Ogan Komering Area di bawah pimpinan Kapten Alamsyah; Ogan Artea di bawah pimpinan Kapten Ryacudu; Musi Banyuasin Area di pimpin oleh Mayor Dhani Effendy; Dawas Tanah Abang Area dipimpin oleh Kapten Animan Achyat; Babat Toman Area dipimpin oleh Kapten Makmun Murod dan Mangunjaya dan Pendopo Atea di bawah pimpinan Kapten Usman Bakar.

Meskipun situasi dan kondisi ABRI di daerah ini kurang menguntungkan di segala front pertempuran, namun kebijaksanaan tertinggi kemiliteran di wilayah ini dalam bentuk organisasi dan rasionalisasi berjalan terus. Sehingga dalam pelaksanaan terdapat tiga corak:

1. TNI akan diperkecil jumlah personel sesuai dengan kemampuan keuangan negara waktu itu.
2. Memperbaiki struktur organisasi pertahanan.
3. Alih tugas personel untuk memperoleh kesegaran dalam menjalankan tugas.

Dalam kaitan ini, maka pada tanggal 1 Juli 1948 lahirlah SUBKOMANDEMEN SUMATRA SELATAN (Subkoss) yang menggantikan Divisi dan sistem Brigade. Sistem yang baru ini membawahi empat Sub Territorium yaitu : Sub Territorium Jambi di bawah pimpinan Lerkol Abunyani; Sub Territorium Bengkulu di Bengkulu di bawah pimpinan Letkol. Barlian; Sub Territorial Palembang di Muara Beliti dipimpin oleh Letkol Bambang Utoyo dan Sub Territorium Lampung di Tanjung Karang dipimpin oleh Lerkol Semaun Gaharu. Sub Komandemen Sumatera Selatan bermarkas di Lubuk Linggau di bawah pimpinan Panglima Kolonel M. Simbolon dengan Kapten Staf Letkol dr. Ibnu Sutowo.

Ketika sub Komandemen Sumatera Selatan bermarkas di Lubuk Linggau, Badan-badan Perjuangan yang terhimpun di dalam Lasykar seperti Lasykar Napindo dan Lasykar Pesindo dilebur menjadi Batalyon 36, sedangkan Lasykar hizbullah di daerah Musi Banyuasin dilebur menjadi Batalyon 38 di bawah pimpinan Kapten a. Baidjuri dengan Kepala Staf Lettu. A. Qorik Ujud. Kedua batalyon ini diremikan oleh Panglima Suboss di Lampung Mredaka Lubuk

Linggau. Batalyon 38, yang pada waktu itu bermarkas di Lubuk Linggau membawahi tiga kompi :

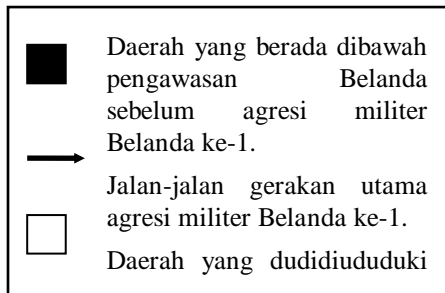
1. Kompi I di daerah Musi Ilir berkedudukan di Sugihwaras dengan komandannya Letda. Sahulik yang diperbantukan pada Batalyon XI Garuda Merah.
2. Kompi II di Pagar Alam dengan komandanya Letda. A. Somad
3. Kompi III bermarkas di Muara Dua di bawah pimpinan Letda Yusuf Aziz,<sup>183)</sup>

Politik konsolidasi di dalam tubuh TNI waktu itu, merupakan jawaban terhadap situasi perjuangan yang meningkat. Dengan terbentuknya Subkoss, maka tiap-tiap Sub Teritorial diberi kuasa penuh sera bertanggung jawab ataswilayahnya dan perjuangan masing-masing dalam bentuk perlawanan total, dengan mengikut-

## **DAERAH-DAERAH YANG DIDUDUKI BELANDA SETELAH AGRESI MILITER BELANDA KE I**

---

<sup>183)</sup> Dokumen H. Rozali Harom, Sekayu, 1988, halaman 14.

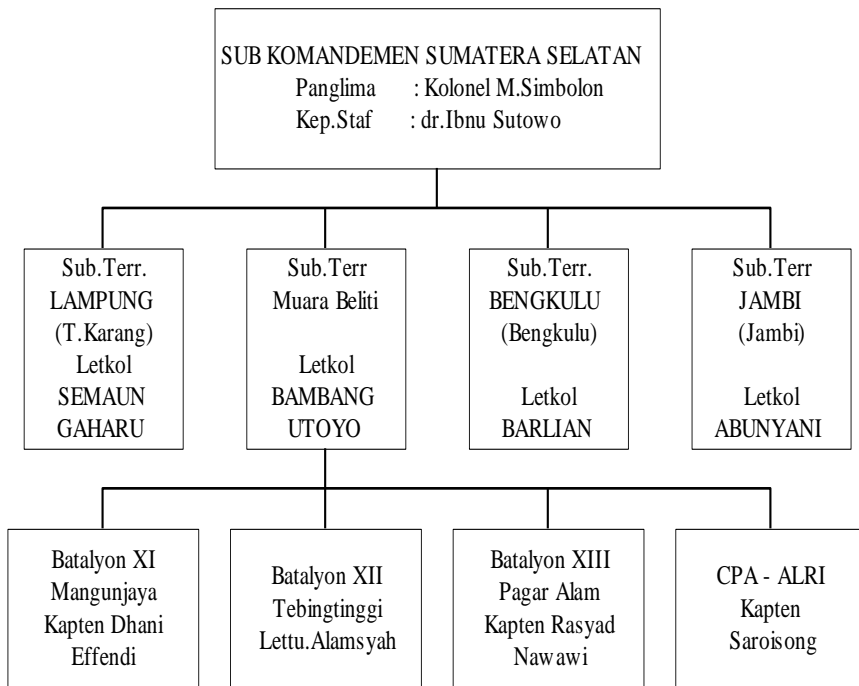


SUMBER : Dr.A.Nasution (Jilid V), halaman 298

sertakan rakyat secara aktif. Bentuk perlawanan total ini, merupakan persiapan dalam menghadapi Belanda yang akan melakukan Agresi Militernya lagi. Sementara itu desakan Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda berjalan terus, sampai menghasilkan suatu komisi yang kita kenal “Komisi Tiga Negara”

(KTN). Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Australia (Richard Kirby), Belgia (Paul van Zeeland) dan Amerika Serikat (Dr. Frank Graham).<sup>184)</sup> Atas dorongan KTN, terdapat kata sepakat untuk kembali ke meja peundingan. Akhirnya perundingan itu diadakan diatas sebuah kapal milik Angkatan Laut Amerika RENVILLE.

Dibawah ini dapat dilihat struktur organisasi Kemiliteran sampai akhir bulan Desember 1948, dimana SUBKOSS membawahi Sub Territorium - Sub Territorium di wilayah inti :



Sementara terjadi reorganisasi dan rasionalisasi I kalangan TNI, Belanda secara sepihak tidak menghiraukan seruan Dewan Keamanan pada tanggal 4 Agustus 1947. Dimana saja terjadi kontak senjata secara sporadis antara TNI dengan serdadu Belanda, sebelum tiba Komisi Tiga Negara untuk menentukan daerah “Penyanggah” antara dusun Tnjung durian dengan dusun Ulak Tebrau. Secara nonstop Belanda melancarkan ke daerah Republik, baik menggunakan

<sup>184)</sup> Nugroho Notosusanto (Jilid VI), *Op cit*, halaman 159.

jalur sungai maupun jalan darat yang ditanjang oleh pesawat prkatis. Oleh katena itu terpaksa TNI/ anggota Lasykar sambil mundur, merubah taktis dalam menghadapi serangan Belanda menurut sistem „W ehrkerise” (suatu cara dalam m enghadapi musuh yang memiliki persenjataan lengkap dengan sistem “taktik grilya”) untuk menggantikan sistim pertahanan linier.

Sub Territorium Muara Beliti di bawah komandan Letkol Bambang Utomo memiliki empat Batalyon, dan di antaranya beroperasi di daerah Musi Ilir yaitu Batalyon XI yang dipimpin oleh Kapten Dhani Effendi dan CPA-ALRI dibawah pimpinan Kapten Saroinsong.<sup>185)</sup> ketika belanda melancarkan Agesi Militer II (19 Desember 1948), sistem pertahanan linier diroboh menjadi sistim “w ehrkreise” sesuai dengan perintah Siasat Nomor 1 dari Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :

1. Tidak akan melakukan pertahanan linier.
2. Tugas memperlambat kemajuan dan serbuan musuh serta pengungsian total serta bumi hangus total.
3. Tugas membentuk kantong-kantong di tiap-tiap onder distrik militer yang mempunyai pemerintahan Gerilya yang totaliter (Wehrkreise) dan mempunyai pusat beberapa komplek pegunungan.
4. Tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah Federal untuk ber-“w ingate” (m enyusup) ke daerah musuh yang pernah ditinggalkan oleh anggota TNI.<sup>186)</sup>

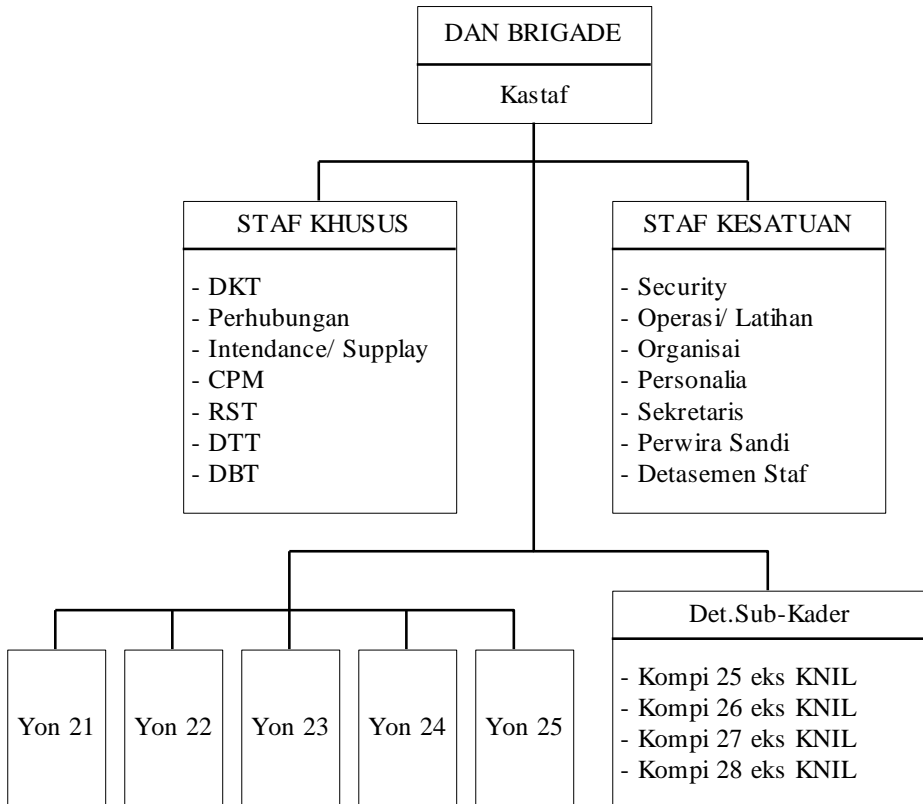
Selama berlangsung Agresi Militer Belanda II, Sub Komandemen Sumatera Selatan pada dasarnya tidak mengalami perubahan. Tetapi dalam proses akhir yaitu masa-masa menjelang pengakuan Kedaulatan (27 Desember 1949), semua sub Territorial meleburkan diri menjadi satu Brigade yaitu BRIGADE SUMATRA SELATAN yang membawahi Batlayon-batalyon dalam bentuk riel. Sesuai dengan Surat Perintah Panglima Subkoss (Kol.M.Simbolon)

---

<sup>185)</sup> Moh. Ali, et al., Patah Tumbuh Hilang Berganti, untuk diingat dan di kenang, Dinas Pen. Daerah TNI-AD IV/ Sriwijaya, Palembang 1978, halaman 107.

<sup>186)</sup> Nugroho Notosusanto, Op cit, halaman 176-177.

No. 217/11a/KG/1949 tertanggal 15 Oktober 1949<sup>187)</sup>, maka terbentuklah struktur organisasi yang baru pada masa transisi sebagai berikut :



Struktur organisasi Kemiliteran di Wilayah ini seperti yang digambarkan di atas, secara formal mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 1949, di mana Sub Territorium dijadikan Batalyon-batalyon yang riil (Yon 21, Yon 22, Yon 23, Yon 24, Yon 25) dan Detasemen Sub.Kader yang terdiri dari unsur-unsur eks KNIL yang terbagi atas 4 Kompi (Kompi 24, Kompi 26, Kompi 27 dan Kompi 28) di daerah

<sup>187</sup> Sli, Moh, et al., Op cit, halaman 109-110.

Sumatera bagian Selatan. Sudah barang tentu dalam pembentukan struktur organisasi yang baru ini dari suatu bentuk kesatuan yang riil menjadi bentuk kesatuan tempur yang belum begitu jelas, karena situasi politik ekonomi dan sosial yang belum mapan. Keadaan administrasi masih sangat sederhana, peraturan-peraturan dan surat-surat perintah susul menyusul yang tumpang tindih dalam menangani suatu masalah. Tetapi bagaimana juga pola umum BRIGADE SUMATERA SELATAN sudah mulai diletakkan atas dasar kebijaksanaan yang sangat mendesak, yang kemudian melahirkan KODAM IV SRIWIJAYA di wilayah ini.

Setelah terbentuk Brigade Sumatera Selatan, berarti Subkoss yang menjadi induk tertinggi Kemiliteran di daerah ini dihapuskan. Berdasarkan Surat Perintah Menteri Pertahanan RI No.806/1a/KG/1949 tertanggal 8 September 1949, Staf Brigade Sumatera Selatan dipindahkan ke Palembang.<sup>188)</sup> Segala kekuasaan Subkoss diambil alih oleh komando Brigade Sumatera Selatan termasuk anggota stafnya, yang komandannya Lekol Bambang Utoyo. Ketika terjadi peristiwa 27 Desember 1959, daerah Sumatera Selatan termasuk Jambi diserahkan oleh Belanda (Letkol.P.N.Donk) pada pimpinan tertinggi TNI di daerah ini (Letkol.M.Simbolon). Walaupun sudah ada surat perintah dari Menteri Pertahanan RI, kekuasaan tertinggi TNI di daerah ini masih dipegang oleh Kol.M.simbolon. Baru pada tanggal 30 Maret 1950, Komando Sumatera Selatan diserahkan dari tangan M.Simbolon pada Bambang Utoyo sebagai Komandan Brigade Sumatera Selatan. Akhirnya bentuk Brigade Sumatera Selatan dirobah dengan nama BRIGADE TERRITORIUM SUMATERA SELATAN/ JAMBI, Berdasarkan Surat Keputusan KASAD No.083/KSAD/ Kpts/1950 tertanggal 30 juni 1950.

#### **E. Masa Gerilya, Long March ke Ranau dan Lahirnya Negara Sumatera Selatan :**

Letak geografis daerah Onderafdeeling Musi Ilir dan Banyuasin seperti yang telah diuraikan, merupakan daerah yang cukup menunjang dalam melaksanakan “perang Gerilya” atau “Perang Rakyat Semesta”

---

<sup>188)</sup> Ibid, loc cit.



pada waktu revolusi fisik melawan Belanda. Ia terletak pada ketinggian tidak lebih dari 9 meter di atas permukaan laut dan sebagian besar terdiri dari dataran rendah<sup>189)</sup> serta warawa-rawa yang tertutup oleh kayu nipah dan pohon gelam. Makin ke udik Sungai Musi beserta anak sungainya ditutupi oleh hutan lebat yang sulit dilalui, sehingga secara alamiah dapat dijadikan tempat persembunyian bagi anggota TNI apabila terpaksa. Perobahan taktis strategis melawan Belanda di wilayah ini dari sistem pertahanan linier menjadi sisti “W ehrkreise” yang dapat diartikan sebagai perang Gerilya atau “Perang Rakyat Sementara”<sup>190)</sup> tidak dapat dilepaskan pada kebijakan yang telah diambil oleh pucuk pimpinan ABRI di tingkat Nasional. Peristiwa-peristiwa itu baik yang datang dari dalam maupun yang ada dari luar/ Belanda yang ingin menghapuskan pemerintah RI. Pertikaian yang terjadi di kalangan RI sebagai akibat dari persetujuan Renville, kegoncangan di tubuh TNI sehubungan adanya rekonstruksi, rasionalisasi dan penumpasan terhadap pemberontakan Partai Komunis Indonesia (Madiun Affair 1948), telah memberikan peluang bagi Belanda untuk menekan RI sebagai negara yang baru lahir.

Sementara perundingan-perundingan yang diselenggarakan dibawa pengawasan Komisi Tiga Negara (KTN) selalu menemui jalan buntu dan prakondisi TNI tidak menguntungkan sebagai akibat Agresi Militer Belanda I di daerah ini, perlawanan rakyat sementara merupakan satu-satunya alternatif. Belanda dengan tegas mengemukakan tuntutan yang tidak mungkin diterima oleh Pemerintah RI seperti : Interpretasi “garis CAN M ook” sebagai garis demarkasi antara daerah yang masuk kekuasaan Republik Indonesia dengan daerah yang menjadi kekuasaan Belanda, dan masalah lain yang menyangkut pembentukan pemerintah Interim negara Indonesia Serikat. Usul tawaran yang diajukan oleh Komisi Tiga Negara yang terkenal dengan “usul Chritchley Dubois (anggota KTN dari Amerika-Australia) ditolak mentah-mentah oleh Belanda karena tidak

---

<sup>189)</sup> Pemda Kabupaten Muba/ Statistik, Musi Banyuasin Dalam Angka 1984, Kantor Statistik Muba, 1985, halaman 1.

<sup>190)</sup> Nasution, A.H., Pokok-pokok Gerilya, Pembimbing, Jakarta 1954, halaman 25.

menuntungkannya. Dalam situasi yang sangat gawat ini, akhirnya terpaksa Bung Hatta meminta kembali KTN menyelenggarakan perundingan dengan Belanda, dengan syarat kesediaan pemerintah RI mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan. Uluran tangan tersebut dijawab dengan tegas oleh pihak Belanda pada hari itu juga (13 Desember 1948), bahwa perundingan apa saja dengan pihak RI tidak akan diadakan lagi, apabila tidak didasarkan pada tuntutan-tuntutan yang pernah diajukan oleh Belanda.

Lima hari sesudah penolakan tersebut, pada jam 23.30 secara resmi Dr.Beel memberitahukan kepada delegasi RI dan KTN, bahwa Belanda tidak lagi mengakui atau terikat pada persetujuan Renville. Berita yang sangat penting ini tidak dapat diteruskan oleh delegasi RI ke Yogyakarta, karena hubungan telepon telah diputuskan oleh Belanda sebelumnya. Pernyataan Dr.Beel yang bersifat formal itu telah menimbulkan apa yang disebut Agresi Militer Belanda II, yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 di mana pasukan lintas udara Belanda melakukan serangan langsung ke ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta. Dalam waktu yang relatif singkat lapangan terbang Maguwo (sekarang Adisucipto) dan seluruh kota Yogyakarta dapat dikuasai. Presiden, wakil Presiden dan sejumlah pembesar negara tidak menyingkir dan ditawan oleh Belanda.<sup>191</sup> Presiden Soekarno cs diterbangkan ke Prapat (Sumatera Utara) dan wakil Presiden Moh.Hatta cs ke pulau Bangka. Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan praktis dari pihak Belanda, maka pada tanggal 6 Pebruari 1949 Presiden Soekarno cs dipindahkan ke Bangka dan bergabung dengan wakil Presiden beserta pejabat-pejabat tinggi lainnya.

Sebelum Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia ditawan oleh Belanda, pada hari itu juga diadakan sidang Kabinet darurat/ Istimewa yang telah mengambil keputusan untuk memberikan mandat melalui radiogram kepada Menteri Kemakuran (Mr.Syarifuddin Prawiranegara) yang kebetulan pada waktu itu sedang berada di Sumatera, agar membentuk Pemerintah Darurat Republik Indoneis (PDRI). Jika tidak memungkinkan terbentuk PDRI, kepada

---

<sup>191)</sup> Nugroho Notosusanto, *Op cit*, halaman 179.

Mr.A.A.Maramis (Menteri Keuangan), LN.Palar dan Dr.Soedharsono yang sedang berada di India <sup>192)</sup> Dalam sidang Kabinet Istimewa itu pula telah terjadi suatu “dialog” antara Presiden di satu pihak dengan golongan TNI di pihak lain. Sebagai hasil akhir dialog, diputuskan Presiden cs tidak mengungsi ke luar kota. Sesuai dengan rencana yang telah digariskan sebelumnya dan telah disetujui oleh pemerintah RI, seluruh kekuatan Angkatan Bersenjata RI diperintahkan pergi ke luar kota untuk melakukan “perang Gerilya” di bawah Komando Panglima Besar Jenderal Sudirman, sekalipun kondisi fisik beliau sendiri kurang menjang.

Seperti apa yang telah kita ketahui sebelum terbentuk Pemerintah Darurat RI di Sumatera, telah ada kesepakatan antara pimpinan TNI dengan Pemerintah Sipil, yaitu apabila Belanda melakukan penyerangan terhadap RI, pemerintah sipil akan menyingkir keluar kota bersama-sama anggota TNI melakukan perang Gerilya. Dalam situasi yang kurang menguntungkan dan sebagai jawaban terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di ibukota Yogyakarta demi untuk mencapai keseragaman bertindak dan bahasa yang sama memperoleh daya juang yang optimal di daerah ini, pada akhir bulan Desember 1948 Dr.A.K.Gani menjadi Gubernur Militer Istimewa Sumatera Selatan.<sup>193)</sup> Pada masa awal proklamasi dan saat-saat yang menentukan seperti ini, memang diperlukan kepemimpinan supra Lokal yang berbobot, sehingga dalam penilaian Sejarah Lokal dinilai/dianggap sebagai “tokoh” yang disegani oleh kawan dan lawan di daerah ini. Sementara itu

---

<sup>192)</sup> Kementerian Penerangan, RI Daerah Istimewa Yogyakarta, Jogjakarta, 1953, halaman 94 ; Sudharmono, SH, Op cit, halaman 184.

<sup>193)</sup> Moh.Ali,BA, et al., Op cit, halaman 61; Kem.Penerangan (Sumsel), Op cit, halaman 66.

WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENURUT  
PERSETUJUAN " RENVILLE "

KETERANGAN :  
Daerah Pendudukan Belanda  
Daerah Republik Indonesia

Belanda telah memulai operasinya ke daerah-daerah yang dikuasai oleh pemerintah Republik. Karena target target yang telah dicapai pada Agresi Militer Belanda I untuk menciptakan garis demarkasi menurut  
164

“im pian van M ook” belum berhasil. Dalam suasana yang tidak menentu ini Gubernur Militer Istimewa Sumatera Selatan mengeluarkan order Nomor 1/R.O. yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan :

1. Belanda mulai melakukan kekerasan Militer dengan maksud menjajah kita.
2. Negara memanggil kamu sekalian untuk berjuang.
3. Jangan mendengar bujukan Belanda sekedae karena uang dan pangkat.
4. Pertahanan tahah air kita; di kota-kota, di puncak gunung, di pantai-pantai, di sungai-sungai, dan di seluruh dusun.<sup>194)</sup>

Seruan itu telah menyentuh hati nurani masyarakat pedusunan dan mendapat tanggapan positif, sehingga perlawanan semakin meningkat di mana-mana. Keterpaduan antara TNI/ anggota Lasykar dan badan-badan perjuangan serta alat-alat Pemerintah sipil di satu pihak dengan rakyat di lain pihak, merupakan modal perjuangan yang paling dominan, walaupun Belanda dengan cara militer teknis dapat mencapai kemengan untuk sementara. Untuk menghadapi keunggulan persenjataan yang dimiliki Serdadu Belanda, tidak ada jalan lain kecuali menerapkan taktik Grilya decara konsisten, yaitu suatu sistem silemah/ sikecil melawan sikutat/ si besar. Didalam pelaksanaannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di mana musuh dalam keondisi lemah, kita imbangi kemajuannya.
2. di man musuh kuat, kita mundur/menyingkir untuk menghemat tenaga tempur.
3. Di mana musuh lengkap, kita serang.
4. Di mana ia lemah, kita hancurkan sama sekali.<sup>195)</sup>

---

<sup>194)</sup> Jarahdam IV/ Sriwijaya, Op cit, halaman 105-106.

<sup>195)</sup> Staf Angkatan Bersenjata, Sejarah singkat perjuangan bersenjata bangsa Indonesia, Pusat Sej. Militer-AD, Jakarta, 1964, halaman 74.

Dengan diterapkannya sistim ini, maka tidak ada tempat yang aman bagi Belanda, tidur tak nyenyak, makan tak enak dan rasa takut selalu menghantui mereka dimana berada.

Perang Grilya melawan Belanda setelah agresi Militer Belanda I di daerah Musi Ilir, telah melibatkan seluruh rakyat pedusunan, baik di daerah pendudukan maupun di daerah Republik, yang dapat di sebut “perang wilayah” dalam bentuk perang Rakyat Semesta. Sasarannya tidak hanya ditujukan pada angkatan bersenjata musuh, tetapi juga ditujukan pada susunan dan lembaga politik beserta sosial ekonominya. Ia bergerak sekaligus di sektor Militer, politik, psikologis dan sosial-ekonomi. Mengingat sifat setangannya semesta, maka seantero lapangan kehidupan rakyat turut dalam pergolakan rakyat total. Dalam segi militer ia merupakan pertarungan antara pasukan musuh yang masing-masing memiliki persenjataan, sedangkan dalam segi politik adalah usaha untuk mengurangi jumlah lawan/ musuh yang dan memperbanyak musuh-musuhnya, tetapi berbuat sebaliknya untuk diri sendiri. Perang urat syaraf baik sebelum maupun selama berlangsungnya perang, berusaha untuk melemahkan bahkan meruntuhkan moral lawan dengan isu-isu. Sebaliknya berusaha dengan segala macam cara untuk memelihara dan memperteguh semangat rakyat jangan sampai kendor. Usaha lain dalam segi ini membangun “kolone kelima”, untuk menimbulkan kekacauan di dalam tubuh lawan/ musuh. Di segi ekonomi berusaha untuk menghancurkan sumber-sumber atau alat-alat produksi lainnya yang dimiliki oleh musuh, sambil mengusahakan perbaikan serta memperbanyak produksi sendiri. Usaha perang bukanlah cuma usaha Angkatan Bersenjata saja, tapi ia menjadi usaha rakyat Semesta di berbagai sektor kehidupannya, yang masing-masing menjadi peserta aktif dalam melaksanakan perang itu sendiri.

Apa yang menjadi saksi pada waktu itu, Belanda pun telah melancarkan serangan semesta terhadap Republik Indonesia. Secara maksimal Belanda telah menghimpun kekuatan dari rakyatnya yang berjumlah 10 juta jiwa, dan mengerahkan suatu Angkatan Perang seperti belum pernah di lakukan sebelumnya. Silih berganti Belanda melakukan ofensif politik, psikologis, militer dan ekonomi. Gerakan politiknya telah menelorkan persetujuan Linggarjati dan Renville,

sebagai suatu taktik mengulur waktu untuk mendatangkan angkatan perangnya dan menciptakan negara-negara boneka untuk mengepung Republik Indonesia. Persetujuan Renville telah menghasikan pengosongan daerah-daerah kantong, yang dianggap sebagai kerikil tajam di dalam ruang lingkup kekuasaannya. Gerakan/ psuykologis telah menciptakan golongan-golongan masyarakat Indonesia yang berprinsip “Co-operation”, dalam arti yang realistik di dalam kerangka sistem Federalis atau anti Unitarisme. Demikian pula mengenai gerakan militer, yang selalu ditujukan pada daerah-daerah yang secara potensial memiliki sumber daya alam, terutama daerah-daerah yang banyak mengandung mineral, untuk mengeringkan daerah-daerah Republik. Untuk sementara nampak usaha Belanda lebih berhasil, karena memiliki persenjataan yang lebih modern dan kerapian organisasi.

Perang Gerilya bukanlah perang antara tentara dengan tentara atau bukan hanya perang militer saja. Tetapi yang berperang adalah rakyat, dan perang itu sendiri bergolak tidak hanya di daerah-daerah pertempuran/ front saja. Orang bergerak secara semesta, walaupun keputusan terakhir ditentukan oleh kalah-menangnya kedua angkatan perang yang berhadapan. Oleh karena rakyatlah yang berperang bukan hanya angkatan bersenjata saja maka rakyatlah yang memaklumkan perang, menentukan damai dan melahirkan angkatan bersenjatanya. Dalam hal ini Militer (golongannya) haruslah senantiasa ingat akan hal ini, karena mereka adalah “ujung tombak” dari rakyat secara keseluruhan. Rakyat yang mengutus putra putrinya untuk memanggul senjata, apabila rakyat menghendaki adanya perang. Kepada rakyat itu pulalah putra putri itu kembali apabila perang dianggap selesai. Dengan kata lain, rakyat bukalah sebagai “objek” tetapi ia tetap sebagai “subjek” untuk memulai dan mengakhiri perang.

Sumber kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing gerilya adalah “semangat kemerdekaan” yang dianggap sebagai pelopor perjuangan ideologi. Ia hanya bermodal senjata pada api perjuangan yang menyala pada setiap sanubari, yang tumbuh dan berakar di dalam hati rakyat yang tertindas dan terjajah. Atas dasar ideologi yang kuat, batin yang teguh dan semangat yang menyala-nyala untuk melawan musuh yang lebih kuat dan teratur organisasinya, adalah suatu drama

perjuangan bangsa Indonesia yang pernah terjadi pada jaman revolusi Kemerdekaan. Khusus untuk daerah Onderdeeling Musi Ilir dan Banyuasin, secara alamiah telah banyak membantu terlaksananya sistem perang Gerilya, karena wilayahnya tertutup oleh hutan belukar, kebun karet rakyat dan rawa-rawa yang dapat dijadikan tempat pelarian untuk menghindari serangan mendadak dari pihak musuh.

Sebelum Agresi Militer Belanda ke II meletus telah terjadi rasionalisasi di kalangan anggota TNI, dalam arti pangkatnya diturunkan setingkat. Komandan Batalyon ke XI dibawah pimpinan Kapten.M.Dhani Effendi dan wakilnya Lettu.Usman Bakar telah terbagi dalam beberapa Kompi sebagai berikut :

1. Kompi I dibawah pimpinan Lettu.Makmun Murod di Babat Toman.
2. Kompi II dipimpin oleh Lettu.Aiman Achyat di Kampung Baru Keluang.
3. Kompi III dipimpin oleh Lettu Wahiddudin di Mangunjaya (Talang Satu).
4. Kompi IV dipimpin oleh Letda.Rozali di Sungai Angit.
5. Kompi V merupakan kompi anti udara di Mangunjaya.<sup>196)</sup>

Kelima Kompi ini terlibat langsung melawan gerakan militer Belanda pada waktu Agres Militer Belanda I di daerah ini. Sebagai hasil akhir penyerbuan Belanda ke segala sektor pertahanan TNI, secara sepihak Belanda telah membuat dusun Karang Ringin di pinggir Sungai Musi dan Muara Tirau di pinggir Sungai Batang Hari Leko sebagai daerah Status-quo.<sup>197)</sup> Oleh karena Kompi I akan berhadapan langsung dengan Belanda dari Sekayu, maka ia terbagi atas tiga Seksi : Seksi I dipimpin oleh Serma.Azahari, Seksi II dipimpin oleh Serma.A.Gatam Iderusr yang kemudian diganti oleh Vandriq A.Kasim Djaki dan Seksi III dipimpin oleh Serma.A.M.Tobi Gazali.

Oleh karena dusun Babat Toman letaknya kurang menguntungkan, maka Kompi I dipindahkan ke dusun Ulak Tebrau. Ketika Belanda melancarkan Agresi MiliterII pada tanggal 21

---

<sup>196)</sup> Abd.Karim bin Umar Hasan, Wawancara, Palembang 1988.

<sup>197)</sup> Haji Usman Bakar, Wawancara, Palembang 1988.



Desember 1948 di daerah ini, lokasi pertahanan TNI di dusun Ulak Tebrau menjadidasaran utama dari pihak musuh yang menggunakan jalur jalan raya, sungai Musi dan pesawat udara. Oleh karena persenjataan yang dimiliki TNI kurang dapat mengimbangi persenjataan di pihak musuh, maka pada hari itu pulalah dusun Babat Toman jatuh ke tangan musuh. Tiga pesawat taktis Belanda telah menjatuhkan bom di Mangunjaya sambil menembaki dusun-dusun secara membabi buta. Serangan yang bertubi-tubi yang datang dari udara, telah membuat pasukan TNI tidak berdaya untuk memberikan perlawanan yang berarti. Staf Batalyon XI hijrah ke Bingin Teluk dan Kompi di Yon 38 di bawah pimpinan Lenan Muda Zaidir Rasyid beserta anggota-anggotanya: Rozali Harom, Musni Hakim, M. Toyib, Hasan Basri, Aliasan, Harsya Shulip, Ambon Yasin, Syapidin dan M. Tulis mendapat tugas untuk memasuki daerah pendudukan Belanda di daerah sungai Keruh, Abab-Penukal, Teluk Kijing dan Epil pada awal tahun 1949.<sup>198)</sup>

Walaupun dari segi Militer Belanda berhasil mematahkan segala sektor pertahanan RI dan dapat menduduki dusun-dusun kecil dan ibukota Kewedanan Sekayu, namun keselamatan mereka akan menjelang malam dihadapkan pada situasi “hidup atau mati”. Apabila matahari akan terbenam saat-saat yang menegangkan bagi serdadu Belanda walaupun mereka lengkap dengan persenjataan prima, peluang itu digunakan oleh anggota TNI untuk mengacaukan konsentrasi pertahanan Belanda. Dengan kata lain, tidak ada tempat yang aman abai Belanda. Memang benar apabila siang menjelang, mulai pesawat taktis menunjukkan kebolehannya dan bunyi gemuruh suara motor landing-craf menyusuri sungai-sungai. Tidak mengherankan apabila sewaktu-waktu terjadi kontak senjata di pinggir-pinggir sungai seperti yang pernah terjadi di dusun Pauh yang dapat menewaskan Koprak M. Tulis<sup>199)</sup>, di Karang Dapo, di Bukit Tanganan (Bingin Teluk) dan di tempat-tempat lain. Begitu pula di lokasi Keluang Belanda berhadapan dengan anggota TNI dibawah pimpinan A.Somad dan Qorid Udjud yang telah mengorbankan Anang

---

<sup>198)</sup> H. rozali Harom, Wawancara, Sekayu 1988.

<sup>199)</sup> Zaidir Rasyid, Wawancara, Sekayu 1988.

Keneng dan Ansyori Leman.<sup>200)</sup> Tembak menembak antara anggota TNI dengan Belanda yang pernah terjadi di waktu malam di dusun Lais, telah menewaskan salah seorang/ orang tua dari pejabat tinggi Negara Sumatera Selatan dan beberapa serdadu Belanda.<sup>201)</sup> Masih banyak lagi peristiwa yang terjadi pada masa-masa menjelang Agresi Militer Belanda ke II di daerah pendudukan Belanda. Kontak senjata yang bersifat sporadis di daerah pendudukan Belanda waktu itu, rakyat di hadapkan pada pra kondisi yang kurang menguntungkan, terutama bagi golongan yang pada awal revolusi loyalitasnya diragukan.<sup>202)</sup>

Bagi mereka yang tidak teguh iman ragu-ragu dalam menentukan pilihan terutama bagi mereka yang pernah merasakan hidup segar di jaman kolonial Belanda masa lampau, terpaksa melakukan urbanisasi untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Gerakn bumi hangus yang dilakukan gerilyawan kita tidak hanya ditujukan pada bangunan-bangunan vital/ instalasi saja, tetapi juga rumah-rumah penduduk di dusun-dusun yang dianggap antek-antek Belanda. Mneskipun sistem gerilyawan di daerah Musi Ilir dan sekitarnya memakan waktu yang relatif singkat seperti halnya di daerah-daerah lain di Indonesia tetapi akibatnya telah menimbulkan akses-akses yang tidak kita inginkan.<sup>203)</sup> Gerakan bumi hangus, sabotase, menghakim sendiri, menyampingkan ukuran-ukuran hukum dan adat istiadat setempat dan sebagainya, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perang Gerilya yang pernah terjadi di daerah ini. Ia telah meninggalkan kesan tersendiri yang cukup mendalam, dan tradisi-tradisi semacam itu tidak akan hilang begitu saja setelah Pengakuan Kedaulatan, tetapi ia berkelanjutan dalam bentuk “perang saudara” yang tidak kalah hebatnya dalam gerakan sejarah lokal. A pabila di aw a pernah terjadi “Long M arch” yang dilakukan

---

<sup>200)</sup> H.Kapi. Wawancara, Sekayu, 1984.

<sup>201)</sup> Iringan mobil serdadu KNIL menuju Sekayu, hanya untuk menjaga prestise seorang pejabat Negara Sumatera Selatan, karena anak gadisnya dilarikan oleh seorang KNIL.

<sup>202)</sup> Banyak rumah penduduk dibakar oleh gerilyawan, terutama rumah-rumah di dusun Lumpatan dan penulis sendiri dapat menyaksikan Kerio tertembak mati.

<sup>203)</sup> Kolonel A.H.Nasution, Op cit, halaman 21.

anggota Pasukan Siliwangi dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, di daerah Musi Ibir pernah juga terjadi gerakan semacam itu, yaitu daerah Musi Ulu ke daerah Danau Ranau. Sebagai latar belakang terjadinya peristiwa historis itu, karena daerah Musi Ibir dan Banyuasin sedang dilanda banjir dan ruang gerak gerilyawan sangat terbatas. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis-operasional di dalam kerangka sistem perang gerilya alam yang tidak menunjang dan logistik yang datang rakyat kurang memadai, sulitnya transportasi melalui rawa-rawa yang tergenang air maka terpaksa perang gerilya diarahkan ke tempat lain yang tidak lagi terikat pada areal masing-masing Kompi.<sup>204)</sup> Jadi “Long March” yang pernah terjadi di daerah ini adalah penjabaran dari sistem gerilya untuk menghadapi Belanda dimana mereka itu berada.

### **Long March ke Ranau.**

Setelah memperhitungkan untung rugi kehadiran anggota TNI apabila bertahan di daerah ini dengan posisi yang tidak menguntungkan, baik ditinjau dari segi operasional maupun faktor lingkungan alam yang pada waktu itu musim banjir, terpaksa mengambil langkah baru untuk meneruskan perang gerilya di tempat lain yang tidak lagi terikat pada lokasi. Sementara itu induk pasukan sedang bermarkas di Ranau yang letaknya agak jauh dari daerah pendudukan Belanda. Untuk mencapai daerah tersebut akan melewati daerah patroli Belanda, dan besar kemungkinan akan terjadi kontak senjata. Tidak hanya akan berhadapan dengan musuh saja, tetapi juga jalan yang akan ditempuh itu akan melintasi hutan lebat yang dihuni oleh binatang buas, yang sewaktu-waktu akan menerkam mereka dari belakang. Hutan lebat yang dikenal dengan nama “Hutan Semangus”, adalah satu-satunya hutan yang jarang dijamah oleh manusia dan sulit ditembus oleh sinar matahari. Diperkirakan jalan yang akan ditempuh ± 1.500 kilometer tanpa ada jalan setapak.<sup>205)</sup>

Setelah anggota Seksi dari Kompi I tidak dapat menahan trobosan Belanda melalui sungai Musi dan Babat Toman dapat

---

<sup>204)</sup> A.Karim Umar Hasan, Wawancara, Palembang 1987.

<sup>205)</sup> Animan Achyat, Wawancara, Palembang 1988.

diduduki, maka setapak demi setapak anggota TNI bergerak mudnur ke dusun Lubuk Buah pada tanggal 5 Januari 1949. Dari dusun Lubuk Buah menuju dusun Pangkalan Bulian, dan dari sini mereka ke Talang Buluh (Pak Rembatd) bertemu dengan anggota pasukan yang dipimpin oleh Lettu animan Achyat (Komandan Kompi II). Dari Takang Buluh mereka dan anggota pasukan Lettu. Wahid Uddin (Komandan Kompi III) bergerak dengan Kosim Dahayat yang telah lebih dahulu berada di Tanah Abang Tua. Semua anggota TNI bergerak menuju Rawas untuk menggabungkan diri dengan Wakil Komandan (Lettu. Usman Bakar), di mana mereka akan minta izin (restu) untuk melakukan perjalanan dalam melaksanakan Perang Gerilya yang tidak terikat pada lokasi semula. Untuk mencapai daerah Rawas, harus melalui dusun Binti Aleh, Suban Burung sampai ke Talang Empalau. Karena mereka kehabisan logistik/ bahan makanan, haus dan lapar maka ditempat ini mereka terpaksa merampas ubi kayu milik rakyat. Sore harinya mereka meneruskan perjalanan ke dusun Pauh, dan ti tengah malam mereka kepergok motor landing craf Belanda yang menuju dusun Pauh. Tembakan terjadi selama dua jam dan diantara anggota TNI dari seksi 2 Kompi I (prajurit M. Syarif) tertawan oleh musuh.<sup>206)</sup>

Setelah berdialog dengan Wakil Komandan Yon XI (Lettu. Usman Bakar) di susun Belani (Rawas), maka pada malam itu juga mereka meneruskan perjalanan ke dusun Muara Megang, dan dari sini mereka tinggal beberapa hari untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Dusun Muara Megang terletak di pinggir sungai Lakitan, dan dari sini anggotab pasukan di bawah dua ortang Komandan Kompi (Lettu Makmun Murod dan Lettu. Animan Achyat ) bergerak menuju Semangus. Dari dusun Sungai Pinang (Semangus) melewati hutan belantara memasuki talang-talang, bertemu ladang padi yang sedang menguning masak. Rupa-rupanya ladang itu tidak dijaga pemiliknya, kartena takut akan harimau yang buas dan sudah 17 orang yang dimakan harimau di daerah itu. Setelah bertemu dengan pemilik ladang tersebut, terjadilah permufakatan, pemilik ladang akan memberikan padi seberapa perlu asal harimau itu dapat dimatikan.

---

<sup>206)</sup> Syafran Anang, Kenang-kenagan pengabdian Prajurit Sapta Marga (Ki. I Yon XI) pimpinan Makmun Murod (Brosur), halaman 9.

Untuk membunuh harimau yang buas itu, Komandan memintahkan pasukan di bawah pimpinan Sersan Djinar untuk menembak harimau tersebut, yang akhirnya berhasil menembak mati binatang buas itu.<sup>207)</sup> Sesuai dengan permufakatan dengan rakyat setempat, maka pasukan memperoleh beberapa ton beras sebagai sugu dalam perjalanan, yang pada waktu itu sedang habis persediaan makanan.

Sementara itu perlu juga dicatat suka-duka dalam perjalanan menempuh hutan belantara (Semangus), rakyat sekitar dipimpin oleh H.M.Daud, H.Ali dan H.Tjondet telah memberikan bantuan bahan makanan pada anggota TNI dan penunjuk jalan yang berasal dari suku terasing (Djalo, Pengetjing dan Pengadjum).<sup>208)</sup> Selama lima hari lima malam berjalan kaki di hutan belantara tanpa alat kompas, kecuali penunjuk jalan yang berjalan di depan sampailah mereka di dusun/talang Tjetjar, yang hampir setiap hari tempat itu menjadi tempat lintasan patroli Belanda. Dari Dusun/Talang Tjetjar anggota pasukan bergerak menuju Talang Bumbey di sekitar dusun Hujan Mas dan bertemu dengan anggota TNI yang dipimpin oleh Letnan.Murkadis. Perjalanan masih terus dilakukan dan sampailah ke dusun Kebur yang terletak di pinggir Sungai Lematang. Oleh karena Sungai Lematang sedang dalam dan deras arusnya, maka terpaksa pasukan dibantu oleh rakyat sekitar menyeberang sungai dengan menggunakan perahu atau rakit. Setelah pasukan dapat diseberangkan seluruhnya, perjalanan diteruskan lagi sampai ke sebuah Talang Air Lawai, suatu lokasi yang terletak di sekitar Suban Jeriji (daerah Tanjung Enim). Melihat tempatnya terpencil dan sulit dijangkau Talang Air Lawai itu, diperkirakan tidak akan bertemu dengan serdadu Belanda tapi apa yang terjadi ketika anggota TNI sedang mandi Belanda yang mengambil posisi di atas bukit telah menembaki mereka. Kontak senjata terjadi dan akibatnya dua orang anggota TNI gugur (Kopral.Bakri dan Pratu Adjis) dan satu orang (Pratu Djamil) luka

---

<sup>207)</sup> Amin Achyat, Wawancara, Palembang 1988.

<sup>208)</sup> A.Karim Umar Hasan, Wawancara, Palembang 1987.

ringan.<sup>209)</sup> Kedua jenazah dikuburkan dengan upacara sederhana di sekitar Air Lawai.

Kontak senjata yang terjadi di Talang Air Lawai itu, merupakan pengalaman yang cukup berarti, karena sebelum peristiwa itu terjadi sudah ada orang yang tidak dikenal dan diragukan,<sup>210)</sup> berada waktu anggota TNI tiba di talang tersebut. Oleh karena tidak ada instruksi Komandan orang tersebut tidak ditangkap dan kemudian menghilang. Setelah menyelesaikan penguburan dua orang anggota TNI tersebut seluruh pasukan bergerak ke arah Semendo Darat yang melewati talang-talang dan sampailah ke Dusun Talang Bunkuk (Kompi II) dan dusun Ramanti (Kompi I). Kedua tempat ini dijadikan markas untuk menghadang serdadu Belanda dari kesatuan **Flying Tiger** Gajah Merah dibawah pimpinan Letnan.Bek. Kompi I melakukan penghadangan di dusun Sukarami untuk mengerilya serdadu yang datang dari dusun Pulau Panggung. Kontak senjata di lokasi ini terjadi pada awal bulan Mei 1949 telah gugur seorang anggota TNI bernama Koprul.Sirot.

Pada awal bualan Juni, anggota pasukan bergerak kedaetah Ogan Ullu Kisam, melewati dusun Bayur mendaki Bukit Ringgit dan kemudian menurun bukit sampi ke dusun Lawang Agung, suatu tempat terdapatnya sumber air panas. Dari daerah pasukan bergerak ke dusun Tenang dan terus ke Muaradua Kisam, ke Pulau Betingin, Ke Pulau Kemiling, ke dusun Kemu, ke Tanjung Raya dan akhirnya sampailah anggota pasukan ke Simpang Sender sebagai tempat Markas Batalyon XI di bawah pimpinan Kaptsen Dhani Effendi), yang berarti Long March ke Ranau Kerui telah berakhir. Sebagai tindak lanjut dari gerakan gerilya, Komandan Batalyon menugaskan mereka untuk memasuki daerah-daerah pendudukan sebelum terjadi genjatan senjata.

Sementara anggota TNI (Kompi I dan Kompi II) melakukan Long March ke Ranau, dalam arti melakukan perang gerilya yang tidak terikat pada lokasi semula, di daerah Musi Ilir dan Banyuasin masih terdapat anggota TNI yang dipimpin oleh wakil Komandan Lettu.

---

<sup>209)</sup> Syafran Anang, Op cit, halaman 12; A.Karim Umar Hasan, Wawancara, Palembang 1987; lihat Jarahdam IV/ Sriwijaya, Op cit, halaman 94.

<sup>210)</sup> A.Karim.Usman Hasan, Wawancara, Palembang 1988.

Usman Bakar yang menempati kantong-kantong tertentu di dalam wilayah pendudukan serdadu Belanda. Adapun anggota pasukan TNI waktu itu:

- a. Anggota pasukan yang dipimpin oleh Pembantu Letnan A. Kosim Dhahayat dan Serma. Muchsin Syamsuddin.
- b. Anggota pasukan yang dipimpin Letda. Rozak.
- c. Anggota pasukan TNI (Yon 38 Subkoss) berjumlah 35 orang dipimpin oleh Letnan Syahulik dan Letnan Huseini Sidik.<sup>211)</sup>

Sesuai dengan luas wilayah Musi Ilir dan Banyuasin, ketiga pasukan inti disebarluaskan :

1. Anggota pasukan dibawah pimpinan A.Kosim Dhahayat beroperasi di sekitar Tanah Abang, Keluang, Sekayu, Lumpatan dan Bailangu. Mereka menciptakan daerah-daerah kantong sambil membangun anasir-anasir kolone kelima untuk mengacaukan di dalam tubuh musuh/ lawan.
2. Anggota TNI yang berkekuatan ± 20 orang dipimpin oleh Muchsin Syamsudin bergerak di seberang dusun Bumiayu : Talang Sungai Putih, Talang Lubuk Batang, Talang Sungai Serdang dan sekitarnya.
3. Anggota TNI yang dipimpin oleh Syahulik dan Huseini Sidik beroperasi di daerah Sungai Keruh, Abab Penukal, Teluk Kijing dan Dusun Epil.
4. Anggota TNI yang dipimpin oleh Rozak bergerak di daerah sekitar Sungai Angit, Babat Toman sampai ke Mangunjaya.

Untuk menjaga hubungan yang tetap terpelihara antara staf batalyon yang dipimpin oleh wakil komandan Lettu.Usman Bakar dengan kepala-kepala pasukan yang tersebut diatas telah ditunjuk beberapa anggota TNI dibawah pimpinan Serma Abdullah Awan, yang sekaligus berfungsi sebagai intel dan perantara penerima bantuan logistik/ bahan makanan dari rakyat sekitar.

---

<sup>211)</sup> Husaini sidik, Wawancara, Sekayu 1988 ; Kosim Dhahayat, Wawancara, Sekayu 1987.

Pada umumnya gerakan gerilya yang dilakukan oleh anggota TNI pada waktu itu, sesuai dengan sistem perang gerilya, tidak melakukan kontak senjata secara terbuka dan besar-besaran.<sup>212)</sup> Mungkin hal ini disebabkan persediaan amunisi sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan anggota pasukan untuk membawa senjata-senjata yang agak berat, mengingat tidak memiliki basis pertahanan yang tetap. Mereka selalu berpindah-pindah sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Meskipun demikian tidak berarti tak adanya kontak senjata melawan serdadu Belanda waktu itu. Kontak senjata bisa terjadi, apabila terdapat perhitungan yang tepat bahwa pihak anggota TNI akan memperoleh kemenangan. Mengingat para gerilyawan tidak mempunyai tempat konsentrasi pasukan dan mereka berpencar-pencar, maka bagi Belanda menemui banyak kesulitan untuk menghancurkan *trugval*-basis gerilyawan di daerah ini. Pada masa-masa menjelang terselenggaranya Konferensi Meja Bundar di Den Haag, gerakan para gerilyawan lebih banyak ditujukan pada *oknum-oknum* di pedusunan yang terang-terangan mencari keuntungan materi dari pihak musuh.<sup>213)</sup>

Di tinjau dari segi persenjataan anggota TNI, Belanda jauh lebih hebat daripada pasukan kita. Tetapi akhirnya dengan menggunakan sistem Gerilya dengan melibatkan seluruh masyarakat, maka Belanda dihadapkan pada situasi yang kurang menguntungkan. Di mana saja Belanda berada “tidak aman”, sekaligus mereka dikawal oleh persenjataan modern. Kemenangan yang kita capai melawan Belanda, tidak hanya dilihat dari sudut ilmu politik saja. Tapi tidak kurang pentingnya dari sudut ilmu Militer. Perang adalah tindakan kekerasan untuk memaksa lawan/Belanda tunduk pada kehendak kita, dan perang merupakan kelanjutan dari politik yang dilakukan dengan cara lain. Kita harus akui, bahwa revolusi kemerdekaan terjadi karena karena negosiasi/perundingan antara Pemerintah RI dengan pihak Belanda

---

<sup>212)</sup> Haji Usman Bakar, Wawancara, 1988.

<sup>213)</sup> Penulis sendiri sebagai penduduk asli daerah ini, kebetulan menyaksikan dengan mata sendiri, beberapa banyak rumah-rumah dan beberapa orang/ *oknum* yang menjadi sasaran Gerilyawan. Bahkan ada kecenderungan revolusi ke arah “revolusi sosial”.



mengalami kemacetan. Secara makro ada beberapa unsur yang mendukung suksesnya Perang Kemerdekaan di daerah ini, sehingga memberikan kontribusinya dalam pencapaian Kedaulatan RI yang diakui oleh Belanda dan dunia internasional.

Suksesnya Perang Kemerdekaan melawan Belanda di lihat dari sudut militer adalah sebagai berikut :

Pertama, daya-juang bersifat psikologi yang timbul dari gerakan Kebagsaan Nasionalisme, merupakan landasan yang kuat untuk berjuang, dan karena itu menjadi kekuatan moral yang oleh kebanyakan ahli strategi dinilai sebagai faktor utama di dalam perang. Perang pada hakekatnya merupakan satu pertarungan antara dua kehendak yang bertentangan, sehingga penggunaan kekerasan secara efektif amat dipengaruhi oleh kekuatan dari kehendak itu sendiri. Oleh sebab itu kekuatan kehendak banyak dipengaruhi/ ditentukan oleh kondisi moral.

Kedua, pemanfaatan latihan militer/ semi-militer yang pernah diberikan oleh serdadu Jepang pada pemuda-pemuda Indonesia. Meskipun latihan-latihan itu akan ditujukan pada kepentingan Jepang, meyiapkan kekuatan gerilya untuk menghadapi Sekutu, namun para pemuda Indonesia yang memperoleh latihan militer itu dapat memanfaatkannya untuk menumbuhkan suatu kemampuan baru yang belum dimilikinya. Pada waktu jaman kolonial Belanda, kesempatan seperti sangat terbatas bagi pemuda Indonesia, dan tidak ada kesempatan bagi pemuda yang memiliki semangat kebangsaan. Dengan kata lain, penguasa kolonial akan menutup pintu bagi para pemuda Indonesia yang akan menyebarkan semangat kebangsaan dalam jajaran KNIL. Kita harus akui diantara pemuda yang mendapatkan latihan militer dari Jepang (PETA, Gyugun dan Heyho), terdapat orang-orang yang memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

Ketiga, adanya hubungan yang erat antara organisasi militer kita dengan rakyat pedusunan telah menciptakan suatu kekuatan yang terpadu antara TNI dengan rakyat dalam bentuk sitim senjkata sosial yang apat menetralsir keunggulan persenjataan yang digunakan oleh pihak musuh. Dengan demikian persenjataan yang kita miliki dapat digunakan secara efektif untuk memberikan pukulan-pukulan kepada pihak musuh dalam kondisi yang tidak siap.

Keempat, kemampuan cara berpikir yang bersifat fleksibel dari Pimpinan Militer kita, dimana mereka tidak terikat pada satu metode perlawanan saja. Andaikata Pimpinan Militer kita tidak memiliki sikap dan cara berpikir fleksibel, maka tidak akan pernah ada pembentukan organisasi-teritorial dan tidak ada operasi gerilya. Dalam hal ini besar kemungkinan perlawanan militer kita berakhir ketika Belanda menduduki Jogjakarta pada tanggal 19 Desember 1948 dan seluruh Pimpinan Pemerintahan Sipil ditawan oleh Belanda.

Kelima, kehadiran Dr.A.K.Gani sebagai pimpinan supra-lokal di daerah ini dan ikut serta bergerilya, bila di pusat adanya kepemimpinan Jenderal Sudirman, merupakan “tokoh” yang sangat disegani oleh kawan dan lawan. Secara historis ia telah mulai dan ia pula yang mengakhiri perjuangan melawan Belanda di daerah ini.

Sejak semula Belanda berhasrat betul menguasai Hindia-Belanda yang terlepas dari tangan Jepang, dan untuk dapat menegakkan kembali kekuasaannya itu Belanda harus berjuang dengan segala macam cara. Salah satu cara klasik yang selama ini ditempu yaitu dengan memecah belah (mengadu domba) antara daerah atau suku yang satu dengan yang lain, atau antar golongan yang pro dan kontra. Geografis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, didiami oleh suku-suku bangsa (sub-ethnis) yang memiliki adat istiadat yang berbeda, menunjukkan “kemajemukan” budaya yang dapat menyuburkan terlaksananya politik itu. Faktir lain yang tidak kurang pentingnya untuk menunjang politik itu, yaitu adanya produk yang telah dicapai oleh sekolah-sekolah pemerintah selama ini, sebagai pelaksanaan Politik Etika, telah menelorkan manusia-manusia intelektual Indonesia yang meninginkan terjalinnya hubungan kultural yang erat dan abadi antara Hindia Belanda/ Indonesia dengan negeri induk. Mungkin atas dasar pemikiran itu pulalah H.J.van Mook memberanikan diri sebagai konsepstor dan pelaksana untuk menghambat ide persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai akibat pertempuran Lima Hari Lima Malam, kerikil tajam yang akan menghambat terbentuknya negara boneka Sumatera Selatan sudah dapat disapu habis di dalam kota Palembang. Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II telah memberikan jalan ke arah terbentuknya negara tersebut menjadi lebih mulus. Pemerintah

Sipil RI dan Staf Komando Divisi telah berada diluar kota Palembang. Sementara di daerah-daerah pendudukan Belanda terdapat kantong-kantong/ Wehrkreise, yang kadang-kadang terputus hubungan satu sama lainnya dalam melakukan sistem gerilya. Dalam situasi dan kondisi yang tidak menentukan pihak Republik Indonesia, dimana kekuatan-kekuatan melawan Belanda berada jauh dari pusat kota Palembang, Recomba Mr. M.J.Wijnmalen dengan bantuan komandan militer setempat menemukan orang-orang yang dapat diajak kerjasama, untuk membentuk “Dewan Penasehat Sumatera Selatan”.

Dewan tersebut ditugaskan untuk membentuk negara baru di Sumatera Selatan yang diketuai oleh RECOMBA (Regering Commisaris Bestuurs Aangelegenheden) atau seorang yang ditunjuknya sebagai pengganti. Adapun anggota-anggotanya terdiri dari 36 orang yaitu 30 orang Indonesia; 2 orang Belanda; 1 orang wakil penduduk India; 2 orang wakil penduduk Cina dan 1 orang wakil penduduk Arab. 30 orang Indonesia tersebut terdiri dari : 9 orang Kepala Marga/ Pasirah yang dipilih; 13 orang wakil penduduk Marga (bukan Kepala Marga) dan wakil penduduk pasar (dipilih); 5 orang wakil penduduk Huminte kota Palembang yang diangkat; 1 orang wakil kaum Ulama (diangkat) dan 2 orang wakil gerakan buruh perminyakan (diangkat). Badan ini disamping bertugas membentuk negara yang diinginkan oleh Belanda, berkewajiban pula memberikan nasehat kepada Recomba, mengenai semua masalah penting yang menyangkut kebijaksanaan pemerintah Belanda, dan mempunyai suara dalam masalah yang berhubungan dengan kegiatan pemerintah, ekonomi dan ketatanegaraan.<sup>214)</sup>

Dalam suatu konfrensi yang diadakan oleh penguasa-penguasa sipil Belanda di Palembang pada tanggal 6 sampai dengan 8 April 1948, dikunjungi para pegawai orang Eropa dan pegawai sipil bangsa Indonesia serta wakil-wakil dari Badan Persiapan Pembentukan Negara Sumatera Selatan, rencana pembentukan Dewan Penasehat Sumatera Selatan dibicarakan panjang lebar. Bahkan rencana pemilihan anggota Dewan akan dilakukan pada bulan itu juga. Ada kemungkinan apabila Dewan itu telah dibentuk, akan dilantik secepat mungkin. Ada

---

<sup>214)</sup> Dr.A.H.Nasution (jilid VIII), Op cit, halaman 241.

suatu peristiwa yang telah terjadi kalangan orang Arab di Palembang untuk menunjuk wakilnya di dalam Dewan yang terhormat itu di rumah S.Muhammad bin Alwi Shahab di kampung 8 Iilir. Walaupun pertemuan itu diboikot oleh penduduk Arab yang berdomisili di seberang Ulu, toh akhirnya dapat diselenggarakan dengan menghasilkan empat calon yaitu : Abubakar Almasawah (31 suara), Sehan Shahab (52 suara), Abdulkadir Shahab (55 suara), dan Sehan Gathmyr (69 suara). Rupa-rupanya penduduk Arab yang ada di seberang Iilir kota Palembang lebih ambisi untuk menjadi aparat negara Sumatera Selatan, suatu kesempatan yang baik dalam kesempatan.

Adapun anggota-anggota Dewan Penasehat Sumatera Selatan yang terhormat itu sebagai berikut :

- 1). Ketua : Abdulmalik.
- 2). Wakil Ketua : R.Zainuddin bin P.Tosir.
- 3). Distrik Banyuasin : Moh.Asik bin Moj.Akil.  
: Moh.Jumit bin Matraden.
- 4). Distrik Musi Iilir : Aburhan.  
: Sumsulah bin Salam.
- 5). Distrik Komering Iilir : Basari  
Ahmad bin Pangeran  
M.Zainal.
- 6). Distrik Ogan Iilir : M.Syafei bin Depati.  
: H.Hanapi.  
: M.Yahya bin Usin.  
: H.Asib bin H.Idris.
- 7). Distrik Ogan Ulu : Mustopa Gahni.  
: Pangeran Bakri bin Muhaah
- 8). Distrik Lematang Ulu : Husinsyah  
Amasin bin Paro
- 9). Distrik Lematang Iilir : H. Moh. Syahri  
Rd. Moh. Noer  
Rd. Zainuddin bin Pangeran Tasir
- 10). Distrik Ogan Tengah : Umar Hasan  
Mohamad Noer Kadih
- 11). Anggota-anggota yang : Rd. Moh. Akib, Rd. Usman Azhari

diangkat

Rd.Hanan, RA.Bakri, Haji Moechtar, Albertus Magnus Padjar Rachmad, Ir.A.van Durrsen, Mr.Ch. Maathuis, W.V.Doop, Tjiu Tjeng Hok, Tie Siu Seng, Adji Abdullah dan Said Abubakar Almasawa.<sup>215)</sup>

Setelah berhasil menyelesaikan pemilihan dan penunjukan anggota Dewan terhormat, pada tanggal 4 Mei 1948 Mr. M.J. Wijnamalen atas nama pemerintah Belanda melantik Dewan penasehat Sumatera Selatan dengan di hadiri oleh  $\pm$  100 orang Kepala Negeri dan diramaikan oleh hiburan musik. Dengan demikian orang dapat menarik kesimpulan bahwa Belanda akan segera dapat mewujudkan keinginannya, yaitu membentuk Negara Sumatera Selatan yang berpenduduk  $\pm$  1½ juta jiwa.<sup>216)</sup> Sebagai konseptor pembentukan negar-negara “boneka” ini adalah H.J.van Mook dengan melalui beberapa Konferensi. Mula-mula konferensi diadakan di Malino (16 sampai 12 Juli 1946), Konferensi Pangkal Pinang (1 sampai 12 Oktoher 1946) dan akhirnya Konfrensi Denpasar-Bali (7 sampai 24 Desember 1946). Dalam rangka politik global Belanda untuk menentang Republik Indonesia, maka negara-negara bikinan H.J. van Mook tersebut dikoordinir dalam suatu Konferensi Federal, yang diselenggarakan di Bandung dengan dihadiri oleh wakil-wakil dari daerah yang diduduki oleh Belanda waktu itu.<sup>217)</sup>

Sementara anggota-anggota Dewan yang terhormat sibuk dengan dunianya sendiri, mempergunakan kesempatan dalam kesempatan, barang distribusi dan uang diterima berlimpah-limpah, masyarakat pedusunan di daerah pendudukan dihadapkan pada suatau alternatif. Harga barang membumbung tinggi, terutama mengenai harga barang kebutuhan pokok. Alat pembayaran yang sah semakin tidak menentu, karena uang Jepang dan uang ORI (Oeang Republik

---

<sup>215)</sup> Ibid, halaman 243-244.

<sup>216)</sup> Georger Mc. Tuenan Kahin, Nationalism dan Revolution in Indonesia, Cornell University Press-New York, 1952, halaman 354.

<sup>217)</sup> Iwa Kusumasumanti, Sejarah Revolusi Indonesia, Jakarta, 1963, halaman 197-199; Lihat Dr. A.H. Nasution (jilid VII), Op cit, halaman 377-384.

Indonesia) diisytukan tidak berlaku lagi. Sebaliknya uang NICA yang datang dari kota sebagai alat pembayaran yang sah, tidak mau diterima oleh penduduk karena ada rasa takut akan akibat-akibatnya. Di lihat sepintas lalu di dalam kota Palembang, adanya kebanjiran sandang pangan dengan harga relatif murah, sementara di daerah-daerah Uluu barang-barang tersebut sukar didapatkan. Mungkin hal ini diakibatkan kesulitan transportasi atau memang dicipitakan oleh Belanda sedemikian rupa untuk menarik perhatian penduduk yang pro pada Republik. Meskipun kota sudah dikuasai seluruhnya oleh Belanda, namun masih banyak rakyat dan para pelajar yang tetap memiliki semangat Republik.<sup>218)</sup>

Pembentukan negara boneka di daerah Sumatera Selatan pada saat historis, saat mana di Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Jawa Timur pemerintah Republik Indonesia menghadapi golongan kontra revolusionair yang dipelopori oleh Partai Komunis Indonesia. Kehadiran negara boneka itu pada dasarnya untuk menekan Republik Indonesia di lapangan politik, dan oleh karena itu pengertian “Co-operation” sebelum dan sesudah Proklamasi adalah dititikberatkan pada taktik strategi perjuangan seperti : menjadi anggota Volksraad, anggota Gemeenteraad, Lokale Raad dan lain lain. Sebaliknya perjuangan yang bercorak koorpratip sesudah Proklamasi, mengandung suatu realita yang sangat prinsip.<sup>219)</sup> yaitu menciptakan negara-negara baru atas inisiatip Belanda dan bukan inisiatip yang berasal dari putera-putera Indonesia. Dengan kata lain kebebasan yang dimiliki oleh negara-negara boneka itu masih di bawah legitimasi negeri Belanda, dimana ikatan antara negeri induk dan negara-negara boneka merupakan bagian integral, dan sifat ketergantungan dengan Belanda sebagai ciri khas. Dalam hal ini dapat kita kutip pidato Wijnmalen pada waktu pembentukan Negara Sumatera Selatan :

---

<sup>218)</sup> Penulis sendiri sebagai murid SM-Recomba melihat dengan mata sendiri, masih banyak tokoh-tokoh Republikein dan para pelajar bekas anggota IPPI berjiwa Republik yang berdomisili dalam kota. Murid Taman Siswa dan SM Recomba sebagian besar berjiwa Republik.

<sup>219)</sup> Drs.Susanto Tirtopoodjo, Sej.Perggerakan Nas.Indonesia, PT.Pembangunan, Jakarta, 1961, halaman 21-25.

”Saya merasa perlu untuk memberi gambaran secara singkat mengenai cara-cara yang harus ditempuh negara agar tetap berkembang, dan apa yang harus terjadi agar negara dapat kesempatan untuk menjadi sebuah negara yang sempurna, berdiri sendiri dalam federasi yang akan datang.

Pertama-tama diperlukan dibentuknya suatu aparat yang memungkinkan dapat dirahkannya seluruh kekuasaan kepada Negara. Sebagaimana tercantum pengumuman Departemen Dalam Negeri, maka dalam penyerahan tugas, negara-negara yang akan bergabung dalam negara Indonesia Serikat, pada satu pihak harus sedapat mungkin menikmati kebebasannya, akan tetapi di lain pihak harus memenuhi pula segala kewajibannya terhadap kedaulatan federasi negara-negara yang datang itu.

... .. . Setelah negara membangun organisasi yang diperlukan sehingga dapat dilaksanakan tugas-tugas yang dihadapinya, mata atas permintaan negara itu dapatlah dilakukan serah-terima tugas pemerintahan kepadanya. Ketentuan dalam peraturan Denpasar serta peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan pemerintah terhadap suatu wilayah dari negara akan tetap berlaku sejauh dan selama belum dicabut oleh yang berwenag dari negara-negara itu, membenarkan dilakukannya serah terima tugas sebelum negara itu memiliki suatu ketentuan hukum sendiri serta ketentuan-ketentuan administrasi lainnya... .. .<sup>220)</sup>

Apabila kita simak pidato Wijnmalen yang diucapkan berkenaan dengan pembentukan “Negara Sumatera Selatan” nampak dengan jelas peranan bangsa Indonesia putra-putri Indoneisa berasal dari daerah ini, tidak sebagai “subjek” tetapi berperan sebagai “objek” yang dikendalikan legalitas Belanda, kemudian setelah mendengar laporan dari suatu komisi yang terdiri dari : Maathuis, Raden Hanan Raden Zainuddin Dharmo mengenai tata negara Sumatera Selatan yang meliputi hampir 2/3 bagian dari keresidenan Palembang, maka

---

<sup>220)</sup> Dr.A.H.Nasution (Jilid VIII), Op cit, halaman 449-450.

bentuknya meniru Sumatera Timur dan Walinegara harus penduduk asli berasal dari Sumatera Selatan. Empat orang yang telah dicalonkan untuk menduduki jabatan Walinegara Abdulmalik, Zainal Abidin, Muchtar dan Bustam, setelah dipilih (voting) jatuh pada Abdull malik yang memperoleh 20 suara. Pada tanggal 28 Desember 1948 diadakan pelantikan oleh Dr.Beel, sehingga sengan resmi berdirinya Negara Sumatera Selatan dengan Walinegaranya Abdulmalik, dan Dewan Penasehat berfungsi sebagai Badan Legislatif sementara yang beraggotakan 36 orang.

Dengan berdirinya negara Sumatera Selatan, berarti Belanda telah mendapatkan jago-jago yang anti Republik Indonesia sebagai imbalan terhadap kelompok Anak Agung Gde Agung & Adil Puradiredja yang berorientasi pada Republik Indoneisa. Dengan kata lain, keinginan van Mook selama ini telah menjadi kenyataan di daerah ini. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam arti mengurangi reaksi negatif yang akan timbul dalam masyarakat, harian-harian daerah yang cenderung ke arah Republikein (Harian Suara Rakyat dan Harian Fikiran Rakyat) sejak tanggal 30 Desember 1948 dikenakan larangan terbit. Ketua Redaksi harian itu untuk sementara ditahan oleh Belanda (Inderus Nawawi dan R.A,Haky) dan beberapa pemuka masyarakat yang pro Republik antara lain : Dr.Selamet, Dr.Karimuddin, Zainuddin Djeragan, A.A.Harahap, Musa Tahir Hasibuan, Syehan Sahab, Yosodipuro, Kiayi H.Malian Djamal, Kiayi Ahmad Asaari, Kiayi Rasyid Thalib dan lain-lain, diamankan oleh Belanda di rumah tahanan Boom Baru. Atas inisiatip Dr.Soedarto dan Nyonya Sugiharto beserta para pemuda lainnya, mendirikan sebuah panitia untuk menolong keluarga Bapak-bapak yang meringkuk dalam tahanan politik.

Setelah resmi pengangkatan Abdulmalik sebagai Walinegara Sumatera Selatan, maka mulai tanggal 1 Pebruari 1949 kekuasaan-kekuasaan atas beberapa cabang kegiatan administrasi Pemerintah di daerah ini ditransferkan kepada Pemerintahan yang baru antara lain sektor-sektor yang menyangkut masalah internal, lalu lintas, pembangunan/ irigasi, kesehatan, masalah sosial, penerangan dan



pendidikan.<sup>221)</sup> Sebagai akibat alih kekuasaan itu, maka semua pegawai-pegawai yang berkebangsaan Belanda dan Indonesia, yang dulunya terdaftar sebagai pegawai administrasi Hindia Belanda di Keresidenan Palembang, mulai dilakukan inventarisasi untuk diangkat kembali sebagai pegawai negara Sumatera Selatan. Dengan demikian formasi yang ditinggalkan oleh pegawai-pegawai Republik pada setiap instansi dapat diisi tanpa mengurangi jumlah personil yang di-perlukan. Gaji mereka secara berkesinambungan dapat dibayar oleh Batavia, sedangkan pegawai administrasi regional di bawah tingkatan Wedana akan dibayar oleh Recomba Sumatera Selatan.<sup>222)</sup>

Departemen Dalam Negeri dikepalai oleh orang Indonesia yang bernama Alwi. Tetapi oleh karena sebagian besar waktunya tersita di Batavia/ Jakarta sebagai wakil tetap Sumatera Selatan di B.F.O (Bijenkost Federal Overleg = Badan Musyawarah Federal), maka praktis jabatan itu dipegang oleh orang Belanda bernama Mr. van der Griend. Yang sangat menyolok sekalai di Departemen Kepolisian dipegang seluruhnya oleh orang Belanda atau Indo-Belanda. Demikian pula Kepala Agraria yang merupakan bagian Departemen Dalam Negeri dipegang oleh W.V. Doop yang merangkap sebagai Walikota Palembang. Departemen Sosial dan Keuangan dijabat oleh Kepala yang lama juga berkebangsaan Belanda. Kemudian yang menyangkut Departemen Pendidikan dan Pengajaran dijabat oleh Moh. Rasyid,<sup>223)</sup> yang pada dasarnya dikendalikan oleh Mr. Boekhove yang merangkap sebagai Direktur Sekolah-sekolah di seluruh Keresidenan Palembang yang diduduki oleh Belanda.<sup>224)</sup>

Sejak semula Recomba Wijnmalen berhasrat untuk menarik lebih banyak orang-orang di daerah ini, untuk mengisi tenaga-tenaga administratif di kantor-kantor. Tetapi oleh karena mereka yang berpendidikan tidak mau dan menolak untuk bekerjasama dengan Belanda. Kalaulah ada yang mau bekerjasama hanyalah terbatas pada orang-orang tertentu saja, yang biasanya mereka berasal dari anak-

---

<sup>221)</sup> George Mc. Turnan, Op cit, halaman 383.

<sup>222)</sup> Ibid, Loc cit.

<sup>223)</sup> Muhammad Hasyim, Wawancara, Palembang 1987.

<sup>224)</sup> George Mc, Turnan Kahin, Op cit, halaman 383.

anak bekas penguasa di jaman kolonial, sehingga sebagian besar posisi penting masih banyak diduduki oleh orang-orang Belanda/Indo-Belanda. Dengan kata lain, politik Belanda kurang berhasil dalam segi kepegawaian, seperti yang dilakukan oleh daerah-daerah Federal lainnya dalam mengelolah administrasi pemerintahan. Mengingat posisi penting sebagian besar diduduki oleh Belanda/Indo-Belanda, maka secara psikologis penduduk berganggapan bahwa yang baru saja lahir itu telah menyimpang dari cita-cita semula, yaitu cita-cita negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamkan 17 Agustus 1945. Tidak hanya orang awam yang buta politik memiliki pandangan seperti itu, tetapi juga sebagian besar murid-murid Menengah Recomba yang dipimpin oleh Bapak Amir Hamzah dan kawan-kawan, telah terang-terangan menyatakan sikap tidak hadir pada hari peresmian Negara Sumatera Selatan.<sup>225)</sup> Antipati masyarakat dan murid-murid sekolah pada umumnya (Sekolah Menengah Recomba, Sekolah Taman Siswa dan Sekolah Menengah Umum) waktu itu terhadap negara yang baru lahir, dapat kita lihat setelah terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat sebagai hasil akhir konferensi Meja Bundar di Den Haag.

Ketika Bung Hatta beserta rombongan mengunjungi kota Palembang sebagai pusat kegiatan administrasi Negara Sumatera Selatan pada bulan Pebruari 1950, kesempatan yang baik itu telah digunakan masyarakat untuk menyatakan pendapat dan pendirian-nya. Mereka disambut dengan meriah oleh Gubernur Militer Dr.A.K.Gani dan Walinegara Sumatera Selatan beserta pembesar-pembesar Belanda lainnya.<sup>226)</sup> Dalam hubungan kedatangan tamu Agung ini, telah diselenggarakan rapat Akbar di depan istana jalan Tasik, yang dihadiri oleh sebagian besar penduduk kota dan rakyat yang datang dari daerah Ulu. Mereka dengan sengaja untuk menghadiri Rapat Akbar itu, dengan maksud untuk menyampaikan pernyataan dan sekaligus mendengarkan wejangan dari Bung Hatta yang sudah lama tidak

---

<sup>225)</sup> Moh.Hasyim, Wawancara, Palembang 1987; Penulis sendiri sebagai salah seorang murid Sek.Men.Recomba, pernah dikumpulkan oleh Kepala Sekolah untuk mendengar wejangan dari Abdulmalik. Ketika terjadi dialog, maka secara emosional beliau mencaci maki.

<sup>226)</sup> Kem.Penerangan Sumsel, Op cit, halaman 241.

muncul di daerah ini. Dalam suasana yang cukup meriah dan penuh semangat persatuan menyaksikan kehadiran tamu Agung beserta rombongan itu, di saat Bung Hatta sedang menyampaikan pidatonya, tiba-tiba terjadi “penurunan” bendera Negara Sumatera Selatan secara paksaan oleh Djohan Mardjuki (Pemuda Pesindo).<sup>227)</sup>

Kasus penurunan bendera yang terjadi di depan mata Bung Hatta itu, merupakan indikator yang sangat menarik perhatian orang banyak. Negara buatan Belanda itu tidak mendapat dukungan dari seluruh masyarakat di wilayah ini, karena motor penggerakannya bukanlah orang-orang yang mendapat kepercayaan penuh dari rakyat. Sebagai rentetan dari peristiwa tersebut, tersurat pada tembok-tembok bangunan di sepanjang jalan yang dilalui oleh Bung Hatta dengan hurup yang menyolok : “B ubarkan N egara S um atera S elatan”.

Walaupun suasana dalam kota cukup menegangkan, tapi selama tamu Agung berada di Palembang tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun di sana-sini, pokok pembicaraan orang awam berkisar pada antipati terhadap negara boneka beserta para pendukung-pendukungnya. Sebagai tindak lanjut dari peristiwa “bendera” di depan Istana Jalan Tasik dan coret-coretan di tembok-tembok bangunan dalam kota, maka beberapa minggu setelah itu Walinegara Abdulmalik akan bersiap-siap untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan pendirian beliau pribadi.<sup>228)</sup> Akhirnya pada tanggal 18 Maret 1950, pelaksanaan penyerahan kekuasaan berlangsung dengan lancar dan baik, yang disaksikan oleh Mr.Makmoen Soemadipraja sebagai wakil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat.<sup>229)</sup>

Apa yang kita temukan di dalam Sejarah Lokal terutama mengenai daerah Sumatera Selatan, merupakan fakta sejarah yang tidak dapat dilupakan begitu saja. Pada saat-saat memuncaknya perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan, ia telah memunculkan cerita sejarah yang tidak seragam yang telah dipancarkan oleh segolongan kecil manusia di daerah ini.

---

<sup>227)</sup> A.S.Semadi, Wawancara, Palembang 1979.

<sup>228)</sup> Abdulmalik SH, Wawancara, Palembang 1981.

<sup>229)</sup> Kementerian Penerangan Sumsel, Op cit, halaman 244-246.

Kebhinekaan dalam masyarakat Indonesia telah ikut serta meramaikan perjuangan bangsa, terutama sekali mengenai gerak Sejarah Lokal di Sumatera Selatan. Tantangan pada jaman revolusi kemerdekaan harus dianggap sebagai pelajaran, karena ia sebagai fenomena sosio kultural, yaitu terbentuknya negara Sumatera Selatan yang menyimpang dari cita-cita semula. Ia telah gagal memancarkan semangat juga yang penuh kepalsuan, sesuai dengan ritme dan gaya federasinya. Bagaimanapun juga telah mewarnai sejarah Lokal di dalam ruang lingkup Nasional, dan akhirnya ia punya arti tersendiri bagi mereka yang terlibat di dalamnya.

#### **F. Pendidikan Sebagai Faktor Dinamisasi dan Mobilitas Sosial.**

Pengertian “pendidikan” didalam uraian ini dititik beratkan pada sistem persekolahan yang lazim disebut pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda maupun badan swasta/perorangan di daerah Onderafdeeling Musi Ilir dan Banyuasin, yang dewasa ini menjadi Daerah Tingkat II Musi Banyuasin. Apa yang telah diutarakan pada Bab sebelumnya yang berhubungan dengan pendidikan di daerah ini, baik jumlah maupun jenis/macam sedikit sekali. Khusus di daerah pedalaman/Uluu hanya terdapat satu macam sekolah, yaitu sekolah kelas dua saja yang diperuntukan bagi rakyat Bumiputera di dalam kerangka politik kolonial, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan pada tingkat administrasi Marga. Sebaliknya di ibukota Afdeeling tidak hanya kelas dua saja, pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah kelas satu dan macam-macam sekolah yang sederajat. Secara teoritis sekolah-sekolah kelas dua tersebut diperuntukkan bagi rakyat Bumiputera, tapi dalam prakteknya hanya dimonopoli oleh anak-anak tertentu saja yang berasal dari keluarga penguasa dan keluarga mampu sosial ekonominya. Pada tahap permulaan di-bukanya sekolah-sekolah di daerah ini, kemungkinan juga di daerah-daerah lain seperti di pulau Bali,<sup>230)</sup> banyak mengalami kesulitan-kesulitan terutama dalam

---

<sup>230)</sup> A . A . G de Pu tra A gung , “Pendidikan sebagai fak tor dinam isasi Sosial di Bali” dalam Seminar Sejarah Lokal, Denpasar 1983.

mendapatkan murid. Pada umumnya orang-orang tua belum memiliki wawasan dan kesadaran yang memadai untuk menyekolahkan anak-anaknya terutama sekali anak-anak perempuan, karena disamping ada hambatan-hambatan tradisi dalam adat istiadat setempat, juga faktor biaya yang tidak menjangkau.

Pada masa mulai dibukanya sekolah-sekolah di daerah ini pada sekitar perempat abad ke-20, Sekayu sebagai ibukota Onderafdeeling menduduki tempat yang terkemuka, karena adanya Sekolah Sambungan (Vervolgschool) dan Lembaga Pendidikan Calon Guru Sekolah Desa (Leergang). Ia menjadi pusat perhatian khusus bagi masyarakat di sekitarnya, karena bagi pemerintah kolonial Belanda dijadikan pusat kegiatan administrasi pemerintahan Onderafdeeling, District, Onderdistrict dan Marga Manteri Melayu. Secara makro perkembangan sekolah di daerah pedalaman/ uluan waktu itu, dapat dikatakan masih sangat terbelakang dan tingkat kecerdasannya hanya terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Oleh karena itu bagi anak-anak yang telah menamatkan sekolah kelas dua yang berasal dari golongan tertentu, diantaranya ada yang meneruskan pelajaran ke sekolah yang lebih tinggi ke tempat-tempat lain atau ke kota Palembang.

Mengenai sekolah-sekolah yang bernafaskan agama dikelola oleh perorangan/organisasi, yang dianggap sebagai usaha untuk memperbaharui sistem pendidikan Islam tradisional, merupakan reaksi atas berdirinya sekolah-sekolah Gouvernement. Ia didirikan oleh pemuka masyarakat/Organisasi sosial kemasyarakatan. Dengan berdirinya sekolah-sekolah agama setelah jaman Malaise di daerah ini, berarti ia telah ikut serta secara aktif membantu kearah berpikir dan sistematis. Betapa pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, adalah suatu kebenaran umum yang mungkin dapat kita terima. Bukankah melalui proses belajar mengajar, masyarakat mewariskan dan mengembangkan kebudayaannya ? Dengan kecerdasan dan kemauan yang dimilikinya, masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan untuk masa depan yang lebih baik. Meskipun macam dan jumlahnya sekolah di-jamin kolonial yang pada jaman pendudukan Jepang menjadi ciut karena ditutupnya

sekolah-sekolah agama,<sup>231)</sup> eksistensinya telah berhasil memproduksi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berfikir sistematis dengan kategori abstrak, merupakan kemampuan yang sebagian besar dikuasai melalui sekolah. Sedemikian kuatnya pengaruh cara berpikir ini terhadap orang-orang yang bersekolah, sehingga ia mempengaruhi bukan saja frekwensi, tapi juga jenis kesalahan yang mereka perbuat. Dengan kata lain, sekolah telah mengajarkan orang bagaimana caranya memilah-milah benda dalam kategori umum dan melatih orang berpeikir dengan konsep-konsep abstrak<sup>232)</sup>

Apabila sekolah dianggap sebagai tempat untuk mencetak manusia berpikir sistematis, maka orang-orang tersebut memiliki pandangan hidup tradisional yang semakin kurang. Cara berpikir yang didapatkan dari sekolah, tahap demi tahap telah menggantikan pengajaran dan pengetahuan tradisional, karena pengajaran yang bersifat tradisional itu sendiri tidak diajarkan di sekolah. Memang ada benarnya, bahwa pendidikan itu merupakan proses sosial dalam jangka panjang.<sup>233)</sup> dan otomatis mengandung dinamika yang mampu mengundang perubahan didalam diri sendiri atau didalam masyarakat. Perubahan-perubahan itu tertuang dalam bentuk gagasan atau ide-ide baru dari golongan terpelajar atau golongan intelektual yang telah mengenyam pendidikan Barat. Pada tahap permulaan kita mengenal golongan ini sebagai invator atau reformis.

Ide-ide pembaharuan itu merupakan serah terimakan pada mereka yang bertugas mendifudikan inovasi tersebut, sehingga golongan ini kita kenal sebagai Agen perubahan (Change Agent). Dalam proses perubahan ini fungsi dan peranan pemimpin-opinion (Opinion Leader) memegang peranan penting sebagai mitra agen-agen perusahaan, dalam usaha membangun masyarakat yang di-inginkan. Faktor pendidikan yang dianggap sebagai kunci dalam proses sosial, telah banyak menyentuh masyarakat di daerah Uluu, yaitu merubah

---

<sup>231)</sup> H. Moh.Thahir, Wawancara, Palembang 1987; H.Umar Mustofa, Wawancara, Palembang 1987; Moh. Hasyim, Wawancara, Palembang, 1988.

<sup>232)</sup> James Mangan, "Pengaruh Sekolah pada masyarakat tradisional di Indonesia" dalam PRISMA No.2 Th.XV 1986.

<sup>233)</sup> Dr. Astrid S. Santoso, Pengantar sosiologi dan perogahan Sosial, Binacipta, Bandung, 1977, halaman 213.

cara berpikir orang-orang yang tidak sekolah untuk meninggalkan warisan/harta benda kepada anak-anaknya dalam bentuk ilmu pengetahuan dan bukan kekayaan materi yang di-kumpulkan selama ia hidup di dunia ini. Hal ini nampak dengan jelas pada masa awal revolusi Kemerdekaan, dimana orang-orang tua di pedusunan berlomba-lomba menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah Umum daripada sekolah-sekolah yang bernafaskan agama.

Perluasan pendidikan di daerah Onderafdeeling Musi Iilir & Banyuasin, terutama pada jaman Recomba, telah banyak me-nimbulkan perubahan sosial seperti : perubahan status, perubahan nilai-nilai atau norma-norma, yang ada kecendrungan bahwa pengaruh pendidikan akan menimbulkan gejolak-gejolak di dalam masyarakat yang sedang mengalami masa transisi. Di satu pihak ada golongan yang ingin memasukkan nilai-nilai baru dan di pihak lain masih tetap mempertahankan nilai-nilai lama. Kondisi sosial se-macam ini kadang-kadang menimbulkan benturan-benturan dalam masyarakat pedusunan yang masih kuat tradisinya. Sejalan dengan perkembangan pendidikan pada waktu revolusi Kemerdekaan di-mana nilai-nilai revolusi mulai diterima oleh massa seperti : ke-merdekaan, demokrasi, kesadaran nasional, anti imperialisme, heroisme dll. Suatu hal sangat penting, seberapa jauh nilai-nilai revolusi itu mempunyai pengaruh terhadap perubahan sosial di dalam masyarakat. Dalam hal ini tak dapat dilepaskan pada ke-sempatan belajar yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pada jaman kolonial Belanda tidak kita temukan kesempatan itu. Disamping pengaruh pendidikan dan revolusi ke-merdekaan, masalah letak daerah sangat berpengaruh dalam proses perubahan itu.<sup>234)</sup> Biasanya dusun-susun yang terletak di pinggir-pinggir sungai atau jalur jalan raya dimana komunikasi lancar, lebih terbuka untuk menerima perubahan dalam masyarakat.

Masyarakat pedusunan dengan ikatan teritorial dan ikatan keagamaan di daerah ini yang mendapat pengaruh kota terutama oleh pengaruh ekonomi keuangan politik dan pendidikan, agaknya cenderung ke arah pergeseran nilai-nilai dalam arti mengalami transisi.

---

<sup>234)</sup> Alfian, Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh, LP3ES, Jakarta, 1977, halaman 139.

Nampaknya unsur-unsur tradisional belum banyak di-lepaskan oleh masyarakat dan unsur-unsur baru yang relatif rasional mulai di anut. Sejalan dengan kemajuan yang mulai menyentuh segala aspek kehidupan masyarakat di daerah ini sebagai akibat pen-didikan, lancarnya komunikasi antar kota dengan daerah-daerah Uluan dan pengaruh revolusi, diberbagai dusun sudah mulai mencerminkan masyarakat kota dengan segala kehidupannya. Faktor-faktor yang tersebut di atas telah menimbulkan interaksi dalam masyarakat, dimana peranan dan fungsi pendidikan merupakan salah satu faktor dinamisasi sosial.

Dinamika yang ditumbulkan oleh pengaruh pendidikan di dalam masyarakat telah menunjukkan adanya kemajuan-kemajuan dibidang kehidupan masyarakat pada umumnya dan mobilitas sosial pada khususnya. Sejak awal abad ke-20 telah ada beberapa jenis “mobilitas” didalam masyarakat tradisional di daerah Onderafdeeling Musi Ilir & Banyuasin, baik secara geografis maupun sosiologis. Mobilitas dalam pengertian geografis yaitu perpindahan yang di-bebabkan oleh pekerjaan. Transmigrasi, migrasi inten/bermusim dan urbanisasi, merupakan mobilitas sosial utntuk keluar dari lingkungan hidup yang lama. Pengaruh penetrasi ekonomi keuangan dan ke-padatan penduduk, mobitilas dalam usaha memperbaiki tingkata ke-hidupan keluarga dapat terjadi di kalangan para petani, pedangang kecil, pelayan, pengrajin dan lain-lain. Perpindahan antar kerja dan tempat tinggal, mungkin saja tidak membawa pengaruh apa-apa bagi kedudukan seseorang di dalama masyarat, dan dianggap tetap sebagaimana keadaannya yang dulu. Dalam hal ini kita temukan semacam mobilitas yang bersigat horizontal atau yang mendarat saja. Tetapi ada kalanya mobilitas tersebut membawa akibat positif bagi kedudukan seseorang apabila otang yang pindah ke kota/ tempat lain itu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dalam hal ini terjadilah semacam mobilita sosial vertikal,<sup>235)</sup> yang ada kaitannya dengan pengaruh perluasan pendidikan dan pelebaran birokrasi kepegawaian di segala sektor.

---

<sup>235)</sup> Sartono Kartodirdjo et al., (Jilid V), Op cit, halaman 154.



Ber macam jenis mobilitas itu biasanya terjadi di dalam masyarakat yang sedang membangun, yang mengakibatkan menaik atau menurunnya seseorang di dalam hidup ini. Tidak sedikit jumlah anak yang lebih tinggi kedudukannya dari kedudukan yang pernah dicapai oleh orang tuanya. Dalam konteks ini faktor pendidikan atau sekolah berfungsi sebagai alat untuk memberikan kemungkinan mobilitas vertikal, dalam lembag birokrasi atau bukan menjadi salurannya. Sukses dalam jabatan dan menduduki posisi penting di dalam sistem birokrasi kepegawaian atau diluar sistem itu, sering mempengaruhi peranannya di dalam masyarakat, bahkan pandangan masyarakat terhadap kerabatnya ikut juga naik. Hal yang seperti ini dapat dilihat dengan jelas di kota-kota besar dan kecil di dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan setelah pengakuan kedaulatan 1949. Kedudukan kota Palembang sebagai ibukota Propinsi, yaitu sebagai pusat kegiatan administrasi pemerintahan di wilayah ini dan juga sebagai kota dagang dan industri, sudah barang tentu semakin ramai dari tahun ke tahun.

Hampir semua kegiatan, baik di bidang politik, ekonomi, keuangan dan sosial budaya semua terpusat di kota Palembang. Se-bagai kota dagang ia terletak tidak begitu jauh dari jalur pelayaran pantai/inter insular. Banyak para pedagang yang berasal dari daerah sekitarnya menetap sampai membuat perkampungan-perkampungan yang berasal dari berbagai suku seperti : suku Ambon, Suku Bugis/Makasar, Suku Sunda/Banten dan perkampungan orang-orang Timur Asing lainnya. mereka diperbolehkan untuk memasuki sekolah-sekolah yang tersedia, sehingga masing-masing sekolah ter-dapat murid-murid dari berbagai asal kelahiran atau latar belakang sosial ekonomi : anak-anak yang berasal dari Timur Asing, pen-duduk asli yang berasal dari keluarga petani, keluarga pedagang, keluarga Guru/ Kiayi, keluarga ABRI, keluarga yang berasal dari orang-orang yang pernah berkuasa di jaman kolonial Belanda dan entah dari mana lagi yang pada masa terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia, berlomba-lomba memasuki lembaga pendidikan yang sama dari tingkat Sekolah Dasar sampai ke tingkat Akademi dan Perguruan Tinggi. Mereka semua berasal dari latar belakang, yang muncul secara berangsur-angsur sebagai kelas baru, yaitu golongan Elit modern berdasarkan tinggi

rendahnya pendidikan formal yang diperoleh. Hal seperti ini sedikit banyaknya telah menyentuh masyarakat tradisional yang tinggal di daerah Uluan, terutama kelompok masyarakat yang mendiami tempat-tempat yang memiliki transportasi-komunikasi yang lancar antar kota dan dusun.

Pendidikan atau sekolah, pelebaran birokrasi dan munculnya lapangan kerja yang berbagai jenis, merupakan saluran mobilitas sosial yang berasal dari golongan menengah untuk melepaskan diri dari kehidupan agraris selama ini. Gerakan mobilitas vertikal yang menaik mengharuskan terjadinya pelebaran lapisan atas dan meng-ancam terjadi semacam sirkulasi, yang berarti orang-orang selama ini menduduki lapisan tertentu haruslah diganti. Kesadaran golongan ini sebagai kekuatan yang berdasarkan intelektual yaitu setelah mereka keluar dari sekolah, beberapa kemungkinan karier terbuka bagi mereka di bidang birokrasi kepegawaian atau di sektor swasta. Sebagian dari mereka itu ada yang bergabung ke dalam suatu asosiasi yang bergerak di bidang wiraswata seperti : kontraktor, pengrajin, mendirikan perkumpulan atau yayasan dan sebagainya. Semuanya ini adalah suatu mobilitas sosial yang terjadi setelah bangsa Indonesia mencapai Kemerdekaan.

Apa yang telah diutarakan diatas ini termasuk kategori mobilitas fisik, dalam arti seseorang yang memperoleh pendidikan dan kemudian pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi pada akhir-akhir ini terjadi suatu mobilitas sosial-budaya atau mobilitas nonfisik.<sup>236)</sup> Dengan adanya teknologi komunikasi secanggih se-karang ini dan didukung oleh listrik masuk desa khususnya radio dan televisi yang dimiliki oleh masyarakat pedusunan, informasi dan pengaruh kota dengan cepat menyerbu masyarakat pedusunan se-belum mereka itu pindah ke kota. Malahan banyak dari mereka itu tidak pindah ke kota dan tetap tinggal di dusun, tetapi gaya hidupnya, aspirasi dan selernya seperti orang-orang kota. Banyak diantara mereka itu bolak balik dari desa ke kota karena alasan-alasan tertentu. Dalam hubungan ini kita jumpai mobilitas sosial pada tingkat mental-kognitif, karena adanya

---

<sup>236)</sup> Ignas K leden, "M em bangun Tradisi tanpa sikap tradisional", dalam PRISMA No.8 Th.XV, LP3ES, Jakarta, 1986, halaman 83.

pengaruh dari informasi baru melalui media cetak dan media elektronik yang dapat menjangkau tempat-tempat di daerah Uluu. Sementara perubahan pada landasan material kebudayaan berjalan terus karena pertumbuhan ekonomi keuangan dan pendapatan perkapita, maka landasan sosio-kulturalpun mengalami pergolakan yang luar biasa, karena laju pertumbuhan penduduk setiap tahun terus meningkat.

## **VI. P E N U T U P**

1. Semangat perjuangan dengan diiringi sikap suka berkorban demi kejayaan nusa, bangsa, agama dan tanah air bagi masyarakat Musi Banyuasin (Muba) bukanlah merupakan hal yang asing. Perwujudan demikian selain dari naluri masyarakat sendiri yang bersifat dinamis, lebih dipercepat lagi dengan kemampuan untuk mengadaptasikan hal-hal yang baru, baik keagamaan, sosial budaya dan politik sekalipun. Gerakan perkembangan dan pembaharuan di Indonesia sejak awal abad ke-20, lebih-lebih pada era Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diikuti oleh reaksi fisik, masyarakat Muba selalu ikut ambil bagian pula.
2. Era reaksi fisik 1945 - 1949 yang antara lain ditandai dengan terjadinya pertempuran baik terhadap sisa-sisa serdadu-serdadu Jepang, maupun terhadap Belanda, telah mencatatkan beberapa lokasi sebagai situs-situs perlawanan dan juga beberapa nama para pejuang sebagai tentara dari peristiwa tersebut. Perbuatan nyata dari sebagian masyarakat seperti mengiatkan dana pada saat kehadiran tentara Belanda, semboyan nasional kepada para pejuang permusuhan tentara Belanda yang diperkirakan akan dimanfaatkan oleh musuh sudah dibuktikan pula.

3. Puncak-puncak perjuangan/ perlawanan seperti yang juga terjadi pada sebagian besar Nusantara ini, berakhir sejalan dengan pola dan kebijaksanaan nasional. Era perlawanan terhadap sisa serdadu Jepang, Aksi Militer Belanda I dan Ke II, era Gerilya melibatkan pula daerah ini. Setiap episode dari rangkaian peristiwa-peristiwa itu mendapat dan memang didukung oleh masyarakat Muba. Tiada peristiwa yang berdiri sendiri lepas keikutsertaan masyarakat Muba.